



LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Kabupaten Kotawaringin Barat
Provinsi Kalimantan Tengah

TAHUN ANGGARAN 2018



KATA PENGANTAR



Puji syukur bagi Allah SWT atas rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir pekerjaan **Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) di Kabupaten Kotawaringin Barat - TA 2018**.

Tahun 2010, melalui Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang Kebijakan Pembangunan yang Berkeadilan ditetapkanlah **upaya percepatan penanggulangan kemiskinan** oleh pemerintah. Instruksi ini memberikan mandat kepada seluruh instansi untuk mengambil langkah-langkah yang diperrukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan meliputi progam pro rakyat, progam keadilan untuk semua dan pencapaian tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals - MDGs*).

Upaya pemerintah setempat untuk menanggulangi kemiskinan di daerah ini diantaranya adalah: program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sejak 2013, Bantuan Siswa Miskin (BSM), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Kartu Sehat Kobar, sekolah Gratis 12 tahun serta Penanggulangan Desa Tertinggal, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Upaya-upaya lain, pemerintah setempat melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Kotawaringin Barat, merumuskan program-program yang dapat menjadi unggulan daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Evaluasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat ini, menurut data Bappeda setempat, bahwa realisasi RPJMD sampai dengan tahun 2013 belum tercapai, dan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat perlu setiap SKPD teknis untuk fokus dan tepat sasaran pada program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Kegiatan **penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)** dalam usulan ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam memperkuat dan lebih memfokuskan pencapaian tujuan yang telah dirumuskan tersebut untuk pedoman menyusun program aksi penanggulangan kemiskinan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Laporan Akhir ini berisi tentang pendahuluan, kondisi umum kabupaten, profil kemiskinan daerah, determinan kemiskinan daerah, analisis APBD untuk penanggulangan kemiskinan, tinjauan kebijakan, dan kelembagaan koordinasi penanggulangan, dan strategi. Semoga Laporan ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan harapan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini dan kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi kesempurnaan buku ini dan menjadi acuan untuk penyusunan studi kajian selanjutnya.

Pangkalanbun, September 2018

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	3
1.3 DASAR HUKUM	3
1.4 TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN	5
1.4.1 Tujuan	5
1.4.2 Sasaran Kegiatan	5
1.5 RUANG LINGKUP	6
1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah	6
1.5.2 Ruang Lingkup Kegiatan	6
1.6 SISTEMATIKA PELAPORAN	7

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

2.1 KONDISI GEOGRAFIS WILAYAH	9
2.1.1 Letak Geografis Wilayah	9
2.1.2 Kondisi Topografi, Jenis Tanah dan Hidrologi Permukaan	10
2.1.3 Kondisi Klimatologi	11
2.2 ADMINISTRASI WILAYAH.....	12
2.2.1 Pembagian Wilayah Administrasi.....	12
2.2.2 Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan.....	12
2.2.3 Kondisi Sarana dan Prasarana Wilayah	15
2.3 KONDISI DEMOGRAFI	23
2.3.1 Jumlah, Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk	23
2.3.2 Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin serta Rata-rata Jumlah Jiwa per Rumah Tangga	25
2.4 KONDISI PEREKONOMIAN	26
2.4.1 Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi.....	26
2.4.2 Tingkat Inflasi	32
2.4.3 Ketenagakerjaan.....	34

BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

3.1 KONSEP KEMISKINAN	37
3.1.1 Definisi Kemiskinan	37
3.1.2 Ukuran Kemiskinan	40
3.1.3 Kerentanan.....	46
3.1.4 Kesenjangan.....	46

3.2	KONDISI KEMISKINAN DAERAH	49
3.2.1	Kemiskinan Konsumtif	53
3.2.1.1	Garis Kemiskinan dan Klasifikasi Keluarga	53
3.2.1.2	Persentase Penduduk Miskin	57
3.2.1.3	Jumlah Penduduk Miskin	61
3.2.1.4	Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan	63
3.2.2	Analisis Kemiskinan Non Konsumtif	69
3.2.2.1	Ketenagakerjaan	69
3.2.2.2	Kesehatan	73
3.2.2.3	Pendidikan	83
3.2.2.4	Infrastruktur Dasar	102
3.2.2.5	Ketahanan Pangan	109
BAB IV	DETERMINAN KEMISKINAN DAERAH	
4.1	ANALISIS AKAR MASALAH	114
4.1.1	Kemiskinan Konsumtif	120
4.1.2	Kemiskinan Non Konsumtif	120
4.1.2.1	Ketenagakerjaan	120
4.1.2.2	Kesehatan	127
4.1.2.3	Pendidikan	130
4.1.2.4	Infrastruktur Dasar	133
4.1.2.5	Ketahanan Pangan	146
BAB V	ANALISIS APBD UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN	
5.1	GAMBARAN UMUM ANGGARAN DAERAH	147
5.1.1	Pendapatan Daerah	148
5.1.2	Belanja Daerah	149
5.1.3	Pembiayaan Daerah	151
5.2	ANALISIS PENDAPATAN DAERAH	158
5.2.1	Rasio Pajak (<i>Tax Ratio</i>)	158
5.2.2	Pajak Per Kapita (<i>Tax Per Kapita</i>)	159
5.2.3	Ruang Fiskal (<i>Fiscal Space</i>)	160
5.2.4	Tingkat Ketergantungan Daerah	161
5.3	ANALISIS BELANJA DAERAH	162
5.3.1	Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah	162
5.3.2	Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah	163
5.3.3	Rasio Belanja Modal Per Kapita	164
5.3.4	Rasio Belanja Bantuan Sosial Terhadap Total Belanja Daerah	165
BAB VI	TINJAUAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	
6.1	KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NASIONAL	167
6.2	KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM RPJP DAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	178
6.2.1	Visi, Misi dan Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah ..	178
6.2.2	Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan RPJMD ketiga (2016-2021)	179
6.2.3	Arahan Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis	184

6.2.4	Pembangunan Kewilayahan	184
6.3	KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM RPJP DAN RPJMD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	185
6.3.1	Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025	185
6.3.2	Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025	186
6.3.3	Visi dan Misi RPJPM Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2022	187
6.3.4	Tujuan dan Sasaran Misi ke-5 RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2022	188
6.3.5	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah	189
6.4	KELEMBAGAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD)	193
BAB VII	ISU-ISU STRATEGIS DAN RENCANA AKSI	
7.1	ISU-ISU STRATEGIS	206
7.1.1	Kemiskinan Konsumtif	206
7.1.2	Kemiskinan Non Konsumtif	206
7.2	TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI	207
BAB VIII	MONITORING DAN EVALUASI	
8.1	MAKSUD DAN TUJUAN	212
8.2	PELAKSANA	213
8.3	TOLOK UKUR DAN RUANG LINGKUP	215
8.4	MANFAAT	218

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2017	9
Tabel II.2	Klasifikasi Lereng Kabupaten Kotawaringin Barat	11
Tabel II.3	Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Stasiun Pengamatan Pangkalan Bun (mm), 2017	11
Tabel II.4	Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2017	12
Tabel II.5	Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2017	13
Tabel II.6	Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru menurut Jenis dan Status Sekolah di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2017/2018	15
Tabel II.7	Banyaknya Sekolah Menurut Kecamatan dan Status Sekolah di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2017/2018	15
Tabel II.8	Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2017	16
Tabel II.9	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2017	16
Tabel II.10	Banyaknya Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2017	16
Tabel II.11	Banyaknya Tempat Ibadah menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2017	17
Tabel II.12	Jumlah Sarana/Fasilitas Olah Raga Menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2017	18
Tabel II.13	Panjang Jalan menurut Tingkat Pemerintahan yang Berwenang (km) di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2011-2017	18
Tabel II.14	Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan Jalan (km) di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2011-2016	19
Tabel II.15	Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan (km) di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2011-2017	19
Tabel II.16	Jumlah Kantor Pos Pembantu Menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2017	20
Tabel II.17	Banyaknya Langganan dan Daya Terpasang Langganan Menurut Rumah Tangga pada PLN Ranting Pangkalan Bun, 2017	21

Tabel II.18	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama dan Tipe Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2017	21
Tabel II.19	Banyaknya Pelanggan PDAM menurut Jenis Konsumen di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2017	22
Tabel II.20	Tingkat Kelengkapan Fasilitas Publik dan Jarak Jangkau ke Ibukota Kabupaten Kotawaringin Barat	23
Tabel II.21	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2017	23
Tabel II.22	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Pendudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2015-2017	24
Tabel II.23	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2017	24
Tabel II.24	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2017	25
Tabel II.25	Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2017	26
Tabel II.26	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2014 – 2017	27
Tabel II.27	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Lapangan Usaha (persen), 2014–2017	27
Tabel II.28	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 – 2017 (Persen)	28
Tabel II.29	Perkembangan Beberapa Agregat PDRB dan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2014-2016	29
Tabel II.30	Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Tahun 2014-2016	34
Tabel II.31	Angkatan Kerja	34
Tabel II.32	Persentase dan Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2015	35
Tabel III.1	Garis Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	54
Tabel III.2	Garis Kemiskinan dan Perubahannya Menurut Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2016	54
Tabel III.3	Daftar Komoditi yang Memberi Pengaruh Besar pada Kenaikan Garis Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016	55
Tabel III.4	Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2017	56

Tabel III.5	Persentase Posisi Penduduk Miskin (P0) di Kabupaten Kotawaringin Barat Terhadap Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lainnya Tahun 2012-2017	57
Tabel III.6	Perubahan Posisi Persentase Angka Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Angka Provinsi dan Kabupaten Lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2017	58
Tabel III.7	Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2017	62
Tabel III.8	Posisi Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Kelompok, Tahun 2012-2016	63
Tabel III.9	Tabel Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2017	64
Tabel III.10	Posisi Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2016	65
Tabel III.11	Perubahan Posisi Tingkat Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat Terhadap Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2016	66
Tabel III.11	Posisi Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2016	67
Tabel III.13	Analisis Keterkaitan Kondisi Kemiskinan Konsumsi Kotawaringin Barat	68
Tabel III.14	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2017	69
Tabel III.15	Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2017	70
Tabel III.16	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016	71
Tabel III.17	Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016	73
Tabel III.18	Angka Kematian Balita (AKBA) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016	75
Tabel III.19	Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016	76
Tabel III.20	Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016	78
Tabel III.21	Proporsi Kelahiran yang Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	79

Tabel III.22 Cakupan Pelayanan Antenatal (K4) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	80
Tabel III.23 Angka Penemuan Kasus Malaria di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	81
Tabel III.24 Proporsi Kasus Tuberculosis yang Disembuhkan Melalui DOTS di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016	82
Tabel III.25 Angka Partisipasi Murni SD/MI di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	84
Tabel III.26 Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	85
Tabel III.27 Angka Partisipasi Murni SMA/MA Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	87
Tabel III.28 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	88
Tabel III.29 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	90
Tabel III.30 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	91
Tabel III.31 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	93
Tabel III.32 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	93
Tabel III.33 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	94
Tabel III.34 Angka Kelulusan (AK) SD/MI Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	95
Tabel III.35 Angka Kelulusan (AK) SMP/MTs Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	96
Tabel III.36 Angka Kelulusan (AK) SMA/MA Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	97
Tabel III.37 Angka Melek Huruf di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	98
Tabel III.38 Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	99
Tabel III.39 RAPM SD/MI Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	100
Tabel III.40 RAPM SMP/MTs Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	101
Tabel III.41 RAPM SMA/MA Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 ..	102
Tabel III.42 Akses Rumah Tangga Terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	103

Tabel III.43 Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum Bersih di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	105
Tabel III.44 Cakupan Rumah Tangga Pengguna Air Minum PDAM di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	105
Tabel III.45 Persentase Rumah Tinggal Pengguna Fasilitas Penerangan Listrik di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	109
Tabel III.46 Produksi Beras di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	110
Tabel III.47 Jumlah Kebutuhan Bahan Pangan Pokok Strategis di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	111
Tabel III.48 Perbandingan Jumlah Kebutuhan terhadap Ketersediaan Bahan Pangan Pokok Strategis di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	112
Tabel IV.1 Kemiskinan dan Tingkat Inflasi di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	114
Tabel IV.2 Jumlah Individu Menurut Kecamatan dan Status Kesejahteraan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015	117
Tabel IV.3 Jumlah Individu Menurut Pendidikan Tertinggi Kepala Rumah Tangga dengan Kepala Rumah Tangga dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015, Per Kecamatan	124
Tabel IV.4 Jumlah Individu Menurut Kelompok Usia Kepala Rumah Tangga dengan Kepala Rumah Tangga dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015, Per Kecamatan	126
Tabel IV.5 Jumlah Individu Menurut Kelompok Usia Kepala Rumah Tangga Perempuan dengan Kepala Rumah Tangga dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015, Per Kecamatan	126
Tabel IV.6 Prioritas Penanganan Kemiskinan Berdasar Kondisi Kepala Keluarga dan Jumlah Jiwa yang tidak Sekolah Per Kecamatan.....	132
Tabel IV.7 Karakteristik Kepemilikan Bangunan Keluarga Miskin dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015.....	134
Tabel IV.8 Karakteristik Kepemilikan Lahan Keluarga Miskin dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015.....	135
Tabel IV.9 Karakteristik Jenis Atap Rumah Keluarga Miskin dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015.....	136
Tabel IV.10 Karakteristik Jenis Dinding Bangunan Keluarga Miskin dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015.....	136

Tabel IV.11	Karakteristik Jenis Lantai Bangunan Keluarga Miskin dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015.....	137
Tabel IV.12	Karakteristik Jumlah Keluarga Miskin Berdasarkan Cara Mendapatkan Air Berdasarkan Sumbernya Diluar Air Kemasan, Ledeng dan Sumur Bor di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015	139
Tabel IV.13	Daerah Prioritas Penanganan Infrastruktur Dasar di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015.....	145
Tabel IV.14	Komparasi Ketersediaan dan Kebutuhan Bahan Pangan Pokok (Beras) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016.....	146
Tabel V.1	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2012-2016 Kabupaten Kotawaringin Barat	148
Tabel V.2	Prioritas Alokasi Belanja Langsung Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018-2020	151
Tabel V.3	Prioritas Alokasi Belanja Langsung Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018-2020 yang Diharapkan Mampu Mendukung Penanggulangan Kemiskinan.....	152
Tabel V.4	Komposisi Rasio Pajak Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016.....	159
Tabel V.5	Komposisi Pajak Per Kapita Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2015...	160
Tabel VI.1	Sasaran Utama Pengembangan Wilayah Kalimantan Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	178
Tabel VI.2	Prioritas Alokasi Belanja Langsung Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018-2022.....	181
Tabel VI.3	Strategi PJM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021	181
Tabel VI.4	Program Prioritas dan Kegiatan Pokok untuk Pengurangan Beban dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin.....	182
Tabel VI.5	Pembagian 3 Zona di Provinsi Kalimantan Tengah	184
Tabel VI.6	Misi ke-5, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat.....	189
Tabel VI.7	Linieritas Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Strategi (Misi ke-5).....	190
Tabel VI.8	Justifikasi Empat Perspektif Balanced Score Card Strategi, Khusus Misi ke-5 Terhadap Program Pembangunan Daerah	191
Tabel VII.1	Isu-isu Strategis dan Rencana Aksi SPKD Kabupaten Kotawaringin Barat.....	210

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat	14
Gambar 2.2 Piramida Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat (dalam jiwa), 2017	25
Gambar 2.3 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013-2017	28
Gambar 2.4 Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2011-2016	30
Gambar 2.5 Grafik Perbandingan Jumlah Penduduk yang Bekerja di Sektor Utama Dengan Distribusi Prosentase Sektor Utama PDRB Tahun 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat	31
Gambar 2.6 Inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	32
Gambar 2.7 Grafik Perbandingan Laju Inflasi di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2017	33
Gambar 2.8 Grafik Prosentasi dan Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2015	36
Gambar 3.1 Diagram Perangkap Kemiskinan (<i>Poverty Trap</i>)	38
Gambar 3.2 Keterkaitan Antara Pembangunan Kesehatan dan Ekonomi	43
Gambar 3.3 Grafik Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin (Persen) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017	59
Gambar 3.4 Grafik Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (Persen) Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2017	60
Gambar 3.5 Grafik Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin (Persen) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	60
Gambar 3.6 Profil Kemiskinan di Indonesia Tahun 2017	61
Gambar 3.7 Grafik Perkembangan jumlah Miskin Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017 (ribu jiwa)	62
Gambar 3.8 Grafik Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat	68
Gambar 3.9 Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017 (%)	69
Gambar 3.10 Grafik Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017 (%)	70
Gambar 3.11 Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	71

Gambar 3.12	Grafik Proporsi Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	72
Gambar 3.13	Grafik Posisi Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Kotawaringin Barat Terhadap Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2017	72
Gambar 3.14	Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	74
Gambar 3.15	Grafik Posisi Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Kotawaringin Barat Terhadap Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2017	74
Gambar 3.16	Grafik Angka Kematian Balita (AKBA) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	75
Gambar 3.17	Grafik Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) di Kabupaten Kotawaringin Barat Terhadap Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2017	76
Gambar 3.18	Grafik Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	76
Gambar 3.19	Grafik Posisi Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) di Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2017	77
Gambar 3.20	Grafik Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	78
Gambar 3.21	Grafik Posisi Relatif Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Kotawaringin Barat Terhadap Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2016	78
Gambar 3.22	Grafik Posisi Proporsi Kelahiran yang Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih di Kabupaten Kotawaringin Barat Terhadap Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2017	80
Gambar 3.23	Grafik Cakupan Pelayanan Antenatal (K4) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	81
Gambar 3.24	Grafik Penemuan Kasus Malaria di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	82
Gambar 3.25	Grafik Proporsi Kasus Tuberculosis yang Disembuhkan Melalui DOTS di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	83
Gambar 3.26	Grafik Angka Partisipasi Murni SD/MI di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	84
Gambar 3.27	Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni SD/MI di Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2017	85
Gambar 3.28	Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	86

Gambar 3.29	Grafik Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni SMP/MTs di Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2017	86
Gambar 3.30	Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	87
Gambar 3.31	Grafik Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni SMA/MA di Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2017	87
Gambar 3.32	Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	89
Gambar 3.33	Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2017	89
Gambar 3.34	Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	90
Gambar 3.35	Grafik Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2017	90
Gambar 3.36	Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016	91
Gambar 3.37	Grafik Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2017	92
Gambar 3.38	Grafik Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	93
Gambar 3.39	Grafik Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	94
Gambar 3.40	Grafik Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	95
Gambar 3.41	Grafik Angka Kelulusan (AK) SD/MI Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	96
Gambar 3.42	Grafik Angka Kelulusan (AK) SMP/MTs Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	96
Gambar 3.43	Grafik Angka Kelulusan (AK) SMA/MA Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	97
Gambar 3.44	Grafik Angka Melek Huruf di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	98
Gambar 3.45	Grafik Rasio APM Perempuan Terhadap Laki-Laki di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	99

Gambar 3.46	Grafik RAPM SD/MI Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	100
Gambar 3.47	Grafik RAPM SMP/MTs Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	101
Gambar 3.48	Grafik RAPM SMA/MA Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	102
Gambar 3.49	Grafik Akses Rumah Tangga Terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016	103
Gambar 3.50	Grafik Persentase Penduduk dengan Akses Sanitasi Layak (Jamban Sehat) Per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016	104
Gambar 3.51	Grafik Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum Bersih di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016	105
Gambar 3.52	Grafik Cakupan Rumah Tangga Pengguna Air Minum PDAM di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	106
Gambar 3.53	Grafik Jumlah Penduduk dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016	107
Gambar 3.54	Grafik Persentase Penduduk dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas Per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016	108
Gambar 3.55	Grafik Persentase Rumah Tinggal Pengguna Fasilitas Penerangan Listrik di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	109
Gambar 3.57	Grafik Produksi Beras di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	114
Gambar 3.56	Grafik Jumlah Kebutuhan Bahan Pangan Pokok Strategis di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	110
Gambar 3.57	Grafik Perbandingan Jumlah Kebutuhan terhadap Ketersediaan Bahan Pangan Pokok Strategis di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016	111
Gambar 4.1	Grafik Kemiskinan dan Tingkat Inflasi di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017	115
Gambar 4.2	Grafik Perkembangan NTP dan Indeks Harga yang Diterima/Dibayar Petani November 2015 – November 2016	115
Gambar 4.3	Grafik Persandingan Pertumbuhan Ekonomi di Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten	116
Gambar 4.4	Grafik Jumlah Individu Menurut Kecamatan dan Status Kesejahteraan di Kabupaten Kotawaringin Barat	117
Gambar 4.5	Jumlah Rumah Tangga dan Menurut Kecamatan dan Status Kesejahteraan di Kabupaten Kotawaringin Barat	118
Gambar 4.6	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Berdasarkan Pekerjaan Utama di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015	119

Gambar 4.7 Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Menganggur Tahun 2012-2017	121
Gambar 4.8 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2017	121
Gambar 4.9 Grafik Perbandingan Jumlah Penduduk yang Bekerja di Sektor Utama Dengan Distribusi Prosentase Sektor Utama PDRB Tahun 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat	123
Gambar 4.10 Grafik Prosentase Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Tertinggi Tahun 2015 di Kabupaten Kotawaringin Barat	123
Gambar 4.11 Grafik Persandingan Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Tertinggi Tahun 2015 dan 2017 di Kabupaten Kotawaringin Barat	124
Gambar 4.12 Jumlah Individu yang Bekerja dan Tidak Bekerja Menurut Kelompok Usia dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah di Kabupaten Kotawaringin Barat	124
Gambar 4.13 Jumlah Rumah Tangga dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan Menurut Kelompok Umur Kepala Rumah Tangga dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	124
Gambar 4.14 Tingkat Kematian Bayi dan Balita Gizi Buruk.....	127
Gambar 4.15 Tingkat Kematian Balita (AKABA).....	128
Gambar 4.16 Angka Kematian Ibu Melahirkan	128
Gambar 4.17 Jumlah Kunjungan Wanita Hamil, Nifas/Menyusui, Bayi dan Anak Menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2016	129
Gambar 4.18 Angka Partipasi Kasar Per Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2016.....	130
Gambar 4.19 Penduduk Usia Sekolah (7-18 Tahun) Tidak Bersekolah	131
Gambar 4.20 Jumlah Anak yang Tidak Sekolah Menurut Kelompok Usia dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	132
Gambar 4.21 Grafik Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Kotawaringin Barat Per Kecamatan Tahun 2016	133
Gambar 4.22 Grafik Prosentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Kotawaringin Barat Per Kecamatan Tahun 2016	134
Gambar 4.23 Karakteristik Kepemilikan Bangunan Rumah Keluarga Miskin Dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015.....	135
Gambar 4.24 Karakteristik Kepemilikan Lahan Keluarga Miskin dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015	146
Gambar 4.25 Karakteristik Kepemilikan Lahan dan Rumah yang Dibedah di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015	139
Gambar 4.26 Grafik Jumlah Keluarga Berdasarkan Sumber Air Bersih di Kabupaten	

	Kotawaringin Barat Per Kecamatan Tahun 2016	140
Gambar 4.27	Grafik Jumlah Rumah Tangga Menurut Kapasitas Daya Sumber Penerangan Utama dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah di Kabupaten Kotawaringin Barat	142
Gambar 4.28	Jumlah Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah di Kabupaten Kotawaringin Barat	143
Gambar 4.29	Jumlah Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah di Kabupaten Kotawaringin Barat	144
Gambar 4.30	Jumlah Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja Dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah di Kabupaten Kotawaringin Barat	145
Gambar 4.31	Grafik Komparasi Ketersediaan dan Kebutuhan Bahan Pangan Pokok (Beras) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016.....	146
Gambar 5.1	Rata-rata Pertumbuhan APBD Tahun 2012-2016 Kabupaten Kotawaringin Barat	147
Gambar 5.2	Komposisi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016 (%)	149
Gambar 5.3	Perkembangan Komposisi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2011-2016 (Rupiah)	149
Gambar 5.4	Komposisi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016 (%)	150
Gambar 5.5	Perkembangan Komposisi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2011-2016 (Rupiah)	150
Gambar 5.6	Grafik Program yang Mendukung Penanggulangan Kemiskinan dalam Alokasi Belanja Langsung Prioritas II	148
Gambar 5.7	Grafik Perkembangan Rasio Pajak Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2015 (%)	159
Gambar 5.8	Perkembangan Pajak Per Kapita Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2011-2016 (Rupiah)	160
Gambar 5.9	Perkembangan Ruang Fiskal Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2012-2016	161
Gambar 5.10	Perkembangan Tingkat Ketergantungan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2012-2016 (%)	162
Gambar 5.11	Perkembangan Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2012-2016 (%)	163
Gambar 5.12	Perkembangan Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2012-2016 (%)	163

Gambar 5.13	Perkembangan Rasio Belanja Modal Per Kapita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2012-2016 (Rupiah)	164
Gambar 5.14	Perkembangan Rasio Belanja Bantuan Sosial Terhadap Total Belanja Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2012-2016 (%)	165
Gambar 5.15	Hubungan Penurunan Persentase Penduduk Miskin (P0), Kenaikan P1 dan P2 Akibat Penurunan Rasio Bansos Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2012-2016 (%)	166
Gambar 6.1	Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi ke-5.....	188
Gambar 6.2	Pohon Kinerja Pencapaian Misi ke-5.....	189
Gambar 6.3	Susunan Organisasi TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat	193

BAB I

PENDAHULUAN



Bagian Satu: Pendahuluan berisi landasan kebijakan mengenai peranan TKPK dan penyusunan dokumen SPKD (Perpres 15 dan Permendagri no 42). Selain itu perlu menjelaskan apakah dokumen SPKD mencantumkan landasan kebijakan secara terstruktur mengenai penanggulangan kemiskinan. Bagian ini juga menjelaskan tujuan dan manfaat dari dokumen SPKD, yang kemudian dilanjutkan dengan sistematika penulisan dokumen SPKD.

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan memiliki kewajiban dalam menangani permasalahan kemiskinan pada masing-masing wilayahnya. Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan baik dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Pada tahun 2010, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dapat dilihat melalui Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang Kebijakan Pembangunan yang Berkeadilan. Instruksi ini memberikan mandat kepada seluruh instansi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan meliputi program pro rakyat, program keadilan untuk semua dan pencapaian tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals - MDGs*).

Program penanggulangan kemiskinan melalui program pro rakyat difokuskan pada program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Sementara itu pada point pembangunan percepatan pencapaian MDGs target dalam penanganan kemiskinan dan kelaparan adalah menurunkan 50% pada tahun 2015.

Dalam rangka meningkatkan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, diperlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Upaya percepatan tersebut dimulai dari penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran dan penguatan kelembagaan di tingkat pusat

maupun daerah. Untuk mendukung upaya percepatan tersebut, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 menetapkan percepatan program-program penanggulangan kemiskinan. Percepatan program penanggulangan kemiskinan ini dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi program percepatan penanggulangan kemiskinan melalui penajaman program perlindungan sosial.

Kemiskinan merupakan isu yang senantiasa aktual dan selalu mengiringi setiap upaya pembangunan. Menariknya, isu kemiskinan selalu muncul sebagai dampingan ketika penyelenggaraan pembangunan dilakukan. Kemiskinan merupakan permasalahan klasik dan sampai saat ini belum ada solusi yang riil dalam menuntaskannya, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan bahkan sering kali hanya dijadikan sebagai objek dalam proses pembangunan. Karenanya, di setiap daerah senantiasa terdapat fenomena kemiskinan. Kabupaten Kotawaringin Barat, salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, sangat perlu untuk menata daerahnya sebaik-baiknya untuk tampil sebagai daerah yang bebas kemiskinan. Kabupaten Kotawaringin Barat, yang memiliki luas wilayah 10.759 km² dan berpenduduk kurang lebih sebanyak 286.714 jiwa pada tahun 2016 dengan 6 Kecamatan dan 81 desa dan 13 kelurahan, ini menyimpan beberapa potensi yang sangat baik. Beberapa di antaranya adalah pelabuhan, perikanan dan kelautan, wisata alam, wisata budaya, dan sebagainya.

Sementara itu, tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Kabupaten Kotawaringin Barat pada periode tahun 2011-2016 mengalami penurunan dari 14.910 jiwa menjadi 14.110 jiwa atau menurun sekitar 5,36%. Perkembangan data kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat, menurut data BPS Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan trend positif setiap tahunnya, dengan angka penurunan kemiskinan pada tahun 2011 sebesar 6,19 % atau 14.910 jiwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 253.549,- pada tahun 2012 sebesar 5,63 % atau 14.370 jiwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 263.840,- dan pada tahun 2013 sebesar 5,44% atau 14.330 jiwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 273.467, sedangkan angka kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2013 mengalami penurunan sudah di bawah angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 6,23%. Tetapi menurut Kepala BPS setempat bahwa target kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat akan tercapai dengan mengendalikan inflasi, di mana pada tahun 2013 angka inflasi kumulatif sebesar 6,29%.

Upaya pemerintah setempat untuk menanggulangi kemiskinan di daerah ini di antaranya adalah: program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sejak 2013, Bantuan Siswa Miskin (BSM), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Kartu Sehat Kobar, Sekolah Gratis 12 tahun serta Penanggulangan Desa Tertinggal, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Upaya-upaya lain, pemerintah setempat melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Kotawaringin Barat, merumuskan program-program yang dapat menjadi unggulan daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

Sebagaimana disampaikan oleh Wakil Bupati Kotawaringin Barat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Kotawaringin Barat, bahwa melalui pihaknya ingin meningkatkan fokus program-program penanggulangan kemiskinan yang ditujukan kepada masyarakat miskin agar lebih efektif dan efisien. Kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan gerakan bersama tentunya tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja tetapi juga memerlukan keterlibatan semua pihak selaku pemangku kepentingan, dukungan dan kerjasama ini perlu ditingkatkan dan digerakkan bersama pemerintah, dunia usaha, perbankan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat, serta kepada semua camat diminta agar memperhatikan kondisi masyarakat di wilayahnya, dan mempunyai data kemiskinan di wilayahnya, sehingga setiap program yang dibuat oleh SKPD agar dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pihak kecamatan dengan harapan program dimaksud tepat sasaran untuk mencapai target RPJMD sebesar 2% pada tahun 2015. Evaluasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat ini, menurut data Bappeda setempat, bahwa realisasi RPJMD sampai dengan tahun 2013 belum tercapai, dan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat perlu setiap SKPD teknis untuk fokus dan tepat sasaran pada program/ kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Kegiatan **penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)** dalam usulan ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam memperkuat dan lebih memfokuskan pencapaian tujuan yang telah dirumuskan tersebut untuk pedoman menyusun program aksi penanggulangan kemiskinan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

1.2 RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana deskripsi kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat?
- b. Bagaimana potensi sumberdaya lokal Kabupaten Kotawaringin Barat?
- c. Bagaimana kondisi dan peran stakeholders lokal di Kabupaten Kotawaringin Barat?
- d. Bagaimana pendekatan yang sesuai untuk menangani masalah kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat?
- e. Bagaimana rumusan program aksi yang sesuai untuk menangani masalah kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat?

1.3 DASAR HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Politic Right* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 9) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
- 10) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 12) Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;

- 13) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 –2025.
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 –2022.
- 17) Keputusan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 050/03/BAPP-I/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018.

1.4 TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

1.4.1 Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah menyusun dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai landasan operasional dan acuan bagi Pemerintah, TKPKD, masyarakat, pelaku usaha, dan stakeholder lainnya dalam mengentaskan kemiskinan secara sinergis di Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.4.2 Sasaran Kegiatan

Untuk mencapai tujuan maka sasaran kegiatan yang perlu dilakukan adalah:

- a. Mengidentifikasi kondisi umum daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- b. Mengidentifikasi profil kemiskinan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Menganalisis prioritas intervensi kebijakan daerah untuk penanganan kemiskinan.
- d. Menganalisis anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penanganan kemiskinan.
- e. Mengkaji ulang kebijakan dan kelembagaan daerah yang berperan dalam penanggulangan kemiskinan.
- f. Menganalisis isu-isu strategis pembangunan daerah.
- g. Menganalisis prioritas kegiatan, hambatan dan kendala dalam penanggulangan kemiskinan.

- h. Merumuskan program aksi dan arahan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- i. Merencanakan sistem monitoring dan evaluasi penanggulangan dan pengendalian kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.5 RUANG LINGKUP

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah pekerjaan Penyusunan dokumen SPKD Kabupaten Kotawaringin Barat mencakup wilayah Administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.5.2 Ruang Lingkup Kegiatan

- A. Analisis dokumen kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan
 - 1) Inventarisasi dan mengkaji dokumen kebijakan nasional terkait penanggulangan kemiskinan;
 - 2) Inventarisasi dan mengkaji dokumen kebijakan provinsi terkait penanggulangan kemiskinan; dan
 - 3) Inventarisasi dan mengkaji dokumen kebijakan daerah terkait penanggulangan kemiskinan.
- B. Penyusunan dokumen SPKD, meliputi materi:
 - 1) Identifikasi kondisi umum daerah, antara lain:
 - a. Posisi dan orientasi wilayah
 - b. Kondisi fisik wilayah
 - c. Kondisi kependudukan (sosial, ekonomi, dan budaya)
 - d. Kondisi kelembagaan
 - e. Kondisi sarana dan prasarana
 - f. Kepemilikan KTP
 - 2) Profil kemiskinan daerah, antara lain:
 - a. Konsep kemiskinan
 - b. Kondisi umum kemiskinan daerah
 - 3) Prioritas intervensi kebijakan, antara lain:
 - a. Capaian bidang pendidikan
 - b. Capaian bidang kesehatan
 - c. Capaian bidang infrastruktur dasar
 - d. Capaian bidang ketenagakerjaan dan kewirausahaan
 - 4) Analisis anggaran pendapatan dan belanja daerah, antara lain:
 - a. Kinerja keuangan masa lalu
 - b. Kebijakan pengelolaan keuangan

- c. Kerangka pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan
 - 5) Kajian kebijakan dan kelembagaan, antara lain:
 - a. Pemetaan program nasional, regional dan lokal untuk penanggulangan kemiskinan
 - b. Kelembagaan, sistem koordinasi dan pengendalian
 - c. Permasalahan koordinasi dan penguatan kelompok kerja TKPKD
 - 6) Analisis isu-isu strategis, antara lain:
 - a. Permasalahan pembangunan daerah
 - b. Isu strategis pembangunan daerah
 - 7) Analisis prioritas kegiatan, hambatan dan kendala dalam penanggulangan kemiskinan.
 - 8) Rumusan program aksi dan arahan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - 9) Rencana sistem monitoring dan evaluasi penanggulangan dan pengendalian kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- C. Penyedia jasa konsultasi Penyusunan Dokumen SPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan lingkup kegiatan/pekerjaan, bertanggung jawab secara kontraktual kepada kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat.
- D. Penyedia jasa konsultasi Penyusunan Dokumen SPKD Kabupaten Kotawaringin Barat bertugas sejak waktu yang telah ditetapkan sesuai Surat Perintah Kerja hingga serah terima pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

1.6 SISTEMATIKA PELAPORAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, dasar hukum, tujuan dan sasaran kegiatan, ruang lingkup kegiatan serta sistematika pelaporan.

BAB II KONDISI UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Bab II menyampaikan kondisi umum kabupaten saat ini baik gambaran umum fisik geografis hingga kondisi kependudukan, sarana dan prasarana, kondisi keuangan daerah, kondisi ekonomi wilayah hingga kondisi kesejahteraan penduduk saat ini.

BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

Bab III menyampaikan profil kemiskinan berisi tentang konsep kemiskinan dan kondisi kemiskinan daerah yang terdiri dari kemiskinan konsumtif dan kemiskinan non konsumtif

BAB IV DETERMINAN KEMISKINAN DAERAH

Bab IV menyampaikan tentang analisis akar masalah, yang terdiri dari: kemiskinan konsumtif, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan ketahanan pangan.

BAB V ANALISIS APBD UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bab ini gambaran umum anggaran daerah, analisis pendapatan daerah, dan analisis belanja daerah.

BAB VI TINJAUAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bab VI ini berisikan kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional, kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam RPJPD dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, dan tinjauan kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB VII STRATEGI

Bab VII ini berisikan strategi-strategi yang dihasilkan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya untuk penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Bab VIII ini berisikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat yang terdiri dari: maksud dan tujuan, pelaksana, tolok ukur dan ruang lingkup; dan manfaat.

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



2.1 KONDISI GEOGRAFI WILAYAH

2.1.1 Letak Geografis Wilayah

Kabupaten Kotawaringin Barat yang beribukota di Pangkalan Bun, berada di Provinsi Kalimantan Tengah dan terletak di daerah khatulistiwa diantara: 1° 19' sampai dengan 3° 36' Lintang Selatan, 110° 25' sampai dengan 112° 50' Bujur Timur Terletak di antara 3 kabupaten yaitu, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara dan sebelah selatan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Batas administratif wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara.

Tabel II.1.
Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2017

No.	Kecamatan	Luas/(km ²)	Persentase	Jml Kelurahan	Jml Desa
1.	Kotawaringin Lama	1.218	11,32	2	15
2.	Arut Selatan	2.400	22,31	7	13
3.	Kumai	2.921	27,15	3	15
4.	Pangkalan Banteng	1.306	12,14	-	17
5.	Pangkalan Lada	229	2,13	-	11
6.	Arut Utara	2.685	24,96	1	10
	Kab. Kotawaringin Barat	10.759	100,00	13	81

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2018.

2.1.2 Kondisi Topografi, Jenis Tanah dan Hidrologi Permukaan

Topografi Kabupaten Kotawaringin Barat digolongkan menjadi 4 bagian dengan ketinggian antara 0-500 m dari permukaan laut dan kemiringan antara 0-40 persen, yaitu dataran, daerah datar berombak, daerah berombak berbukit dan daerah berbukit-bukit yang terdiri dari:

- Sebelah Utara adalah pegunungan dan macam tanah Lotosal tahan terhadap erosi
- Bagian Tengah terdiri dari tanah Podsolik Merah Kuning, juga tahan terhadap erosi
- Sebelah Selatan terdiri dari danau dan rawa Alluvial/ Organosol banyak mengandung air

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat di sekitar aliran Sungai Kumai, Arut, dan Lamandau, mudah tergenang, berawa-rawa dan merupakan daerah endapan serta bersifat organik dan asam. Ketiga sungai yang melintasi Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai kedalaman rata-rata 5 meter dan lebar 100-300 meter.

Tanah Latosol. Jenis tanah ini juga salah satu yang terdapat di Indonesia, tanah ini terbentuk dari pelapukan batuan sedimen dan metamorf. Karakteristik: Ciri-ciri dari tanah latosol adalah warnanya yang merah hingga kuning, teksturnya lempung dan memiliki solum horizon. Persebaran tanah latosol ini berada di daerah yang memiliki curah hujan tinggi dan kelembapan yang tinggi pula serta pada ketinggian berkisar pada 300-1000 meter dari permukaan laut. Tanah latosol tidak terlalu subur karena mengandung zat besi dan aluminium.

Tanah Podsolik Merah Kuning. Tanah ini sangat mudah ditemukan di seluruh wilayah Indonesia karena persebarannya yang hampir rata. Karakteristik: Tanah ini berwarna merah hingga kuning dan kandungan organik serta mineralnya akan sangat mudah mengalami pencucian oleh air hujan. Oleh karena itu untuk menyuburkan tanah ini harus ditanami tumbuhan yang memberikan zat organik untuk kesuburan tanah serta pupuk baik hayati maupun hewani.

Tanah aluvial merupakan jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur biasanya yang terbawa karena aliran sungai. Tanah ini biasanya ditemukan di bagian hilir karena dibawa dari hulu. Tanah ini biasanya berwarna coklat hingga kelabu. Karakteristik: tanah ini sangat cocok untuk pertanian baik pertanian padi maupun palawija seperti jagung, tembakau dan jenis tanaman lainnya karena teksturnya yang lembut dan mudah digarap sehingga tidak perlu membutuhkan kerja yang keras untuk mencangkulnya.

Dilihat dari kesesuaian penggunaan lahan berdasarkan kemiringan lahan, mayoritas lahan di daerah ini dapat diarahkan penggunaannya untuk budidaya pertanian jika faktor lain mendukung. Lahan ini adalah lahan yang mempunyai kemiringan < 40%. Lahan yang mempunyai kemiringan >40% termasuk peka terhadap erosi. Kelerengan di atas 40 penyebarannya terkonsentrasi di bagian utara, di mana ketinggian wilayahnya di atas 500 meter di atas permukaan laut. Tipe kelas lereng ini hanya terdapat di wilayah Kecamatan Arut Utara.

Tabel II.2.
Klasifikasi Lereng Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Kecamatan	Luas (Ha)				
		0 – 2 %	2 – 15 %	15 – 40 %	> 40 %	Jumlah
1	Kotawaringin Lama	45.903,35	64.739,94	3.000,60	0	113.643,89
2	Arut Selatan	113.593,76	69.107,06	34.963,03	0	217.663,86
3	Kumai	278.812,90	22.572,55	0	0	301.385,44
4	Pangkalan Banteng	16.610,11	56.222,47	0	0	72.832,58
5	Pangkalan Lada	7.189,56	24.120,18	0	0	31.309,74
6	Arut Utara	0	292.410,98	121.342,23	72.460,00	249.450,98
	Jumlah	462.109,98	292.410,98	159.305,86	72.460,00	986.286,49
	%	46,85	29,65	16,15	7,35	100

Sumber: RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017 - 2022

2.1.3 Kondisi Klimatologi

Iklim daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau/kering dan musim hujan. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret, yaitu 423,8 mm, dengan jumlah hari hujan pada tahun 2017 tercatat sebanyak 262 hari dan bulan Januari merupakan bulan dengan hari hujan terbanyak yaitu 29 hari. Suhu udara maksimum berkisar antara 33,4°C-36,4°C dan suhu minimum antara 20,0°C-22,4°C dengan kelembaban udara rata-rata antara 89,4-90,4 persen dan kecepatan angin maksimal 22 knot.

Tabel II.3.
**Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Stasiun
Pengamatan Pangkalan Bun (mm), 2017**

No.	Bulan	Curah Hujan(mm3)	Hari Hujan
1	Januari	277,40	29
2	Februari	154,40	19
3	Maret	232,30	20
4	April	231,90	21
5	Mei	251,30	25
6	Juni	186,80	19
7	Juli	167,70	20
8	Agustus	170,80	17
9	September	126,10	20
10	Oktober	203,70	22
11	November	379,20	27
12	Desember	199,20	23
	Rata-rata	215,07	22

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2018.

Letak geografis, topografi, iklim, dan kondisi fisik lainnya dari suatu daerah yang mempengaruhi kondisi masyarakat dan memunculkan suatu karakteristik kemiskinan tertentu. Berdasarkan kondisi tanahnya, hanya tanah aluvial yang subur dan bisa diolah lebih mudah untuk pertanian dengan kemiringan relatif datar. Kabupaten Kotawaringin Barat masih menjanjikan untuk pengembangan sektor pertanian ini dengan dukungan iklim dan topografi wilayah, namun untuk faktor kesuburan

tanah wilayah bagian tengah dan utara perlu penanganan yang lebih serius untuk meningkatkan kesuburannya. Pengembangan ekonomi wilayah berbasis pertanian masih bisa dikembangkan dengan penelitian lebih lanjut disektor ini, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2 ADMINISTRASI WILAYAH

2.2.1 Pembagian Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat 10.759 km² . Dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten sesuai dengan UU No. 5 tahun 2002, Kabupaten Kotawaringin Barat dimekarkan menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Sukamara dan Lamandau. Seiring dengan semakin berkembangnya Kabupaten Kotawaringin Barat maka sejak tahun 2003 sesuai dengan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2003 terjadi pemekaran kecamatan dari 4 kecamatan menjadi 6 kecamatan. Kecamatan yang mengalami pemekaran adalah Kecamatan Kumai yaitu menjadi Kecamatan Kumai, Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng. Kecamatan Kumai merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 2.921 km² (28,13% dari total luas kabupaten), dan Kecamatan Pangkalan Lada merupakan kecamatan yang terkecil dengan luas wilayah 229 km² (3,08% dari total luas kabupaten).

Tabel II.4.
Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2017

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah		Ibu Kota
			Kelurahan	Desa	
1.	Kotawaringin Lama	1.218,00	2	15	Lama Kotawaringin
2.	Arut Selatan	2.400,00	7	13	Pangkalan Bun
3.	Kumai	2.921,00	3	15	Kumai
4.	Pangkalan Banteng	1.306,00	-	17	Karang Mulya
5.	Pangkalan Lada	229	-	11	Pandu Sanjaya
6.	Arut Utara	2.685,00	1	10	Pangkut
	Jumlah	10.759,00	13	81	

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2018.

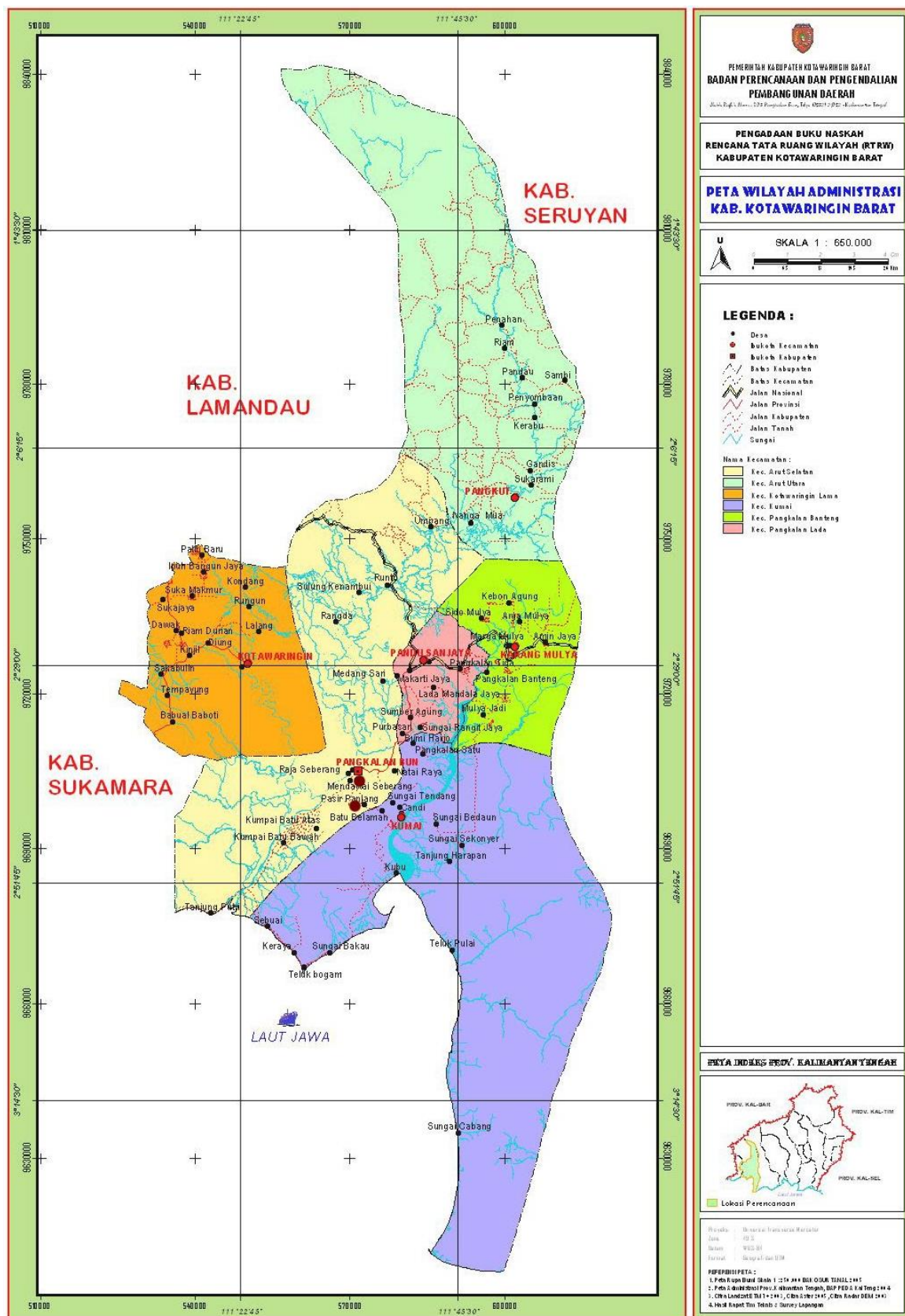
2.2.2 Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan

Dilihat dari jarak Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan, kecamatan Arut Utara merupakan kecamatan paling jauh jarak jangkanya dari Ibukota Kabupaten yaitu mencapai jarak sekitar 100 Km, dan berikutnya Kecamatan Kotawaringin Lama dan Pangkalan Banteng, yang masing-masing mencapai jarak sekitar 60 Km. Berikut ini disampaikan rinciannya.

Tabel II.5.
Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan di Kabupaten
Kotawaringin Barat, 2017

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)
1.	Kotawaringin Lama	Kotawaringin	60
2.	Arut Selatan	Pangkalan Bun	0
3.	Kumai	Kumai	15
4.	Pangkalan Banteng	Karang Mulya	60
5.	Pangkalan Lada	Pandu Sanjaya	30
6.	Arut Utara	Pangkut	100
	Rata-rata		44,17

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2018.



Gambar 2.1. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

2.2.3 Kondisi Sarana Dan Prasarana Wilayah

A. Pendidikan

Sarana pendidikan yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi TK hingga SLTA (SMA) sederajat. Berikut ini disampaikan jumlah dan persebaran sarana pendidikan yang dirinci per jenis tingkatan sekolah per kecamatan tahun 2017/2018.

Tabel II.6.
Banyaknya Sekolah, Menurut Jenis dan Status Sekolah di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2017/2018

No.	Jenis Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	5	122	127
2.	Sekolah Dasar (SD)	165	24	189
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	44	16	60
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	9	4	13
5.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	10	5	15

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2018.

Tabel II.7.
Banyaknya Sekolah Menurut Kecamatan dan Status Sekolah di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2017/2018

No.	Kecamatan	Jenis Sekolah												
		Taman Kanak-kanak (TK)/RA			Sekolah Dasar (SD)/MI			SMP/MTs			SMA/ MA			SMKN /S
		TKN	TKS	RA	SDN/S	MIN	MIS	SMPN/S	MTsN	MTsS	SMAN /S	MAN	MAS	
1.	Kotawaringin Lama	-	9	-	24	-	-	8	-	2	1	-	1	1
2.	Arut Selatan	1	49	4	68	2	8	19	1	2	6	1	2	10
3.	Kumai	1	23	3	33	2	4	12	1	2	2	-	1	2
4.	Pangkalan Banteng	-	22	4	26	-	3	10	-	1	2	-	1	1
5.	Pangkalan Lada	-	14	-	21	-	-	6	-	2	1	-	1	1
6.	Arut Utara	-	8	-	17	-	-	5	-	-	1	-	-	-
	Jumlah	2	125	11	189	4	17	60	2	9	13	1	6	15

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2018.

B. Kesehatan

Sarana kesehatan yang ada meliputi Rumah Sakit (RS) dan Puskesmas. Puskesmas, klinik, polindes dan Posyandu tersebar di setiap kecamatan. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan untuk masyarakat seperti Puskesmas dan Rumah Sakit dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Selain sarana kesehatan, banyaknya tenaga medis juga merupakan faktor yang sangat penting dalam peningkatan layanan kesehatan. Pada tahun 2016 jumlah tenaga kerja kesehatan di Kotawaringin Barat yang terdiri atas 30 Dokter umum, 9 dokter gigi, 26 dokter spesialis, 195 Bidan, 207 perawat, 10 farmasi dan 24 ahli gizi.

Berikut ini disampaikan perinciannya.

Tabel II.8.
Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2017

No.	Kecamatan	Rumah Sakit	Klinik/ Balai Kesehatan	Puskesmas	Posyandu	Klinik/ Balai Kesehatan	Poskes des	Jumlah
1.	Kotawaringin Lama	-	1	3	22	1	12	39
2.	Arut Selatan	2	16	6	68	14	11	117
3.	Kumai	-	5	3	30	3	12	53
4.	Pangkalan Banteng	-	6	2	55	6	15	84
5.	Pangkalan Lada	-	1	2	24	2	5	34
6.	Arut Utara	-	2	2	26	2	5	37
	Kotawaringin Barat	2	31	18	225	28	60	364

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2018.

Tabel II.9.
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2017

No.	Kecamatan	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Ahli Gizi
1.	Kotawaringin Lama	25	26	-	2
2.	Arut Selatan	58	55	5	13
3.	Kumai	48	46	1	4
4.	Pangkalan Banteng	38	33	2	2
5.	Pangkalan Lada	17	15	-	2
6.	Arut Utara	20	20	-	1
	Jumlah	207	195	10	24

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2018.

Tabel II.10.
Banyaknya Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2017

No.	Kecamatan	Dokter Umum	Dokter Gigi	Dokter Spesialis	Jumlah
1.	Kotawaringin Lama	3	4	-	7
2.	Arut Selatan	12	1	26	39
3.	Kumai	7	2	-	9
4.	Pangkalan Banteng	5	1	-	6
5.	Pangkalan Lada	2	1	-	3
6.	Arut Utara	1	-	-	1
	Jumlah	30	9	26	65

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2018.

C. Peribadatan

Sarana peribadatan yang ada mencakup masjid, musholla, gereja katolik dan gereja kristen protestan. Untuk Vihara dan Pura saat ini belum ada. Berikut ini disampaikan rinciannya.

Tabel II.11.
Banyaknya Tempat Ibadah menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2017

No.	Kecamatan	Masjid	Musholla	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara
1.	Kotawaringin Lama	27	51	20	4	-	-
2.	Arut Selatan	101	100	22	6	1	1
3.	Kumai	40	46	18	-	-	-
4.	Pangkalan Banteng	32	123	29	5	-	-
5.	Pangkalan Lada	36	104	12	2	-	-
6.	Arut Utara	6	3	12	1	-	-
	Jumlah	242	427	113	18	-	-

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2018.

D. Ekonomi dan Perdagangan

Sarana ekonomi dan perdagangan terdapat berbagai pasar dan toko tradisional hingga modern dari skala lingkungan hingga perkulakan, minimarket hingga hypermarket. Berikut ini disampaikan beberapa pasar tradisional dan modern yang saat ini melayani Kabupaten Kotawaringin Barat:

1) Pasar Tradisional:

- Pasar Tembaga Indah
- Pasar Indra Sari
- Pasar Burung Panggung
- Pasar Ikan Kotawaringin Lama
- Pasar Babaga Baru
- Pasar Palagan Sari
- Pasar Indrakencana
- Pasar Baru Pangkalan Bun
- Pasar Ikan Hias Pangkalan Bun
- Pasar Saik Kumai
- Pasar Cempaka
- Pasar Desa Sidomulyo
- Pasar Sp4 Karang Mulya
- Pasar Sari Mulya
- Pasar Pangkalan Lada
- Pasar Rakyat
- Pusat Perbelanjaan Pelabuhan Pasar Lama

2) Pasar dan Pertokoan/ Pusat Perbelanjaan Modern:

- Pelangi Supermarket
- Hypermart Pangkalan Bun
- Borneo Supermarket
- Ciptaland Supermarket

- Barata Departemen Store
- Citimall Pangkalan Bun

E. Olahraga

Sarana olahraga yang saat ini sudah tersedia di antaranya berupa gedung olahraga, lapangan sepak bola, bulu tangkis, basket dan voli. Berikut ini disampaikan perinciannya.

Tabel II.12.
Jumlah Sarana/Fasilitas Olahraga Menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2017

No.	Kecamatan	Gedung Olahraga	Lapangan				
			Sepak Bola	Tenis	Bulu Tangkis	Basket	Voli
1.	Kotawaringin Lama	-	15	3	4	-	27
2.	Arut Selatan	12	20	8	16	2	54
3.	Kumai	4	12	-	8	-	53
4.	Pangkalan Banteng	3	8	-	5	-	50
5.	Pangkalan Lada	1	11	-	3	-	35
6.	Arut Utara	1	6	-	1	-	27
	Jumlah	21	72	11	37	2	246

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2018.

F. Jaringan Jalan dan prasarana transportasi

Jaringan jalan yang tersedia saat ini berdasarkan kewenangan pemeliharannya meliputi jalan nasional, provinsi, kabupaten dan jalan desa. Sebagian besar merupakan jalan kabupaten (49,51%) dan jalan desa (41,89%). Kondisi permukaan jalan saat ini sebagian besar berupa jalan tanah (43,5%) dan jalan aspal (42,09%). Kondisi jalan sebagian besar dalam keadaan baik (36,33%) dan sedang (31,27), dengan 7,69% masih dalam kondisi rusak berat dan 24,71% dalam kondisi rusak. Berikut ini disampaikan perinciannya

Tabel II.13.
Panjang Jalan menurut Tingkat Pemerintahan yang Berwenang (km) di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2011-2017

Tahun	Panjang Jalan Seluruhnya (Km)	Tingkat Pemerintahan Yang Berwenang (Km)			
		Nasional	Provinsi	Kabupaten	Desa
2011	2.481,47	151,32	72,75	1.222,85	1.034,55
2012	2.461,58	143,00	64,65	1.220,91	1.033,02
2013	4.811,78	143,00	64,65	1.185,51	1.013,17
2014	4.083,49	126,50	155,00	1.182,51	1.002,75
2015	4.083,49	126,50	155,00	1.182,51	1.002,75
2016	2.469,75	156,96	55,40	1.222,84	1.034,55
(%)	100,00	6,36	2,24	49,51	41,89

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2018.

Tabel II.14.
Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan Jalan (km) di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2011-2017

Tahun	Jenis Permukaan Jalan				
	Diaspal	Kerikil	Tanah	Lainnya	Jumlah
2011	653,93	168,66	1.276,91	367,26	2.466,76
2012	663,84	174,66	1.266,16	375,52	2.480,18
2013	689,84	120,58	1.255,09	396,82	2.462,33
2014	717,99	115,37	1.250,88	397,23	2.481,47
2015	717,99	115,37	1.250,88	397,23	2.481,47
2016	1.039,46	92,03	1.074,44	263,82	2.469,75
(%)	42,09	3,73	43,50	10,68	100,00

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2018.

Tabel II.15.
Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan (km) di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2011-2017

Tahun	Kondisi Permukaan Jalan				Jumlah
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
2011	484,18	1.059,39	661,52	261,66	2.466,75
2012	526,68	1.041,97	669,52	242,02	2.480,19
2013	582,38	999,59	633,39	246,22	2.461,58
2014	615,14	981,39	657,38	227,56	2.481,47
2015	615,14	981,39	657,38	227,56	2.481,47
2016	897,27	772,31	610,18	189,99	2.469,75
2017	507,36	442,32	150,92	335,72	

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2018.

Selain keberadaan jaringan jalan, untuk menunjang kelancaran transportasi hubungan antar dan inter wilayah Kabupaten, Kotawaringin Barat juga memiliki bandar udara Iskandar Pangkalan Bun, yang saat ini telah berkembang melayani enam rute penerbangan, yaitu:

- Pangkalan Bun – Sampit
- Pangkalan Bun – Ketapang
- Pangkalan Bun – Cengkareng
- Pangkalan Bun – Semarang
- Pangkalan Bun – Surabaya
- Pangkalan Bun – Palangka Raya

Juga terdapat pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Pangkalan Bun, yang melayani Kunjungan Kapal dan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Pangkalan Bun, yang saat ini kunjungan kapal yang berlabuh

mencapai 763 kapal/tahun. Pelabuhan Kumai yang melayani Kunjungan Kapal dan Penumpang di Pelabuhan Kumai, yang saat ini kunjungan kapal yang berlabuh mencapai 2.867 kapal/tahun.

G. Prasarana Pos dan Telekomunikasi

Sarana telekomunikasi yang ada saat ini berupa kantor pos pembantu yang berupa kantr pos, loket ekstensi, kantor pos desa dan pos desa. Berikut ini disampaikan perinciannya.

Tabel II.16.
Jumlah Kantor Pos Pembantu Menurut Jenis dan Kecamatan di Kotawaringin Barat, 2017

No.	Kecamatan	Jenis		
		Kantor Pos	Loket Ekstensi	Kantor Pos Desa
1.	Kotawaringin Lama	1	-	-
2.	Arut Selatan	1	2	-
3.	Kumai	1	-	-
4.	Pangkalan Banteng	1	-	-
5.	Pangkalan Lada	1	1	-
6.	Arut Utara	-	-	-
	Jumlah	5	3	-

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2018.

Selain itu keberadaan telepon seluler dengan keterjangkauan jaringan nir kabel juga memerlancar komunikasi di wilayah ini. Sampai dengan tahun 2016 tercatat Persentase Rumah Tangga Menurut Anggota Rumah Tangga Yang Menguasai Telepon Seluler (HP) dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2016 (Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2017):

- 78,26% Rumah Tangga di Perkotaan Menguasai Telepon Seluler(HP) dan 21,74% tidak; dan
- 65,23% Rumah Tangga di Perdesaan Menguasai Telepon Seluler(HP) dan 34,77% tidak.

Kemudian untuk akses internet, sampai dengan tahun 2016 tercatat Persentase Penduduk Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Akses Terhadap Internet Dalam 3 Bulan Terakhir di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2016 (Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2017):

- Perkotaan terakses internet 42,62% dan 57,38% tidak terakses internet; dan
- Perdesaan terakses internet 20,85% dan 79,15% tidak terakses internet

H. Prasarana Listrik

Kebutuhan energi merupakan kebutuhan yang penting. Listrik sebagai sumber penerangan utama adalah energi yang dibutuhkan banyak orang. Di Kabupaten Kotawaringin Barat penggunaan penerangan dengan listrik yang disediakan oleh PLN sudah tercakup di seluruh daerah. Tetapi wilayah perdesaan masih terdapat penggunaan listrik non-PLN maupun bukan listrik sebagai

penerangan utama. Berikut ini disampaikan rincian data Banyaknya Langganan dan Daya Terpasang Langganan Menurut Rumah Tangga pada PLN Ranting Pangkalan Bun tahun 2017.

Tabel II.17.
Banyaknya Langganan dan Daya Terpasang Langganan Menurut Rumah Tangga pada PLN Ranting Pangkalan Bun, 2017

No.	Unit	Langganan	Daya Tersambung (KVA)	Jalur Tegangan Menengah	Jalur Tegangan Rendah/	Gardu
01.	Pangkalan Bun	36.875	55.287.070	145,42	168,92	324
02.	Kumai	7.946	11.243.600	93,59	52,05	66
03.	Teluk Bogam	1.067	1.083.200	37,15	7,45	17
04.	Sei Rangit	10.244	10.540.450	105,58	71,76	111
05.	Pangkalan Banteng	6.682	7.268.350	93,28	131,62	73
06.	Pembuang Hulu	5.875	6.602.200	105,97	68,4	66
07.	Sukamandang	683	665.300	3,3	5	4
08.	Rantau Pulut	892	872.150	2,78	2,88	10
09.	Kenambui	274	191.300	2,91	3,95	6
10.	Pangkut	492	422.500	-	3,45	-
11.	Tumbang Manjul	391	348.250	1,9	10,52	2
	Jumlah	71.421	94.524.370	591,88	527	679

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2018.

Sedangkan Rumah Tangga yang sudah terakses jaringan PLN untuk penerangannya, saat ini masih mencapai 81,80%, sisanya menggunakan listrik Non PLN (16,99%) dan bukan listrik (1,21%). Berikut ini disampaikan perinciannya.

Tabel II.18.
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama dan Tipe Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2017

Sumber Penerangan Utama	Wilayah (%)		
	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah
1. Listrik PLN	99,56	66,77	81,80
2. Listrik Non-PLN	0,44	30,99	6,99
3. Bukan Listrik	0,00	2,24	1,21

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2018.

I. Prasarana Air Bersih

Untuk prasarana air bersih, saat ini tercatat terdapat 14.605 pelanggan rumah tangga dari total 75.133 rumah tangga yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sekitar 19,44% rumah tangga telah terlayani PDAM untuk pemenuhan kebutuhan air bersihnya, selebihnya menggunakan sumber-sumber air bersih lainnya. Berikut ini disampaikan data pelanggan PDAM tahun 2015-2017.

Tabel II.19.
Banyaknya Pelanggan PDAM menurut Jenis Konsumen di Kabupaten
Kotawaringin Barat, 2015-2017

No.	Jenis Konsumen	2015	2016	2017
1	Sosial/ <i>Social</i>			
	-Umum/ <i>Public</i>	148	21	21
	-Khusus/ <i>Particular</i>	120	271	144
2	Non Niaga/ <i>Non Commercial</i>			
	-Rumah Tangga/ <i>Household</i>	12.818	14.605	16.774
	-Instansi Pemerintah/ <i>Institution Government</i>	102	114	124
3	Niaga/ <i>Commercial</i>			
	-Kecil/ <i>Small</i>	1.919	2.044	2145
	-Besar/ <i>Large</i>	106	110	118
4	Industri / <i>Industry</i>			
	-Kecil/ <i>Small</i>	4	3	3
	-Besar/ <i>Large</i>	-	-	-
5	Khusus / <i>Special</i>			
	-Pelabuhan / <i>Port</i>	2	3	3
	-Lainnya/ <i>Others</i>	1	1	156
6	Susut/ Hilang/ <i>Lost</i>			
	Jumla/ Total	13.631	17.172	19.488

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2018

Tingkat kelengkapan fasilitas publik dan jarak jangkau ke Ibukota Kabupaten sangat penting untuk dapat memperkirakan tantangan-tantangan yang harus dihadapi daerah dalam melakukan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, urusan pelayanan pemerintah, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari lainnya. Jarak jangkau ke ibukota kabupaten sedikit banyak berpengaruh pada aksesibilitas ke wilayah-wilayah tertentu di daerah tersebut, walaupun ketersediaan angkutan umum, kualitas jaringan jalan dan kontur wilayah juga sangat berpengaruh pada aksesibilitas kawasan.

Tabel II.20.
Tingkat Kelengkapan Fasilitas Publik dan Jarak Jangkau ke Ibukota
Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	KECAMATAN	JENIS FASILITAS PUBLIK																											JML	Jarak ke ibukota kab.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1.	Kotawaringin Lama	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	19	60
2.	Arut Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	0
3.	Kumai	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	21	15
4.	Pangkalan Banteng	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	20	60
5.	Pangkalan Lada	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	20	30
6.	Arut Utara	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	18	100

Keterangan:

- | | | |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 1 TK | 10 Poskesdes | 19 Pertokoan |
| 2 SD/MI | 11 Masjid | 20 toko/warung |
| 3 SMP/MTs | 12 Musholla | 21 GOR |
| 4 SMA/SMK/MA | 13 Gereja Protestan | 22 Kantor Pos |
| 5 Rumah Sakit | 14 Gereja Katolik | 23 Kantor Kecamatan |
| 6 Klinik/ Balai Kesehatan | 15 Pura | 24 Bank BRI |
| 7 Puskesmas | 16 Vihara | 25 Kantor pemkab |
| 8 Pos yandu | 17 Pasar | 26 Bandara |
| 9 Klinik/ Balai Kesehatan | 18 Toserba/supermarket/Hypermarket | 27 Pelabuhan |

Nilai 1: ada fasilitas

Nilai 0: tidak ada fasilitas

Sumber: Diolah dari KDA Kab. Kotawaringin Barat, 2018.

Catatan: Dengan melihat kondisi pada tabel II.20 di atas maka Kecamatan Arut Utara menjadi fokus perhatian utama yang harus diperhatikan agar ada peningkatan aksesibilitas ke Ibukota Kabupaten dan Peningkatan kelengkapan fasilitas pelayanan publik agar kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

2.3 KONDISI DEMOGRAFI

2.3.1 Jumlah, Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 berdasarkan data BPS – Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka tahun 2018, mencapai 295.349 jiwa. Dari jumlah tersebut penduduk laki-laki jumlahnya lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 156.549 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sejumlah 138.800 jiwa. Dengan porsi tersebut maka sex ratio penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 113 atau dapat diartikan bahwa di setiap 100 penduduk perempuan terdapat 113 penduduk laki-laki.

Persebaran penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak merata. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Arut Selatan. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Kecamatan Arut Selatan sebesar 118.256 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 61.651 jiwa dan perempuan sebesar 56.605 jiwa. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Arut Utara. Jumlah penduduk Kecamatan Arut Utara sebesar 19.760 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 11.365 jiwa dan perempuan sebesar 8.395 jiwa.

Tabel II.21.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2017

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	Kotawaringin Lama	10.639	9.430	20.069	113
2.	Arut Selatan	63.406	58.160	121.566	109
3.	Kumai	29.828	27.146	56.974	110
4.	Pangkalan Banteng	23.035	19.638	42.673	117
5.	Pangkalan Lada	18.276	16.031	34.307	114
6.	Arut Utara	11.365	8.395	19.760	135
	Kotawaringin Barat	10.639	9.430	295.349	113

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2018.

Tabel II.22.
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten
Kotawaringin Barat, 2015-2017

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun(%)	
		2015	2016	2017	2010-2017	2016-2017
1.	Kotawaringin Lama	19.157	19.615	20.069	2,58	2,31
2.	Arut Selatan	114.952	118.256	121.566	3,07	2,87
3.	Kumai	54.015	55.495	56.974	2,93	2,73
4.	Pangkalan Banteng	38.993	40.806	42.673	4,87	4,65
5.	Pangkalan Lada	32.494	33.400	34.307	2,98	2,79
6.	Arut Utara	18.530	19.142	19.760	3,50	3,3
	Kotawaringin Barat	278.141	286.714	295.349	3,27	3,08

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2018.

Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 sebanyak 295.349 jiwa yang terdiri atas laki-laki sebanyak 156.549 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sejumlah 138.800 jiwa. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Kotawaringin Barat mengalami pertumbuhan sebesar 3,08 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 3,12 persen perempuan sebesar 3,16 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 113 tahun 2017 masih sebesar 113.

Tabel II.23.
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut
Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2017

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Penduduk (jiwa)	Persentase (%)	Kepadatan Penduduk per km ²
1.	Kotawaringin Lama	1.218	20.069	6,80	17
2.	Arut Selatan	2.400	121.566	41,16	51
3.	Kumai	2.921	56.974	19,29	30
4.	Pangkalan Banteng	1.306	42.673	14,45	33
5.	Pangkalan Lada	229	34.307	11,62	150
6.	Arut Utara	2.685	19.760	6,69	7
	Kotawaringin Barat	10.759	295.349	100	28

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2018.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 sebesar 28 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan penduduk di keenam kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Pangkalan Lada dengan kepadatan sebesar 150 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Arut Utara sebesar 7 jiwa/km². Sementara itu jumlah rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 2,85 persen dari tahun 2016.

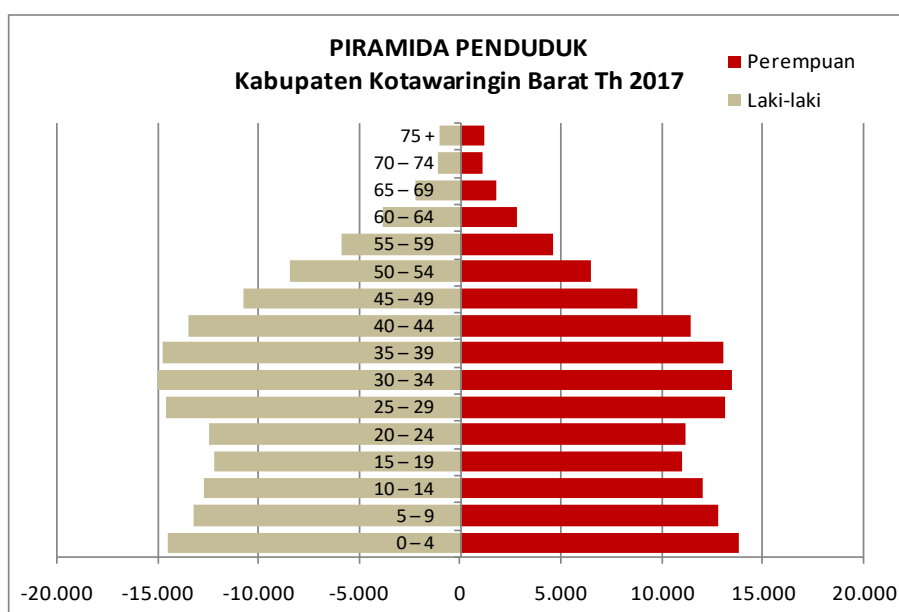
2.3.2 Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin serta Rata-rata Jumlah Jiwa per Rumah Tangga

Jumlah Penduduk Kotawaringin Barat Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin, tahun 2017 di sampaikan secara detail pada tabel berikut ini.

Tabel II.24.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2017

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	14.547	13.846	28.393
5 – 9	13.236	12.793	26.029
10 – 14	12.727	12.073	24.800
15 – 19	12.185	11.036	23.221
20 – 24	12.492	11.196	23.688
25 – 29	14.630	13.123	27.753
30 – 34	15.081	13.523	28.604
35 – 39	14.812	13.099	27.911
40 – 44	13.534	11.421	24.955
45 – 49	10.787	8.768	19.555
50 – 54	8.480	6.455	14.935
55 – 59	5.864	4.591	10.455
60 – 64	3.813	2.817	6.630
65 – 69	2.180	1.773	3.953
70 – 74	1.117	1.095	2.212
75 +	1.064	1.191	2.255

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2018.



Gambar 2.2. Piramida Penduduk Kotawaringin Barat (dalam jiwa), 2017

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa angka ketergantungan penduduk atau *Dependency Ratio* mencapai 45,06, artinya setiap 100 orang usia produktif harus menanggung 45 orang tidak produktif. Angka *Dependency Ratio* 45,06 termasuk rendah. Angka *dependency ratio* bisa dijadikan indikator kasar tingkat kesejahteraan penduduk. Angka *dependency ratio* yang rendah menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kondisi baik. Sedangkan jumlah rumah tangga di enam kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 mencapai 77.395 rumah tangga dengan rata-rata jiwa per rumah tangga mencapai 4 jiwa. Berikut ini disampaikan rinciannya.

Tabel II.25.
Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga
Menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2017

No.	Kecamatan	Penduduk (jiwa)	Rumah Tangga	Rata-rata Anggota Rumah Tangga
1.	Kotawaringin Lama	20.069	5.837	3,44
2.	Arut Selatan	121.566	32.203	3,77
3.	Kumai	56.974	13.191	4,32
4.	Pangkalan Banteng	42.673	10.846	3,93
5.	Pangkalan Lada	34.307	9.647	3,56
6.	Arut Utara	19.760	5.671	3,48
	Kotawaringin Barat	295.349	77.395	3,82

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2018.

2.4 KONDISI PEREKONOMIAN

2.4.1 Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Nilai PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan harga konstan 2000 (ADHK 2000) untuk tahun 2012 – 2016 menunjukkan pertumbuhan yang menurun di tahun 2016. PDRB ADHK pada tahun 2016 tercatat sebesar 10,7 triliun rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 10,112 triliun rupiah. Angka PDRB dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dengan berbagai variasi. Hal ini dapat dimaklumi karena ada kebijakan kebijakan yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi perekonomian yang ada. Rata-rata pertumbuhan selama 3 tahun terakhir tercatat 6,75% pertahunnya. Berikut ini disampaikan rinciannya.

Tabel II.26.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000
Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Lapangan Usaha (juta rupiah),
2014 - 2017

Lapangan Usaha	2014	2015	2016*)	2017**)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.597.566,20	2.749.876,51	2.907.562,45	3.132.434,80
2. Pertambangan dan Penggalan	134.436,50	135.371,64	143.353,14	138.873,49
3. Industri Pengolahan	2.393.769,80	2.556.714,06	2.690.338,27	2.932.661,59
4. Pengadaan Listrik dan Gas	4.703,00	5.688,18	5.896,92	5.998,75
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	8.221,60	8.895,97	9.343,09	9.706,05
6. Konstruksi	815.094,60	885.898,18	934.460,21	1.006.910,86
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	1.133.837,90	1.232.135,56	1.317.850,04	1.396.452,55
8. Transportasi dan Pergudangan	775.715,30	836.753,31	887.038,33	926.590,98
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	117.608,00	128.405,76	139.764,42	145.085,10
10. Informasi dan Komunikasi	102.192,50	110.037,51	118.589,98	122.161,57
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	457.537,70	502.228,42	536.083,89	559.205,20
12. Real Estat	170.990,50	186.011,27	198.148,87	202.580,46
13. Jasa Perusahaan	4.357,30	4.666,21	4.859,70	5.006,06
14. Admin.Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	285.129,90	314.518,17	331.239,21	357.967,63
15. Jasa Pendidikan	234.713,20	254.883,95	267.865,47	276.812,85
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	103.746,60	110.859,08	115.724,40	120.577,47
17. Jasa lainnya	83.579,10	90.308,90	96.593,34	101.946,39
Produk Domestik Regional Bruto	9.423.199,60	10.113.252,72	10.704.711,74	11.440.971,78

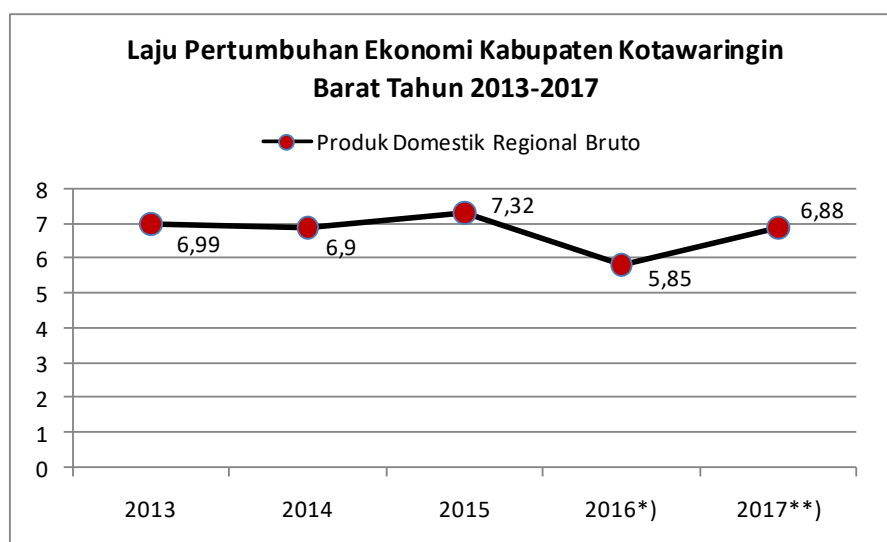
Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2017.

Tabel II.27.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Lapangan Usaha
(persen), 2014-2017

Lapangan Usaha	2014	2015	2016*)	2017**)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,89	5,86	5,73	7,73
2. Pertambangan dan Penggalan	-11,04	0,7	5,9	-3,12
3. Industri Pengolahan	7,92	6,81	5,23	9,01
4. Pengadaan Listrik dan Gas	10,94	17,96	3,67	1,73
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	9,54	8,2	5,03	3,88
6. Konstruksi	6,73	8,69	5,48	7,75
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	4,9	8,67	6,96	5,96
8. Transportasi dan Pergudangan	5,16	7,87	6,01	4,46
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,96	9,18	8,85	3,81
10. Informasi dan Komunikasi	8,2	7,68	7,77	3,01
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	13,16	10,29	6,74	4,31
12. Real Estat	9,14	8,78	6,53	2,24
13. Jasa Perusahaan	7,95	7,09	4,15	3,01

Lapangan Usaha	2014	2015	2016*)	2017**)
14. Admin.Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	9,7	9,76	5,32	8,07
15. Jasa Pendidikan	7,17	8,05	4,09	3,34
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,42	6,86	4,39	4,19
17. Jasa lainnya	5,83	8,05	6,96	5,54
Produk Domestik Regional Bruto	6,9	7,32	5,85	6,88

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2018.



Gambar 2.3. Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013-2017

Sumber: BPS Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2018

Dari 17 kategori atau sektor-sektor penyusun PDRB dapat dilihat bahwa pertumbuhan yang cukup tinggi pada kategori/sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 27,38%, Industri Pengolahan 25,63% dan disusul Sektor Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor 12,21%. Berikut ini disampaikan rinciannya.

Tabel II.28.
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 – 2017 (Persen)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016*)	2017**)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27,57	27,19	27,16	27,38
2. Pertambangan dan Penggalan	1,43	1,34	1,34	1,21
3. Industri Pengolahan	25,40	25,28	25,13	25,63
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,06	0,06	0,05
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,08
6. Konstruksi	8,65	8,76	8,73	8,80
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	12,03	12,18	12,31	12,21
8. Transportasi dan Pergudangan	8,23	8,27	8,29	8,10

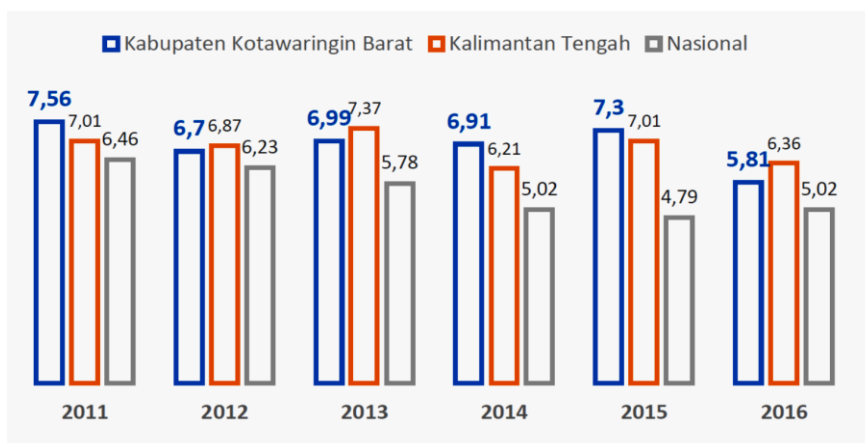
Lapangan Usaha	2014	2015	2016*)	2017**)
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,25	1,27	1,31	1,27
10. Informasi dan Komunikasi	1,08	1,09	1,11	1,07
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,86	4,97	5,01	4,89
12. Real Estate	1,81	1,84	1,85	1,77
13. Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,04
14. Admin.Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	3,03	3,11	3,09	3,13
15. Jasa Pendidikan	2,49	2,52	2,50	2,42
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,10	1,10	1,08	1,05
17. Jasa lainnya	0,89	0,89	0,90	0,89
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2018.

Kontribusi per sektoral atau kategori pada PDRB dari tahun 2014 sampai 2017 masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Transportasi dan pergudangan, dan sector jasa keuangan dan asuransi. Pada tahun 2014, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang sebesar 27,19%, disusul Industri Pengolahan sebesar 25,40% dan berikutnya sektor Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor sebesar 12,03%. Meskipun sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor dominan selama tiga tahun, namun kontribusi sektor tersebut menunjukkan kecenderungan menurun.

Pada tahun 2017, kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang sebesar 27,38%, Industri Pengolahan sebesar 25,63% dan berikutnya sektor Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor sebesar 12,33%. Sektor dominan yang meningkat kontribusinya di tahun 2017 adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan walaupun tidak besar. Sektor yang lain berubah naik ataupun kontribusinya namun tidak besar/ hanya sedikit saja.

Berdasarkan uraian di atas sektor – sektor yang memiliki laju pertumbuhan yang cukup tinggi dapat memberikan kontribusi bagi tujuan pembangunan yaitu dapat meningkatkan pendapatan daerah maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan. Selama 4 (empat) tahun terakhir perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat mampu tumbuh stabil dikisaran 6 hingga 7%, meskipun pada tahun 2016 mengalami perlambatan yang berada pada angka 5,8%, namun perlambatan pertumbuhan tersebut disebabkan oleh faktor ketidakstabilan ekonomi global. Tren perlambatan ini juga terjadi baik pada tingkat Kalimantan Tengah dan Nasional seperti nampak pada gambar berikut ini.



Gambar 2.4. Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2011-2016

Sumber: BPS Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017

PDRB Per Kapita ADHK 2000 juga mengalami peningkatan. Pendapatan per kapita pada tahun 2016 mencapai Rp 50,52 juta/tahun, sedangkan pada tahun 2015 mencapai Rp.47,121 juta/tahun. Rata-rata pertumbuhan per kapita PDRB 7,56%. Dengan meningkatnya pendapatan perkapita, diharapkan dapat mencerminkan peningkatan kesejahteraan di masyarakat.

Tabel II.29.

Perkembangan Beberapa Agregat PDRB dan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2013-2017

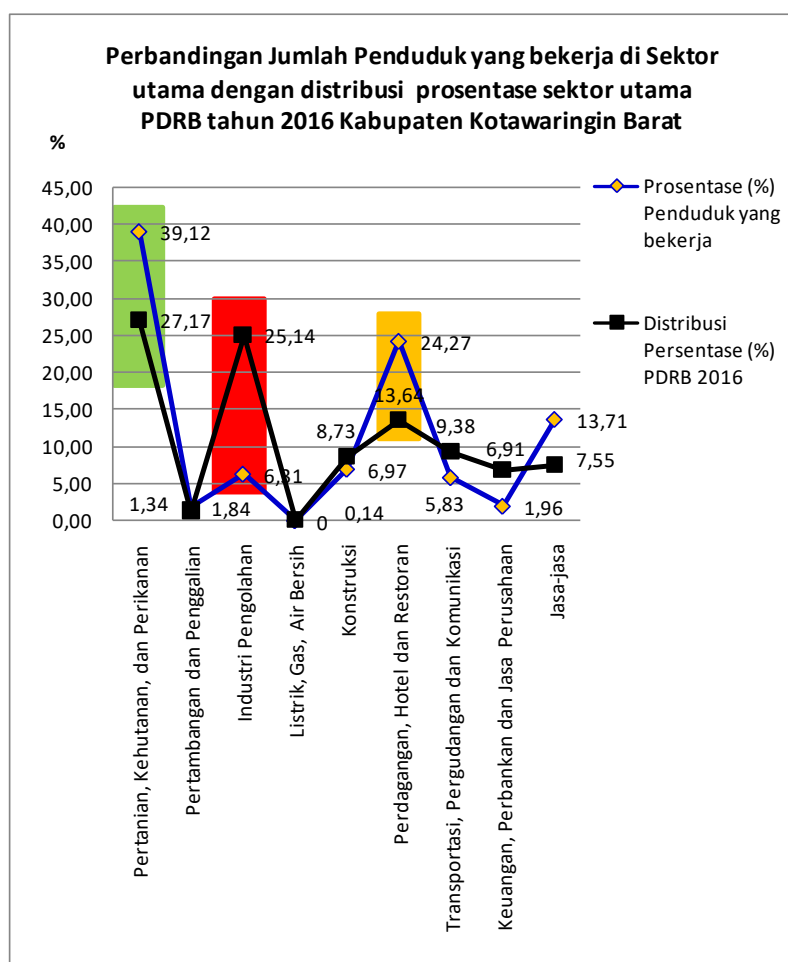
Rincian/Items	2013	2014	2015	2016	2017
ATAS DASAR HARGA BERLAKU					
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (jutaan rupiah)	10.306,88	11.782,72	13.128,56	14.580,99	16.368,11
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (rupiah)	39.453,69	43.669,76	47.201,11	50.855,52	55.419,56
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	261.240	269.629	278.141	286.714	295.349
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000					
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (jutaan rupiah)	8.815,08	9.423,20	10.113,25	10.704,71	11.440,97
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (rupiah)	33.743,24	34.948,76	36.360,17	37.335,85	38.737,13
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	261.240	269.629	278.141	286.714	295.349

Sumber: PDRB Kab. Kotawaringin Barat menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018

Struktur ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat masih memiliki pola yang sama seperti tahun sebelum-sebelumnya, dimana kategori yang **mendominasi dalam berkontribusi** terhadap perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu kategori **1) pertanian, kehutanan dan perikanan, 2) industri pengolahan serta 3) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor**. Tingginya kontribusi ketiga kategori tersebut selaras dengan luasnya perkebunan kelapa sawit yang diusahakan baik masyarakat maupun perkebunan swasta besar. Adanya perkebunan swasta besar diikuti dengan berdirinya industri pengolahan kelapa sawit meskipun belum optimal dengan hasil yang utama adalah minyak CPO dan minyak goreng, selain

itu juga adanya industri pengolahan hasil hutan yang sudah lama eksis di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kondisi struktur ekonomi demikian bila dikaitkan dengan struktur penduduk menurut mata pencaharian di Kabupaten Kotawaringin Barat, menunjukkan kondisi yang saling mendukung. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian masih dominan tertinggi, dan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih mendominasi struktur ekonominya. **Artinya** mayoritas penduduk masih dapat menikmati pertumbuhan tersebut, dengan harapan sektor pertanian bisa diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tiga tahun terakhir dari tahun 2014-2016 menunjukkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan cenderung menurun, oleh karena itu karena sektor ini masih berpengaruh kuat bagi penentu kesejahteraan rakyat maka perlu kiranya minimal mempertahankan tingkat pertumbuhannya.



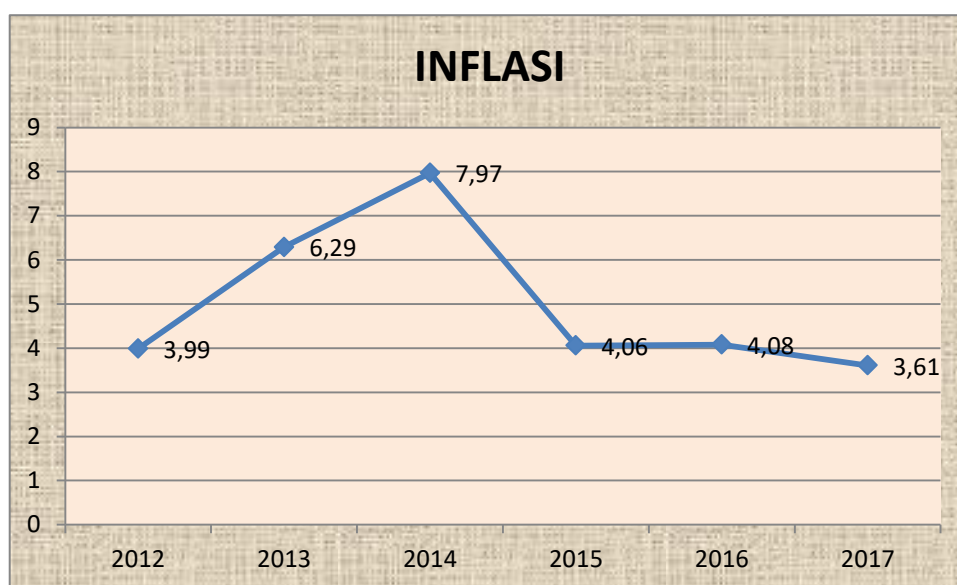
Gambar 2.5. Grafik Perbandingan Jumlah Penduduk yang Bekerja di Sektor Utama dengan Distribusi Prosentase Sektor Utama PDRB Tahun 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat

Sumber: diolah dari data BPS Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017

2.4.2 Tingkat Inflasi

Inflasi menurut Bank Indonesia adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dampak dari inflasi ini salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena ketidakmampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa.

Tingkat Inflasi menggambarkan indeks harga konsumen yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Angka inflasi di Kabupaten Kotawaringin Barat selama lima tahun terakhir (2012-2016) fluktuatif yang menurun di tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2012 inflasi mencapai 3,99%, meningkat cukup drastis menjadi 6,29% pada tahun 2013 dan naik kembali menjadi 7,97 pada tahun 2014. Kemudian menurun di tahun 2015 menjadi 4,06% dan 2016 menjadi 4,08%. Perkembangan inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun cukup fluktuatif dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 7,97 %. Angka tersebut masih tergolong dalam kategori inflasi ringan yang nilainya di bawah angka 10 %. Inflasi yang ringan dibutuhkan dalam perekonomian untuk mendorong produsen agar memproduksi lebih banyak barang dan jasa sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pergerakan inflasi yang fluktuatif perlu dikendalikan untuk meningkatkan dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil melalui upaya-upaya yang dapat menjaga stabilitas harga khususnya bahan pokok, mengingat kebutuhan bahan pokok Kabupaten Kotawaringin Barat banyak yang didatangkan dari Pulau Jawa. Perkembangan tingkat inflasi pada tahun 2012-2017 digambarkan pada grafik berikut ini:



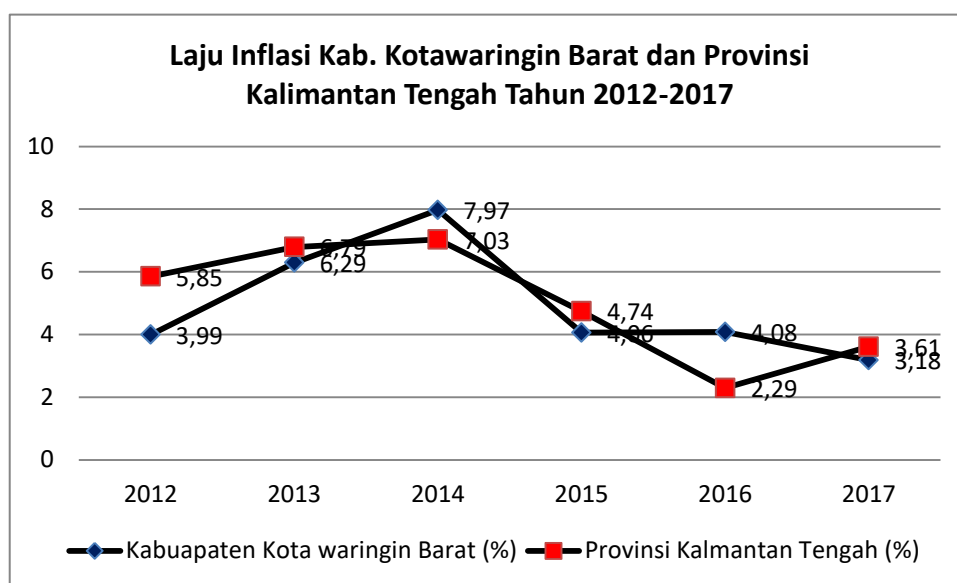
Gambar 2.6. Inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017

Sumber: BPS Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2018

Tingkat inflasi dan perkembangannya pada tahun 2015 menurun hingga 3,91% dan 2016 hanya naik 0,02%, setidaknya hal ini dapat menggambarkan bahwa kondisi beban pengeluaran masyarakat miskin lebih ringan, daya beli masyarakat miskin lebih membaik.

Bila laju inflasi Kabupaten Kotawaringin barat dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah maka akan tampak kondisi tahun 2012 berbanding terbalik dengan tahun 2016. Tahun 2012, laju inflasi Kotawaringin Barat lebih rendah dibandingkan Provinsi Kalimantan Tengah, namun tahun 2016 lebih tinggi Kotawaringin Barat, terpaut selisih hingga 1,97% lebih tinggi.

Berikut ini disampaikan grafik perbandingan laju inflasi di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah.



Gambar 2.7. Grafik Perbandingan Laju Inflasi di Kabupaten Kotawaringin Barat Dengan Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber: diolah dari data BPS Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2018

Selain menggambarkan tingkat inflasi secara umum dan perkembangannya dari waktu ke waktu, dapat pula ditambah dengan membandingkan perkembangan inflasi umum tersebut dengan inflasi garis kemiskinan (GK), dengan demikian akan lebih tergambar apakah harga komoditas-komoditas atau barang-barang yang paling banyak dikonsumsi orang miskin inflasinya lebih besar atau lebih kecil dari perkembangan harga-harga yang dikonsumsi masyarakat secara umum, karena beberapa barang bobotnya berbeda bagi orang miskin dibandingkan masyarakat umum.

Contoh beras, bagi rumah tangga miskin porsi beras dalam seluruh pengeluaran/ konsumsinya mencapai 30%, sedangkan konsumsi beras dalam pengeluaran rumah tangga pada umumnya hanya 5%. Bila kenaikan harga beras menjadi faktor yang paling besar dalam inflasi suatu daerah, maka inflasi GK bisa lebih besar dari inflasi umum, artinya beban pengeluaran masyarakat miskin lebih besar dibandingkan masyarakat secara umum.

2.4.3 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator ekonomi makro, meskipun secara detail akan dianalisis sebagai salah satu bidang dalam analisis kemiskinan multidimensi.

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 sebanyak 202.545 jiwa yang terbagi dalam 5 kegiatan utama. Pada tahun 2016, Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki penduduk dengan usia kerja sebanyak 209.717 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 74,20 % merupakan angkatan kerja, sedangkan 25,80 % bukan merupakan angkatan kerja.

Tabel II.30.
Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Tahun 2014 - 2016

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016**	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
I	Angkatan Kerja	136.864 70,05%		145.749 71,96%		155.605 74,20%	
1.	Bekerja	133.222	97,34	141.011	96,75	150.689	96,84
2.	Pengangguran	3.642	2,66	4.738	3,25	4.916	3,16
II	Bukan Angkatan Kerja	58.509 29,95%		56.796 28,04%		54.112 25,80%	
1.	Sekolah	17.465	29,85	14.855	26,15	18.981	35,08
2.	Mengurus Rumah Tangga	35.598	60,84	37.949	66,82	29.336	54,27
3.	Lainnya	5.446	9,31	3.992	7,03	5.765	10,65
	Jumlah	195.373		202.545		209.717	

Sumber: BPS, Disnakertrans Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

Dari 155.605 penduduk Kotawaringin Barat yang menjadi angkatan kerja, terdapat pengangguran sebanyak 4.916 orang atau 3,16 %. Tingkat PengangguranTerbuka (TPT) tersebut masih belum memenuhi target RPJMD 2016 yang sebesar 2 %.

Tabel II.31.
Angkatan Kerja

No.	Tahun	AK (Jiwa)	TPAK (%)	TKK (%)	TPT (%)
1.	2012	120.613	70,75	97,64	2,36
2.	2013	126.935	67,13	96,32	3,68
3.	2014	136.864	70,05	97,33	2,66
4.	2015	145.749	71,96	96,75	3,25
5.	2016*	155.605	74,20	96,84	3,16

AK : Angkatan Kerja

TPAK: Tingkat Partisipasi AngkatanKerja

TKK : Tingkat Kesempatan Kerja

TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat (BPS)Tahun 2017

*LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2016 sebesar 286.714 jiwa terdapat Angkatan Kerja (AK) sebanyak 155.505 jiwa,

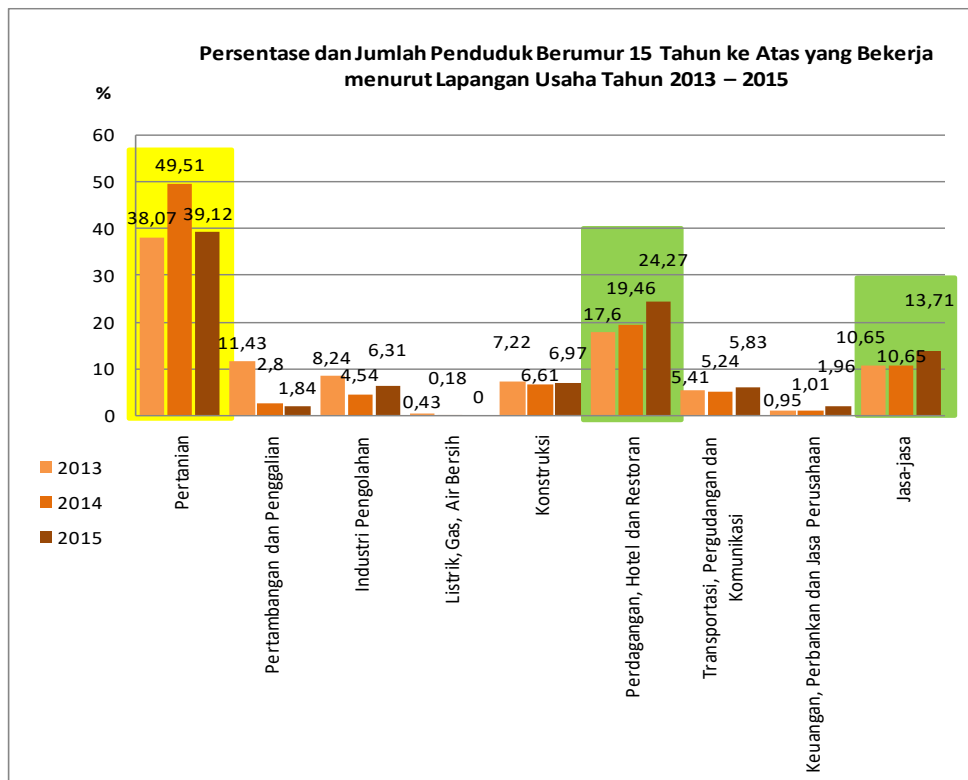
dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 74,20 %, dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) sebesar 96,84% serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,16 %. Progres Tingkat Pengangguran empat tahun terakhir mengalami fluktuasi dari 2,36 % pada tahun 2012 menjadi 3,16% pada tahun 2016. Proporsi jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha pada tahun 2013 – 2015 berdasarkan perhitungan PDRB tahun dasar 2000 dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel II.32.
Persentase dan Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 – 2015

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
1.	Pertanian	45.505	38,07	65.960	49,51	55.160	39,12
2.	Pertambangan dan Penggalian	13.662	11,43	3.724	2,8	2.595	1,84
3.	Industri Pengolahan	9.848	8,24	6.049	4,54	8.891	6,31
4.	Listrik, Gas, Air Bersih	513	0,43	240	0,18	-	-
5.	Konstruksi	8.628	7,22	8.801	6,61	9.824	6,97
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	21.040	17,6	25.925	19,46	34.228	24,27
7.	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	6.469	5,41	6.983	5,24	8.225	5,83
8.	Keuangan, Perbankan dan Jasa Perusahaan	1.132	0,95	1.352	1,01	2.761	1,96
9.	Jasa-jasa	12.736	10,65	14.188	10,65	19.327	13,71
	Jumlah	119.533	100	133.222	100	141.011	100

Sumber: Data BPS Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

Sektor Pertanian dalam arti luas masih mendominasi dalam penyediaan lapangan usaha di Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2015 yaitu sebesar 39,12%, diikuti oleh sektor Perdagangan sebesar 24,27% dan sektor Jasa-jasa sebesar 13,71% yang menjadi tiga sektor utama sebagai penyedia lapangan usaha sebesar 77,10%.



Gambar 2.8. Grafik Persentase dan Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 – 2015
Sumber: diolah dari data BPS Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017

BAB III

PROFIL KEMISKINAN DAERAH



3.1. KONSEP KEMISKINAN

3.1.1. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan dalam arti proper dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Kemiskinan dalam arti luas, merupakan suatu fenomena multi *face* atau multi dimensional. Kemiskinan menurut Chamber adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu (Nasikun 2001):

- 1) kemiskinan (*proper*);
- 2) ketidakberdayaan (*powerless*);
- 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*);
- 4) ketergantungan (*dependence*), dan
- 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti (Chriswardani Suryawati, 2005):

- a) tingkat kesehatan;
- b) pendidikan rendah;
- c) perlakuan tidak adil dalam hukum;
- d) kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal;
- e) ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan
- f) ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.

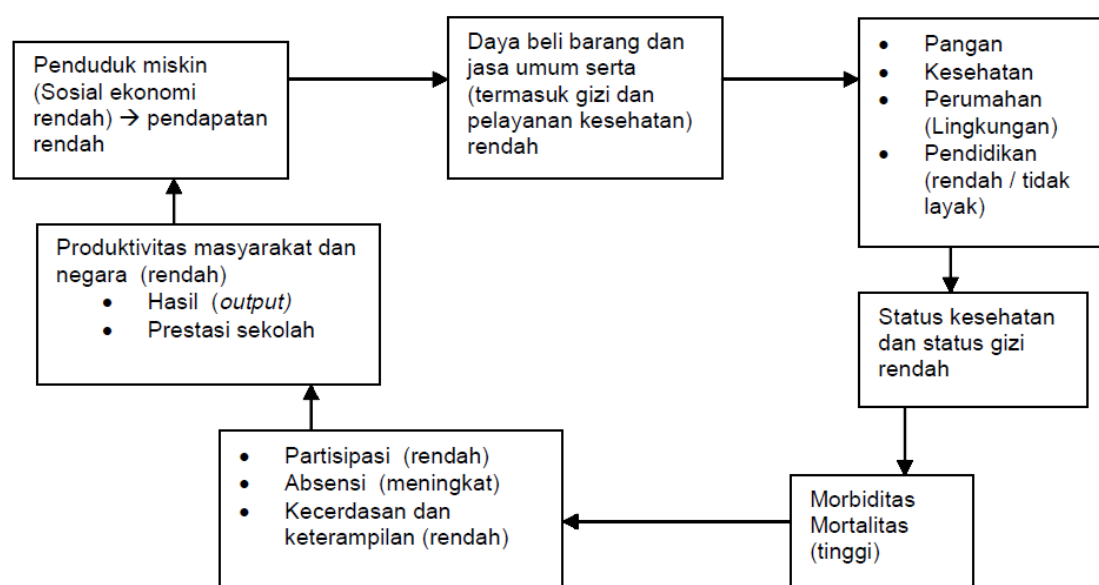
Kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu (Nasikun, 2001):

- a. **Kemiskinan absolut:** bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja;
- b. **Kemiskinan relatif:** kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan;
- c. **Kemiskinan kultural:** mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

- d. **Kemiskinan struktural:** situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Kemiskinan struktural dalam perkembangannya lebih banyak menjadi sorotan sebagai penyebab tumbuh dan berkembangnya ketiga kemiskinan yang lain (Jarnasi, 2005). Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan/artificial (Mas'ood, M., 1997):

- Kemiskinan alamiah berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus;
- Kemiskinan buatan lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.



Gambar 3.1.
Diagram Perangkap Kemiskinan (*Poverty Trap*)

Sumber: Chriswardani Suryawati, 2005.

Ciri-ciri kelompok (penduduk) miskin yaitu (Chriswardani Suryawati, 2005):

- rata-rata tidak mempunyai faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan keterampilan;
- mempunyai tingkat pendidikan yang rendah;
- kebanyakan bekerja atau berusaha sendiri dan bersifat usaha kecil (sektor informal), setengah menganggur atau menganggur (tidak bekerja);
- kebanyakan berada di pedesaan atau daerah tertentu perkotaan (slum area), dan

- e. kurangnya kesempatan untuk memperoleh (dalam jumlah yang cukup): bahan kebutuhan pokok, pakaian, perumahan, fasilitas kesehatan, air minum, pendidikan, angkutan, fasilitas komunikasi, dan kesejahteraan sosial lainnya.

Beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan menurut Nasikun (2001), yaitu:

- a. ***Policy induces processes*** : proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan (*induced of policy*) diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.
- b. ***Socio-economic dualism*** : negara ekskoloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.
- c. ***Population growth***: perspektif yang didasari pada teori Malthus bahwa pertambahan penduduk seperti deret ukur sedang pertambahan pangan seperti deret hitung.
- d. ***Recources management and the environment***: adanya unsur *mismanagement* sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
- e. ***Natural cycles and processes***: kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal di lahan kritis, di mana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir tetapi jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
- f. ***The marginalization of woman***: peminggiran kaum perempuan karena perempuan masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari laki-laki.
- g. ***Cultural and ethnic factors***: bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya, pola hidup konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.
- h. ***Explotative intermediation*** : keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir (lintah darat).
- i. ***Internal political fragmentation and civil stratfe***: suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.
- j. ***International processes***: bekerjanya sistem-sistem internasional (*kolonialisme dan kapitalisme*) membuat banyak negara menjadi semakin miskin.

Selain beberapa faktor di atas, penyebab kemiskinan di masyarakat khususnya di pedesaan disebabkan oleh keterbatasan aset yang dimiliki, yaitu (Chriswardani Suryawati, 2005):

- 1) ***Natural assets***: seperti tanah dan air, karena sebagian besar masyarakat desa hanya menguasai lahan yang kurang memadai untuk mata pencahariannya.

- 2) **Human assets:** menyangkut kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan (tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan maupun tingkat kesehatan dan penguasaan teknologi).
- 3) **Physical assets:** minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum seperti jaringan jalan, listrik, dan komunikasi di pedesaan.
- 4) **Financial assets:** berupa tabungan (*saving*), serta akses untuk memperoleh modal usaha.
- 5) **Social assets:** berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam hal ini kekuatan bargaining position dalam pengambilan keputusan-keputusan politik.

3.1.2. Ukuran Kemiskinan

Ukuran kemiskinan menurut Chriswardani Suryawati (2005), dikelompokkan menjadi 4 jenis yaitu:

- a. ukuran kemiskinan dalam dimensi ekonomi;
- b. ukuran kemiskinan dalam dimensi kesehatan;
- c. ukuran kemiskinan dalam dimensi sosial dan budaya;
- d. ukuran kemiskinan dalam dimensi sosial politik.
- e. ukuran kemiskinan dalam dimensi perdamaian

Berikut penjelasan ukuran masing-masing kemiskinan yang sudah disebutkan di atas:

A. **Kemiskinan Dalam Dimensi Ekonomi.** Dimensi ekonomi dari kemiskinan diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang, baik secara finansial maupun semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dikategorikan miskin bilamana seseorang atau keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok minimnya, seperti: sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Dimensi ekonomi dapat diukur dengan nilai rupiah meskipun harganya selalu berubah-ubah setiap tahunnya tergantung pada tingkat inflasi rupiah. Kemelaratan dan batas ini ditentukan oleh kebutuhan hidup yang minimal perlu dipenuhi bagi kehidupan yang sederhana. Kemiskinan dalam dimensi ekonomi paling mudah untuk diamati, diukur, dan diperbandingkan. Ada beberapa metode pengukuran tingkat kemiskinan yang dikembangkan di Indonesia, yaitu:

- 1) Badan Pusat Statistik (BPS) dalam hal ini mendefinisikan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan konsumsi (satu dimensi). Dengan pendekatan ini, ditentukan ukuran konsumsi standar kehidupan yang "layak" dengan melihat kebutuhan dasar (basic need approach), dengan cara ini kemudian dihasilkan suatu standar pengeluaran/konsumsi minimal yang dihitung. Tingkat kemiskinan oleh dalam satuan rupiah per bulan yang disebut Garis Kemiskinan.

Biro Pusat Statistik (BPS): didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu kurang dari 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada di lapisan bawah), dan konsumsi nonmakanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak

dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk susunan umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk.

Garis Kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori perkapita per hari (GKM) dan kebutuhan non makanan (GKBM). Paket komoditi kebutuhan dasar makanan ini diwakili oleh 52 jenis komoditi meliputi padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak lemak, dan lain-lain. Sedangkan GKBM adalah nilai rupiah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum non makanan yaitu papan, sandang, sekolah, transportasi serta kebutuhan dasar individu dan rumah tangga lainnya. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis kelompok pengeluaran di perkotaan dan 47 jenis kelompok pengeluaran di pedesaan.

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan, dikategorikan sebagai penduduk miskin. Dengan pendekatan konsumsi ini, maka BPS mendefinisikan Kemiskinan sebagai suatu situasi dimana suatu standar kehidupan yang "layak" tidak tercapai. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan penduduk miskin. Cara penentuan penduduk miskin semacam ini disebut penentuan **Kemiskinan Absolut**.

- 2) Sayogyo: tingkat kemiskinan didasarkan jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun dan dibagi wilayah pedesaan dan perkotaan.

Daerah pedesaan:

- a. Miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 320 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- b. Miskin sekali: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 240 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- c. Paling miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 180 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

Daerah perkotaan:

- a. Miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 480 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- b. Miskin sekali: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 380 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

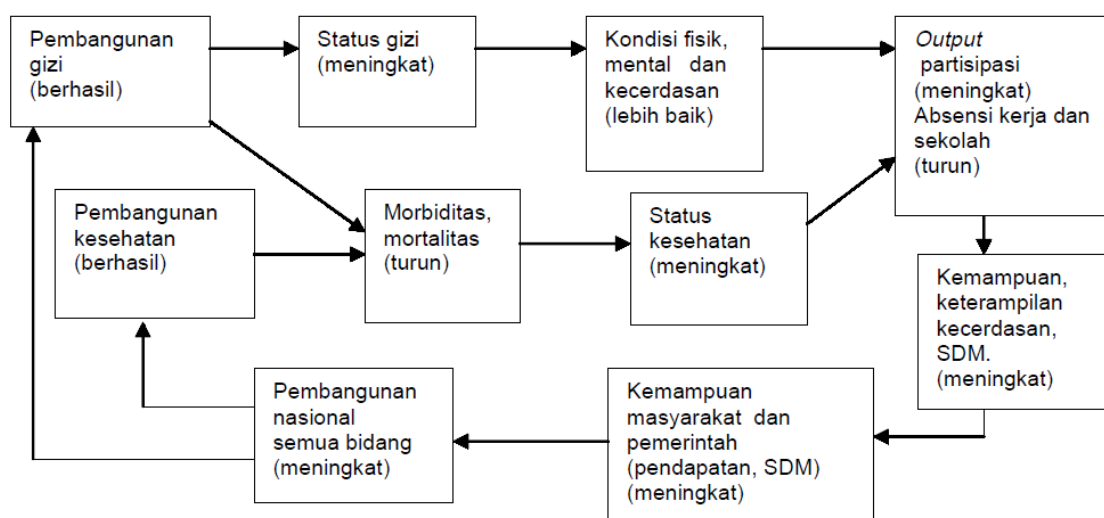
- c. Paling miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 270 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- 3) Bank Dunia: Bank Dunia mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan seseorang kurang dari US\$1 per hari (setara Rp8.500,00 per hari)
- 4) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN): mengukur kemiskinan berdasarkan kriteria Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS 1).
 - a. Kriteria Keluarga Pra KS yaitu keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan perintah agama dengan baik, minimum makan dua kali sehari, membeli lebih dari satu stel pakaian per orang per tahun, lantai rumah bersemen lebih dari 80%, dan berobat ke Puskesmas bila sakit.
 - b. Kriteria Keluarga Sejahtera 1 (KS 1) yaitu keluarga yang tidak berkemampuan untuk melaksanakan perintah agama dengan baik, minimal satu kali per minggu makan daging/telor/ikan, membeli pakaian satu stel per tahun, rata-rata luas lantai rumah 8 m² per anggota keluarga, tidak ada anggota keluarga umur 10 sampai 60 tahun yang buta huruf, semua anak berumur antara 5 sampai 15 tahun bersekolah, satu dari anggota keluarga mempunyai penghasilan rutin atau tetap, dan tidak ada yang sakit selama tiga bulan.

Penetapan pengukuran dan kriteria kemiskinan secara nasional sangat sulit. Masih diperlukan kajian yang dapat mengakomodasikan permasalahan kemiskinan yang kompleks baik dari segi ekonomi, budaya, sosial, psikologik, dan geografik yang sangat bervariasi di Indonesia. Hampir semua pendekatan dalam mengkaji kemiskinan masih berporos pada paradigma modernisasi (*modernisation paradigm*) yang dimotori oleh Bank Dunia. Paradigma ini bersandar pada teori-teori pertumbuhan ekonomi neo klasik (*orthodox neoclassical economics*) dan model yang berpusat pada produksi (*productioncentred model*). Sejak pendapatan nasional (GNP) mulai dijadikan indikator pembangunan tahun 1950-an, para ilmuwan sosial selalu merujuk pada pendekatan tersebut manakala berbicara masalah kemiskinan satu negara.

Pengukuran kemiskinan kemudian sangat dipengaruhi oleh perspektif *income poverty* yang menggunakan pendapatan sebagai satusatunya indikator garis kemiskinan. Di bawah kepemimpinan ekonom asal Pakistan, Mahbub Ul Haq, pada tahun 1990an UNDP memperkenalkan pendekatan *Human Development* yang diformulasikan dalam bentuk Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) dan Indeks Kemiskinan Manusia (*Human Poverty Index*). Dibandingkan dengan pendekatan yang dipakai Bank Dunia, pendekatan UNDP relatif lebih komprehensif karena bukan hanya mencakup dimensi ekonomi (pendapatan), melainkan juga pendidikan (angka melek huruf), dan kesehatan (angka harapan hidup). Pendekatan kemiskinan versi UNDP

berporos pada paradigma pembangunan populis atau kerakyatan (*popular development paradigm*) yang memadukan konsep pemenuhan kebutuhan dasar dari Paul Streeten dan teori kapabilitas yang dikembangkan peraih Nobel ekonomi 1998, Amartya Sen.

- B. **Kemiskinan dalam Dimensi Kesehatan.** Kemiskinan dalam banyak penelitian sangat berhubungan dengan tingginya angka kesakitan dan kematian. Tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan dan rendahnya kesempatan memperoleh berbagai fasilitas kesejahteraan sosial menyebabkan masyarakat miskin sulit memenuhi berbagai keperluan seperti makanan bergizi atau menangkai beragam penyakit. Kondisi ini menyebabkan tingginya angka kematian bayi di lingkungan mereka. Berbagai macam penyakit, seperti: malaria, tuberkulosis, penyakit mata, kwasiorkor banyak menyerang mereka sebagai akibat lemahnya daya tahan tubuh. Hal ini menyebabkan usia harapan hidup mereka pendek dan tingkat kematian mereka tinggi.



Gambar 3.2.
Keterkaitan antara Pembangunan Kesehatan dan Ekonomi

Sumber: Chriswardani Suryawati, 2005.

Gambar 3.2. menunjukkan apabila pembangunan kesehatan dan gizi berhasil, maka status kesehatan dan status gizi akan meningkat yang kemudian berakibat pada peningkatan kondisi fisik, mental, dan kecerdasan, sehingga output dan partisipasi lebih baik yang ditunjukkan dengan rendahnya absensi kerja dan sekolah. Kondisi tersebut tentu akan peningkatan kemampuan, keterampilan, dan kecerdasan, sehingga pendapatan individu, masyarakat, dan negara meningkat. Pendapatan ini kemudian menjadi salah satu sumber daya pembangunan kesehatan dan gizi. Tentu saja sebaliknya, hal tersebut tidak akan terjadi jika pembangunan kesehatan dan gizi tidak berhasil.

Dalam hal kesehatan, ketika berhadapan dengan kemiskinan seperti yang terjadi pada masa krisis ekonomi, reaksi masyarakat bermacam-macam, seperti: orang miskin cenderung

menghindari fasilitas rawat jalan, menunda pelayanan RS, menghindari penggunaan jasa spesialis yang mahal, cenderung memperpendek rawat inap, membeli separuh atau bahkan sepertiga obat yang diresepkan sehingga tidak menjalani pengobatan total, mencari pengobatan lokal yang kadang-kadang dapat menimbulkan efek berbahaya, para ibu cenderung melahirkan di rumah dengan bantuan dukun yang memperbesar risiko persalinan, penyakit menjadi kronis karena menghindari pengobatan yang mahal. Pasien gagal ginjal cenderung menunda, membatalkan atau dibatalkan dari pengobatan, pasien cenderung mengobati sendiri yang berakibat terjadi komplikasi, tingkat pengguguran kandungan meningkat karena biaya dan implikasi sosial ekonomi, pasien menolak atau menunda prosedur operasi karena ketiadaan biaya.

- C. **Kemiskinan dalam Dimensi Sosial dan Budaya.** Dimensi sosial dari kemiskinan diartikan sebagai kekurangan jaringan sosial dan struktur yang mendukung untuk mendapatkan kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat. Kekurangan jaringan tersebut disebabkan oleh dua faktor penghambat yaitu dari diri seseorang atau kelompok (misalnya karena tingkat pendidikan atau hambatan budaya), dan hambatan dari luar kemampuan seseorang (misalnya karena birokrasi atau peraturan resmi yang dapat mencegah mereka memanfaatkan kesempatan yang ada). Pada masyarakat di negara maju, proses peralihan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern berhasil dilakukan, tetapi pada masyarakat di negara sedang berkembang (dunia ketiga), ketika menuju modernitas mereka menghadapi hambatan sosial budaya berupa nilai-nilai tradisional yang sangat kuat dalam segala aspek kehidupan. Hal tersebut menyebabkan mereka hidup dalam keterbelakangan, tidak maju, dan miskin. Kuatnya nilai-nilai budaya tradisional menyebabkan kondisi kehidupan masyarakat menjadi statis, belum mengalami diferensiasi struktural sehingga perkembangan politik, sosial, ekonomi, dan budaya tidak mengalami kemajuan yang berarti. Pada masyarakat tradisional ditandai dengan struktur keluarga yang rumit dan tidak teratur, terdiri dari berbagai generasi, dan jumlah anggota keluarga sangat banyak. Keluarga bertanggung jawab pada kelangsungan keturunan, ekonomi rumah tangga, pendidikan, dan kesejahteraan. Pada keluarga modern biasanya dicirikan dengan anggota keluarga sedikit dan lebih produktif karena lembaga masyarakat yang ada telah berperan pada penyelenggaraan fungsi-fungsi dalam keluarga, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, ekonomi, dan keagamaan. Nilai-nilai budaya tradisional turut membentuk sikap mental masyarakat di negara sedang berkembang. Nilai budaya tradisional tersebut adalah mentalitas masyarakat yang belum siap membangun (tidak memiliki sikap *mental need for achievement*) dalam segala aspek. Kemiskinan muncul sebagai akibat nilai budaya yang dianut kaum miskin itu sendiri, yang berakar dari kondisi lingkungan yang serba miskin dan diturunkan dari generasi ke generasi (*cultural of poverty*). Kaum miskin telah memasyarakatkan nilai dan perilaku kemiskinan secara turun-temurun. Akibatnya, perilaku tersebut melanggengkan kemiskinan mereka, sehingga masyarakat yang hidup dalam kebudayaan kemiskinannya sulit untuk membebaskan diri dari kemiskinan. Telah dijelaskan

sebelumnya bahwa aspek budaya dan etnik juga berpengaruh memelihara kemiskinan. Pola hidup konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, adat istiadat yang konsumtif juga banyak mewarnai masyarakat pedesaan seperti berbagai pesta rakyat atau upacara perkawinan, kelahiran, dan bahkan kematian yang dibiayai di luar kemampuan karena prestise dan keharusan budaya. Hal ini seringkali mengakibatkan suatu keluarga terlibat rentenir atau menjual harta bendanya untuk mendapatkan dana penyelenggaraan pesta.

- D. **Kemiskinan Dalam Dimensi Sosial Politik.** Dimensi sosial politik dari kemiskinan lebih menekankan pada derajat akses terhadap kekuatan yang mencakup tatanan sistem sosial politik yang dapat menentukan alokasi sumber daya untuk kepentingan sekelompok orang atau tatanan sistem sosial yang menentukan alokasi penggunaan sumber daya. Kemiskinan politik merupakan gejala yang secara tidak langsung berpengaruh pada pengembangan kreativitas manusia dan masyarakat, yang pada gilirannya berpengaruh pada kualitas manusia. Kebijakan pemerintah dalam kerangka sosial politik disengaja atau tidak, sebagian di antaranya justru menyebabkan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan pendapat para teoritis bahwa masyarakat atau negara miskin itu bukan karena mereka miskin (*a country is a poor because it is poor*), tetapi karena kebijakan pemerintah yang salah (*a country is poor because of poor policies*). Beberapa kebijakan ekonomi yang memberi andil menciptakan kemiskinan di Indonesia, antara lain: kebijakan penetapan harga dasar gabah yang rendah, pemberian subsidi impor beras dan bahan makanan lain, mengakibatkan gairah petani untuk menanam padi menjadi turun. Strategi industrialisasi yang tidak terarah dengan mengabaikan sektor pertanian atau kebijakan ekonomi yang tidak memperhatikan keterkaitan antara pertumbuhan sektor pertanian dan industri, pembangunan lebih berkonsentrasi pada perkotaan, subsidi modal untuk sektor modern dan pengusaha papan atas padahal sektor ini bukan tempat usaha orang miskin, dan lain-lain. Di sisi lain, banyak negara sedang berkembang menggunakan isu kemiskinan dan pengentasan kemiskinan sebagai kartu kemenangan pemilihan umum (pemilu), walaupun pada kenyataannya setelah menang, isu tersebut belum tentu diwujudkan dalam program kerjanya.
- E. **Kemiskinan Dalam Dimensi Pendidikan, Agama, dan Budi Pekerti.** Keterkaitan kemiskinan dengan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut seharusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa. Tidak terkecuali, keadilan dalam memperoleh pendidikan harus diperjuangkan dan seharusnya pemerintah berada di garda terdepan untuk mewujudkannya. Penduduk miskin dalam konteks pendidikan sosial mempunyai kaitan terhadap upaya pemberdayaan, partisipasi, demokratisasi, dan kepercayaan diri, maupun kemandirian. Pendidikan nonformal perlu mendapatkan prioritas utama dalam mengatasi kebodohan, keterbelakangan, dan ketertinggalan sosial ekonominya. Pendidikan informal dalam rangka

pendidikan sosial dengan sasaran orang miskin selaku kepala keluarga (individu) dan anggota masyarakat tidak lepas dari konsep *learning society adult education experience learning* yang berupa pendidikan luar sekolah, kursus keterampilan, penyuluhan, pendidikan dan latihan, penataran atau bimbingan, dan latihan. Pendidikan agama dan budi pekerti sangat penting untuk penanaman nilai-nilai agamawi dan budi pekerti terutama bagi anak-anak dan pemuda. Strategi pengentasan kemiskinan seharusnya tidak terpaku pada aspek ekonomi dan fisik saja, tetapi aspek nonfisik (rohaniah) juga perlu mendapatkan porsi yang cukup dalam kebijakan ini.

F. **Kemiskinan Dalam Dimensi Perdamaian Dunia.** *Millenium Development Goals on Development and Eradication of Poverty in 2015* telah dideklarasikan oleh para pemimpin negara-negara di dunia pada tahun 2000. Para pemimpin dunia berjanji bekerja sama untuk mencapai target dalam pembangunan dan mengurangi kemiskinan di tahun 2015. Komitmen global tersebut mengamanatkan semua negara anggota PBB agar berusaha lebih keras untuk meningkatkan pendapatan yang selama ini tidak layak, kelaparan, ketimpangan gender, kerusakan lingkungan, hambatan untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan air bersih. Termasuk di dalam kesepakatan global tersebut adalah mengurangi beban hutang, meningkatkan bantuan, perdagangan, dan transfer teknologi kepada negara-negara miskin. Delapan tujuan dan 18 target telah dicanangkan dalam Kesepakatan Global Untuk Pembangunan dan Memerangi Kemiskinan. Delapan tujuan tersebut yaitu:

- 1) memerangi kemiskinan dan kelaparan (*eradicate poverty and hunger*);
- 2) mencapai pendidikan dasar bagi seluruh dunia (*achieve universal primary education*);
- 3) meningkatkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan (*promote gender equality and empower women*);
- 4) menurunkan angka kematian anak (*reduce child mortality*);
- 5) meningkatkan kesehatan ibu (*improve maternal health*);
- 6) memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit-penyakit lainnya (combat HIV/AIDS, malaria and other diseases);
- 7) mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan (*ensure environmental sustainability*);
- 8) mengembangkan kemitraan dunia untuk pembangunan (develop a global partnership for development).

3.1.3. Kerentanan

Kerentanan digambarkan dengan mengulas kurva sebaran konsumsi penduduk Indonesia yang sebagian besar berada pada sekitar garis kemiskinan, dengan kondisi ini jika garis kemiskinan meningkat 20 persen saja maka penduduk yang jatuh ke bawah garis kemiskinan atau menjadi miskin dapat bertambah dua kali lipat atau 100 persen. Di Indonesia jumlah penduduk rentan miskin tiga kali lipat dari jumlah penduduk miskin saat ini.

3.1.4. Kesenjangan

Kesenjangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan pendapatan dapat terjadi akibat beberapa hal, misalnya

tingkat pembangunan, heterogenitas, etnis, kediktatoran dan pemerintah yang gagal menghargai *property right* Geser dalam Hajiji (2010). Kesenjangan pendapatan ini biasanya diukur melalui:

- 1) Kurva Lorenz. Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk secara kumulatif pula. Kurva ini terletak disebuah bujur sangkar yang disisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi dasarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang atau tidak merata. (Todaro, 2006)

Kurva Lorenz digambarkan *pada* sebuah bidang persegi/bujur sangkar dengan bantuan garis diagonalnya. Garis horizontal menunjukkan persentase penduduk penerima pendapatan, sedangkan garis vertikal adalah persentase pendapatan. Semakin dekat kurva ini dengan diagonalnya, berarti ketimpangan semakin rendah dan sebaliknya semakin melebar kurva ini menjauhi diagonal berarti ketimpangan yang terjadi semakin tinggi (Todaro, 2006:237).

- 2) Indeks Gini (*Gini Index*). Gini atau lengkapnya Corrado Gini merumuskan suatu ukuran untuk menghitung tingkat ketimpangan pendapatan personal secara agregatif yang diterima diatas tingkat tertentu. Hasil temuannya sering disebut sebagai *gini coefficient* atau indeks gini.

Menurut Gini setiap kurva Lorenz dapat dihitung nilai angkanya yang selanjutnya disebut angka Gini dengan cara membagi luas yang dibentuk kurva Lorenz tersebut dengan total pendapatan. Semakin kecil Gini index, maka semakin merata, sedang Gini index yang semakin besar menunjukkan distribusi pendapatan yang makin tidak merata. Maksimum dan minimum nilai G adalah $0 \leq G \leq 1$ (Todaro, 2006).

- 3) Indeks Williamson. Jeffrey G. Williamson (1965) meneliti hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan yang sedang berkembang. Ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih "matang", dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan (Kuncoro, 2004).

Indeks Williamson adalah suatu indeks yang didasarkan pada ukuran penyimpangan pendapatan per kapita penduduk tiap wilayah dan pendapatan per kapita nasional. Jadi, Indeks Williamson ini merupakan suatu modifikasi dari standard deviasi. Dengan demikian,

makin tinggi Indeks Williamson berarti kesenjangan wilayah semakin besar, dan sebaliknya (Damarjati: 2010).

- 4) Kriteria Bank Dunia. Bank Dunia yang bekerjasama dengan *Institute of Development Studies* menentukan kriteria tentang penggolongan distribusi pendapatan ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi. Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:
 - a) Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
 - b) Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.
 - c) Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah (Bank Dunia dalam Makmur dkk (2011)).

Sementara kesenjangan sosial menurut Abad Badruzaman (2009) diartikan suatu ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat sehingga menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Atau dapat juga diartikan suatu keadaan dimana orang kaya mempunyai kedudukan lebih tinggi dan lebih berkuasa dari pada orang miskin. Kesenjangan sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Kemiskinan. Kemiskinan adalah penyebab utama terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat. Banyak orang menganggap bahwa kemiskinan adalah suatu surat takdir atau mereka mereka miskin karena malas, tidak kreatif, dan tidak punya etos kerja. Inti kemiskinan terletak pada kondisi yang disebut perangkat kemiskinan. Perangkat itu terdiri dari :
 - a) Kemiskinan itu sendiri
 - b) Kelemahan fisik
 - c) Keterasingan atau kadar isolasi
 - d) Kerentaan
 - e) KetidakberdayaanBeberapa ciri kebudayaan kemiskinan adalah :
 - a. Fatalisme
 - b. Rendahnya tingkat aspirasi
 - c. Rendahnya kemauan mengejar sasaran
 - d. Kurang melihat kemajuan pribadi
 - e. Perasaan ketidak berdayaan/ketidakmampuan Perasaan untuk selalu gagal

- g. Perasaan menilai diri sendiri negative
- h. Pilihan sebagai posisi pekerja kasar
- i. Tingkat kompromis yang menyedihkan

Secara struktural, kemiskinan dapat dimaknai sebagai kondisi yang tercipta akibat ketimpangan kepemilikan modal dan alat produksi. Kemiskinan di sini diartikan sebagai ketidakberdayaan sekelompok masyarakat atas sistem pemerintahan yang tereksplorasi. Hal ini menggambarkan bahwa kemiskinan adalah sebagai suatu kondisi dari pola hidup, budaya dan pola-pola interaksinya bukanlah sesuatu yang terberi, namun tercipta karena adanya peran struktur yang menindas. Seseorang menjadi miskin bukan karena malas, bodoh dan atau tidak punya etos kerja yang tinggi, tetapi lebih karena terdapat struktur sosial yang timpang. Perspektif ini lebih dikenal sebagai kemiskinan struktural. Golongan kaum miskin struktural ini terdiri dari :

- i. Para petani yang tidak memiliki tanah sendiri
 - ii. Petani yang tanah miliknya begitu kecil sehingga hasilnya tidak cukup untuk memberi makan kepada dirinya sendiri dan keluarganya
 - iii. Kaum buruh yang tidak terpelajar dan tidak terlatih (unskilled labourers)
 - iv. Para pengusaha tanpa modal dan tanpa fasilitas dari pemerintah (golongan ekonomi lemah).
- 2) Kurangnya lapangan kerja Lapangan pekerjaan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perekonomian masyarakat, sedangkan perekonomian menjadi faktor terjadinya kesenjangan sosial. Sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia menjadikan pengangguran yang sangat besar di Indonesia dan menyebabkan perekonomian masyarakat bawah semakin rapuh. Salah satu karakteristik tenaga kerja di Indonesia adalah laju pertumbuhan tenaga kerja lebih tinggi ketimbang laju pertumbuhan lapangan kerja.

3.2. KONDISI KEMISKINAN DAERAH

Profil kemiskinan daerah dalam kajian ini menggambarkan bagaimana kondisi kemiskinan daerah secara umum dengan melihat capaian setiap indikator utama pada kemiskinan konsumsi dan kemiskinan non-konsumsi. **Indikator utama kemiskinan konsumsi** menurut BPS meliputi:

- a) persentase penduduk miskin:
- b) jumlah penduduk miskin:
- c) indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan.

Beberapa aturan (konsep, sumber data dan rumus perhitungan) yang digunakan oleh BPS dalam melihat profil kemiskinan ini diantaranya adalah:

A. Penduduk Miskin

Konsep: Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan

dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Sumber Data: Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

B. Garis Kemiskinan (GK)

Konsep:

- 1) Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
- 2) Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)
- 3) Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Sumber Data: Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Rumus Penghitungan :

$$GK = GKM + GKNM$$

Dimana

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

$GKNM$ = Garis Kemiskinan Non Makan

Teknik penghitungan GKM

- 1) Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (*reference population*) yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
- 2) Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan

dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :

$$GKM^*_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

Dimana :

GKM^*_{jp} : Gris Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori) provinsi p .

P_{jkp} : Rata-rata harga komoditi k di daerah j dan provinsi p .

Q_{jkp} : Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p .

V_{jkp} : Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p .

j : Daerah (perkotaan atau pedesaan).

p : Provinsi ke- p .

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga :

$$\overline{HK}_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

Dimana :

K_{jkp} : Kalori dari komoditi k di daerah j di provinsi p

$\overline{HK}_{jp}$: Harga rata-rata kalori di daerah j di provinsi p

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dsan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk.

Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan. Nilai kebutuhan minimum perkomoditi /sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan

yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} V_{kjp}$$

$GKNM_{jp}$: Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah j dan provinsi p

V_{kjp} : Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah j dan provinsi p

r_{kj} : Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah j

k : Jenis komoditi non-makanan terpilih

j : Daerah (Perkotaan atau perdesaan)

p : Provinsi ke- p

C. Persentase Penduduk Miskin

Konsep :

Head Count Index (HCI-P0), adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).

Sumber Data: Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Rumus Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$\alpha = 0$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

D. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Konsep: Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Sumber Data :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Rumus Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$\alpha = 1$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

E. Indeks Keparahan Kemiskinan

Konsep :

Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Sumber Data :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Rumus Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$\alpha = 2$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

3.2.1. Kemiskinan Konsumtif

3.2.1.1. Garis Kemiskinan dan Klasifikasi Keluarga

Garis Kemiskinan merupakan suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan ini bisa mempengaruhi besar kecilnya jumlah penduduk miskin. Besarnya garis kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat antara tahun 2012-2016 bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.1.
Garis Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2012-2017

Indikator Kemiskinan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Garis Kemiskinan (Rp)	263.840	273.467	279.080	293.436	319.064	338.230

<https://kobarkab.bps.go.id/site/resultTab>, Kobar dalam Angka 2018.

Selama 2012 – 2015, Garis Kemiskinan naik sebesar 17,30% persen, yaitu dari Rp 263.839,- per kapita per bulan pada 2014 menjadi Rp 319.064,- per kapita 2015. Pada September 2015 peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Di tingkat provinsi Kalimantan tengah selama Maret 2015 – Maret 2016, Garis Kemiskinan naik sebesar 6,79 persen, yaitu dari Rp 349.727,- per kapita per bulan pada Maret 2015 menjadi Rp 373.484,- per kapita per bulan pada Maret 2016 (Tabel III.2). Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Maret 2016, sumbangan GKM terhadap GK cukup besar, yaitu 80,19 persen, sedangkan GKBM hanya sebesar 19,81 persen saja. Besarnya perubahan garis kemiskinan di perkotaan dan perdesaan di tingkat provinsi Kalimantan Tengah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.2.
Garis Kemiskinan dan Perubahannya Menurut Daerah
di Provinsi Kalimantan Tengah, 2015 –2016

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Perkotaan</u>			
Maret 2015	251.976	76.698	328.674
Maret 2016	264.149	84.105	348.254
Perubahan (%)	4,83	9,66	5,96
<u>Perdesaan</u>			
Maret 2015	296.856	63.814	360.670
Maret 2016	316.546	70.656	387.202
Perubahan (%)	6,63	10,72	7,36
<u>Kota+Desa</u>			
Maret 2015	281.506	68.220	349.727
Maret 2016	299.485	73.999	373.484
Perubahan (%)	6,39	8,47	6,79

Sumber: Berita Resmi Statistik No. 07/07/62/Th. X, 18 Juli 2016

Pada Maret 2016, komoditi makanan yang memberi sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan adalah beras, yaitu sebesar 23,68 persen di perkotaan dan 31,17 persen di perdesaan. Jika kita lihat secara berurutan sepuluh komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar di perkotaan terdiri dari beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, gula pasir, mie instan, kue basah, bawang merah, kopi bubuk dan kopi instan (sachet), dan roti. Sedangkan di perdesaan terdiri dari beras, rokok kretek filter, gula pasir, daging ayam ras, telur ayam ras, mie instan, kue basah, bawang merah, kopi bubuk dan kopi instan (sachet), dan cabe rawit. Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar untuk Garis Kemiskinan adalah perumahan (9,32 persen di perkotaan dan 7,60 persen di perdesaan). Kemudian jika kita lihat secara berurutan lima komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar di perkotaan terdiri dari perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi. Sedangkan di perdesaan terdiri dari perumahan, bensin, listrik, perlengkapan mandi, dan pendidikan, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.3.
Daftar Komoditi yang Memberi Pengaruh Besar pada Kenaikan Garis Kemiskinan, di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016

Perkotaan		Perdesaan	
Komoditi	%	Komoditi	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Makanan</u>			
Beras	23,68	Beras	31,17
Rokok kretek filter	11,14	Rokok kretek filter	10,40
Telur ayam ras	4,52	Gula pasir	4,38
Daging ayam ras	4,47	Daging ayam ras	3,84
Gula pasir	3,03	Telur ayam ras	3,69
Mie instan	3,00	Mie instan	3,12
Kue basah	2,80	Kue basah	2,61
Bawang merah	2,21	Bawang merah	2,43
Kopi bubuk & kopi instan (<i>sachet</i>)	1,72	Kopi bubuk & kopi instan (<i>sachet</i>)	1,91
Roti	1,48	Cabe rawit	1,29
<u>Bukan Makanan</u>			
Perumahan	9,32	Perumahan	7,60
Bensin	2,86	Bensin	2,08
Listrik	2,34	Listrik	1,05
Pendidikan	1,42	Perlengkapan mandi	1,02
Perlengkapan mandi	1,26	Pendidikan	0,86

Sumber: Berita Resmi Statistik No. 07/07/62/Th. X, 18 Juli 2016

Komoditi makanan dari tabel di atas, yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan, di antaranya adalah beras, **rokok kretek filter**, telur ayam ras, daging ayam ras, gula pasir, mie instan, kue basah, bawang merah, dan kopi bubuk/instan. Sedangkan, untuk komoditi bukan makanan di antaranya adalah biaya perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Tabel III.4.
Garis Kemiskinan Kabupaten Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2005-2017

Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kotawaringin Barat	152.316	160.836	166.497	186.618	212.060	238.987	253.549	263.840	273.467	279.080	293.436	319.064	338.230
KotaKotawaringin Timur	144.534	162.068	173.717	217.684	219.104	246.925	261.807	281.887	300.929	312.363	325.234	353.640	381.776
Kapuas	101.118	115.714	125.410	166.944	169.307	195.064	205.852	220.256	235.187	246.679	252.866	266.943	283.222
Barito Selatan	143.364	165.281	179.841	213.197	227.118	261.670	275.729	296.750	311.166	322.062	333.917	355.341	377.322
Barito Utara	139.576	162.490	177.714	206.022	232.267	267.603	281.756	317.497	355.065	385.348	408.241	420.100	446.807
Sukamara	178.551	195.805	207.268	230.697	240.051	270.532	287.692	315.574	344.545	362.337	384.739	418.026	427.101
Lamandau	153.648	174.853	188.940	214.994	219.016	246.826	262.727	286.001	312.204	328.293	350.294	380.888	409.912
Seruyan	133.722	141.938	147.397	178.657	225.683	254.340	268.421	292.912	321.392	338.969	357.090	355.165	415.793
Katingan	137.646	154.532	165.750	192.808	234.586	264.373	273.703	299.427	325.773	341.896	356.695	387.592	412.113
Pulang Pisau	148.202	152.487	155.334	205.288	210.428	242.441	255.595	275.940	294.250	308.323	314.673	387.848	347.878
Gunung Mas	131.129	161.768	182.124	190.043	216.805	249.789	263.356	288.794	317.979	341.141	356.866	335.169	388.415
Barito Timur	146.207	172.697	190.296	232.539	250.920	289.094	304.788	338.467	373.579	401.513	415.710	442.068	467.091
Murung Raya	136.661	153.539	164.753	210.392	236.786	272.809	291.433	320.856	328.986	364.994	378.062	402.682	421.302
Palangka Raya	152.666	159.875	164.665	191.951	193.662	223.125	235.187	258.381	281.323	299.328	307.796	324.082	345.417
Kalimantan Tengah	136.309	151.905	162.266	197.325	212.268	215.466	256.245	277.407	307.698	330.869	349.727	373.484	401.537

<https://kalteng.bps.go.id/dynamictable/2017/06/22/228/garis-kemiskinan-rp-kapita-bulan-menurut-kabupaten-kota-2003-2017-.html>

3.2.1.2. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin di Kotawaringin Barat pada Tahun 2012-2016 secara umum dapat dikatakan lebih rendah dibanding dengan persentase di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah antara 5,66%-6,19% dan persentase di tingkat nasional yaitu 10,64%-11,46%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel III.5.
Persentase Posisi Penduduk Miskin (P0) di Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap
Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lainnya
Tahun 2012-2017

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (Persen)					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kalimantan Tengah	6,19	6,23	6,07	5,94	5,66	5,37
Kotawaringin Barat	5,63	5,44	5,27	5,07	4,96	4,52
Kotawaringin Timur	6,90	6,85	6,67	6,42	6,32	6,24
Kapuas	6,10	6,19	6,12	6,03	5,70	5,32
Barito Selatan	7,25	6,26	6,13	5,07	4,58	4,44
Barito Utara	6,10	5,98	5,88	5,93	5,38	5,21
Sukamara	5,36	4,56	4,29	4,32	3,73	3,36
Lamandau	4,66	4,87	4,66	3,95	3,80	3,52
Seruyan	7,91	8,77	8,39	8,50	8,08	7,46
Katingan	6,10	6,55	6,42	6,53	6,23	5,78
Pulang Pisau	5,24	5,45	5,35	5,65	5,49	5,19
Gunung Mas	6,56	6,90	6,70	6,17	5,85	5,83
Barito Timur	8,52	8,83	8,55	8,41	7,64	7,17
Murung Raya	5,78	6,44	6,24	6,57	6,32	5,88
Palangka Raya	4,24	3,94	3,81	3,91	3,75	3,62

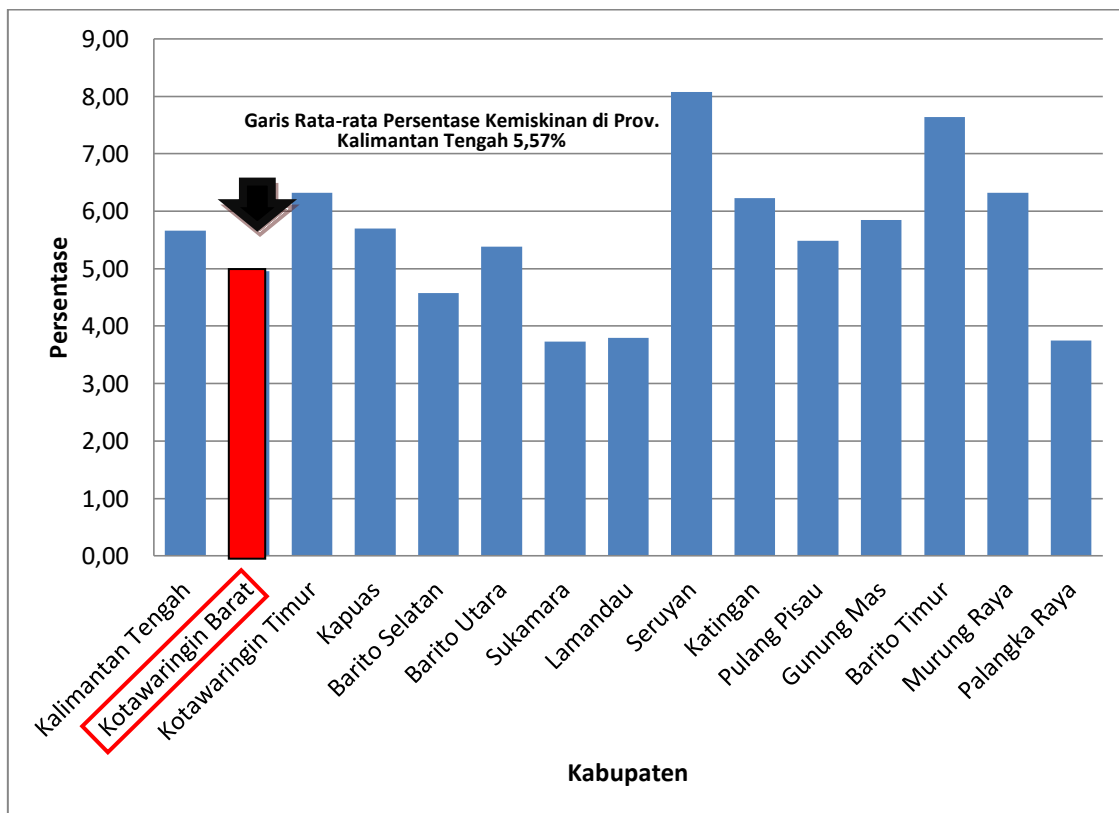
<https://kalteng.bps.go.id/dynamictable/2017/06/22/227/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-2003-2017.html>Sumber: <https://kobarkab.bps.go.id/site/resultTab>

Tabel III.6.
Perubahan Posisi Persentase Angka Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Angka Provinsi dan Kabupaten Lainnya
di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2017

No	Provinsi	2012	Provinsi	2013	Provinsi	2014	Provinsi	2015	Provinsi	2016	Provinsi	2017
A	Kalimantan Tengah	6,19	Kalimantan Tengah	5,94	Kalimantan Tengah	6,07	Kalimantan Tengah	5,94	Kalimantan Tengah	5,66	Kalimantan Tengah	5,37
B	Kabupaten	%	Kabupaten	%	Kabupaten	%	Kabupaten	%	Kabupaten	%	Kabupaten	%
1	Palangka Raya	4,24	Palangka Raya	3,94	Palangka Raya	3,81	Palangka Raya	3,91	Sukamara	3,73	Sukamara	2,36
2	Lamandau	4,66	Sukamara	4,56	Sukamara	4,29	Lamandau	3,95	Palangka Raya	3,75	Palangka Raya	3,62
3	Pulang Pisau	5,24	Lamandau	4,87	Lamandau	4,66	Sukamara	4,32	Lamandau	3,80	Lamandau	3,52
4	Sukamara	5,36	Kotawaringin Barat ↑	5,44	Kotawaringin Barat	↓ 5,27	Kotawaringin Barat	↓ 5,07	Barito Selatan	4,58	Barito Selatan	4,44
5	Kotawaringin Barat	5,63	Pulang Pisau	5,45	Pulang Pisau	5,35	Barito Selatan	5,07	Kotawaringin Barat	↓ 4,96	Kotawaringin Barat	4,52
6	Murung Raya	5,78	Barito Utara	5,98	Barito Utara	5,88	Pulang Pisau	5,65	Barito Utara	5,38	Barito Utara	5,21
7	Kapuas	6,10	Kapuas	6,19	Kapuas	6,12	Barito Utara	5,93	Pulang Pisau	5,49	Pulang Pisau	5,19
8	Barito Utara	6,10	Barito Selatan	6,26	Barito Selatan	6,13	Kapuas	6,03	Kapuas	5,70	Kapuas	5,32
9	Katingan	6,10	Murung Raya	6,44	Murung Raya	6,24	Gunung Mas	6,17	Gunung Mas	5,85	Gunung Mas	5,83
10	Gunung Mas	6,56	Katingan	6,55	Katingan	6,42	KotaKotawaringin Timur	6,42	Katingan	6,23	Katingan	5,78
11	KotaKotawaringin Timur	6,90	KotaKotawaringin Timur	6,85	KotaKotawaringin Timur	6,67	Katingan	6,53	KotaKotawaringin Timur	6,32	KotaKotawaringin Timur	6,24
12	Barito Selatan	7,25	Gunung Mas	6,90	Gunung Mas	6,70	Murung Raya	6,57	Murung Raya	6,32	Murung Raya	5,88
13	Seruyan	7,91	Seruyan	8,77	Seruyan	8,39	Barito Timur	8,41	Barito Timur	7,64	Barito Timur	7,17
14	Barito Timur	8,52	Barito Timur	8,83	Barito Timur	8,55	Seruyan	8,50	Seruyan	8,08	Seruyan	7,46

Sumber: diolah dari tabel III.5

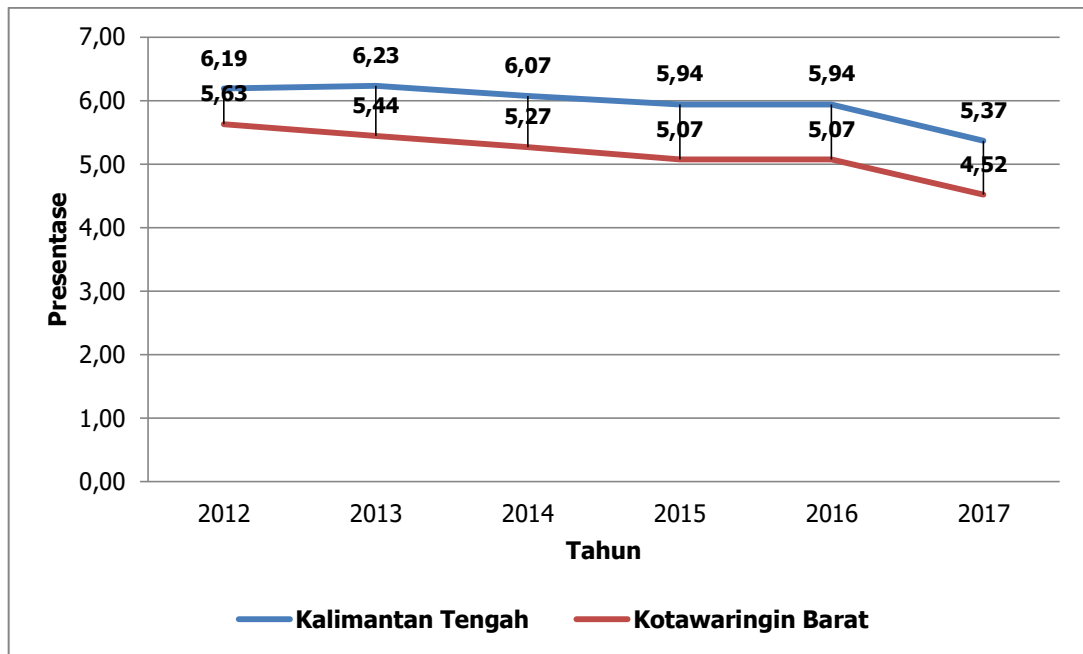
Secara umum angka prosentase di atas untuk Kotawaringin Barat juga berada di bawah posisi tiga kabupaten lainnya yaitu kabupaten Palangkaraya, Lamandau dan Sukamara. Posisi persentase angka kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat pada awal tahun analisis (2012) berada di peringkat ke 5 dan naik ke peringkat 4 pada tahun 2013-2015. Peringkat ini pada tahun 2016 mengalami penurunan satu poin ke peringkat 4 walaupun secara prosentase angka kemiskinan terus mengalami penurunan.



Gambar 3.3.
Grafik Posisi Relatif Pesentase Penduduk Miskin (Persen)
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

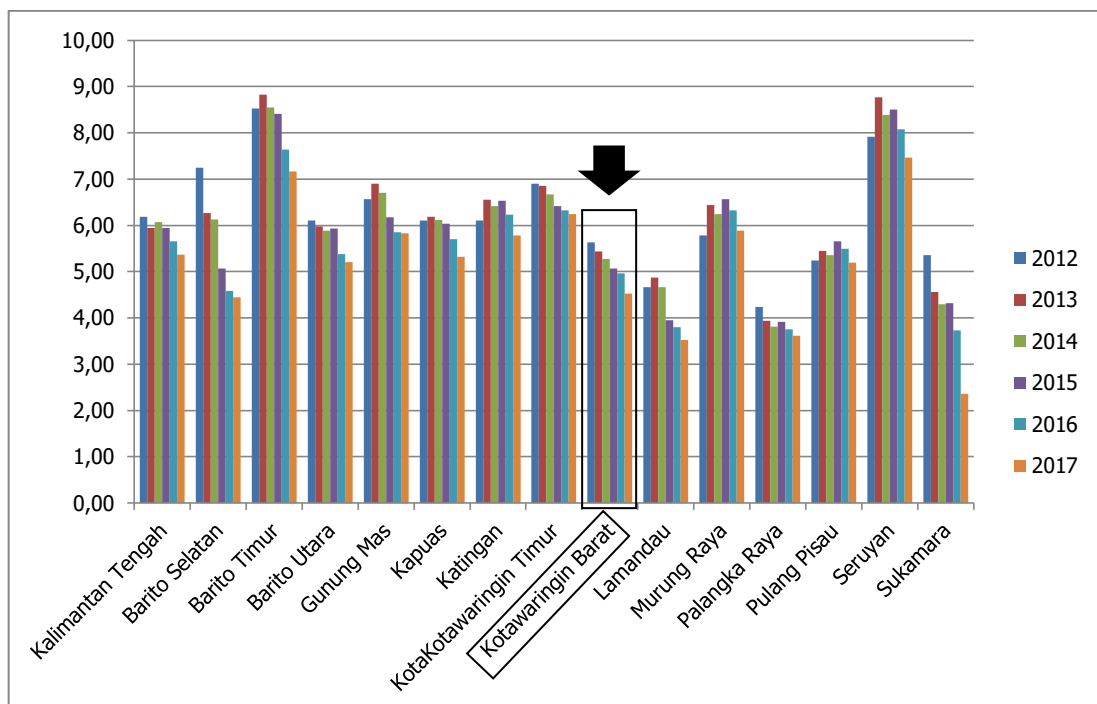
Sumber : Diolah dari tabel III.5

Angka persentase kemiskinan di Kabupaten ini, juga mengalami penurunan tiap tahunnya berkisar antara 0,11%-0,20% pertahun dari tahun 2012-2016. Tahun 2012 sebesar 5,63%, tahun 2013 sebesar 5,44% (turun 0,19%), tahun 2014 sebesar 5,27% (turun 17%), tahun 2015 sebesar 5,07% (turun 20%) dan tahun 2016 sebesar 4,96% (turun 0,11%) seperti pada gambar berikut ini.



Gambar 3.4.
Grafik Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (Persen)
Kab. Kotawaringin Barat terhadap Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2012-2017

Sumber : Diolah dari tabel III.5

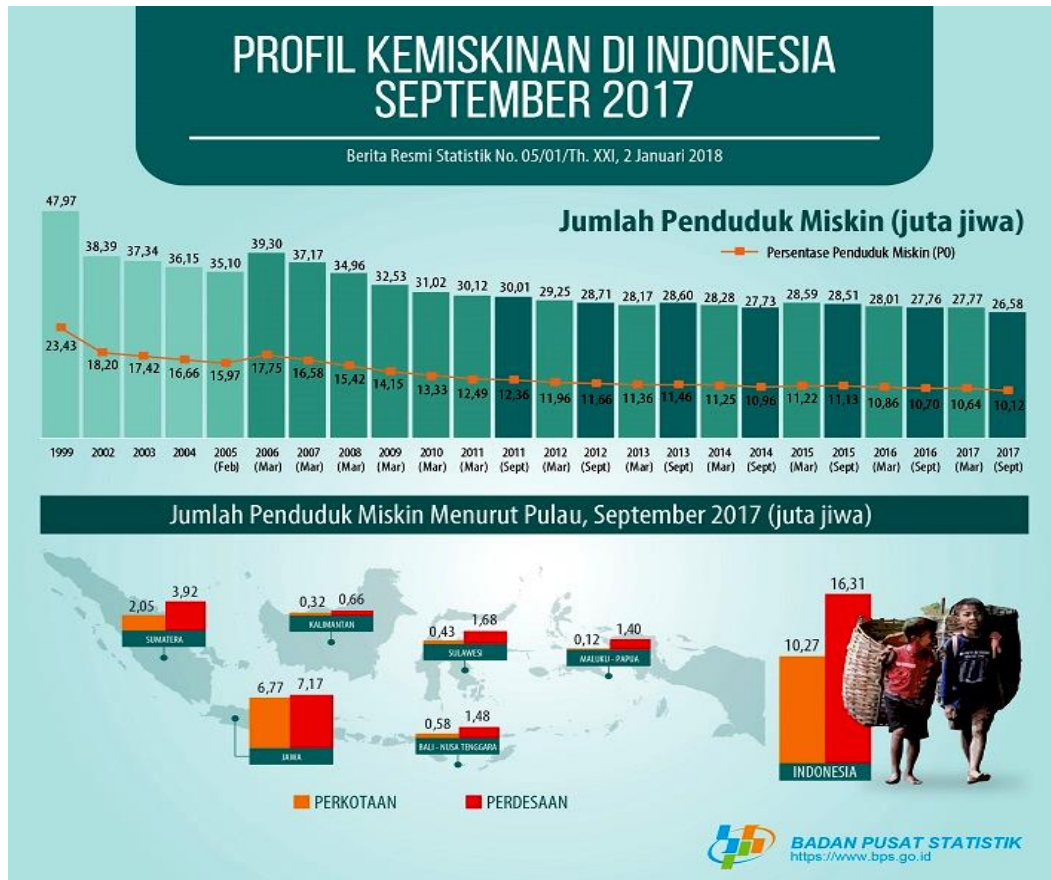


Gambar 3.5.
Grafik Posisi Relatif Pesentase Penduduk Miskin (Persen)
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017

Sumber : Diolah dari tabel III.6

3.2.1.3. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin secara nasional selama 18 tahun terus mengalami penurunan dari 47,97 juta jiwa (23,43%) di tahun 1999 menjadi 27,77 juta jiwa (10,17) di tahun 2017 (lihat gambar 3.4). Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2013 sempat mengalami kenaikan, setelah itu secara perlahan mengalami penurunan.



Gambar 3.6.
Profil Kemiskinan di Indonesia
Tahun 2017

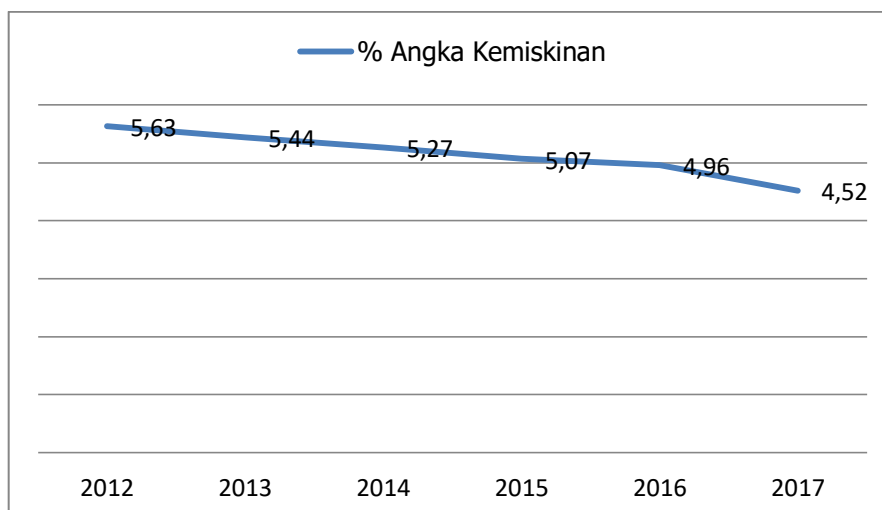
<https://www.bps.go.id/website/images/BRS-KEMISKINAN-JAN-2018-ind.jpg>

Kondisi perkembangan jumlah penduduk miskin antar waktu di Kotawaringin Barat walaupun menurun prosentasenya, akan tetapi jika dilihat dari sisi jumlah penduduk miskin itu sendiri mengalami kenaikan sebesar 0,1%. Adanya peningkatan penduduk miskin di tahun 2016 ini berkaitan.

Tabel III.7.
Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2017

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (Persen)					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kalimantan Tengah	6,19	6,23	6,07	5,94	5,66	5,37
Kotawaringin Barat	5,63	5,44	5,27	5,07	4,96	4,52
Kotawaringin Timur	6,90	6,85	6,67	6,42	6,32	6,24
Kapuas	6,10	6,19	6,12	6,03	5,70	5,32
Barito Selatan	7,25	6,26	6,13	5,07	4,58	4,44
Barito Utara	6,10	5,98	5,88	5,93	5,38	5,21
Sukamara	5,36	4,56	4,29	4,32	3,73	3,36
Lamandau	4,66	4,87	4,66	3,95	3,80	3,52
Seruyan	7,91	8,77	8,39	8,50	8,08	7,46
Katingan	6,10	6,55	6,42	6,53	6,23	5,78
Pulang Pisau	5,24	5,45	5,35	5,65	5,49	5,19
Gunung Mas	6,56	6,90	6,70	6,17	5,85	5,83
Barito Timur	8,52	8,83	8,55	8,41	7,64	7,17
Murung Raya	5,78	6,44	6,24	6,57	6,32	5,88
Palangka Raya	4,24	3,94	3,81	3,91	3,75	3,62

Sumber: Provinsi Kalteng dalam angka 2018



Gambar 3.7.
Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017 (ribu jiwa)

Sumber: Tabel III.7 dan Kobar dalam Angka, 2018

Tabel III.8.
Posisi Jumlah Penduduk Miskin di Kotawaringin Barat Berdasarkan Kelompok,
Tahun 2012-2016

Kecamatan	Jumlah	Keluarga Sejahtera	Pra Sejahtera
Kotawaringin Lama	4 436	823	3 613
Arut Selatan	22 224	2 014	20 210
Kumai	12 713	4 071	8 642
Pangkalan Banteng	6 123	325	5 798
Pangkalan Lada	7 058	1 031	6 027
Arut Utara	-	-	-
Kotawaringin Barat	52 554	8 264	44 290

<https://kobarkab.bps.go.id/site/resultTab>

3.2.1.4. Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan tentang program kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Pada periode Maret 2015 – Maret 2016, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 0,886 menjadi 0,859. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun dari 0,214 menjadi 0,196 pada periode yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin menyempit.

Tabel III.9.
Tabel Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2017

Kabupaten/ Kota	2016					2017				
	Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribuan jiwa)	P0	P1	P2	GJ (Rp/Kap/Bln)	Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribuan jiwa)	P0	P1	P2	GJ (Rp/Kap/Bln)
Kotawaringin Barat	14.11	4.96	0.77	0.16	319,064	13.27	4.52	0.57	0.11	338,230
Kotawaringin Timur	27.39	6.32	0.80	0.18	553,640	27.70	6.24	0.76	0.17	381,776
Kapuas	19.96	5.70	0.60	0.10	266,943	18.80	5.32	0.92	0.20	283,222
Barito Selatan	6.09	4.58	0.50	0.09	355,341	5.95	4.44	0.48	0.09	377,932
Barito Utara	6.90	5.38	0.71	0.15	420,100	6.72	5.21	0.55	0.10	446,807
Sukamara	2.12	3.73	0.62	0.19	418,026	1.99	3.36	0.38	0.08	427,101
Lamandau	2.88	3.80	0.70	0.21	380,888	2.74	3.52	0.46	0.09	409,912
Seruyan	14.57	8.08	1.37	0.33	387,592	14.04	7.46	0.99	0.20	414,798
Katingan	10.10	6.23	0.85	0.19	387,848	9.51	5.78	0.92	0.27	412,113
Pulang Pisau	6.88	5.49	0.74	0.14	335,165	6.54	5.19	0.72	0.18	347,878
Gunung Mas	6.55	5.85	0.60	0.13	365,198	6.67	5.82	0.72	0.12	388,415
Barito Timur	8.88	7.64	1.29	0.34	442,068	8.56	7.17	0.97	0.21	467,091
Murung Raya	7.10	6.32	1.02	0.23	402,682	6.75	5.88	0.58	0.09	421,903
Kota Palangkaraya	9.96	3.75	0.41	0.06	324,082	9.91	3.62	0.51	0.14	345,417
Provinsi Kalimantan Tengah	143.49	5.66	0.86	0.20	373,484	139.16	5.37	0.84	0.21	401,537

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2018

Tabel III.10.
Posisi Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap
Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2012-2016

Kabupaten/Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan			
	2016	2014	2013	2012
Kalimantan Tengah	0.86	0.97	1.02	1.08
Kotawaringin Barat	0.77	0.38	0.61	0.95
Kotawaringin Timur	0.80	0.58	0.71	0.55
Kapuas	0.60	0.85	1.14	0.42
Barito Selatan	0.50	0.85	0.92	0.76
Barito Utara	0.71	0.68	0.57	0.71
Sukamara	0.62	0.53	0.79	0.74
Lamandau	0.70	0.67	0.61	0.45
Seruyan	1.37	1.16	1.02	1.21
Katingan	0.85	1.03	0.85	1.21
Pulang Pisau	0.74	0.55	1.11	0.84
Gunung Mas	0.60	0.56	0.83	1.34
Barito Timur	1.29	1.48	1.47	1.64
Murung Raya	1.02	0.59	0.88	0.73
Palangka Raya	0.41	0.41	0.48	0.46

Sumber: <https://kobarkab.bps.go.id/site/resultTab>

Dari Tabel di atas terlihat angka rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan untuk Kabupaten Kotawaringin Barat jauh lebih kecil dibanding indeks yang sama di tingkat provinsi. Sementara posisi terhadap kabupaten yang lain, mengalami perubahan baik naik ke posisi lebih kecil maupun menurun ke posisi lebih besar, hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi Garis Kemiskinan.

Tabel III.11.

Perubahan Posisi Tingkat Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2016

Provinsi	Indeks Kedalaman Kemiskinan						
	2012		2013		2014		2016
Kalimantan Tengah	0,27	Kalimantan Tengah	0,31	Kalimantan Tengah	0,25	Kalimantan Tengah	0,20
Kabupaten/Kota	2012	Kabupaten/Kota	2013	Kabupaten/Kota	2014	Kabupaten/Kota	2016
Lamandau	0,06	Barito Utara	0,09	Kotawaringin Barat	0,06	Palangka Raya	0,06
Kota Kotawaringin Timur	0,08	Palangka Raya	0,09	Gunung Mas	0,07	Barito Selatan	0,09
Kapuas	0,08	Kotawaringin Barat	0,10	Pulang Pisau	0,09	Kapuas	0,10
Palangka Raya	0,10	Kota Kotawaringin Timur	0,12	Murung Raya	0,09	Gunung Mas	0,13
Barito Utara	0,12	Gunung Mas	0,13	Palangka Raya	0,09	Pulang Pisau	0,14
Murung Raya	0,12	Sukamara	0,17	Kota Kotawaringin Timur	0,11	Barito Utara	0,15
Barito Selatan	0,13	Lamandau	0,17	Sukamara	0,12	Kotawaringin Barat	0,16
Sukamara	0,16	Seruyan	0,19	Barito Utara	0,13	Kota Kotawaringin Timur	0,18
Pulang Pisau	0,20	Katingan	0,19	Kapuas	0,17	Sukamara	0,19
Kotawaringin Barat	0,26	Barito Selatan	0,21	Lamandau	0,21	Katingan	0,19
Seruyan	0,31	Murung Raya	0,21	Barito Selatan	0,22	Lamandau	0,21
Katingan	0,31	Kapuas	0,28	Seruyan	0,27	Murung Raya	0,23
Barito Timur	0,41	Pulang Pisau	0,30	Katingan	0,27	Seruyan	0,33
Gunung Mas	0,59	Barito Timur	0,38	Barito Timur	0,41	Barito Timur	0,34

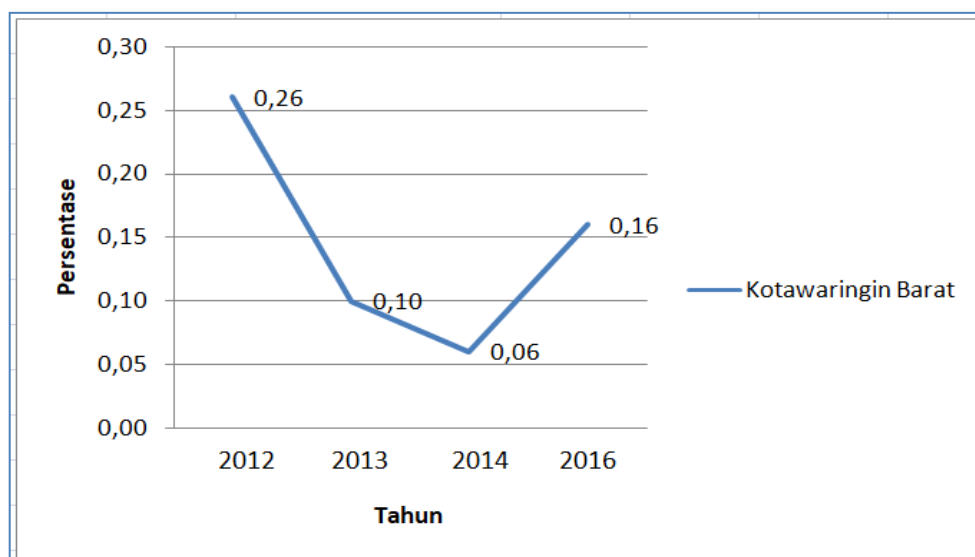
Sumber: diolah dari tabel III.11

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Nilai indeks Keparahan Kemiskinan (P2) ini untuk Kabupaten Kotawaringin Barat dibandingkan dengan nilai indeks di tingkat provinsi Kalimantan Tengah, lebih kecil akan tetapi jika dilihat perkembangannya yang fluktuatif kemudian prosentase di 2016 naik 0,1% ini menunjukkan adanya ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin melebar lagi di tahun 2016.

Tabel III.12.
Posisi Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap
Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2012-2016

Kabupaten/Kota	Indeks Keparahan Kemiskinan			
	2016	2014	2013	2012
Kalimantan Tengah	0.20	0.25	0.31	0.27
Kotawaringin Barat	0.16	0.06	0.10	0.26
KotaKotawaringin Timur	0.18	0.11	0.12	0.08
Kapuas	0.10	0.17	0.28	0.08
Barito Selatan	0.09	0.22	0.21	0.13
Barito Utara	0.15	0.13	0.09	0.12
Sukamara	0.19	0.12	0.17	0.16
Lamandau	0.21	0.21	0.17	0.06
Seruyan	0.33	0.27	0.19	0.31
Katingan	0.19	0.27	0.19	0.32
Pulang Pisau	0.14	0.09	0.30	0.20
Gunung Mas	0.13	0.07	0.13	0.59
Barito Timur	0.34	0.41	0.38	0.41
Murung Raya	0.23	0.09	0.21	0.12
Palangka Raya	0.06	0.09	0.09	0.10

Sumber: <https://kobarkab.bps.go.id/site/resultTab>



Gambar 3.8.
Grafik Indeks Keparahen Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat
Sumber: Tabel III.13

Tabel III.13.
Analisis Keterkaitan Kondisi Kemiskinan Konsumsi Kotawaringin Barat

Indikator	Pereaktif Temuan			
	Analisis Posisi Rlatif	Analisis Perkembangan	Analisis Epektifitas	Analisis Reléfansi
Persentase Penduduk Miskin	Di bawah rata-rata Provinsi dan Nasional	Terus mengalami penurunan		
Jumlah Penduduk Miskin	Di bawah rata-rata jumlah penduduk miskin kab/kota lainnya di Prov. Kal. Teng (urutan 4-5)	Fluktuatif, menurun di 2012-2015, dan sedikit naik di 2016		
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Di bawah rata-rata Provinsi dan Nasional	Fluktuasi (menurun di tahun 2013-2015 dan cenderung meningkat di 2016)	P1 dan P2 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat tidak dapat memberikan kontribusi positif dalam perbaikan capaian persentase penduduk miskin	
Indeks Keparahen Kemiskinan (P2)	Di bawah rata-rata Provinsi dan Nasional	Fluktuasi (menurun di tahun 2013-2015 dan cenderung meningkat di 2016)		

Sumber: Hasil Kajian Tim Penyusun, 2018

3.2.2. Analisis Kemiskinan Non Konsumtif

Kemiskinan non konsumsi terdiri dari 5 kelompok bidang, yaitu ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan ketahanan pangan. Kelompok bidang tersebut terdiri atas beberapa indikator yang menggambarkan capaian (*outcome*) penanggulangan kemiskinan atau disebut juga sebagai indikator utama. Umumnya indikator ini mewakili tujuan yang hendak dicapai oleh suatu program penanggulangan kemiskinan

3.2.2.1. Ketenagakerjaan

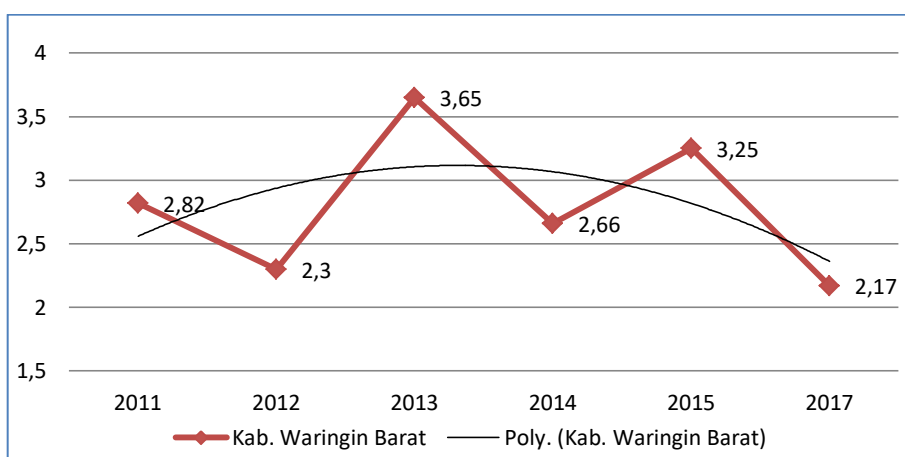
1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pada tahun 2011 hingga tahun 2012, TPT Kabupaten Kotawaringin Barat pernah mengalami penurunan sebesar 0,52%, pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 3,65% atau naik sebesar 1,35%. Di tahun berikutnya turun lagi menjadi 2,66% serta naik lagi di tahun 2015 menjadi 3,25%. Pola penurunan ini terjadi di tahun berikutnya 2016 mengalami penurunan hingga 2,17%. Kondisi pengangguran terbuka di tahun 2016 sebesar 2,17% ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja terdapat sebanyak 2 orang pengangguran. Fluktuasi tingkat pengangguran di Kabupaten Kotawaringin Barat ini secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Tabel III.14.
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2017

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (Agustus)	2017
Kab. Kotawaringin Barat	2.82	2.36	3.68	3,46	3.25	2.17	2,17
Provinsi Kalteng	2,55	3,08	3,00	3,24	4,54	3,67	4,23

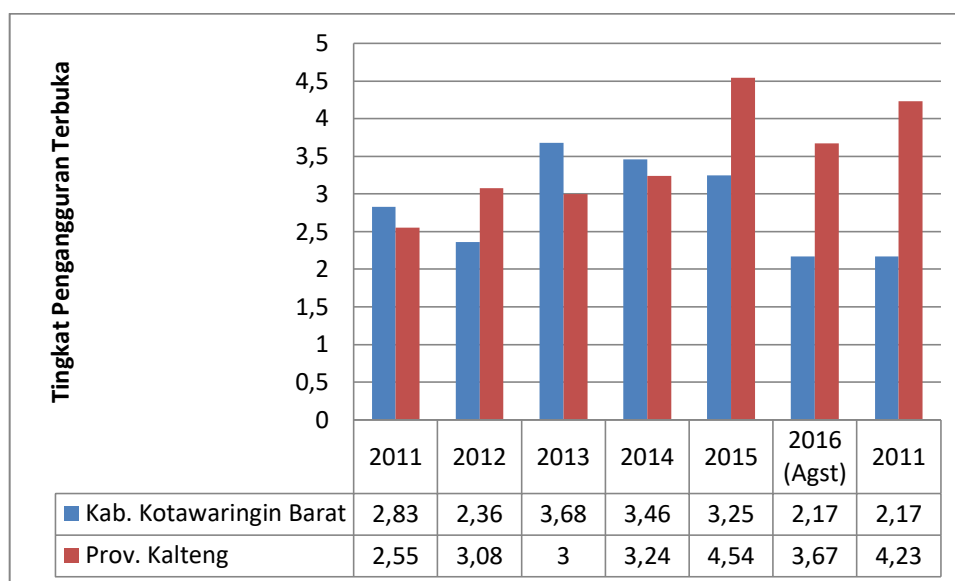
Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka 2018 dan Provinsi Kalteng dalam Angka, 2018.



Gambar 3.9.
Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2017 (%)

Sumber: diolah dari Tabel III.15

Sedangkan posisi relatif TPT Kotawaringin Barat sejak tahun 2011 hingga tahun 2017 lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Kalimantan tengah, namun pada tahun 2013 lebih tinggi, seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.10.
Grafik Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Provinsi Kalimantan Tengah 2011-2017
(dalam%)

Sumber: diolah dari Tabel III. 15

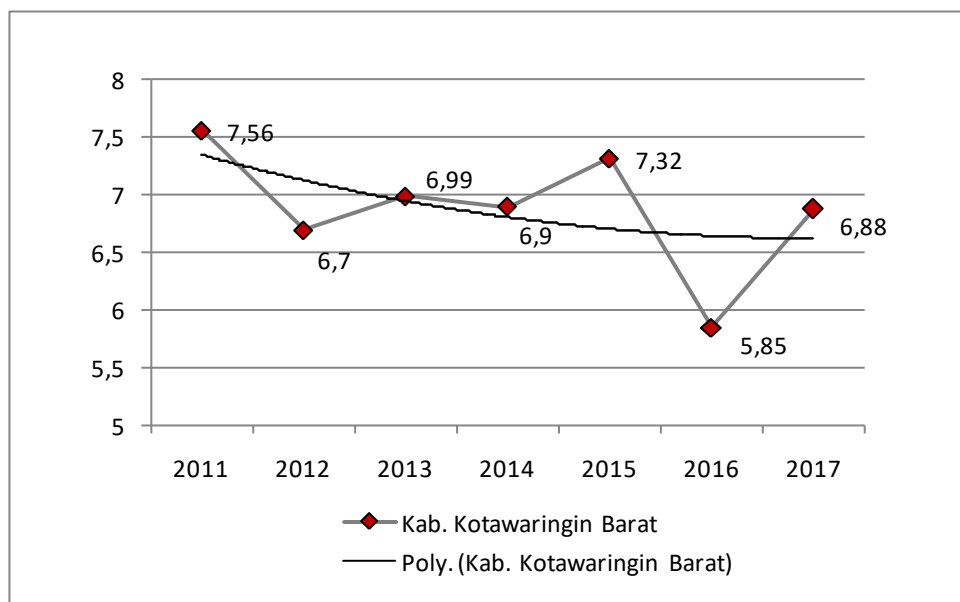
2) Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja

Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja Kab. Kotawaringin Barat tahun 2011 hingga tahun 2017 mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2011 turun sebesar 0,86% dan pada tahun 2012-2015 naik 0,62% menjadi sebesar 67,32%, namun pada tahun 2016 menurun menjadi sebesar 5,81%. Dengan kondisi capaian sebesar 5,81% di tahun 2016 menunjukkan besarnya kontribusi tenaga kerja terhadap laju pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami penurunan. Dengan tren laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja yang mengalami fluktuasi ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Barat kurang stabil dalam upaya mendukung penciptaan kesempatan kerja. Fluktuasi laju pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Tabel III.15.
Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja
Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2017

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Kotawaringin Barat	7,56	6,7	6,99	6,9	7,32	5,85	6,88

Sumber: PDRB Kab. Kotawaringin Barat Menurut Lapangan Usaha tahun 2017



Gambar 3.11.
Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja
Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2017

Sumber: diolah dari Tabel III.16

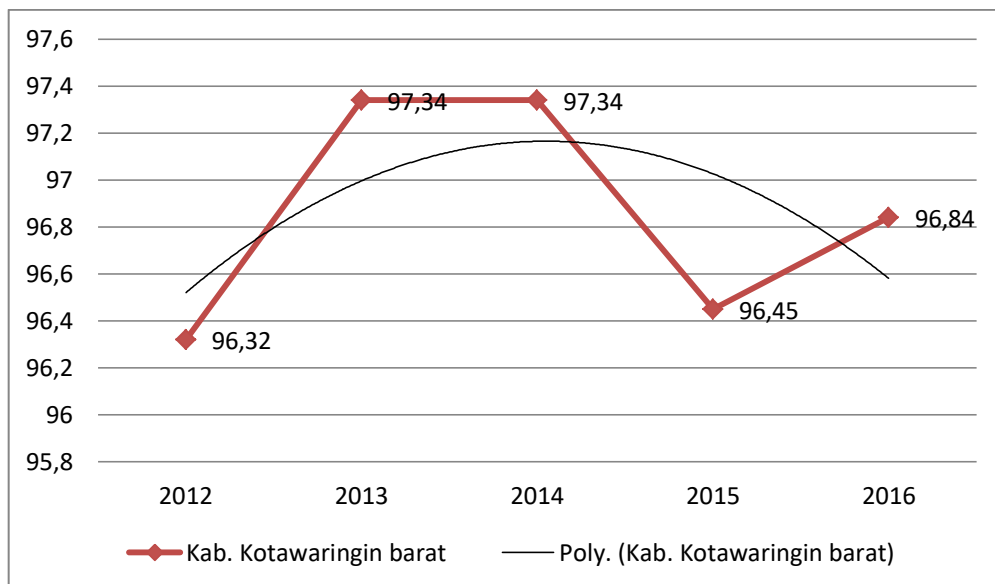
3) Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012 hingga tahun 2016 juga terjadi fluktuasi, pernah mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi sebesar 1,32% dari 97,64% di tahun 2012 menjadi 96,32% di tahun 2013, namun tahun 2014 kembali naik menjadi sebesar 97,45% dan turun lagi di 2016 menjadi 96,84. Dengan kondisi tersebut menunjukkan pada tahun 2016 kesempatan kerja yang tersedia di Kabupaten Kotawaringin Barat mampu diserap oleh penduduk usia kerja sebesar 96,84% sesuai dengan tingkat keahlian, keterampilan dan bakat tenaga kerja, secara rinci dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel III.16.
Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

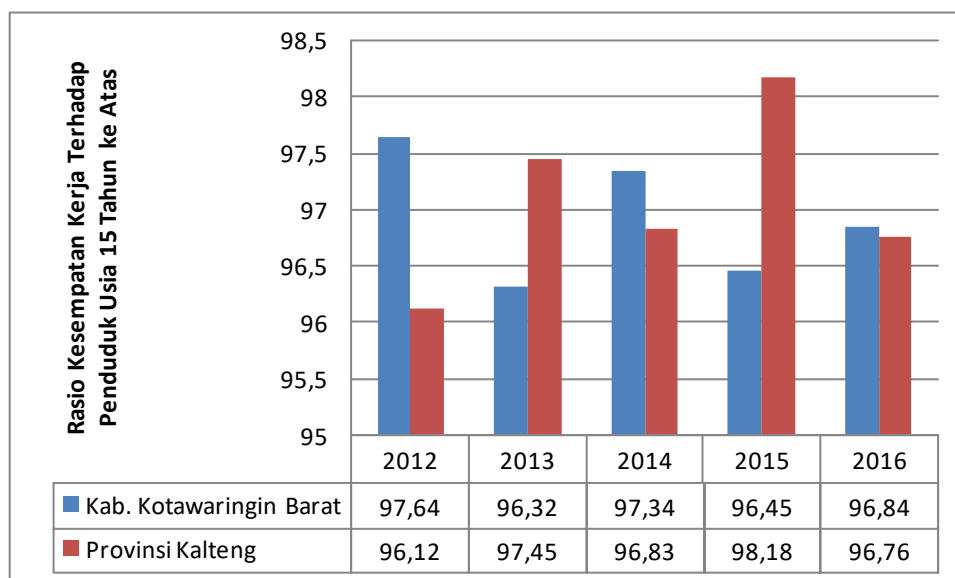
Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
Kab. Kotawaringin Barat	97,64	96,32	97,34	96,45	96,84
Provinsi Kalteng	96,12	97,45	96,83	98,18	96,76

Sumber RPJMD Kobar 2017-2022, RPJMD Kalteng 2016-2021, Kabar dalam Angka 2017



Gambar 3.12.
Grafik Proporsi Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

Sumber: Tabel III. 17



Gambar 3.13.
Grafik Proporsi Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
Di Kabupaten Kotawaringin Barat thd Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2017

Sumber: Tabel III. 17

3.2.2.2. Kesehatan

1) Angka Kematian Bayi (AKB)

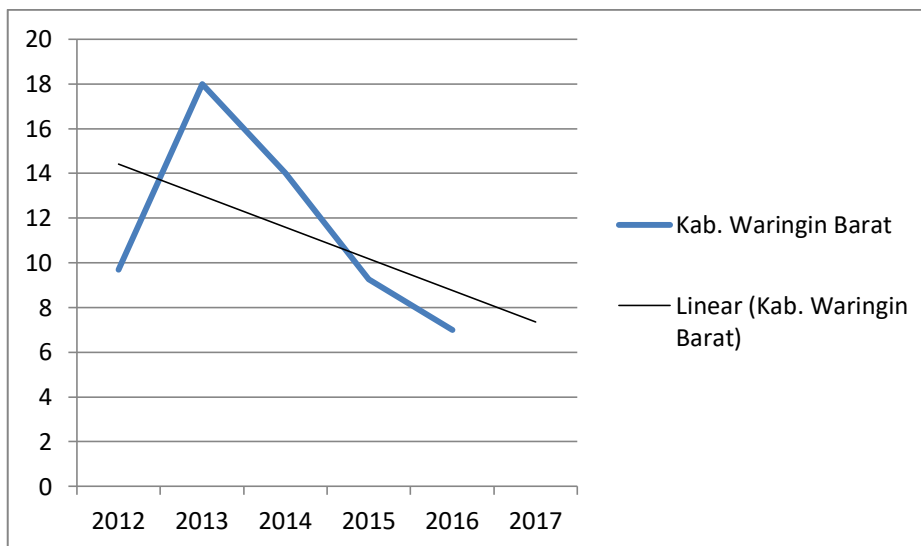
Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Penurunan AKI juga merupakan salah satu target MDGs yaitu tujuan ke 5 yaitu meningkatkan kesehatan ibu dengan mengurangi sampai $\frac{3}{4}$ resiko jumlah kematian ibu. Kematian ibu yang dimaksud adalah kematian seorang ibu yang disebabkan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan 100.000 kelahiran hidup. Setiap periode kehamilan hingga masa nifas berisiko mengalami kematian maternal apabila mengalami komplikasi. AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012 hingga tahun 2016 terjadi sedikit fluktuasi. Pada tahun 2013 mengalami penurunan dari 20 menjadi sebesar 18 per 1.000 KH dan tahun 2014 naik menjadi sebesar 4,79 per 1.000 KH, namun pada tahun 2014 naik menjadi sebesar 19 per 1.000 KH. Kenaikan juga terjadi pada tahun 2012 dan 2024 yang menunjukkan kinerja tidak konsisten. Dalam kurun waktu lima tahun, capaian tahun 2012 sebesar 20 per 1.000 KH, merupakan kejadian tertinggi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Posisi ini jika disandingkan dengan besaran angka rata-rata di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah jauh lebih kecil. Besarnya angka kematian bayi dan tren perkembangannya, secara rinci dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel III.17.
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup
Di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2012-2016

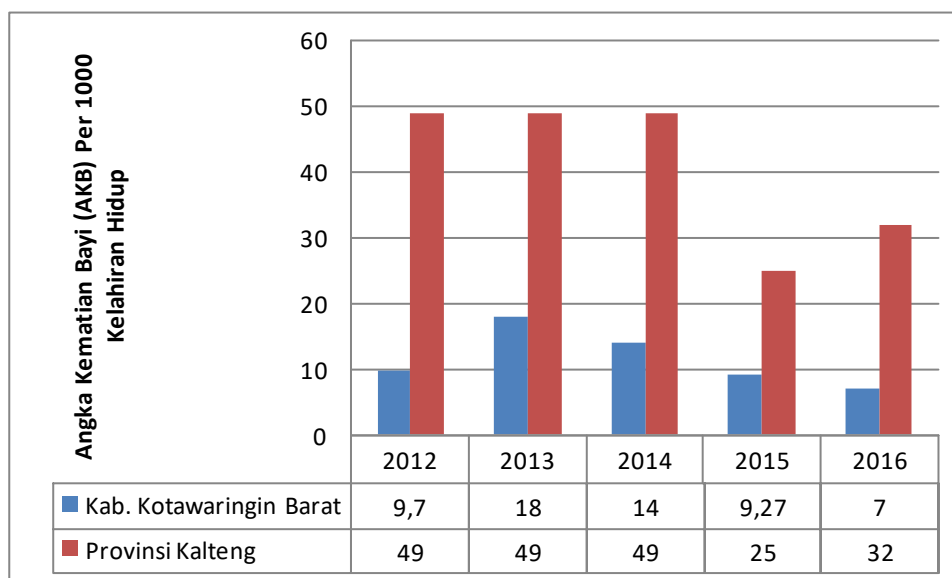
Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
Kab. Kotawaringin Barat	9,7	18	14	9,27	7
Provinsi Kalteng	49	49	49	25	32

Sumber Renstra Dinas Kesehatan 2012 -2016 dan Profil Kesehatan Kalteng, 2016



Gambar 3.14.
Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017
Sumber: Tabel III.18

Posisi angka Kematian bayi kabupaten Kotawaringin Barat ini terhadap rata-rata angka di Provinsi Kalimantan Tengah lebih kecil. Hanya kondisi ini terlihat di tahun 2012 dan 2015, tetapi setidaknya potret kondisi ini bisa menunjukkan angka rata-rata kematian bayi di kabupaten ini lebih kecil, lihat grafik perbandingan berikut ini.



Gambar 3.15.
Grafik Posisi Angka Kematian Bayi (AKB) Di Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2017
Sumber: Tabel III.18

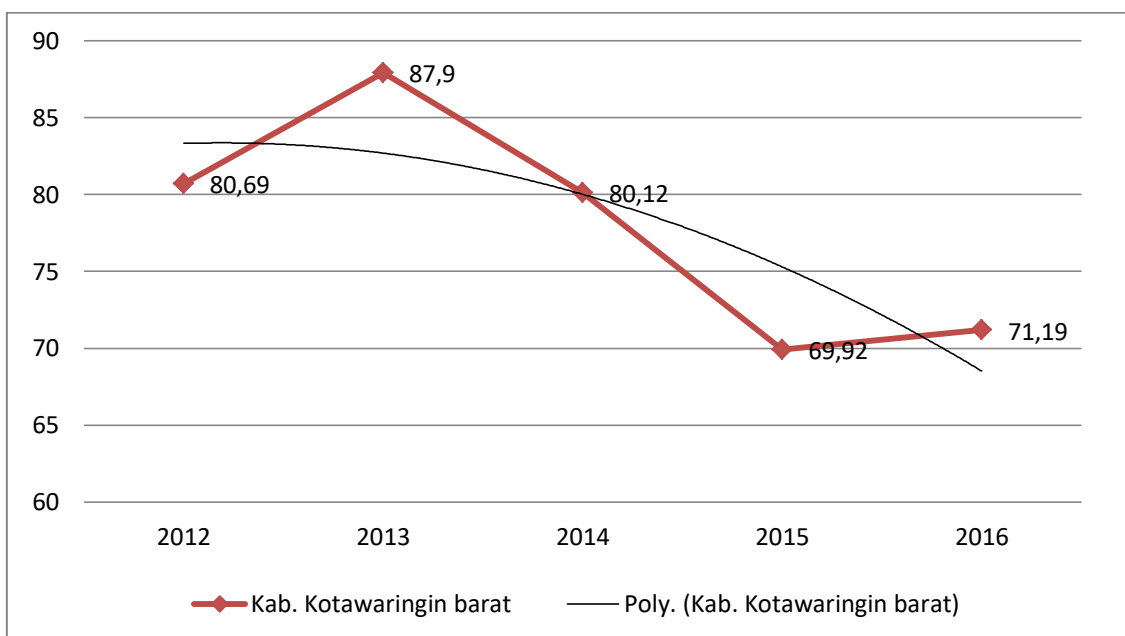
2) Angka Kematian Balita (AKBA)

Perkembangan AKBA Kab. Kotawaringin Barat jika dilihat dalam lima tahun terakhir (2012-2016) relatif tidak stabil dengan kondisi fluktuatif, seperti kondisi AKB. Selama periode ini terjadi dua kali kenaikan yaitu pada tahun 2013 dan tahun 2016. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 7,21, dari 80,69 menjadi 87,90% dan tahun 2015 ke 2016 naik 1, 1,27% dari angka 69,92 menjadi 71,19 per 1.000 KH dan tahun 2014 naik menjadi sebesar 5,3 per 1.000 KH, namun pada tahun 2015 turun menjadi sebesar 3,56 per 1.000 KH, fluktuasi ini secara rinci dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel III.18.
Angka Kematian Balita (AKBA) Di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2012-2016

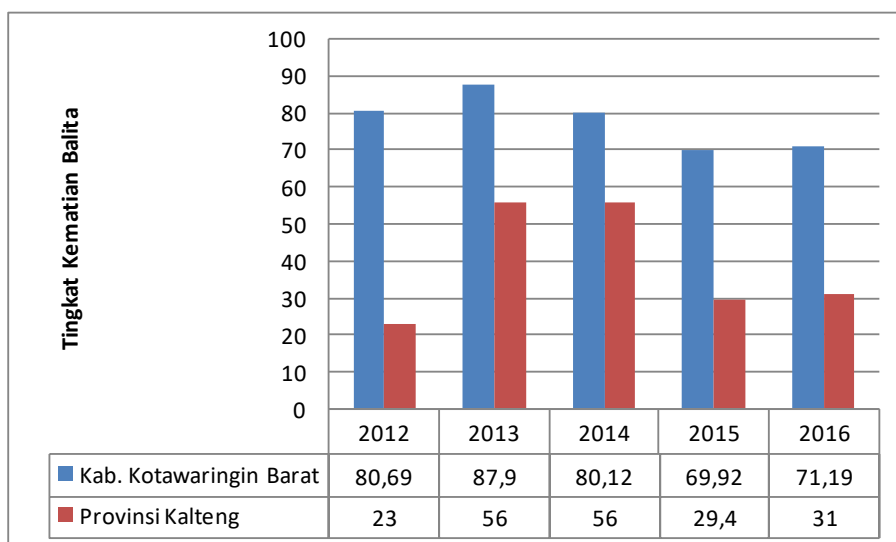
Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
Kab. Kotawaringin Barat	80,69	87,9	80,12	69,92	71,19
Provinsi Kalteng	23	56	56	29,4	31

Sumber Renstra Dinas Kesehatan 2012 -2016 dan Profil Kesehatan Kalteng, 2016



Gambar 3.16.
Grafik Angka Kematian Balita (AKBA) Di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2012-2016

Sumber: Tabel III.19



Gambar 3.17.
Grafik Angka Kematian Balita (AKBA) Di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2012-2017

Sumber: Tabel III.19

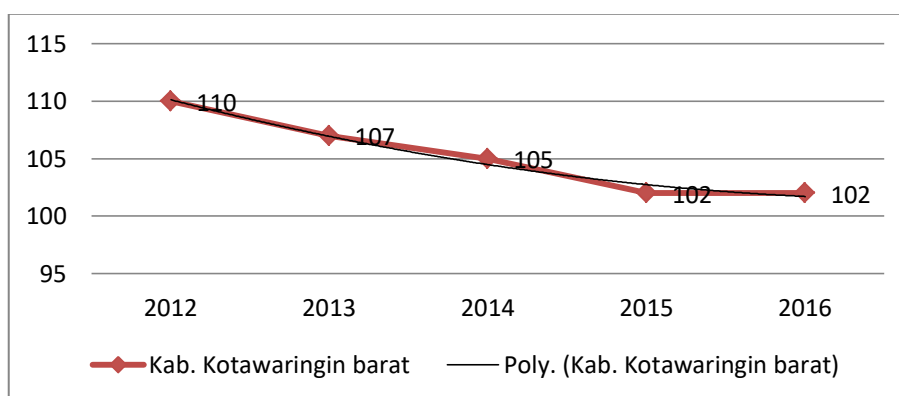
3) Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)

Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Kab. Kotawaringin Barat tahun 2012 hingga tahun 2015 terjadi penurunan, yaitu dari pada tahun 2012 (110 per 100.000 KH) dan tahun 2016 (102 per 100.000 KH), secara rinci dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel III.19.
Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2012-2016

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
Kab. Kotawaringin Barat	110	107	105	102	102
Provinsi Kalteng	63	73	102	80	74

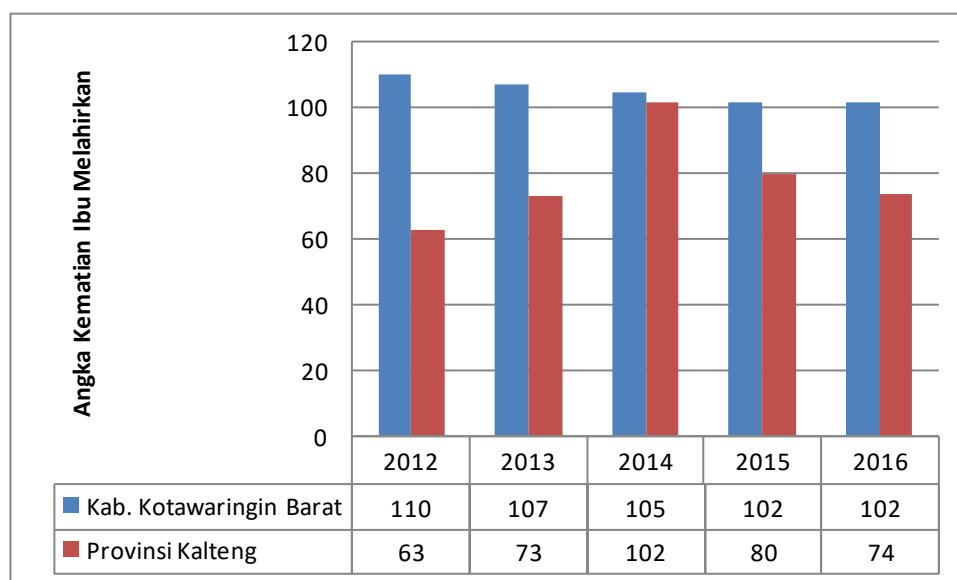
Sumber Renstra Dinas Kesehatan 2012 -2016 dan Profil Kesehatan Kalteng, 2016



Gambar 3.18.
Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) di Kab. Kotawaringin Barat Th 2012-2016

Sumber: Tabel III.20

Angka kematian Ibu Jumlah kasus kematian ibu maternal yang dilaporkan di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2016 sebanyak 74 kasus lebih sedikit dari jumlah kasus kematian ibu tahun 2015 sebanyak 80 kasus, serta tahun 2015 merupakan tahun dengan angka yang cukup tinggi yaitu 101. Trend kasus kematian ibu dalam beberapa tahun terakhir sedikit mengalami penurunan jumlah kasus, ini menjadi tantangan bagi seluruh stakeholder yang berkecimpung di bidang kesehatan. Jumlah kematian terbanyak pada masa ibu bersalin dan penyebab terbanyak akibat komplikasi dalam persalinan seperti perdarahan dan kelahiran yang sulit. Jumlah kematian ibu maternal tertinggi di Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 19 kasus, diikuti oleh Kotawaringin Barat sebanyak 11 kasus dan Kabupaten Kapuas serta Seruyan masing-masing 7 kasus.



Gambar 3.19.

Grafik Posisi Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Di Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2016

Sumber: Tabel III.20

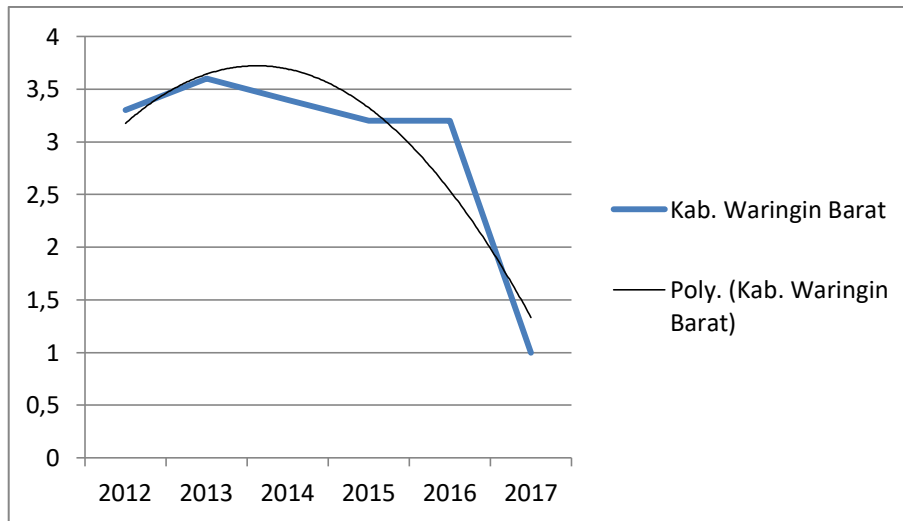
4) Prevalensi Balita Gizi Buruk

Prevalensi balita kurang gizi merupakan perbandingan antara balita berstatus kurang gizi dengan balita seluruhnya. Prevalensi status gizi balita diperoleh melalui indeks berat badan, umur dan jenis kelamin. Perkembangan prevalensi balita kekurangan gizi dalam lima tahun terakhir, yaitu tahun 2012 hingga tahun 2016, permasalahan gizi buruk di Kabupaten Kotawaringin Barat terlihat positif (cenderung turun). Hal ini ditunjukkan dengan kondisi di Kabupaten Kotawaringin Barat terus membaik, tetapi masih membutuhkan perhatian terus karena di tahun 2016 masih tersisa 3,2% terlihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel III.20.
Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2012-2016

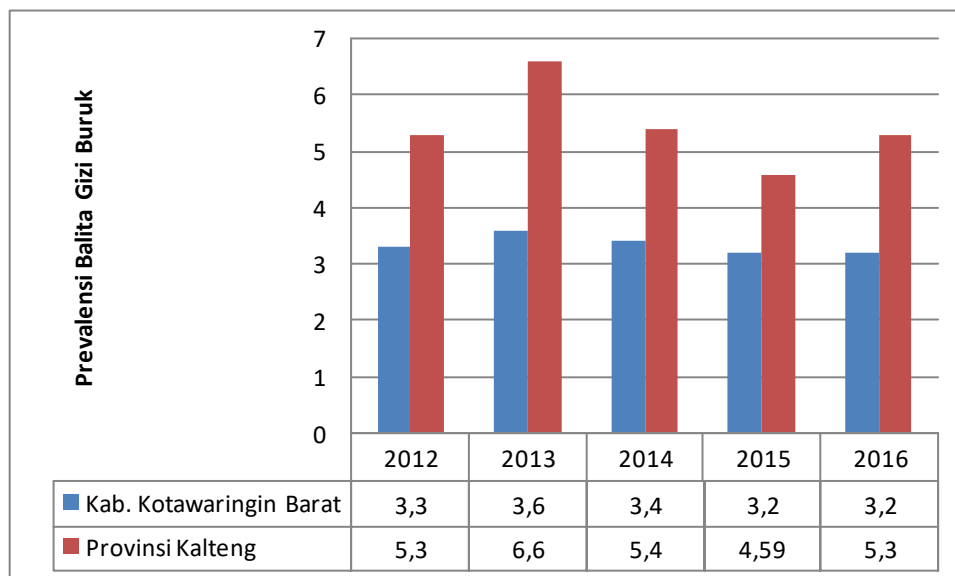
Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
Kab. Kotawaringin Barat	3,3	3,6	3,4	3,2	3,2
Provinsi Kalteng	5,3	6,6	5,4	4,59	5,30

Sumber: Renstra Dinas Kesehatan 2012 -2016, Profil Kesehatan Kalteng 2016, RPJMD Kalteng, 2016-2021



Gambar 3.20.
Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2012-2017

Sumber: Tabel III.21



Gambar 3.21.
Posisi Relatif Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2016

Sumber: Tabel III.21

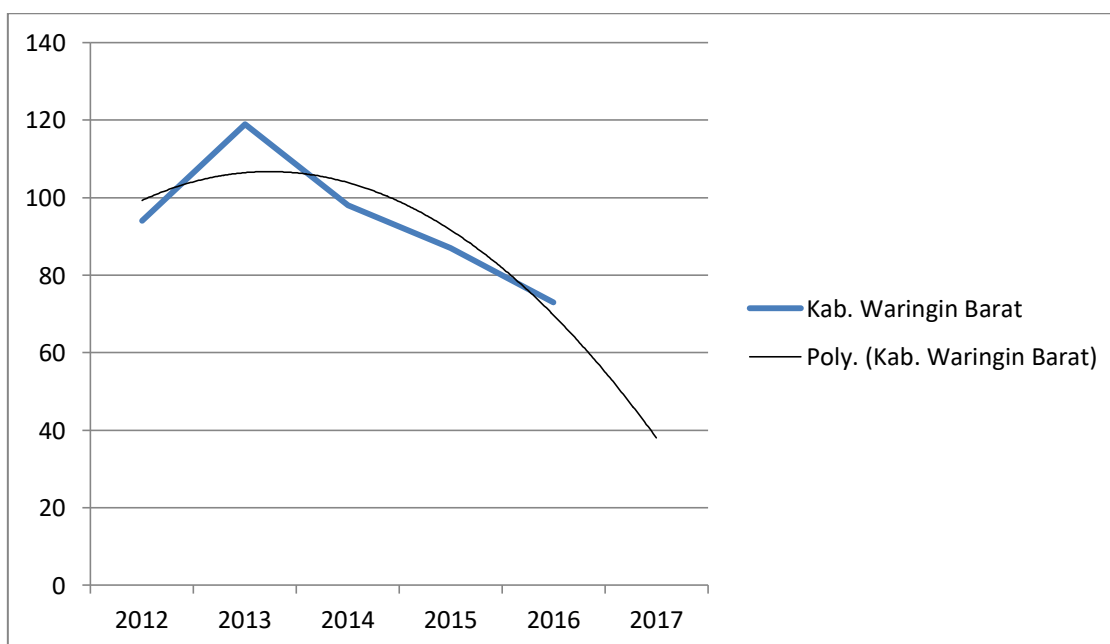
5) Proporsi Kelahiran yang Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih

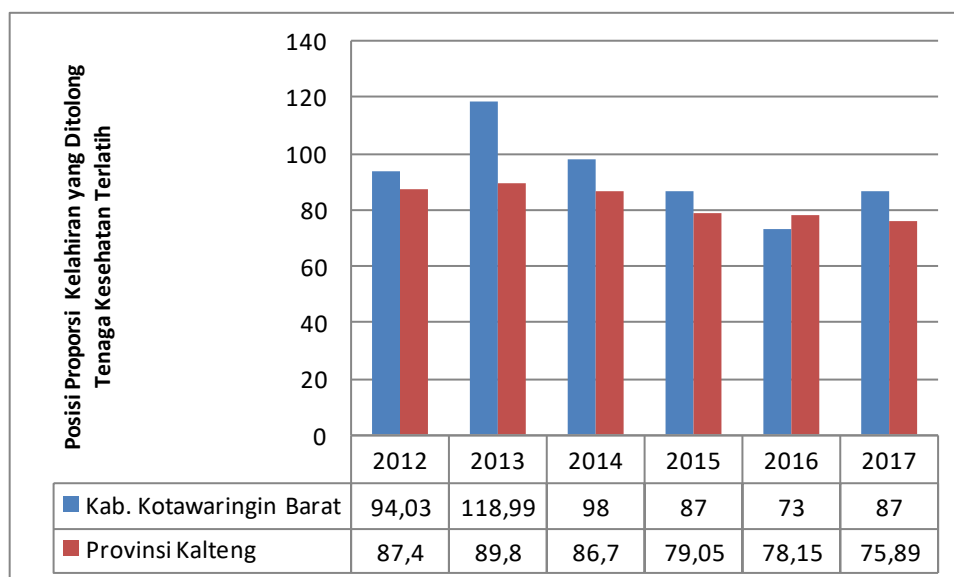
Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih merupakan perbandingan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan dengan jumlah kelahiran hidup. Selama lima tahun terakhir (2012-2016); perkembangan proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012 hingga tahun 2016 cenderung membaik, meskipun pada tahun 2014-2016 tidak mengalami penurunan (tetap bertahan di angka 90%); secara rinci dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel III.21.
Proporsi Kelahiran yang Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih
di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2012-2017

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Kotawaringin Barat	94,03	118,99	98	87	73	87
Provinsi Kalteng	87,40	89,80	86,70	79,05	78,15	75,89

Sumber: Renstra Dinas Kesehatan 2016-2022 dan Profil Kesehatan Kalteng 2016





Gambar 3.22.

Grafik Posisi Proporsi Kelahiran yang Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih Di Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2017

Sumber: Tabel III.22

6) Cakupan Pelayanan Antenatal (K4)

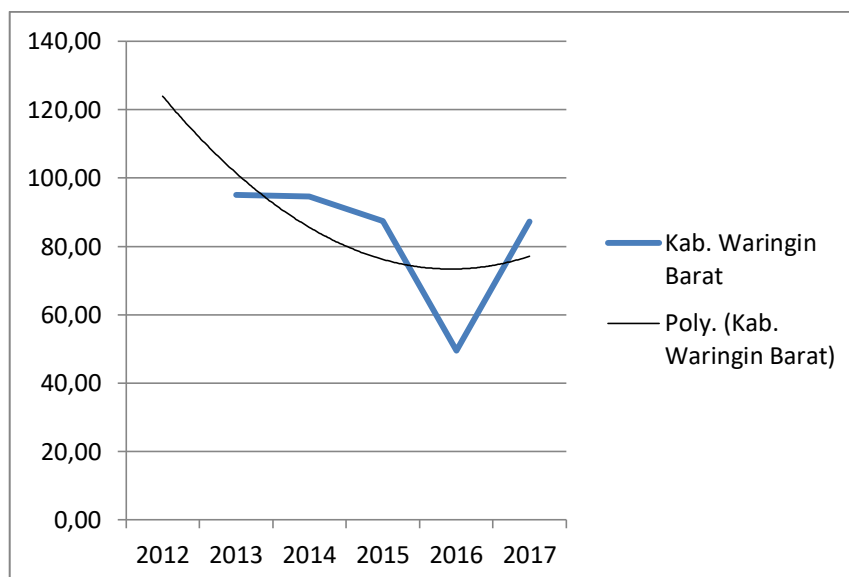
Cakupan layanan antenatal K4 merupakan perbandingan jumlah ibu hamil yang mendapatkan akses layanan ANC minimal 4 kali selama kehamilan dengan jumlah ibu hamil yang ada. Perkembangan cakupan pelayanan antenatal (K4) Kab. Kotawaringin Barat cenderung mengalami fluktuasi. fluktuasi pelayanan antenatal K4 pada tahun 2014 -2016 ditengarai karena sebagian ibu hamil tidak melanjutkan pemeriksaannya pada satu layanan kesehatan, secara rinci dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel III.22.

Cakupan Pelayanan Antenatal (K4) Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Kotawaringin Barat	92	95,11	94,55	87,41	49,51	87,21
Provinsi Kalteng	87	95,72	86,5	82,8	79	79

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka 2018, Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2012-2017



Gambar 3.23.
Cakupan Pelayanan Antenatal (K4) di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2012-2017
Sumber: Tabel III.23

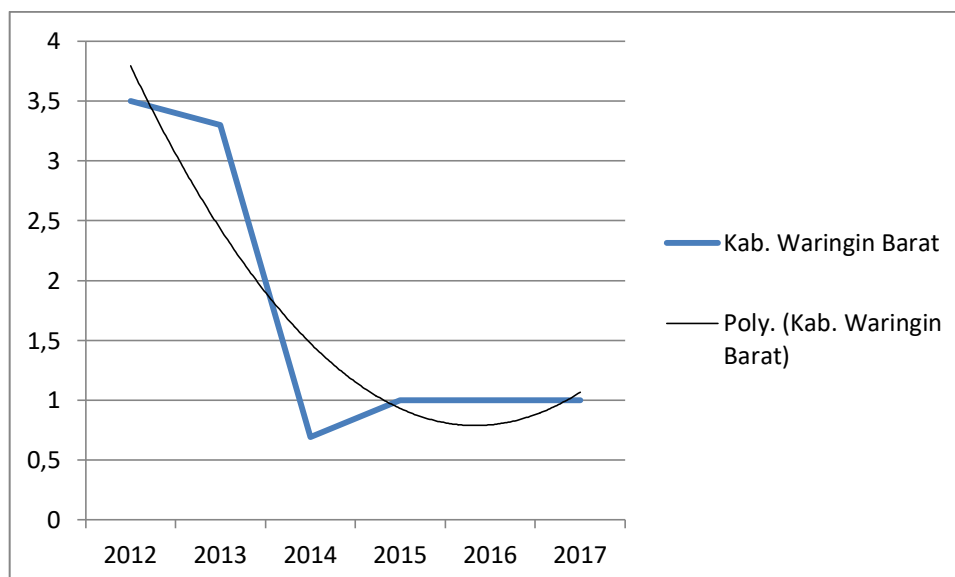
7) Angka Penemuan Kasus Malaria

Selama periode 2012 sampai 2016 penemuan kasus malaria di Kabupaten Kotawaringin Barat terus mengalami penurunan prosentase dari 3,5% menjadi 1%. Hal ini merupakan tren positif, utama terkait dengan kenaikan derajat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

Tabel III.23.
Angka Penemuan Kasus Malaria di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2012-2017

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Kotawaringin Barat	3,5	3,3	0,69	1	1	1
Provinsi Kalteng	3,95	2,38	0,56	0,55	0,19	0,19

Sumber Renstra Dinas Kesehatan 2012 -2016 dan renstra Dinas Kesehatan 2017-2022



Gambar 3.24.
Angka Penemuan Kasus Malaria di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2012-2017
Sumber: Tabel III.24

1) Proporsi Kasus Tuberculosis yang Disembuhkan Melalui DOTS

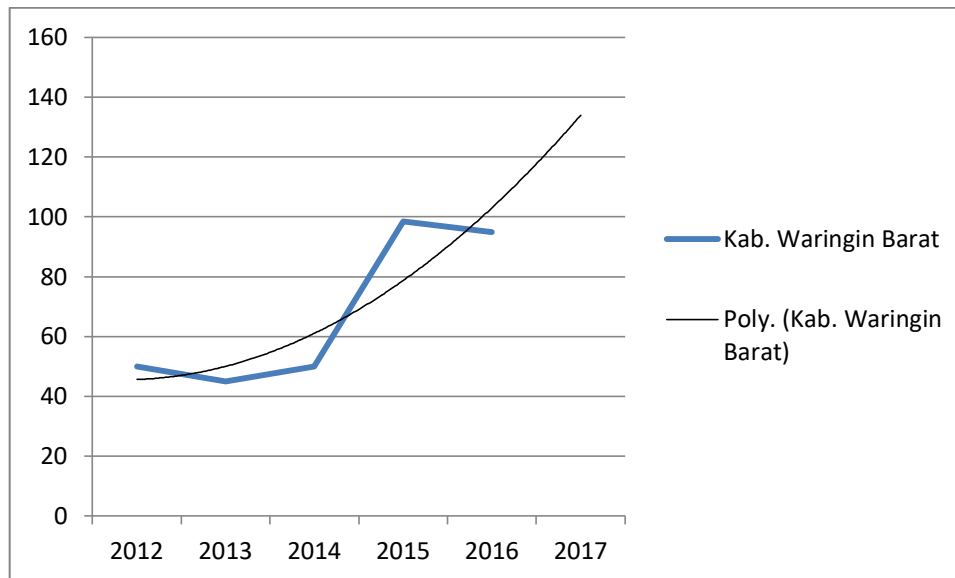
Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang umum, dan dalam banyak kasus bersifat mematikan. Penyakit ini disebabkan oleh berbagai strain mikobakteria, umumnya *Mycobacterium tuberculosis*. Tuberkulosis biasanya menyerang paru-paru, namun juga bisa berdampak pada bagian tubuh lainnya. Tuberkulosis menyebar melalui udara ketika seseorang dengan infeksi TB aktif batuk, bersin, atau menyebarkan butiran ludah mereka melalui udara. Infeksi TB umumnya bersifat asimtomatik dan laten. Namun hanya satu dari sepuluh kasus infeksi laten yang berkembang menjadi penyakit aktif.

Model penanganan dengan menggunakan DOTS ini salah satu perananan paling penting adalah adanya seseorang yang ikut mengawasi atau memantau penderita saat dia minum obatnya. Penderita tuberkulosis jika tidak diobati maka lebih dari 50% orang yang terinfeksi bisa meninggal. Dalam kurun waktu lima tahun (2012-2016), perkembangan proporsi kasus tuberculosis yang disembuhkan melalui DOTS di Kabupaten Kotawaringin Barat terus mengalami kenaikan. Gambaran perkembangan kasus ini secara rinci dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel III.24.
Proporsi Kasus Tuberculosis yang Disembuhkan Melalui DOTS
Di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2012-2016

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
Kab. Kotawaringin Barat	50	45	50	98,5	95
Provinsi Kalteng	71,88	91,84	76,24	57,4	82,7

Sumber Renstra Dinas Kesehatan 2012 -2016 dan Profil Kesehatan Kalteng, 2016. Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2014-2017



Gambar 3.25.
Proporsi Kasus Tuberculosis yang Disembuhkan Melalui DOTS
di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017

Sumber: Tabel III.25

3.2.2.3. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu aspek penting dari pembangunan manusia. Menghilangkan ketimpangan gender di semua jenjang pendidikan akan meningkatkan status dan kemampuan perempuan dan laki-laki untuk berperan dalam pembangunan ekonomi. Rasio APM perempuan terhadap laki-laki pada jenjang pendidikan tertentu, misalnya SD menunjukkan angka di bawah 100 persen. Ini berarti bahwa pada jenjang pendidikan SD lebih banyak murid laki-laki yang bersekolah dibandingkan dengan murid perempuan. Sebaliknya, rasio APM perempuan terhadap laki-laki menunjukkan angka di atas 100 persen menggambarkan murid perempuan lebih banyak dibandingkan murid laki-laki pada jenjang pendidikan tersebut.

A. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) baik SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/MA menjadi bagian dari indikator dalam menggambarkan kemiskinan secara umum. APM merupakan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu.

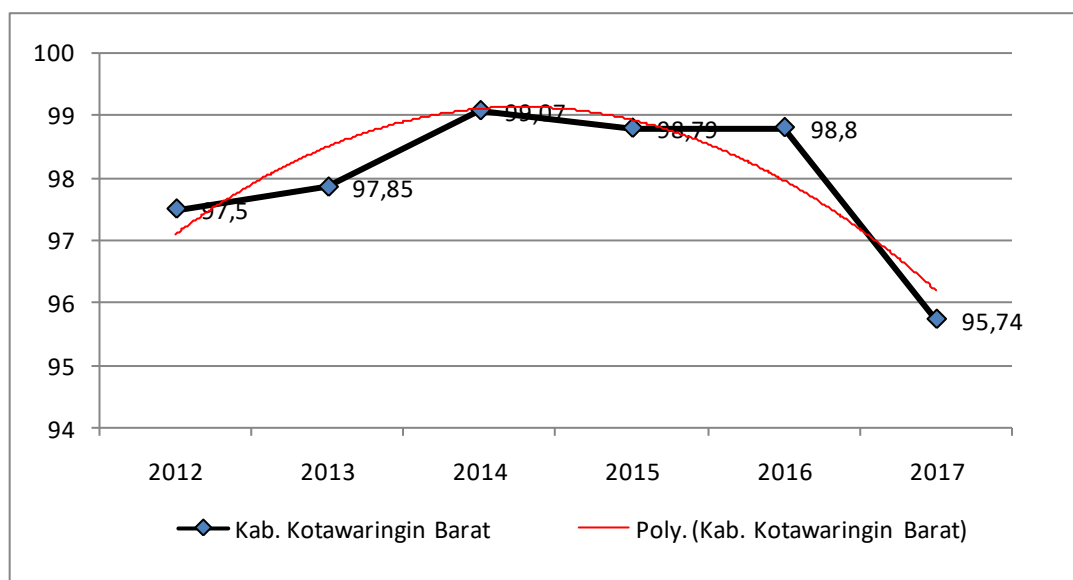
1) Angka Partisipasi Murni SD/MI.

Untuk angka partisipasi murni tingkat SD/MI di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut.

Tabel III.25.
Angka Partisipasi Murni SD/MI di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2012-2017

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Kotawaringin Barat	97,50	97,85	99,07	98,79	98,8	95,74
Provinsi Kalteng	96,03	97,41	98,13	98,54	98,67	98,94

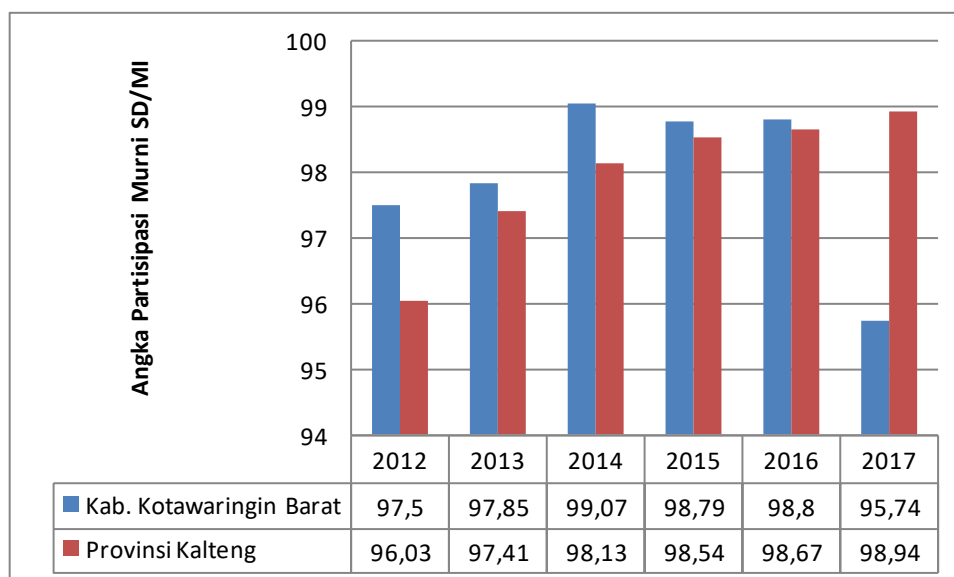
Sumber: RPJMD Kobar 2012-2022, Renstra Dikbud 2016-2022 Kobar Dalam Angka 2016 dan Pusat Data Dan Statistik Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun, 2017



Gambar 3.26.
Angka Partisipasi Murni SD/MI di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2012-2017

Sumber: Tabel III.26

Angka partisipasi murni untuk tingkat SD/MI di kabupaten Kotawaringin Barat dari grafik di atas menunjukkan adanya tren positif di mana selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, walaupun masih ada sisa 1,2% yang kemungkinan tidak berpartisipasi sekolah pada jenjang ini. Secara posisi angka partisipasi murni pada jenjang ini lebih tinggi dibanding dengan angka partisipasi murni di tingkat provinsi.



Gambar 3.27.
Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni SD/MI di Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Prov. Kalimantan Tengah Tahun 2012-2017

Sumber: Tabel III.26

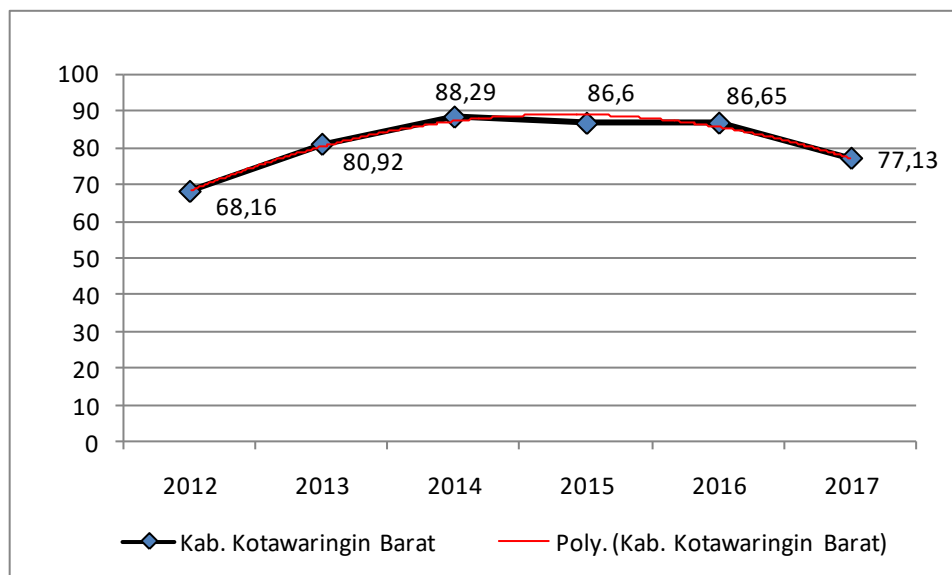
2) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

Angka partisipasi murni untuk tingkat SMP/MTs seperti halnya dengan angka partisipasi murni untuk tingkat SD/MI di Kabupaten Kotawaringin Barat juga menunjukkan adanya tren positif dimana selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan walaupun sangat kecil dan masih banyak (14,35% di tahun 2016) penduduk kelompok usia sekolah ini yang belum berpartisipasi sekolah pada jenjang ini. Angka partisipasi murni pada jenjang ini di Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan adanya tren peningkatan walaupun pernah terjadi penurunan di tahun 2015. Secara posisi angka partisipasi murni pada jenjang ini lebih tinggi dibanding dengan angka partisipasi murni di tingkat provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel III.26.
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Sederajat Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017

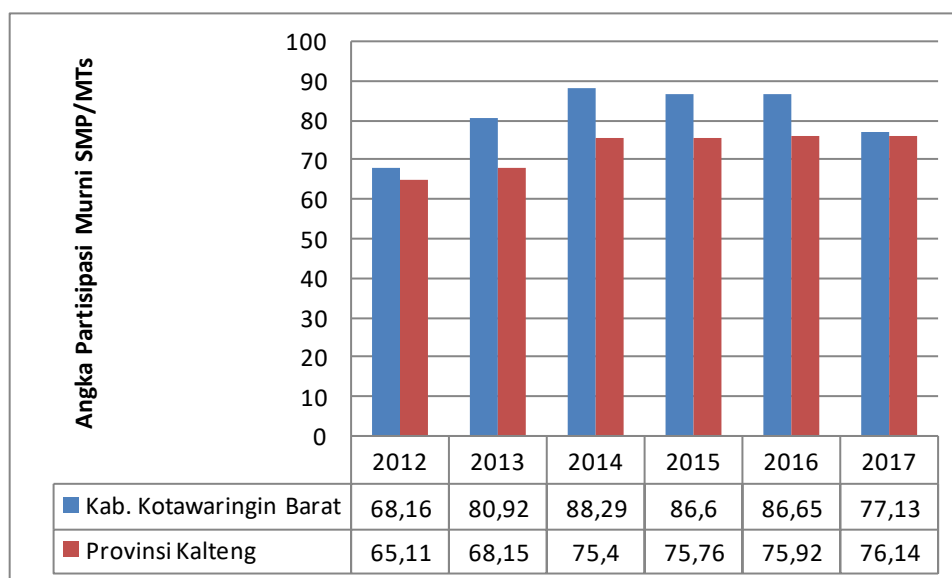
Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Kotawaringin Barat	68,16	80,92	88,29	86,60	86,65	77,13
Provinsi Kalteng	65,11	68,15	75,40	75,76	75,92	76,14

Sumber: RPJMD Kobar 2012-2022, Renstra Dikbud 2016-2022 Kobar Dalam Angka 2016 dan Pusat Data Dan Statistik Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun, 2017



Gambar 3.28.
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Sederajat
Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017

Sumber: Tabel III.27



Gambar 3.29.
Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Di Kabupaten Kotawaringin Barat
terhadap Prov. Kalimantan Tengah Tahun 2012-2017

Sumber: Tabel III.27

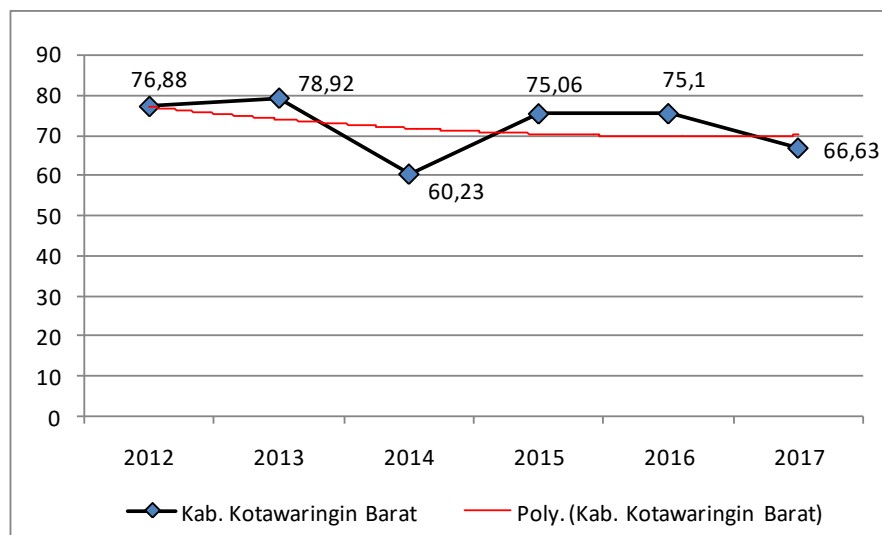
3) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA sederajat

Perkembangan APK SMA/MA sederajat Kab. Kotawaringin Barat tahun 2011 hingga tahun 2015 terus mengalami peningkatan, namun terus mengalami kenaikan pada tahun 2012 hingga tahun 2015, yaitu 65,4% menjadi sebesar 74,67%, secara rinci dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel III.27.
Angka Partisipasi Murni SMA/MA sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2012-2017

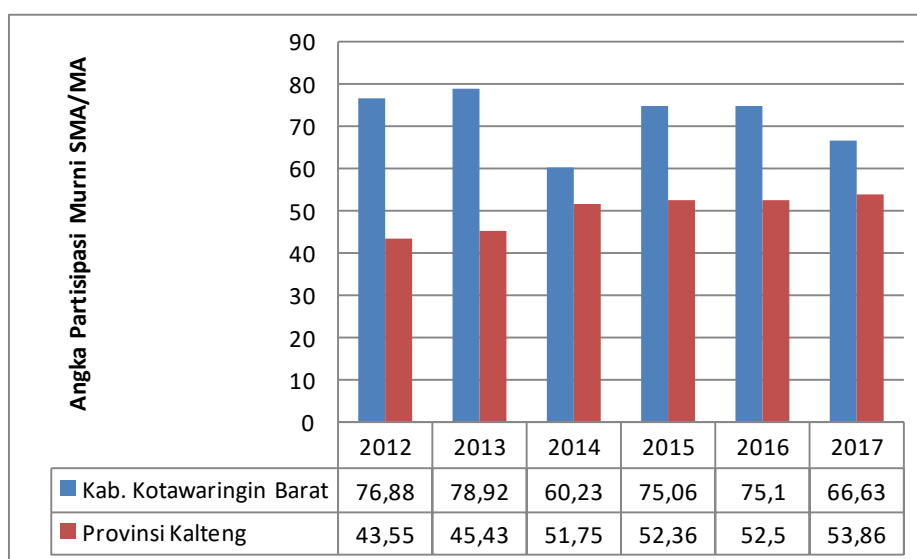
Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Kotawaringin Barat	76,88	78,92	60,23	75,06	75,1	66,63
Provinsi Kalteng	43,55	45,43	51,75	52,36	52,5	53,86

Sumber: RPJMD Kobar 2012-2022, Renstra Dikbud 2016-2022 Kobar Dalam Angka 2016 dan Pusat Data Dan Statistik Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun, 2017



Gambar 3.30.
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2012-2017

Sumber: Tabel III.28



Gambar 3.31.
Posisi Relatif Tingkat Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Sederajat
di Kabupaten Kotawaringin Barat Terhadap Prov. Kalimantan Tengah
Tahun 2012-2017

Sumber: Tabel III.28

B. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Gambaran kemiskinan pada dimensi pendidikan dilihat dari tingkat partisipasi sekolah kasar baik SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/MA. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur Angka Partisipasi Kasar adalah angka perbandingan antara banyaknya murid dari jenjang pendidikan tertentu dengan banyaknya penduduk usia sekolah pada jenjang yang sama dinyatakan dalam persen. Misalnya, GER Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

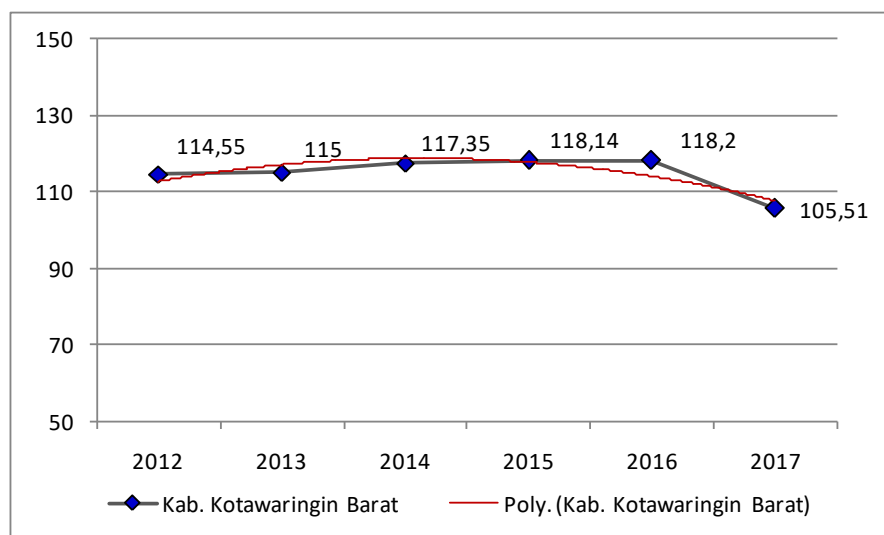
1) APK SD/MI sederajat

Perkembangan APK SD/MI sederajat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2011 hingga tahun 2015 terjadi tren kenaikan yaitu secara rinci dapat dilihat pada Gambar 3.32. Besarnya angka partisipasi ini jika dibandingkan dengan besaran angka partisipasi kasar di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Barat masih memiliki posisi yang relatif tinggi. Seperti yang terlihat pada tabel dan gambar berikut ini.

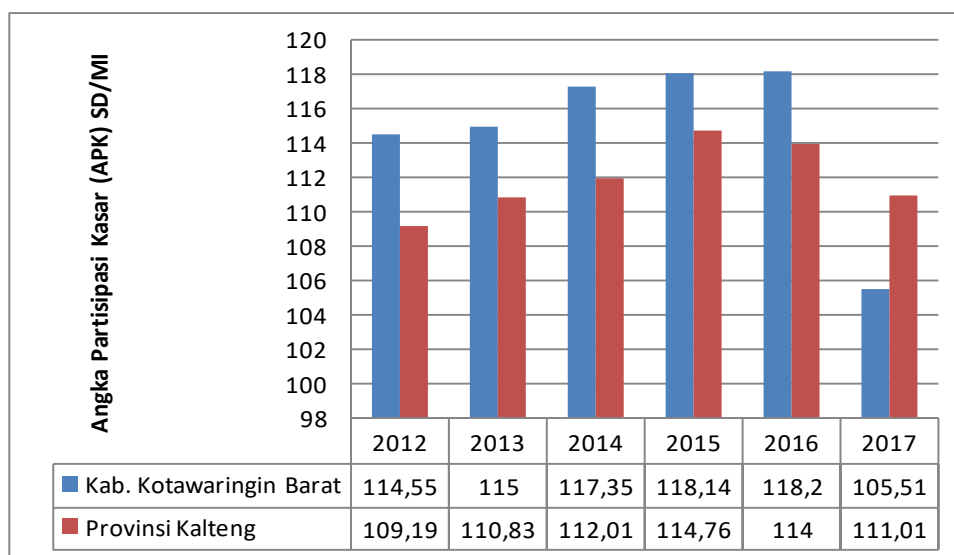
Tabel III.28.
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Sederajat Di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2012-2017

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Kotawaringin Barat	114,55	115	117,35	118,14	118,2	105,51
Provinsi Kalteng	109,19	110,83	112,01	114,76	114	111,01

Sumber: diolah dari RPJMD Kobar 2012-2022, dan Pusat Data Dan Statistik Pendidikan & Kebudayaan 2017



Gambar 3.32.
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017
Sumber: Tabel III.29



Gambar 3.33.
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Prov. Kalimantan Tengah Tahun 2012-2017
Sumber: Tabel III.29

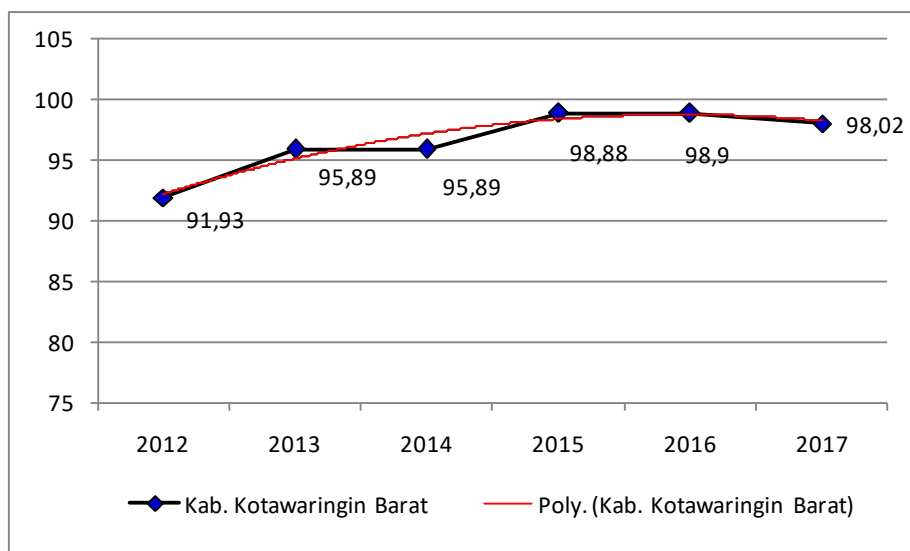
2) APK SMP/MTs sederajat

Perkembangan APK SMP/MTs sederajat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012 hingga tahun 2016 terjadi fluktuasi tetapi cenderung meningkat, dari 91,93% ditahun 2012 menjadi 98,90% ditahun 2016. Tren positif ini secara rinci dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel III.29.
Angka Partisipasi Kasar (APK) APK SMP/MTs sederajat Di Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017

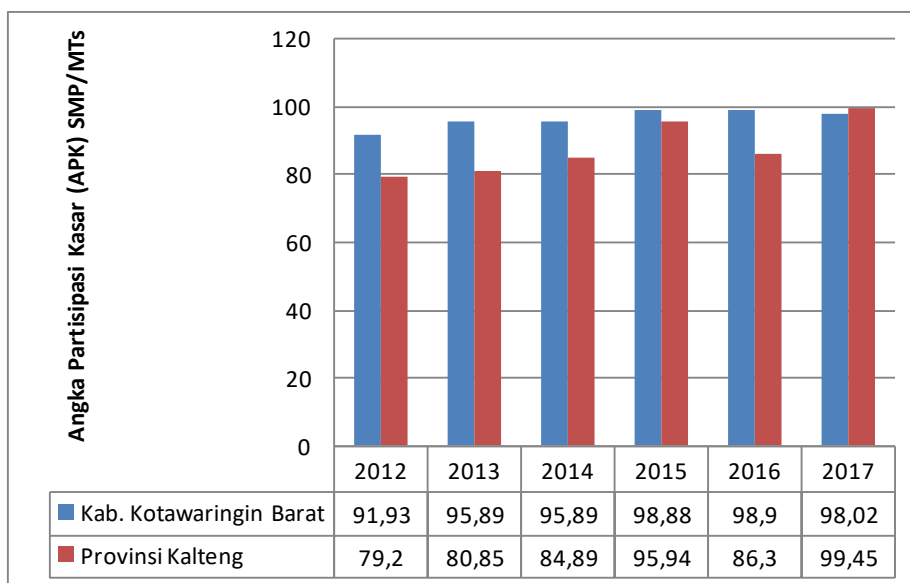
Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Kotawaringin Barat	91,93	95,89	95,89	98,88	98,9	98,02
Provinsi Kalteng	79,20	80,85	84,89	95,94	86,3	99,45

Sumber: diolah dari RPJMD Kobar 2012-2022, dan Pusat Data dan Statistik Pendidikan & Kebudayaan 2017



Gambar 3.34.
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2012-2017

Sumber: Tabel III.30



Gambar 3.35.
Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs sederajat si Kabupaten
Kotawaringin Barat terhadap Prov. Kalimantan Tengah Tahun 2012-2017

Sumber: Tabel III.30

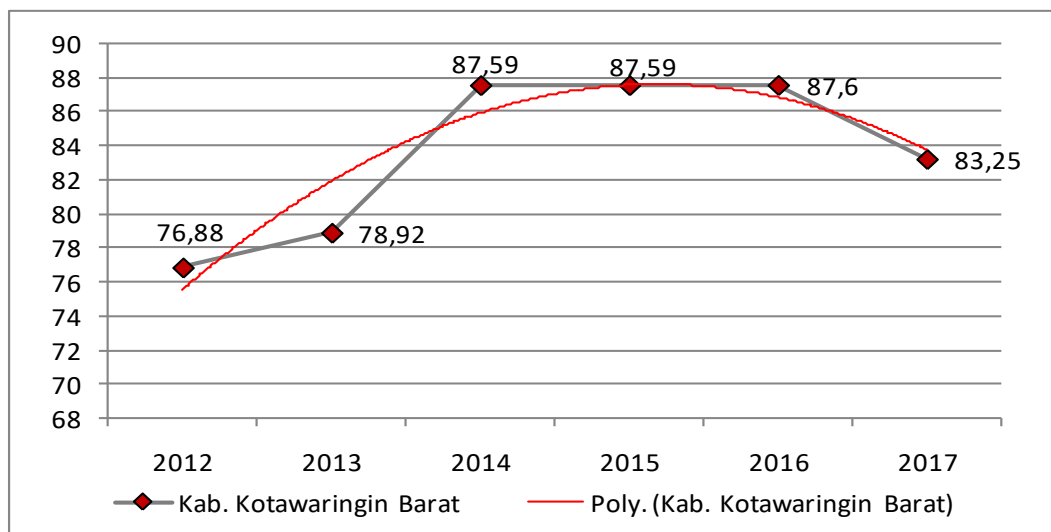
3) APK SMA/MA Sederajat

Perkembangan APK SMA/MA sederajat Kab. Kotawaringin Barat tahun 2012 hingga tahun 2015 terjadi fluktuasi, namun terus mengalami kenaikan pada tahun 2012 hingga tahun 2017, yaitu 76,88% menjadi sebesar 87,60% ditahun 2017, secara rinci dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel III.30.
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA Sederajat sederajat Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017

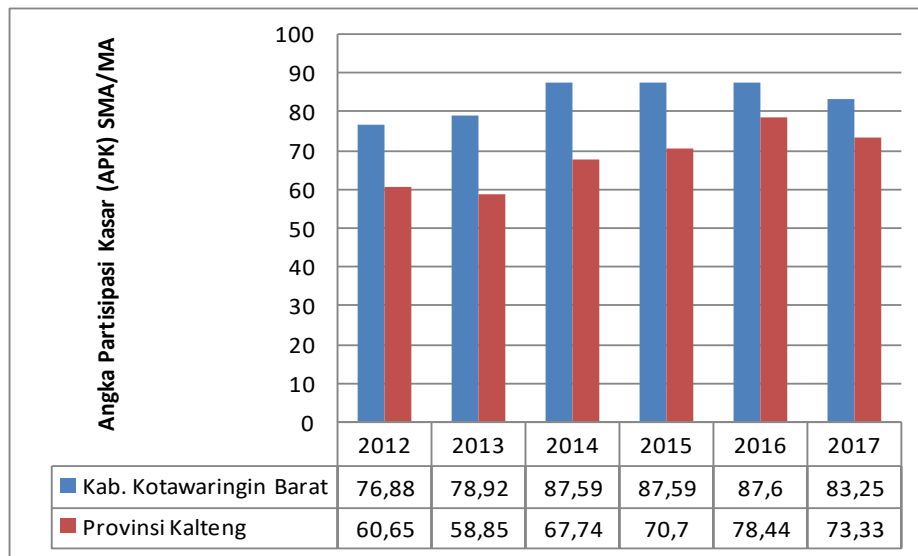
Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Kotawaringin Barat	76,88	78,92	87,59	87,59	87,6	83,25
Provinsi Kalteng	60,65	58,85	67,74	70,7	78,44	73,33

Sumber: diolah dari RPJMD Kobar 2012-2022, dan Pusat Data Dan Statistik Pendidikan & Kebudayaan 2017



Gambar 3.36.
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017

Sumber: Tabel III.31



Gambar 3.37.
Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA sederajat di Kabupaten
Kotawaringin Barat terhadap Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2012-2017

Sumber: Tabel III.31

C. Angka Putus Sekolah (APS)

Angka Putus Sekolah (APS) diartikan sebagai perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK) dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APS ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa putus sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APS berarti semakin banyak siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu daerah.

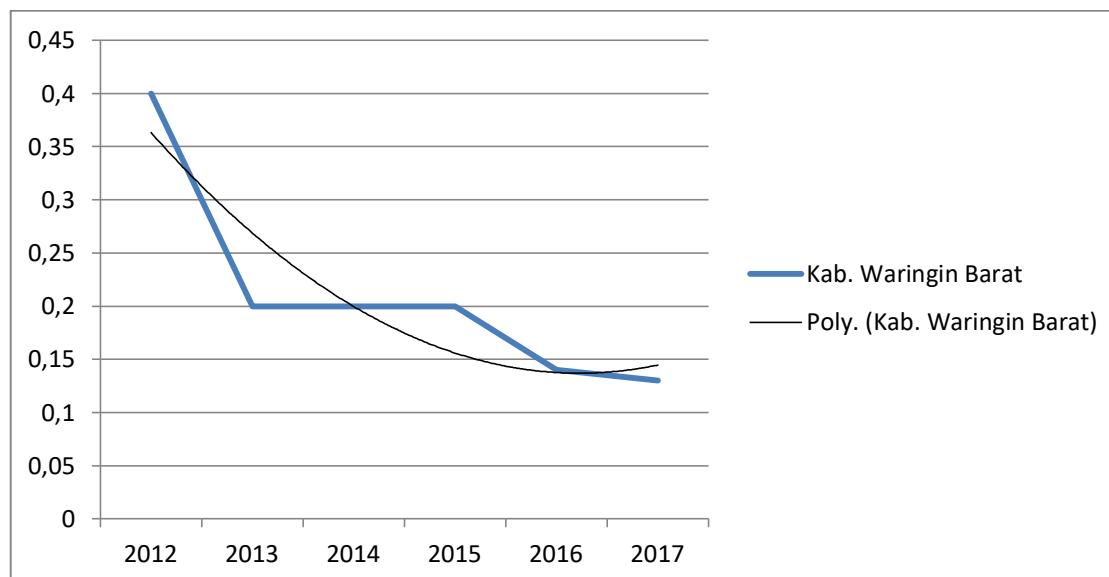
1) APS SD/MI Sederajat

Perkembangan APS SD/MI sederajat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012 hingga tahun 2016 menunjukkan kondisi yang positif dalam arti terus mengalami penurunan dari 0,4% di Tahun 2012 menjadi 0,2% selama 3 tahun berturut antara tahun 2013-2015 dan baru turun 6% menjadi 0,14% di tahun 2016, secara rinci dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel III.31.
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Sederajat Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Kotawaringin Barat	0,4	0,2	0,2	0,2	0,14	0,13
Provinsi Kalteng	1,08	1,53	1,07	0,34	1,5	0,95

Sumber: RPJMD Kobar 2012-2022, Renstra Dinbud Kobar, 2017-2022 dan Infografi Pendidikan Tahun 2011/2012 - 2016/2017



Gambar 3.38.
Angka Putus Sekolah (APS)SD/MI sederajat Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017

Tabel III.32

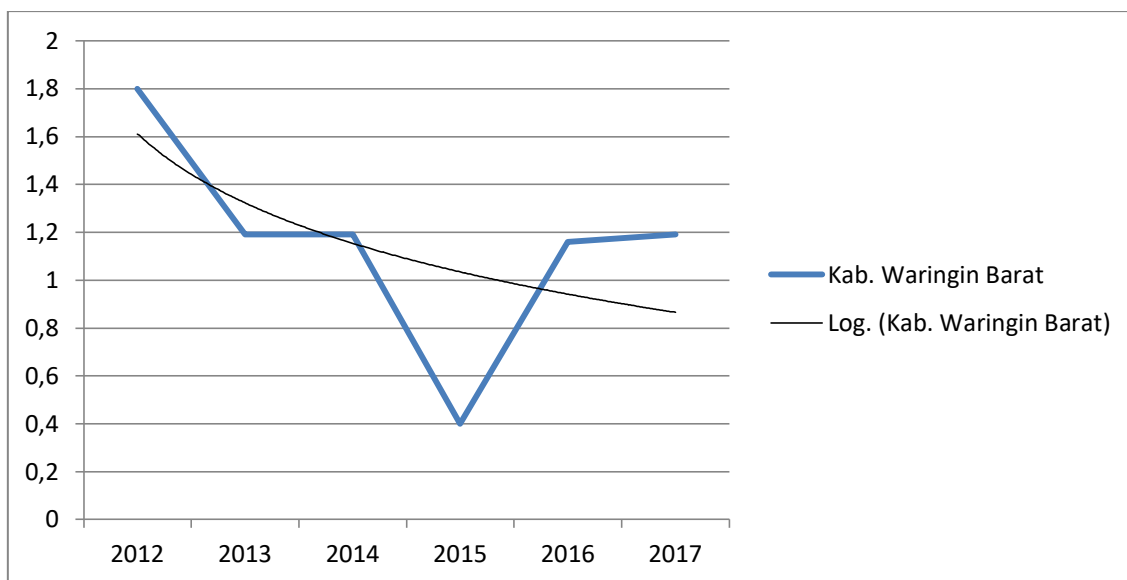
3) APtS SMP/MTs sederajat

Perkembangan APtS SMP/MTs sederajat kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012 hingga tahun 2015 menunjukkan kondisi flutuatif dan cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan di tahun 2015 cukup besar yaitu dengan kisaran prosentase 0,3% yaitu meningkat dari 0,4% menjadi 0,7% di tahun 2016. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel III.32.
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Sederajat Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Kotawaringin Barat	1,8	1,19	1,19	0,4	1,16	1,19
Provinsi Kalteng	2,89	1,5	1,42	0,5	1,53	1,08

Sumber: RPJMD Kobar 2012-2022, Renstra Dinbud Kobar, 2017-2022 dan Infografi Pendidikan Tahun 2011/2012 - 2016/2017



Gambar 3.39.
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Sederajat
di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017

Tabel III.33

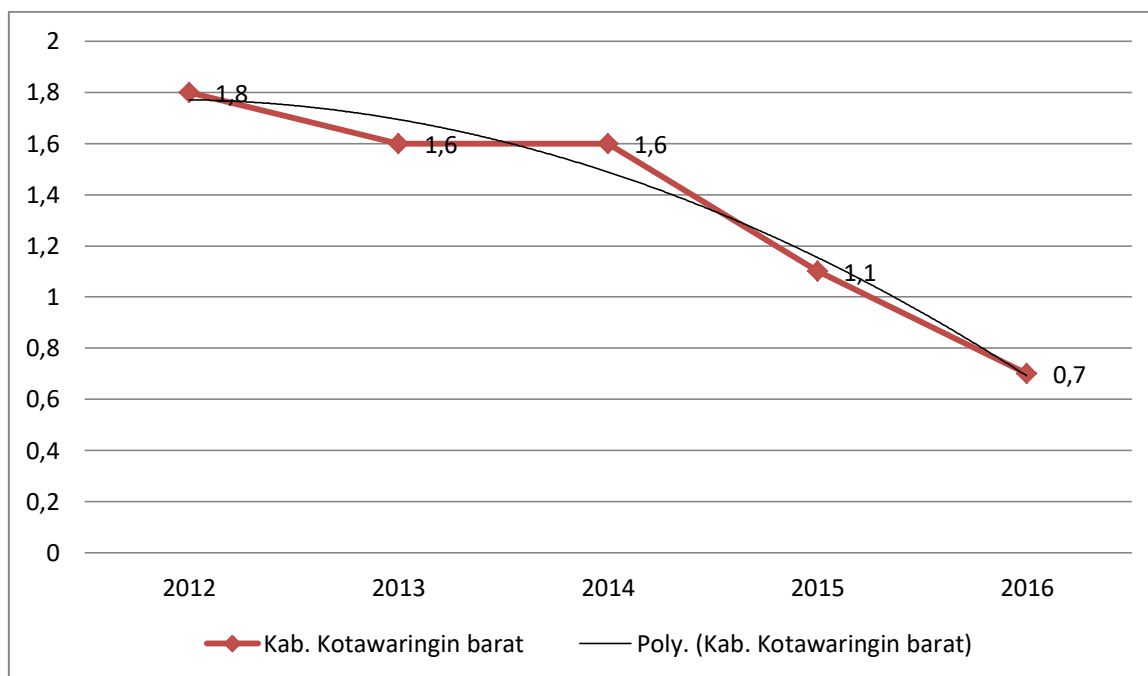
4) APS SMA/MA sederajat

Perkembangan APS SMA/MA sederajat kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012 hingga tahun 2016 terjadi fluktuasi, namun cenderung menurun pada tahun 2013, 2015 dan 2016. Penurunan pada tahun 2012-2013 berkisar 0,2%. Sementara penurunan di tahun 2014-2015 dan 2016 cukup besar yaitu antara 05%-0,6%. Dinamika perkembangan angka putus sekolah di tingkat SMA/MA sederajat ini bisa dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel III.33.
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA Sederajat Di Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2012-2017

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Kotawaringin Barat	1,8	1,6	1,6	1,1	0,7	0,7
Provinsi Kalteng	2,63	2,82	2,61	1,02	1,00	1,00

Sumber: RPJMD Kobar 2012-2022, Renstra Dinbud Kobar, 2017-2022 dan Infografi Pendidikan Tahun 2011/2012 - 2016/2017



Gambar 3.40.
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA Sederajat
di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017
Tabel III.34

D. Angka Kelulusan (AK)

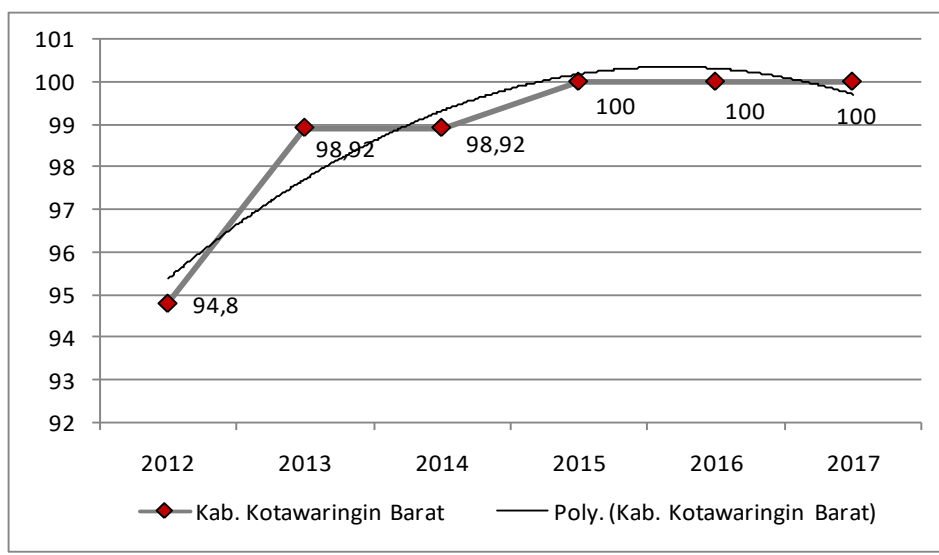
Angka kelulusan merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang lulus dengan siswa pada jenjang terakhir. Di Kabupaten Kotawaringin Barat angka kelulusan ini baik untuk tingkatan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA terus mengalami tren yang positif (cenderung naik) dan mencapai tingkat kelulusan yang maksimal (100%) di dua tahun terakhir yaitu tahun 2015 dan 2016 untuk SD/MI dan SMP/MTs. Sementara untuk SMA/MA hampir mendekati 100% (99%). Untuk lebih jelasnya perkembangan kelulusan mulai dari SD/MI sampai SMA/MA di Kabupaten Kotawaringin Barat ini dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

1) AK SD/MI sederajat

Tabel III.34.
Angka Kelulusan (AK) SD/MI Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2012-2017

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Kotawaringin Barat	94,8	98,92	98,92	100	100	100
Provinsi Kalteng	99,42	99,46	99,5	99,58	99,65	99,68

Sumber: RPJMD Kobar 2012-2022, Renstra Dinbud Kobar, 2017-2022. Infografi Pendidikan Tahun 2011/2012 -2016/2017.



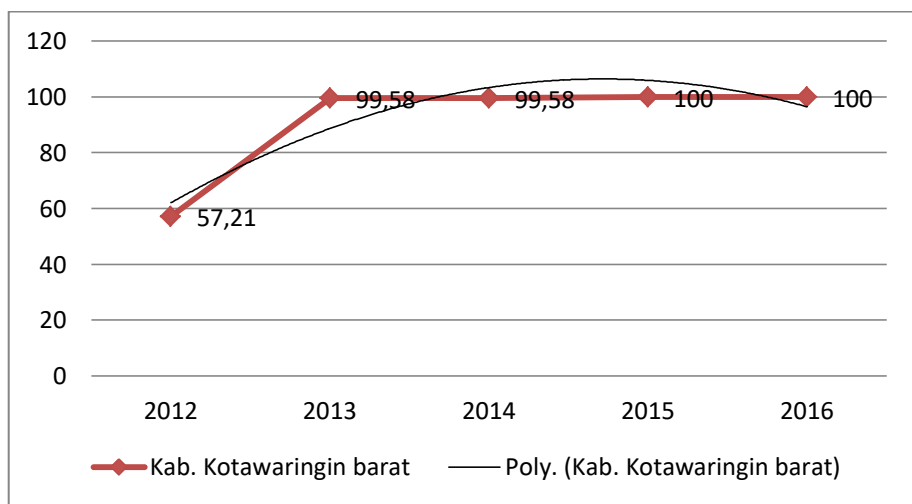
Gambar 3.41.
Angka Kelulusan (AK) SD/MI Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2012-2017
Tabel III.35

2. AK SMP/MTs Sederajat

Tabel III.35.
Angka Kelulusan (AK) SMP/MTs Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2012-2017

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Kotawaringin Barat	57,21	99,58	99,58	100	100	100
Provinsi Kalteng	99,01	96,86	99,26	98,2	98,8	98,65

Sumber: RPJMD Kobar 2012-2022, Renstra Dinbud Kobar, 2017-2022. Infografi Pendidikan Tahun 2011/2012 -2016/2017.



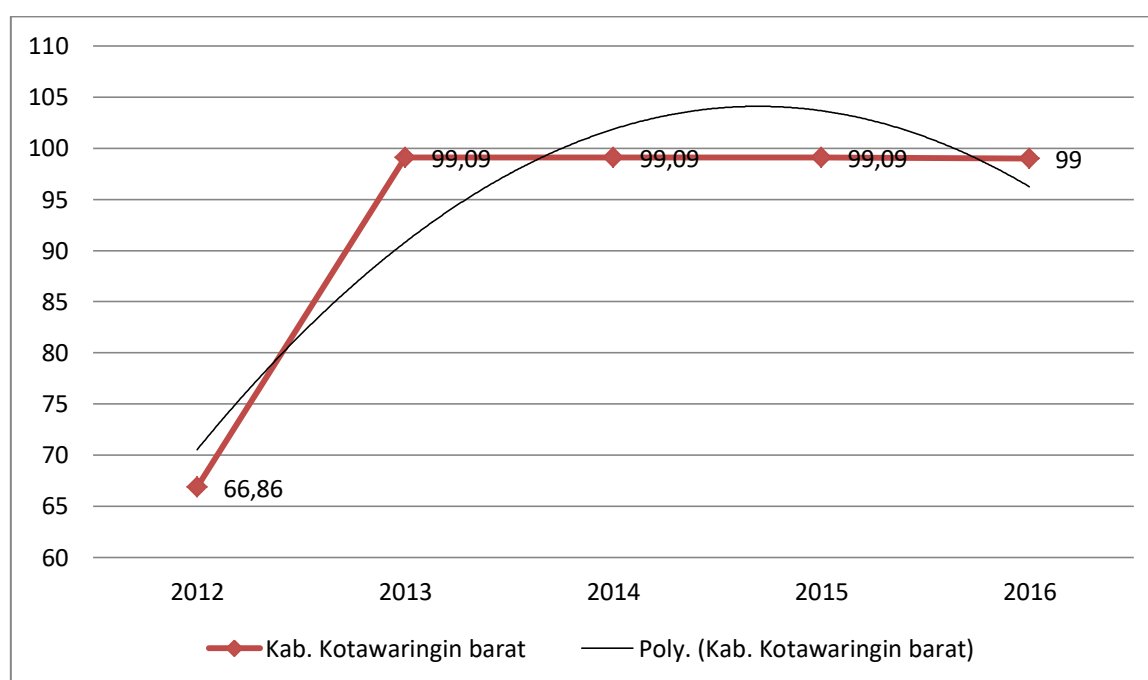
Gambar 3.42.
Angka Kelulusan (AK) SMP/MTs Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2012-2017
Sumber: Tabel III.36

3. AK SMA/MA Sederajat

Tabel III.36.
Angka Kelulusan (AK) SMA/MA sederajat Di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2012-2017

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Kotawaringin Barat	66,86	99,09	99,09	99,09	99	98
Provinsi Kalteng	97,73	98,12	84,09	90,97	97,86	98,76

Sumber: RPJMD Kobar 2012-2022, Renstra Dinbud Kobar, 2017-2022. Infografi Pendidikan Tahun 2011/2012 -2016/2017.



Gambar 3.43.
Angka Kelulusan (AK) SMA/MA Sederajat Di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2012-2017

Sumber: Tabel III.37

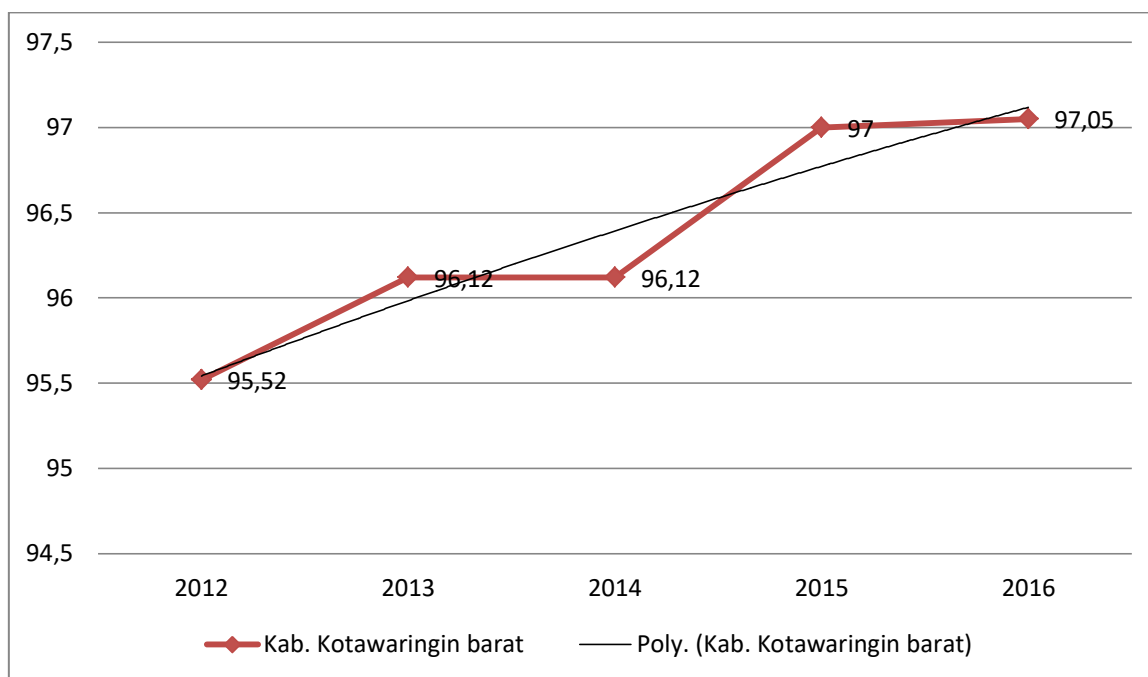
E. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka melek huruf ini di Kabupaten Kota Kotawaringin Barat meskipun mengalami penurunan akan tetapi masih menyisakan sekitar 2,95% penduduk di usia 15 tahun keatas yang buta huruf. Angka melek huruf pada tahun 2012 adalah 95,52% dan naik menjadi 97,05% di tahun 2016.

Tabel III.37.
Angka Melek Huruf di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2012-2017

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Kotawaringin Barat	95,52	96,43	96,12	97	97,05	97,05
Provinsi Kalteng	98,60	99,40	99,59	99,59	98,88	99,66

Sumber: RPJMD Kobar 2012-2022



Gambar 3.44.
Angka Melek Huruf di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2012-2017

Sumber: Tabel III.38

F. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin **lama**/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Sementara Rasio Angka Partisipasi Murni (RAPM) anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi adalah perbandingan APM murid/mahasiswa perempuan terhadap APM murid/mahasiswa laki-laki pada setiap jenjang dan jalur pendidikan, dinyatakan dalam persentase.

Indikator kesempatan memperoleh pendidikan antara perempuan dan laki-laki diukur dari rasio APM yang menunjukkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan. Pendidikan adalah salah satu aspek penting dari pembangunan manusia. Menghilangkan ketimpangan gender di semua jenjang pendidikan akan meningkatkan status dan kemampuan perempuan dan laki-laki. Jumlah penduduk perempuan adalah separuh dari seluruh jumlah penduduk, kesetaraan

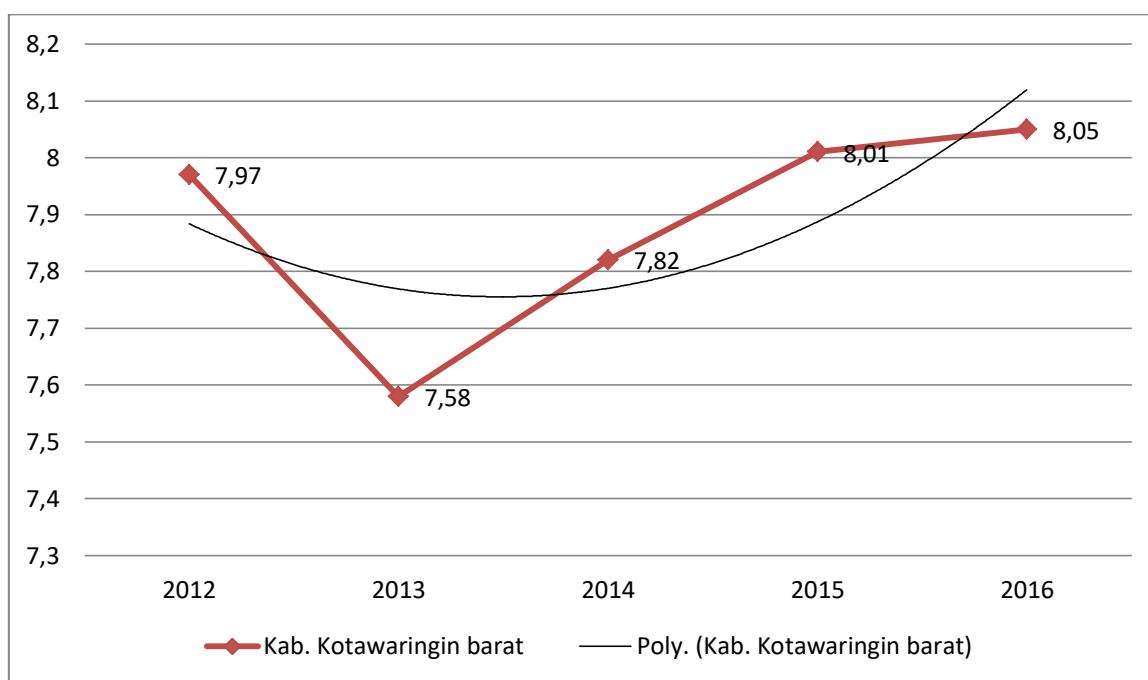
pendidikan perempuan akan memberikan peran aktif perempuan dalam pembangunan dan merupakan determinan yang penting dalam pembangunan ekonomi.

Besarnya APM untuk kabupaten Kotawaringin Barat ini fluktuatif dan sempat menurun sebesar 0,41% di tahun 2013 dari 7,97% ke 7,58% kemudian naik menjadi 8,05% di tahun 2016. Perkembangan rasio APM antara perempuan dan laki-laki ini secara rinci dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel III.38.
Rasio APM Perempuan Terhadap Laki-laki Di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2012-2017

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Kotawaringin Barat	7,97	7,58	7,82	8,01	8,05	
Provinsi Kalteng					1,04	1,02

Sumber: RPJMD Kobar 2012-2022



Gambar 3.45.
Rasio APM Perempuan Terhadap Laki-Laki di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2012-2017

Sumber: Tabel III.39

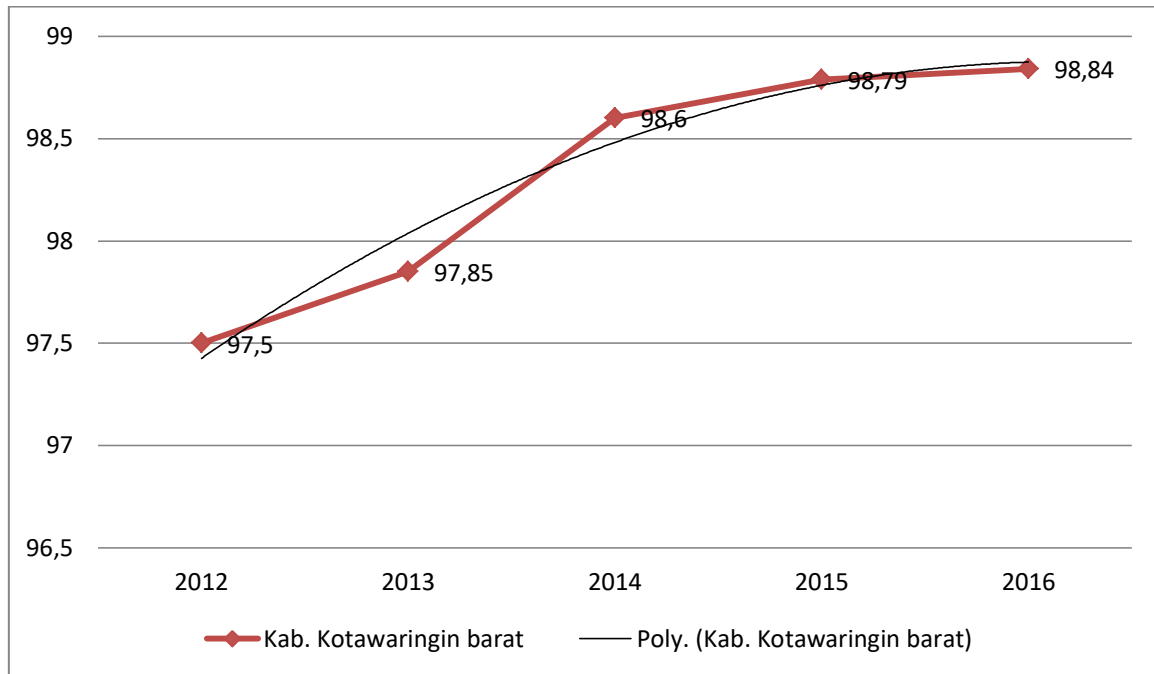
1) RAPM SD/MI Sederajat

Perkembangan rasio APM SD/MI sederajat perempuan terhadap laki-laki di Kotawaringin Barat tahun 2012 hingga tahun 2016 terjadi secara bertahap. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia sekolah SD baik perempuan dan laki-laki hampir semuanya (98,84%) telah bersekolah di tahun 2016. Perkembangan rasio APM SD/MI sederajat secara rinci dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel III.39.
RAPM SD/MI Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2012-2017

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Kotawaringin Barat	97,5	97,85	98,6	98,79	98,84	
Provinsi Kalteng					99,88	99,72

Sumber: RPJMD Kobar 2012-2022



Gambar 3.46.
RAPM SD/MI Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017

Sumber: Tabel III.40

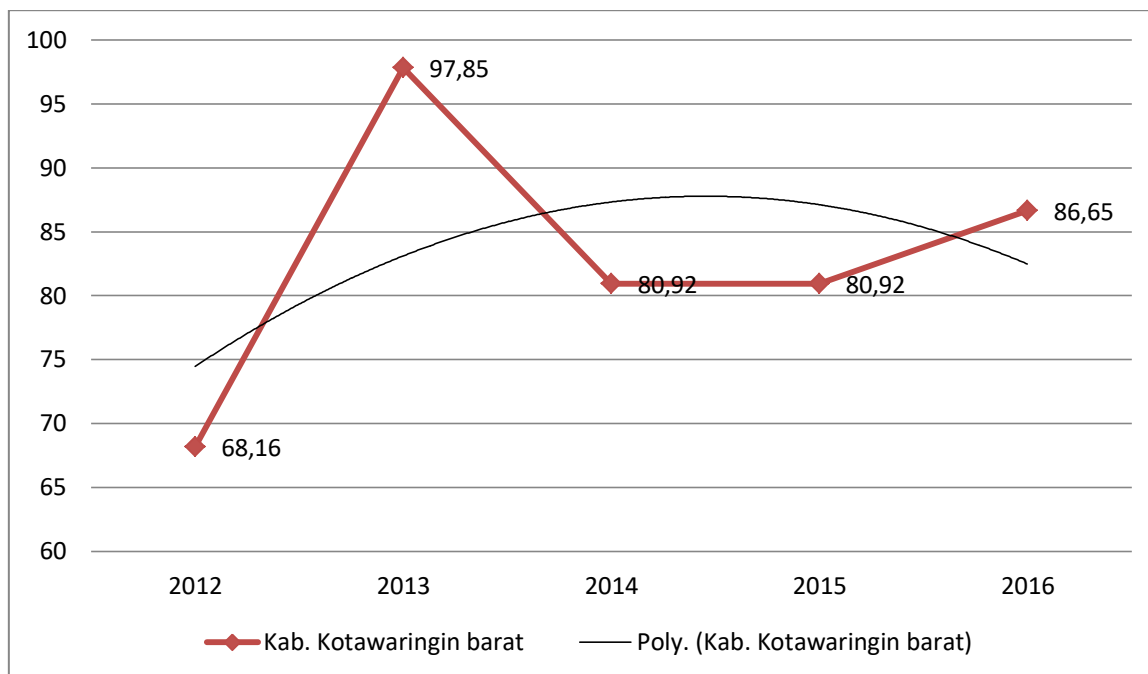
2) RAPM SMP/MTs Sederajat

Perkembangan rasio APM SMP/MTs sederajat perempuan terhadap laki-laki di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012 hingga tahun 2016 terjadi fluktuasi, yaitu pada tahun 2013 mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar 29,69% dan tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 77,92% dan 77,21%. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia sekolah SMP/MTs pada perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel III.40.
RAPM SMP/MTs Sederajat Di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2012-2016

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Kotawaringin Barat	68,16	97,85	80,92	80,92	86,65	
Provinsi Kalteng					103,05	102,04

Sumber: RPJMD Kobar 2012-2022



Gambar 3.47.
RAPM SMP/MTs Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017

Sumber: Tabel III.41

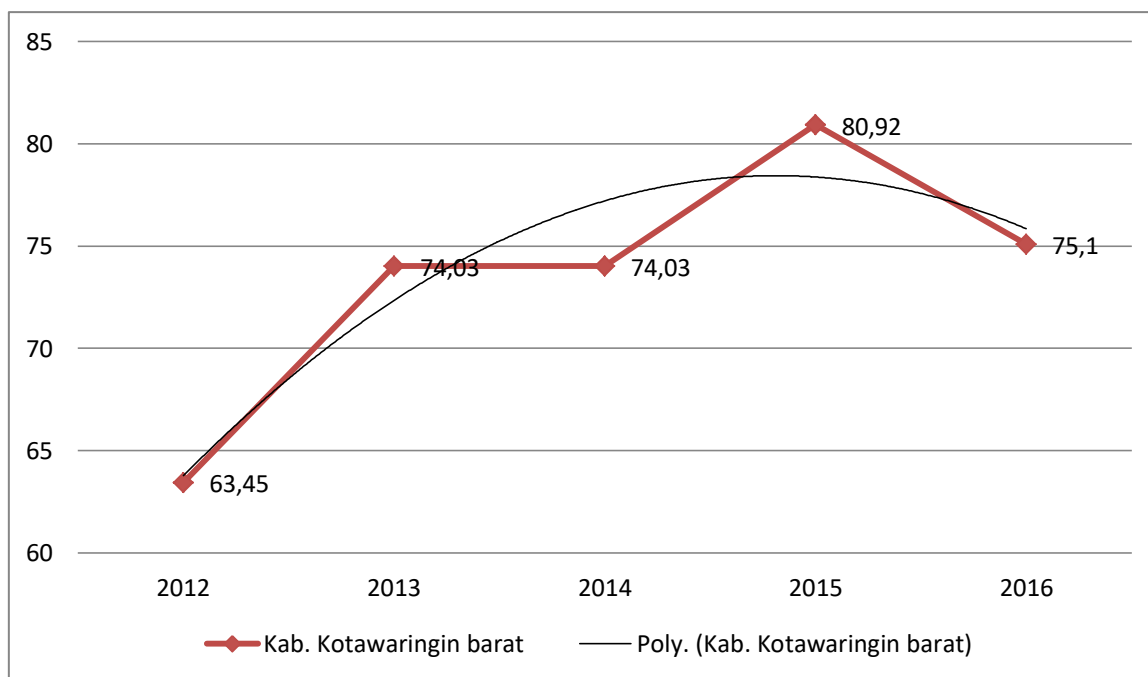
3) RAPM SMA/MA Sederajat

Perkembangan rasio APM SMA/MA sederajat perempuan terhadap laki-laki pada tingkat SMA/MA Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2012-2013 naik dari 63,45 menjadi 74,03% dan 80,92% pada tahun 2015, tetapi kembali menurun di tahun 2016 menjadi 75,1%. Pada periode 2015-2016 ini menunjukkan kinerja yang kurang baik terkait program peningkatan partisipasi rasio perempuan terhadap laki-laki ini kurang baik. Perkembangan rasio APM di tingkat SMA/MA ini secara rinci dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel III.41.
RAPM SMA/MA Sederajat Di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2012-2016

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Kotawaringin Barat	63,45	74,03	74,03	80,92	75,1	
Provinsi Kalteng					98,89	98,01

Sumber: RPJMD Kobar 2012-2022



Gambar 3.48.
RAPM SMA/MA Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017

Sumber: Tabel III.42

3.2.2.4. Infrastruktur Dasar

1) Akses Rumah Tangga Terhadap Sanitasi Layak

Derajat kesehatan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan di samping faktor perilaku dan pelayanan kesehatan. Upaya penyehatan lingkungan dilakukan untuk mewujudkan mutu lingkungan yang lebih sehat, antara lain melalui pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan air bersih dan sanitasi di sarana pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan, pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan dan pengembangan wilayah sehat.

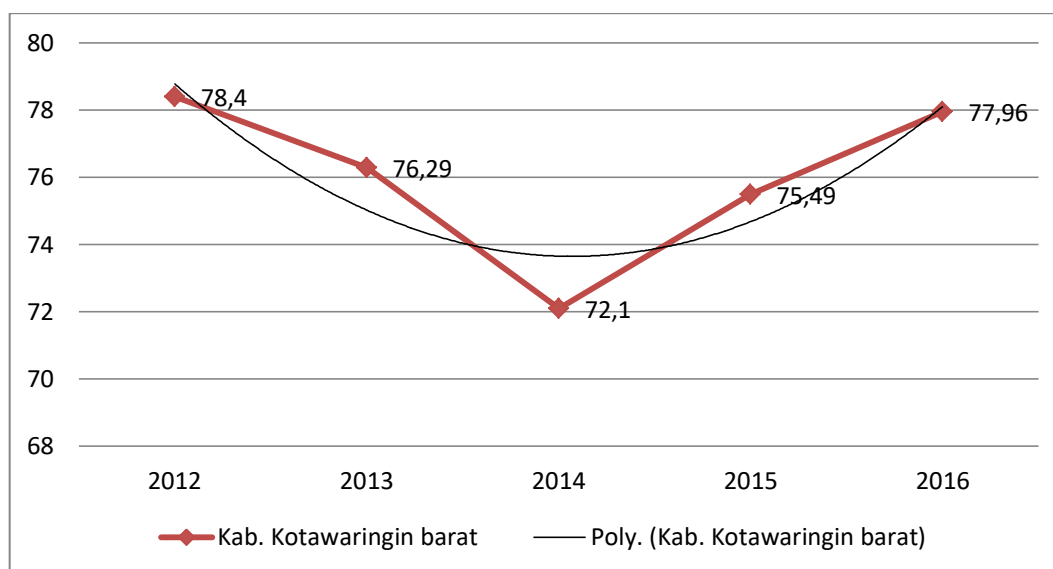
Akses terhadap sanitasi layak merupakan salah satu fondasi inti dari masyarakat yang sehat. Sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan manusia. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Buruknya kondisi sanitasi akan berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minumbagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya beberapa penyakit.

Persentase perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat selama kurun waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2012 sampai 2016 mengalami fluktuasi berkisar 78,4%-77,96%. Angka 78,4% pada tahun 2012 ini sempat mengalami penurunan di 2013 -2014 menjadi 72,1% dan mulai naik kembali di tahun 2015 menjadi 75,47%, serta 2016 menjadi 77,96%. Gambaran perkembangan akses RT terhadap sanitasi layak ini bisa dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel III.42.
Akses Rumah Tangga Terhadap Sanitasi Layak
di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Kotawaringin Barat	78,4	76,29	72,1	75,49	77,96	78,52
Provinsi Kalteng	38,31	38,99	44,05	37,5	30,85	35,88

Sumber: RPJMD Kobar 2012-2022. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS.



Gambar 3.49.
Akses Rumah Tangga Terhadap Sanitasi Layak
di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

Sumber: Tabel III. 43

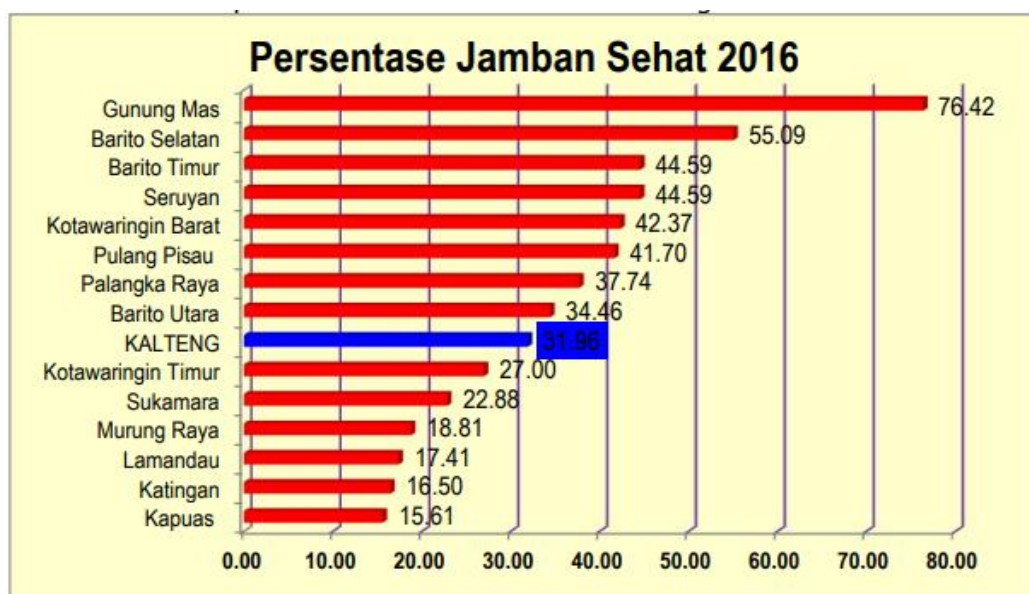
Sementara di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah penduduk yang memiliki akses sanitasi layak (jamban sehat) menurut jenis tempat buang air besar yang digunakan per kabupaten/kota pada tahun 2016 sebagian besar penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan kloset berjenis leher angsa sebanyak 683.894 orang, komunal sebanyak 30.037 orang, cemplung/cubluk sebanyak 63.643 orang, dan plengsengan sebanyak 31.362 orang.

Berdasarkan konsep dan definisi MDGs, akses sanitasi layak apabila penggunaan fasilitas tempat buang air besar milik sendiri atau bersama, jenis kloset yang digunakan jenis leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tangki septik atau Sarana Pembuangan Air

Limbah (SPAL). Metode pembuangan tinja yang baik yaitu dengan jamban dengan syarat sebagai berikut:

- Tanah permukaan tidak boleh terjadi kontaminasi.
- Tidak boleh terjadi kontaminasi pada air tanah yang mungkin memasuki mata air atau sumur.
- Tidak boleh terkontaminasi air permukaan.
- Tinja tidak boleh terjangkau oleh lalat dan hewan lain.
- Tidak boleh terjadi penanganan tinja segar, atau bila memang benar-benar diperlukan, harus dibatasi seminimal mungkin.
- Jamban harus bebas dari bau atau kondisi yang tidak sedap dipandang.
- Metode pembuatan dan pengoperasian harus sederhana dan tidak mahal.

Persentase jumlah penduduk pengguna jamban sehat sekalimantan tengah tahun 2016, bisa dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 3.50.

Persentase Penduduk dengan Akses Sanitasi Layak (Jamban Sehat) Per Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota dan Bidang Kesmas tahun 2017

Pada gambar di atas terlihat bahwa Persentase Penduduk dengan Akses Sanitasi Layak (Jamban Sehat) Per Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 sebesar 31,96% lebih rendah dibandingkan tahun 2015 sebesar 32,33%. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Gunung Mas sebesar 76,42% diikuti oleh Kabupaten Barito Selatan sebesar 55,09% dan Kabupaten Barito Timur sebesar 44,59%. Kabupaten Kotawaringin Barat berada di posisi 5 peserta penggunaan jamban sehat dengan persentase pengguna sebesar 42,37% atau 14,41% di atas rata-rata provinsi Kalimantan Tengah. Persentase terendah terdapat di Kabupaten Kapuas sebesar 15,61%, diikuti oleh Kabupaten Katingan sebesar 16,50% dan Kabupaten Lamandau sebesar 17,41%.

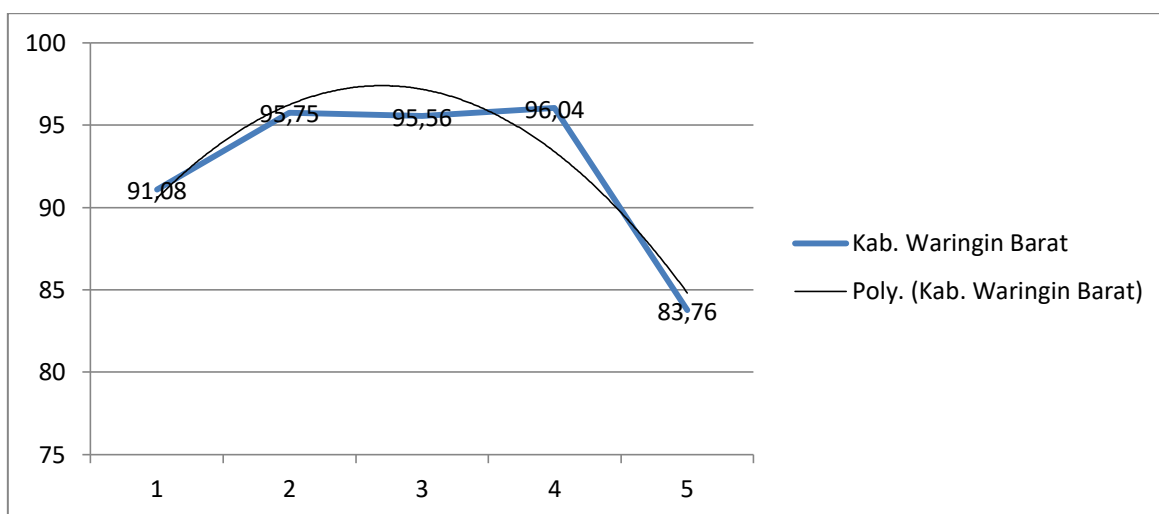
2) Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum Bersih

Perkembangan persentase rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi yang cenderung menurun dari 91,08% di tahun 2012 menjadi 83,76% di tahun 2016 walaupun pada tahun 2013-2015 sempat mencapai angka 96,04%. Gambaran fluktuasi rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Kotawaringin Barat bisa dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel III.43.
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum Bersih
Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Kotawaringin Barat	91,08	95,75	95,56	96,04	83,76	85,25
Provinsi Kalteng	52,44	48,04	58,73	57,01	61,26	63,9

Sumber: RPJMD Kobar 2012-2022. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS.



Gambar 3.51.
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum Bersih
di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

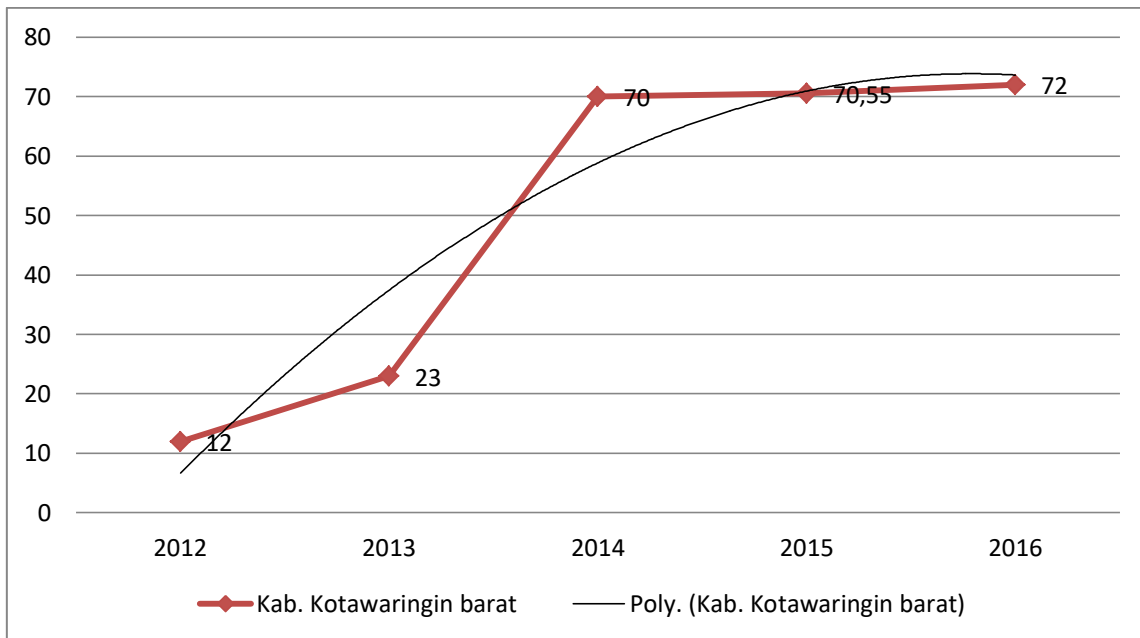
Sumber: Tabel III.44

3) Cakupan Rumah Tangga Pengguna Air Minum PDAM

Tabel III.44.
Cakupan Rumah Tangga Pengguna Air Minum PDAM
di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Kotawaringin Barat	12	23	70	70,55	72	72,8
Provinsi Kalteng	52,44	48,04	58,73	57,01	61,26	63,9

Sumber: RPJMD Kobar 2012-2022. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS.



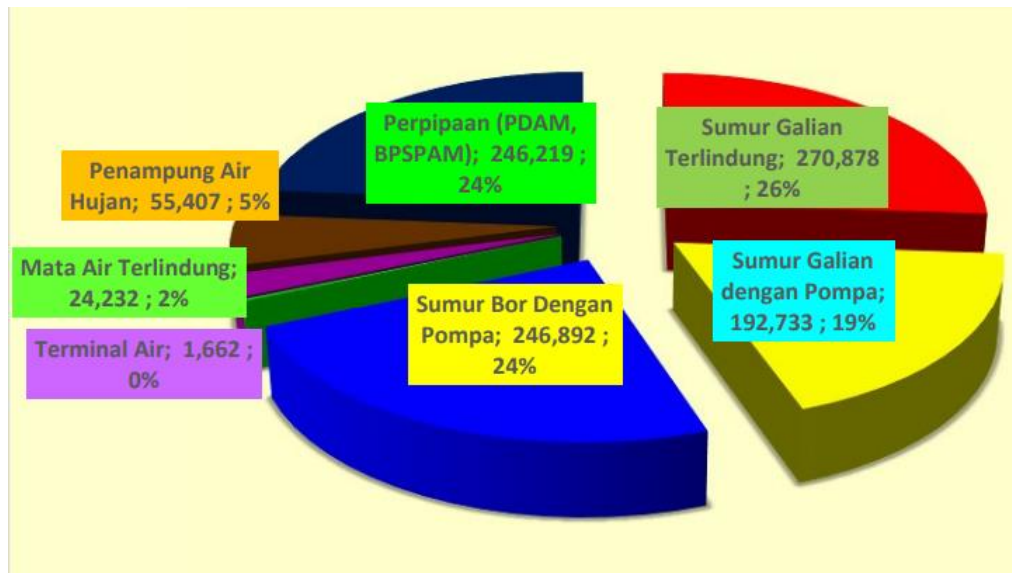
Gambar 3.52.
Cakupan Rumah Tangga Pengguna Air Minum PDAM
di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017

Sumber: Tabel III.45

Kualitas Air Minum menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Penyelenggara air minum dapat berasal dari badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum. Tidak semua air dapat diminum, syarat-syarat kualitas air minum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan dimaksud, di antaranya adalah sebagai berikut:

- Syarat Fisik : Tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna;
- Parameter Mikrobiologi E Coli dan total Bakteri Koliform, kadar maksimum yang di perbolehkan 0 jumlah per 100 ml sampel;
- Syarat Kimia : Kadar Besi : maksimum yang diperbolehkan 0,3 mg/l, Kesadahan (maks 500 mg/l), pH 6,5-8,5;
- Syarat Mikrobiologis : Koliform tinja/total koliform (maks 0 per 100 ml air);
- dan parameter tambahan lainnya.

Jumlah penduduk berdasarkan jenis sumber air minum yang berkualitas yang memenuhi syarat baik secara kimiawi, fisik maupun biologis yang memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum berdasarkan kriteria JMP WHO-INICEF 2006 di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

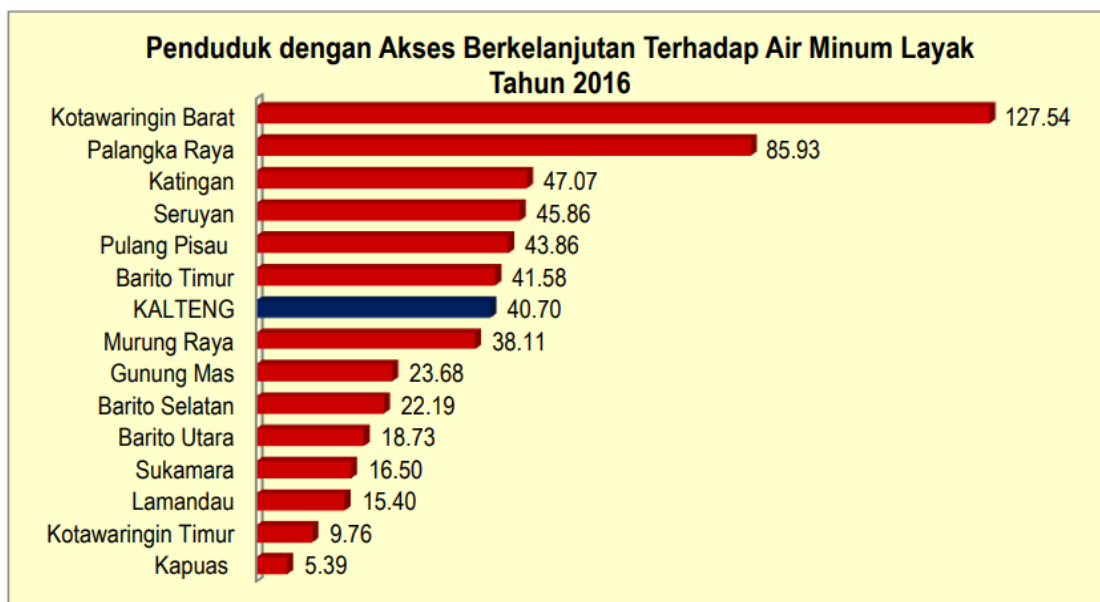


Gambar 3.53.

Jumlah Penduduk dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota dan Bidang Kesmas tahun 2017

Gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang dapat mengakses air minum yang layak di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 terbesar pada sumur gali terlindung sebanyak 270.878 penduduk, kemudian Sumur bor dengan pompa sebanyak 246.892 Penduduk, perpipaan (PDAM, BPSPAM) sebanyak 246.219 penduduk, kemudian sumur galian dengan pompa sebanyak 192.733 penduduk, Penampung Air hujan sebanyak 55.407 Penduduk, Mata air terlindung 24.232 penduduk dan Terminal air sebanyak 1662 penduduk. Data yang ditampilkan di profil kesehatan belum mencerminkan jumlah penduduk dengan akses air minum yang layak, hal ini disebabkan karena belum semua penduduk tercover dalam pemetaan akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas (layak). Persentase penduduk terhadap akses berkelanjutan terhadap air minum layak per kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.54.

Persentase Penduduk dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas Per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota dan Bidang Kesmas tahun 2017

Gambar di atas menunjukkan hasil bahwa Persentase Penduduk dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas Per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 sebesar 40,70%, lebih besar dibandingkan tahun 2015 sebesar 22,41%. Persentase terbesar penduduk Penduduk dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 127,54%, diikuti oleh Kota Palangka Raya sebesar 85,93% dan Kabupaten Katingan sebesar 47,07%. Sedangkan Persentase terendah Penduduk dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas terdapat di Kabupaten Kapuas sebesar 5,39%, diikuti oleh Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 9,76% dan Kabupaten Lamandau sebesar 15,40%.

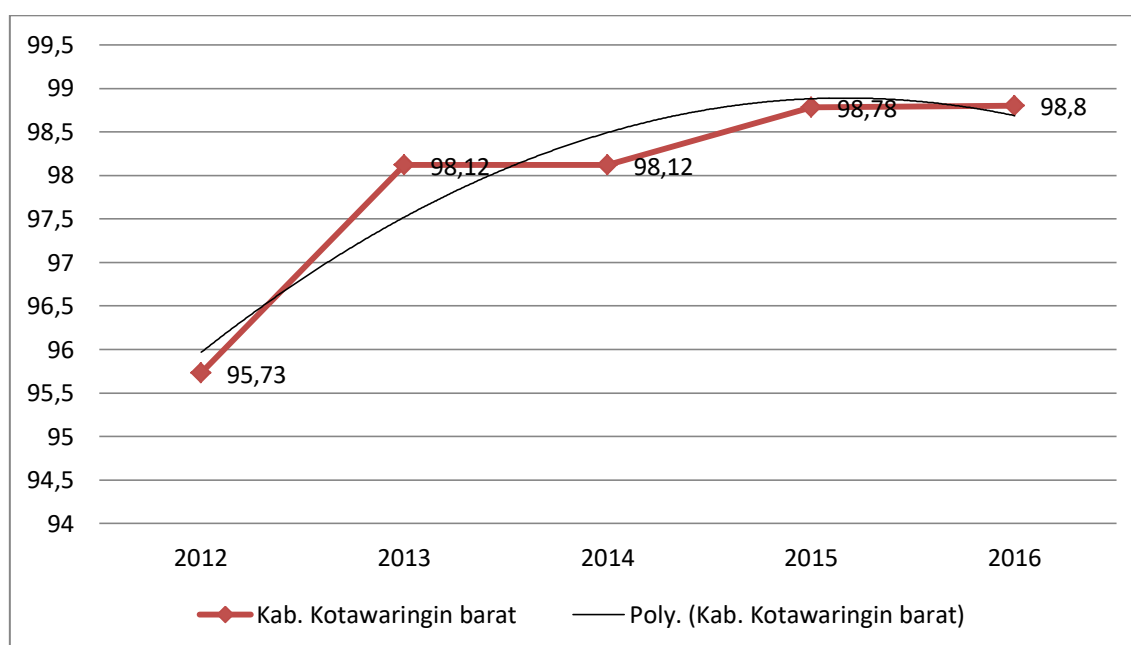
Persentase kualitas air minum di penyelenggara air minum yang memenuhi syarat kesehatan (fisik, bakteriologi dan kimia) per kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 adalah 80,26% dengan 983 sampel, lebih sedikit dibandingkan 2015 adalah 80,90% dari 801 sampel yang diperiksa. Ada 6 (enam) Kabupaten yang capaiannya sebesar 100% yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau diikuti oleh Kabupaten Sukamara, Katingan, Kapuas dan Kabupaten Barito Utara. Sedangkan kabupaten dengan capaian paling sedikit adalah Kabupaten Pulang Pisau sebesar 20,8%, diikuti oleh Kabupaten Kotawaringin Timur 25% dan Kabupaten Barito Timur sebesar 25,6%.

4) Persentase Rumah Tinggal Pengguna Fasilitas Penerangan Listrik

Tabel III.45.
Persentase Rumah Tinggal Pengguna Fasilitas Penerangan Listrik
Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Kotawaringin Barat	95,73	98,12	98,12	98,78	98,8	99,00
Provinsi Kalteng	68.49	72.79	73.74	77.81	76.93	81.75

Sumber: RPJMD Kobar 2012-2022. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS.



Gambar 3.55.
Persentase Rumah Tinggal Pengguna Fasilitas Penerangan Listrik
di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017

Sumber: Tabel III.46

3.2.2.5. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan diartikan sebagai tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi bagi setiap warga untuk menopang aktivitasnya sehari-hari sepanjang waktu. Ada empat komponen dalam yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan, yaitu kecukupan ketersediaan pangan, stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun, aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan dan kualitas/keamanan pangan. Dalam mengukur ketahanan pangan tingkat rumah tangga, kemudian dihitung dengan menggabungkan keempat komponen tersebut untuk menghasilkan satu indikator indeks ketahanan pangan.

1) Produksi Beras

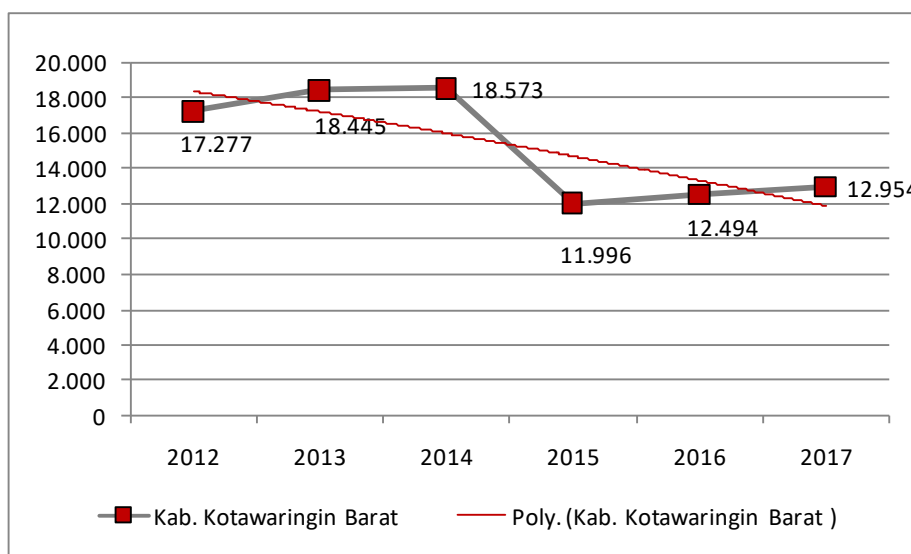
Perkembangan produksi beras di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2012 menunjukkan angka 17.277 Kg. Jumlah ini mengalami kenaikan di tahun 2014 menjadi 18,996 kg pada tahun 2015. Tahun 2015 dan 2016 Jumlah produksi beras mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 12,494 Kg Perkembangan produksi beras ini secara rinci dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel III.46.
Produksi Beras di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Kotawaringin Barat	17.277	18.445	18.573	11.996	12.494	12.954
Provinsi Kalteng	755.507	812.652	838.207	893.202	907.506	922.038

Sumber: RPJMD Kobar 2012-2022

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar 3.56.
Produksi Beras di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017

Sumber: Tabel 3.47

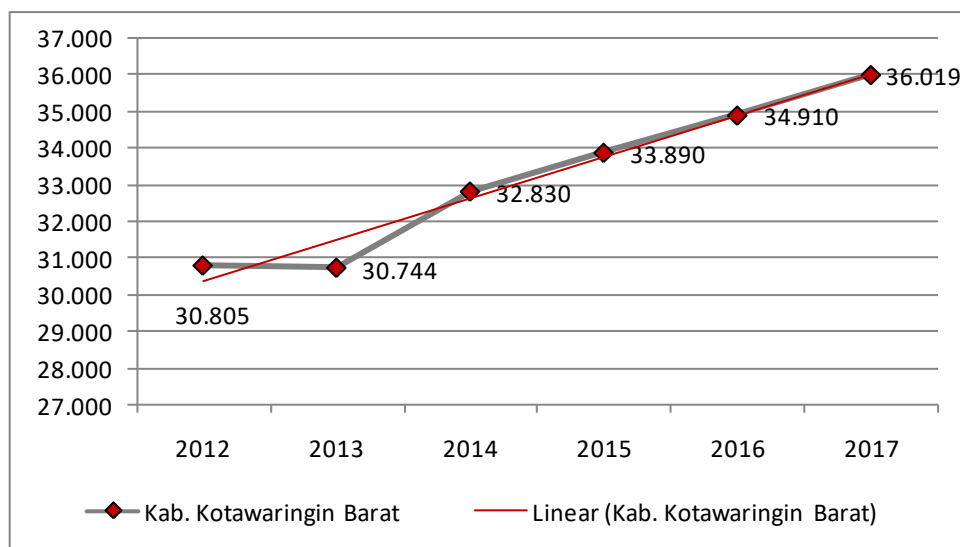
2) Jumlah Kebutuhan terhadap ketersediaan Bahan Pangan Pokok Strategis

Berkebalikan dengan jumlah produksi pangan strategi (beras) selama kurun waktu 2012-2016 yang mengalami penurunan, angka kebutuhan akan bahan pangan strategis terus mengalami peningkatan kebutuhan. Pada tahun 2012 angka kebutuhan akan bahan pokok pangan strategis ini mencapai 30.805 Kg dan meningkat di tahun 2016 menjadi 34,910 Kg. Gambaran tren perubahan yang cenderung naik untuk tiap tahunnya terkait dengan bahan pangan ini dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel III.47.
Jumlah Kebutuhan Bahan Pangan
Pokok Strategis di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Kotawaringin Barat	30.805	30.744	32.830	33.890	34.910	36.019
Provinsi Kalteng (ton/th)	203.482	204.178	206.862	212.190	221.801	213.415

Sumber: RPJMD Kobar 2012-2022



Gambar 3.57.
Jumlah Kebutuhan Bahan Pangan Pokok Strategis
Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017

Sumber: Tabel III.48

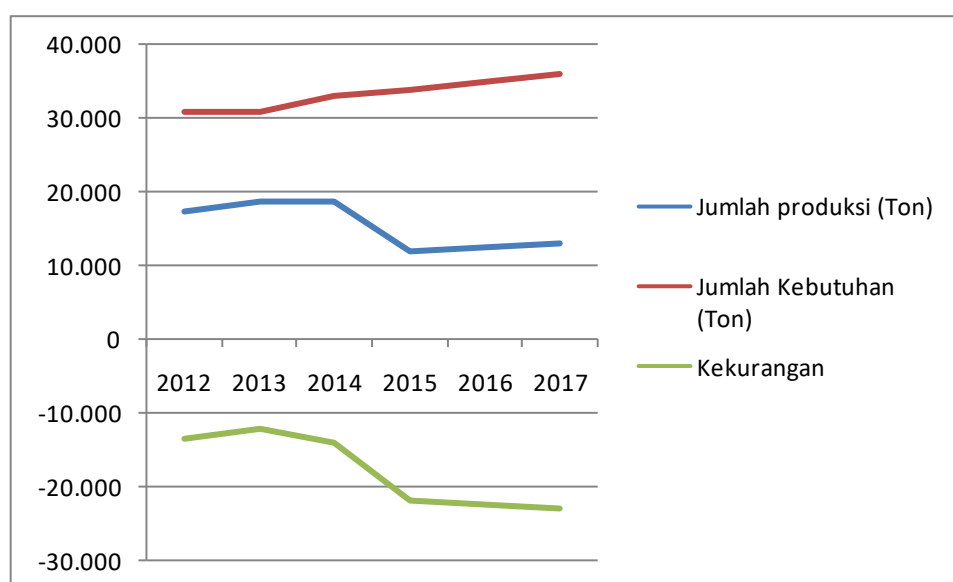
Dari kondisi yang kontradiktif antara produksi bahan pangan strategi yang cenderung menurun dan kebutuhan yang cenderung terus naik tersebut, menyebabkan adanya selisih berupa kekurangan bahan pangan pokok strategis yang jumlahnya cenderung naik sangat signifikan dari kerang 13.258 Kg di tahun 2012 menjadi kurang 22.416 Kg di tahun 2016. Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan adanya peningkatan harga pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

3) Perbandingan Jumlah Kebutuhan terhadap ketersediaan Bahan Pangan Pokok Strategis

Tabel III.48.
Perbandingan Jumlah Kebutuhan terhadap Ketersediaan Bahan Pangan Pokok Strategis di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah produksi (Ton)	17.277	18.445	18.573	11.996	12.494	12.954
Jumlah Kebutuhan (Ton)	30.805	30.744	32.830	33.890	34.910	36.019
Kekurangan	-13.528	-12.299	-14.257	-21.894	-22.416	-23.065

Sumber: RPJMD Kobar 2012-2022



Gambar 3.58.
Perbandingan Jumlah Kebutuhan terhadap Ketersediaan Bahan Pangan Pokok Strategis di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

Sumber: Tabel III.49

Pustaka:

- Badruzaman, Abad. 2009. Dari Teologi Menuju Aksi (Membela yang Lemah, Menggempur Kesenjangan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chriswardani Suryawati Memahami. 2005. Kemiskinan Secara Multidimensional (Understanding Multidimension Of Poverty) Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah Jurnal MPK Vol. 08/No.03/September/2005
- Jarnasy, Owin(2004) Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan. Belantika. Jakarta.
- Mas'ood, M 1997. Politik, Birokrasi dan Pembangunan. Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta.
- Nasikun (2001) Diktat Mata Kuliah. Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Magister Administrasi Publik. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Kabupaten Kotawaringin dalam angka 2012-2018
- Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
- RPJMD Kabupaten Kota Kotawaringin.
- Renstra Dinas Kesehatan 2012 -2016
- <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/>

BAB IV

DETERMINAN KEMISKINAN DAERAH



4.1. ANALISIS AKAR MASALAH

Pada bab sebelumnya telah banyak diuraikan tentang karakteristik kemiskinan yang terjadi di Kotawaringin Barat. Angka kemiskinan ini meskipun persentasenya menurun terus dalam kurun waktu 2012 sampai 2016, dan selalu dibawah angka rata-rata nasional maupun provinsi, akan tetapi secara jumlah masih cukup besar yaitu 14.221 jiwa dan mengalami sedikit kenaikan di tahun 2016.

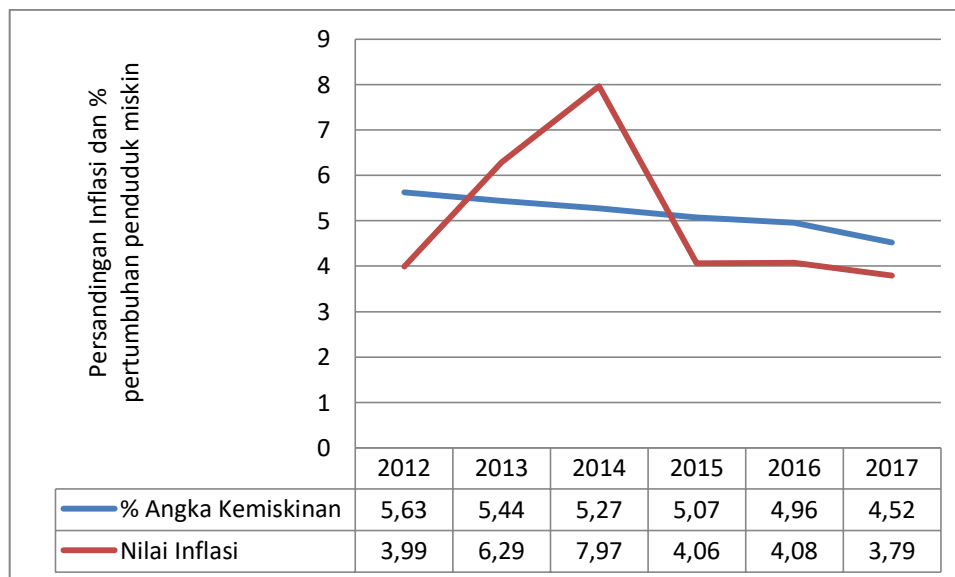
Tabel IV.1.
Kemiskinan dan Tingkat Infasi di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2012-2017

Indikator Kemiskinan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Garis Kemiskinan (Rp)	263840	273467	279080	293436	319064	338 230
Jumlah Pddk Miskin (jiwa)	14244	14207	14102	14102	14221	13 270
% Angka Kemiskinan	5,63	5,44	5,27	5,07	4,96	4,52
Nilai Inflasi	3,99	6,29	7,97	4,06	4,08	3,79

Sumber: diolah dari Data Dinamis BPS, 2016 dan Kobar dalam angka 2018, https://twitter.com/bps_kobar

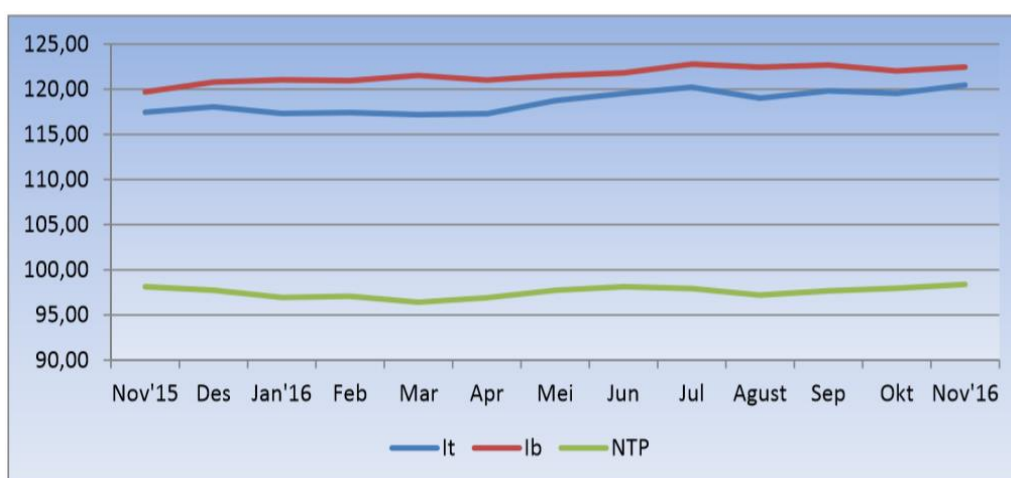
Menurunnya besaran prosentase dan jumlah penduduk miskin ini, di Kabupaten Kotawaringin Barat dipengaruhi oleh beberapa faktor.

- 1) Pertama adalah menurunnya laju inflasi walaupun selama 5 tahun terakhir laju inflasi di kabupaten ini mengalami fluktuasi tetapi pada periode tahun 2015 dan 2016 cenderung mengalami penurunan (kenaikan terjadi pada tahun 2012 -2014) walaupun cukup kecil. Di tingkat provinsi kondisi Inflasi juga mengalami penurunan. Pada September 2015 sebesar 5,75 % mengalami penurunan dibanding pada September 2016 yaitu tercatat sebesar 3,18%.



Gambar 4.1.
Grafik Kemiskinan dan Tingkat Inflasi di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2012-2017
Sumber: Tabel IV.1

- 2) Peran sektor pertanian ini terkait dengan angka kemiskinan ini juga bisa dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) . Biaya produksi, dan konsumsi rumah tangga terhadap barang atau jasa di wilayah perdesaan selama November 2016 menunjukkan bahwa NTP Provinsi Kalimantan Tengah meningkat 0,42%. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan indeks harga yang diterima petani (It) sebesar 0,93%, relatif lebih tinggi dari indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang sebesar 0,43%.

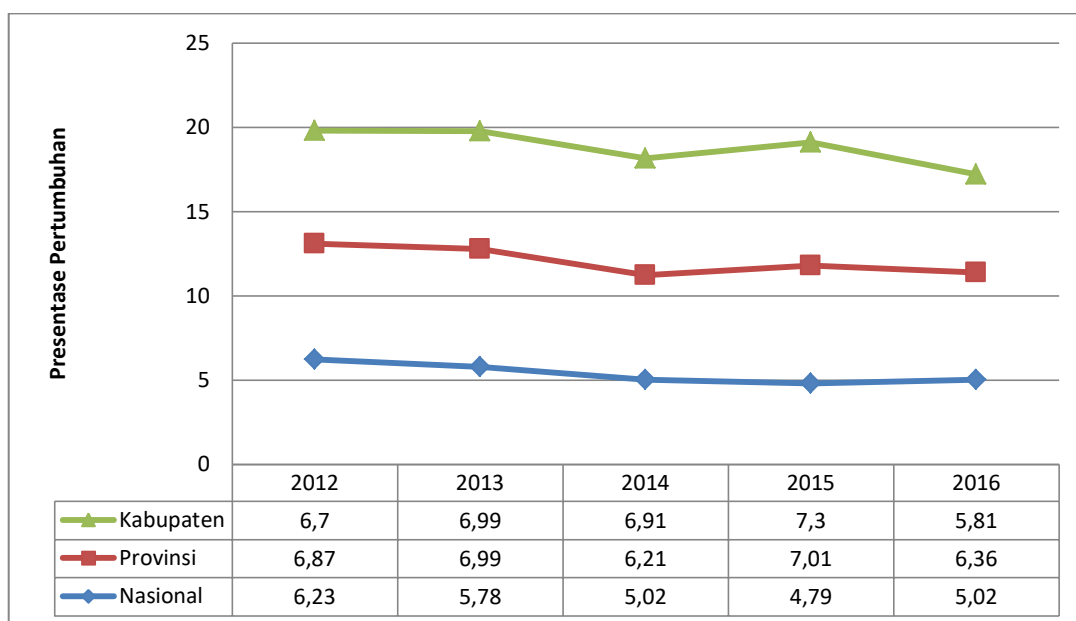


Gambar 4.2.
Grafik Perkembangan NTP dan Indeks Harga yang Diterima/Dibayar Petani
November 2015 – November 2016

Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
No. 03/12/62/Th.X, 1 Desember 2016

Selain itu Besarnya nilai tukar hasil produksi di tingkat petani produsen, memiliki korelasi positif terhadap tingginya perubahan indeks harga pada kelompok komoditas yang dicakup dalam lima subsektor meliputi tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan. Sehingga NTP di sini juga dapat mengindikasikan seberapa kuat daya tukar hasil produksi pertanian terhadap tingkat harga di pasaran, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun biaya produksi pada masing-masing subsektor selama periode yang sama.

- 3) Adanya kenaikan nilai tukar usaha rumah tangga Pertanian. Data per November Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) naik 0,67%, Indeks Harga yang diterima Petani (It) naik 0,93% dan Indeks Harga yang dibayar Petani (Ib) naik 0,43%. Sementara konsumsi rumah tangga juga mengalami kenaikan 0,51%. Kondisi ini juga turun berperan dalam mengurangi prosentase penduduk miskin ditingkat dikabupaten dan provinsi.
- 4) Adanya pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat selama 4 tahun dari tahun 2012-2015 yang mengalami kenaikan, walaupun di tahun 2016 mengalami penurunan.



Gambar 4.3.
Grafik Persandingan Pertumbuhan Ekonomi di Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten

Sumber: RPJMD Kobar 2012-2022

Di luar kondisi positif di atas, dari data yang ada, walaupun garis tren prosentase kemiskinan terus menurun, tetapi masih menyisakan sejumlah individu miskin di Kotawaringin Barat dan jumlahnya masih besar di tahun 2015 (33.332 jiwa) yang terbagi dalam status

kesejahteraan desil 1, desil 2, desil 3 dan desil 4. Jumlah individu sesuai dengan status kesejahteraan di Kabupaten Kotawaringin Barat ini bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.2.
Jumlah Individu Menurut Kecamatan dan Status Kesejahteraan
Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015

No	Nama Kecamatan Kecamatan	Jumlah Individu				
		Desil 1 *)	Desil 2 *)	Desil 3 *)	Desil 4 *)	TOTAL
1	Kotawaringin Lama	419	750	856	778	2.803
2	Arut Selatan	794	2.375	3.060	2.933	9.162
3	Kumai	1.418	3.426	3.384	2.909	11.137
4	Pangkalan Banteng	344	1.120	1.437	1.189	4.090
5	Pangkalan Lada	397	1.470	1.673	1.374	4.914
6	Arut Utara	45	268	425	488	1.226
	Total	3.417	9.409	10.835	9.671	33.332

Keterangan

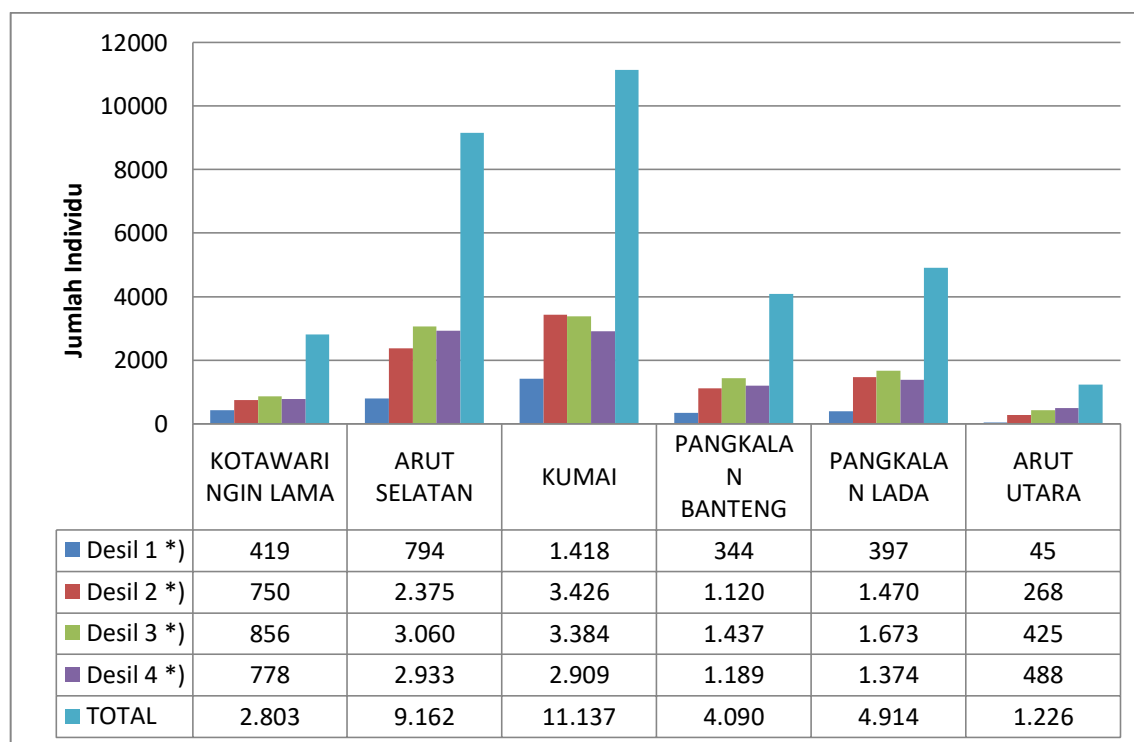
Desil 1 (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia)

Desil 2 (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan diatas 10% - 20% terendah di Indonesia)

Desil 3 (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan diatas 20% - 30% terendah di Indonesia)

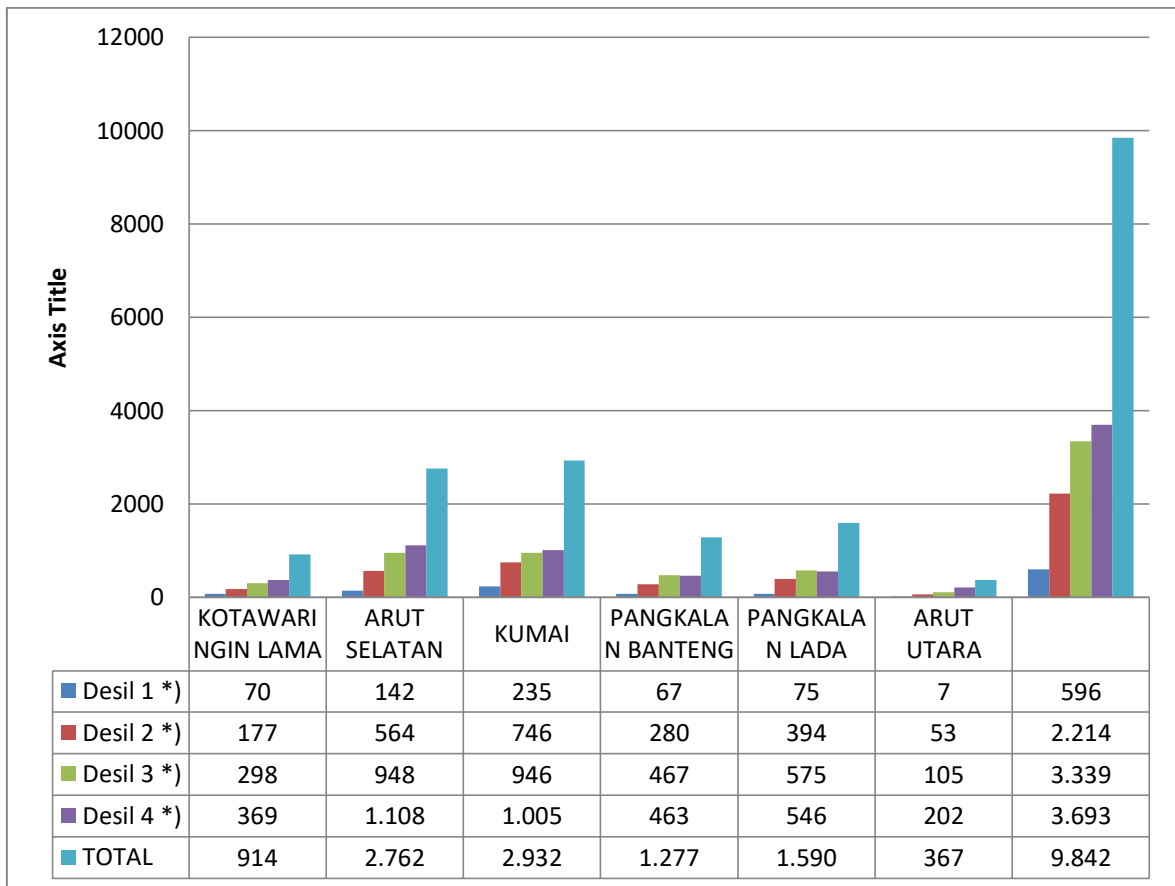
Desil 4 (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan diatas 30% - 40% terendah di Indonesia)

Sumber: Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin 2015



Gambar 4.4.
Grafik Jumlah Individu Menurut Kecamatan dan Status Kesejahteraan di
Kabupaten Kotawaringin Barat

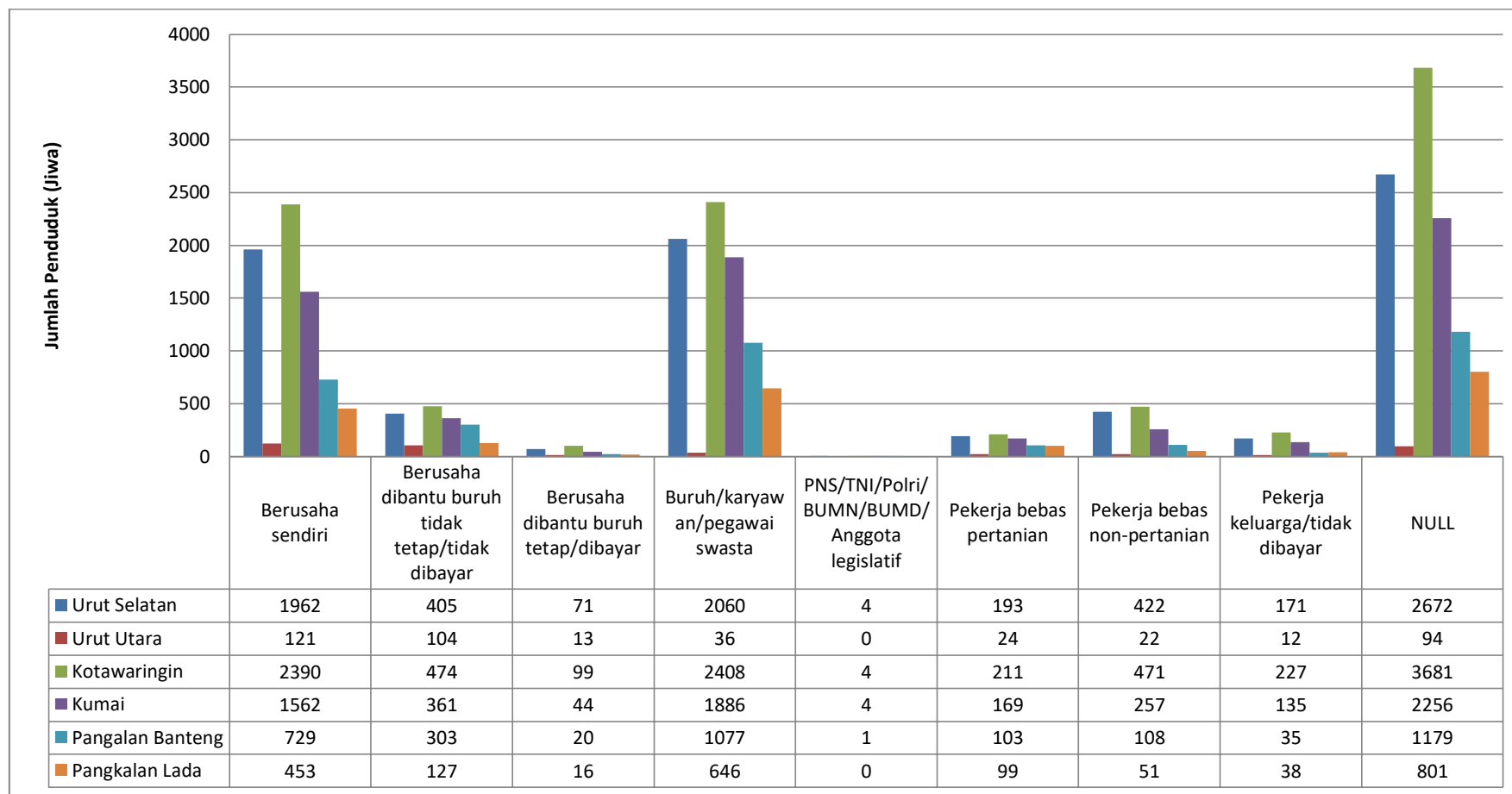
Sumber: Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin 2015



Gambar 4.5.
Jumlah Rumah Tangga dan Menurut Kecamatan dan Status Kesejahteraan Di
Kabupaten Kotawaringin Barat

Sumber: Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin 2015

Dilihat dari karakter penduduk miskin berdasarkan pekerjaan utama, seperti pada grafik tabel di bawah, jumlah penduduk miskin yang bekerja menjadi karyawan sekitar 8.113 jiwa (26,33%), dan yang berusaha sendiri cukup besar yaitu 7.217 (23%). Serapan penduduk miskin pada pekerjaan utama sebagai karyawan ini tentu berkaitan dengan pekerjaan kasar tidak membutuhkan keterampilan khusus. Sementara yang bekerja mandiri ini juga sama. Kondisi inilah yang harusnya disikapi terkait dengan upaya peningkatan lapangan pekerjaan sesuai dengan skill mereka, utamanya berkaitan dengan pekerjaan utama yang mandiri. Sementara besaran jumlah penduduk sesuai dengan lapangan pekerjaan utama lainnya lebih detailnya dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut ini.



Gambar 4.6.
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Berdasarkan Pekerjaan Utama Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015
Sumber: Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial (BDT- PPLS) 2015

4.1.1. Kemiskinan Konsumtif

Dari hasil kajian karakteristik kemiskinan konsumtif di bab sebelumnya, jika dicermati lebih dalam terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih adanya permasalahan berkaitan dengan upaya penyelesaian kemiskinan konsumtif, di antaranya:

- 1) Dari tabel komoditi makanan yang memberi sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan adalah **beras**, yaitu sebesar 20,20% di perkotaan dan 29,35 % di pedesaan. Tidak adanya alternatif bahan pangan pokok setelah beras yang biasa dikonsumsi penduduk lokal. Data per September 2016 terkait dengan Daftar Komoditi yang Memberi Pengaruh Besar pada Kenaikan Garis Kemiskinan, selain beras, di Kalimantan Tengah Tahun 2016, pada urutan nomor 2 pada jenis bahan pangan yang memberi sumbangan pada garis kemiskinan adalah **rokok kretek filter** dengan besar persentase 14,87% di perkotaan dan 12,16% di pedesaan. Menyusul berikutnya adalah gula pasir, telur dan daging ayam;
- 2) Besarnya konsumsi bahan pangan pokok dan beberapa bahan pangan lainnya yang tidak diimbangi dengan adanya peningkatan keragaman usaha untuk peningkatan nilai produk pertanian menyebabkan masyarakat tidak memiliki simpanan untuk kebutuhan lain (non konsumsi).

4.1.2. Kemiskinan Non Konsumtif

4.1.2.1. Ketenagakerjaan

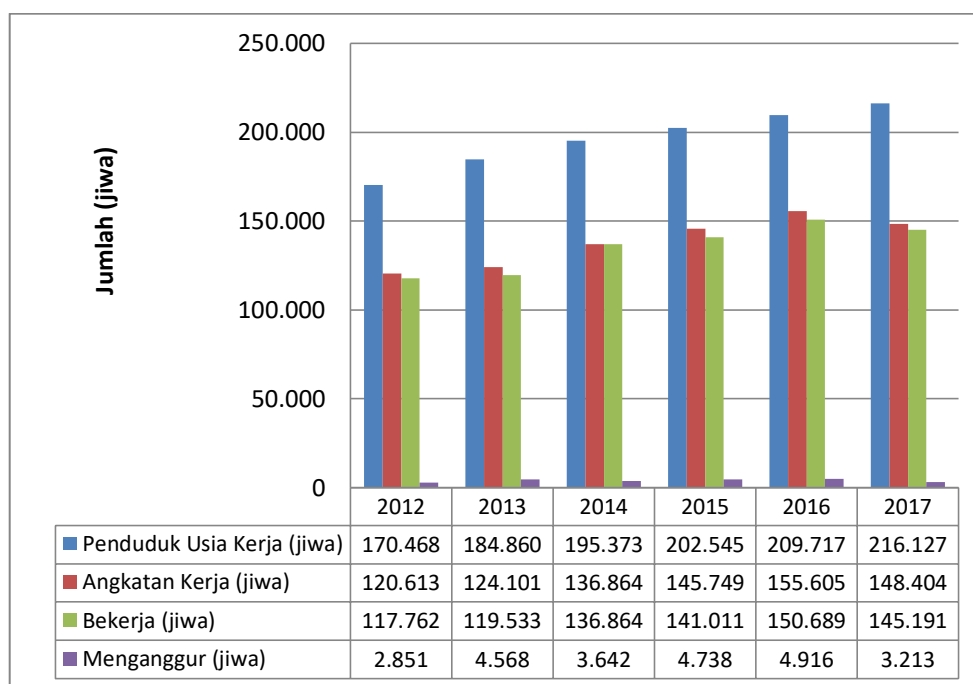
- 1) Pengangguran Terbuka

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka dalam kurun waktu tahun 2012-2016 cukup fluktuatif. Angka tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 3,68 %. Jumlah pengangguran di Kotawaringin Barat selama tahun 2012-2016 ini mengalami fluktuasi. Meskipun tingkat pengangguran terbuka nilainya kecil antara 2,36% sampai 3,68%, secara jumlah pengangguran angkanya relatif besar yaitu berkisar antar 2.851-4.916 jiwa.

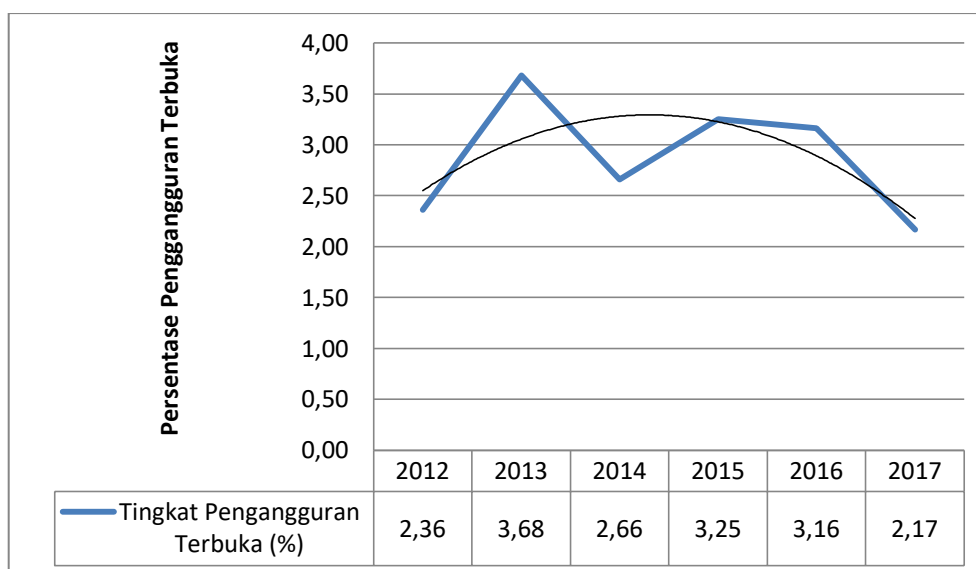
Dari karakteristik yang lain jika dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan sektor, dapat dilihat bahwa dominasi penduduk berdasarkan sektor didominasi oleh penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Berdasarkan karakter ini maka kenaikan/penurunan pertumbuhan sektor pertanian akan berdampak pada kesejahteraan petani, dan ini membawa pengaruh terhadap laju perkembangan jumlah dan prosentase penduduk miskin. Pada pembahasan sebelumnya terlihat adanya korelasi sumbangan PDRB dengan penduduk berdasarkan mata pencarian.

Sektor yang mendominasi dalam struktur ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat Barat yaitu 1) pertanian, kehutanan dan perikanan, 2) industri pengolahan serta 3) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian masih tertinggi, dan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga masih tinggi. Artinya mayoritas penduduk masih dapat menikmati pertumbuhan tersebut, dan sektor pertanian masih andal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hanya saja kondisi tiga tahun terakhir dari tahun 2014-2016 menunjukkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan cenderung

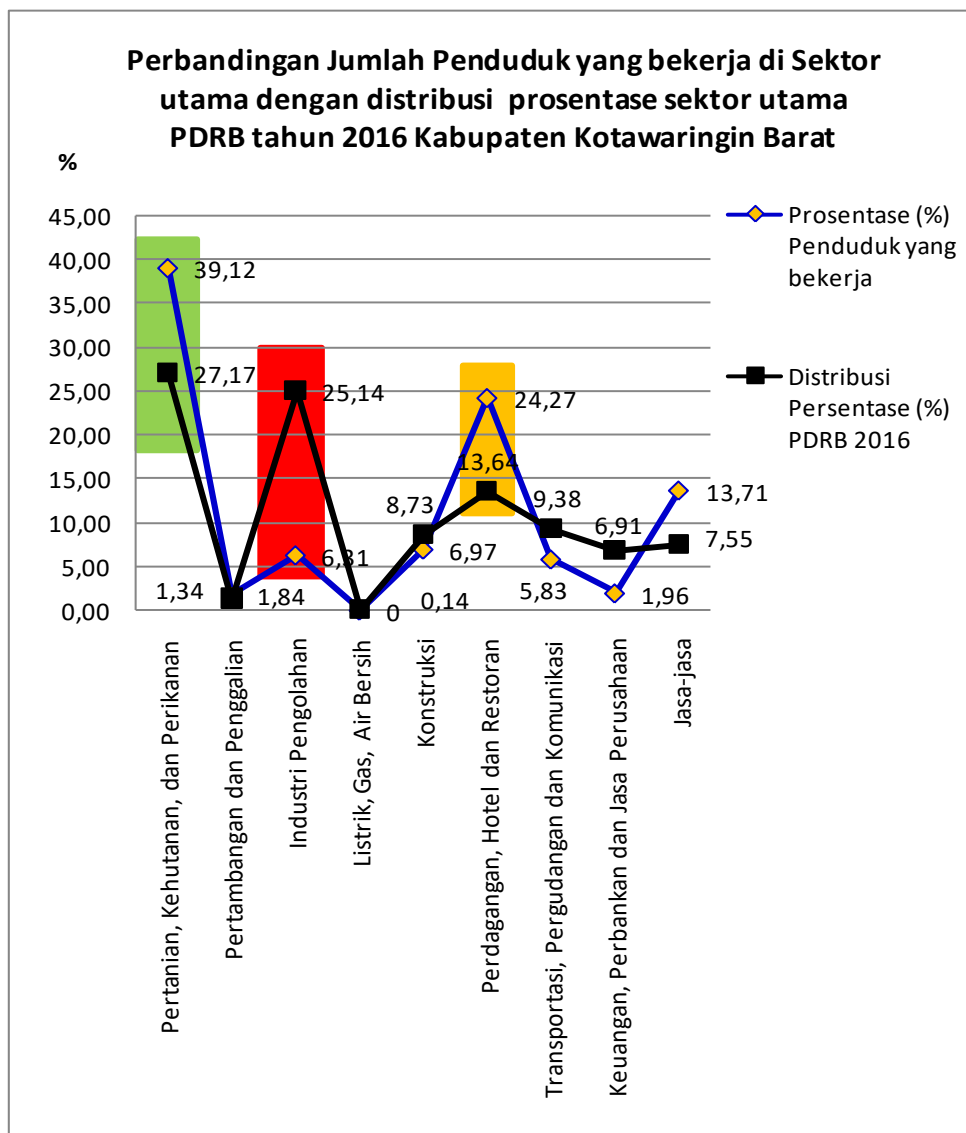
menurun, dan kondisi inilah yang juga memberikan kontribusi terhadap bertambahnya penduduk miskin di tahun 2016.



Gambar 4.7.
Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Menganggur Tahun 2012-2017
Sumber: RPJMD Kobar 2012-2022, Kobar dalam Angka, 2018



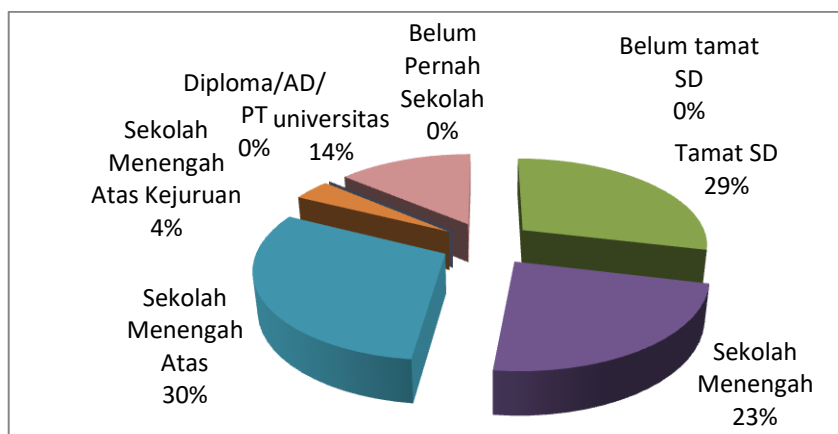
Gambar 4.8.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2017
Sumber: RPJMD Kobar 2012-2022, Kobar dalam Angka, 2018



Gambar 4.9.
Grafik Perbandingan Jumlah Penduduk yang Bekerja di Sektor Utama dengan
Distribusi Prosentase Sektor Utama PDRB Tahun 2016
Kabupaten Kotawaringin Barat

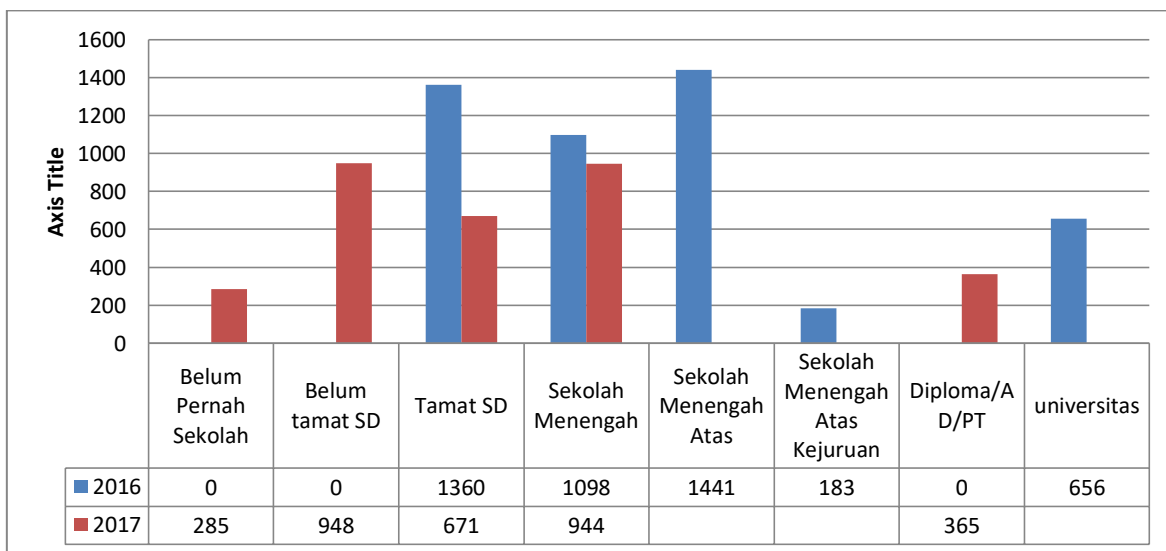
Sumber: diolah dari data BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2017

Selain kondisi di atas jika dilihat karakteristik penduduk berdasarkan Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Kotawaringin Barat ini juga menunjukkan angka pengangguran lulusan perguruan tinggi juga relatif besar, yaitu 14% dibawah pengangguran terbuka lulusan SMA yang mencapai 40%, Tamat SD 29% dan Sekolah Menengah Pertama 23% dari total jumlah pengangguran terbuka yang ada di Kotawaringin Barat.



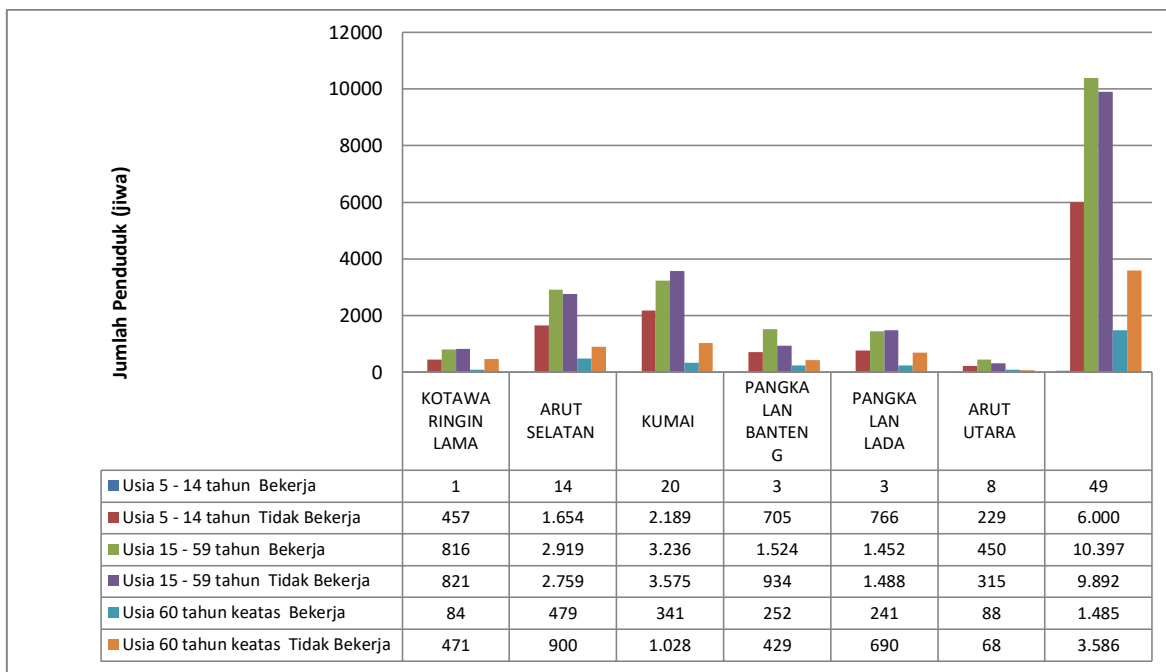
Gambar 4.10.
Grafik Prosentase Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Tertinggi Tahun 2015
di Kabupaten Kotawaringin Barat

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka, Tahun 2017



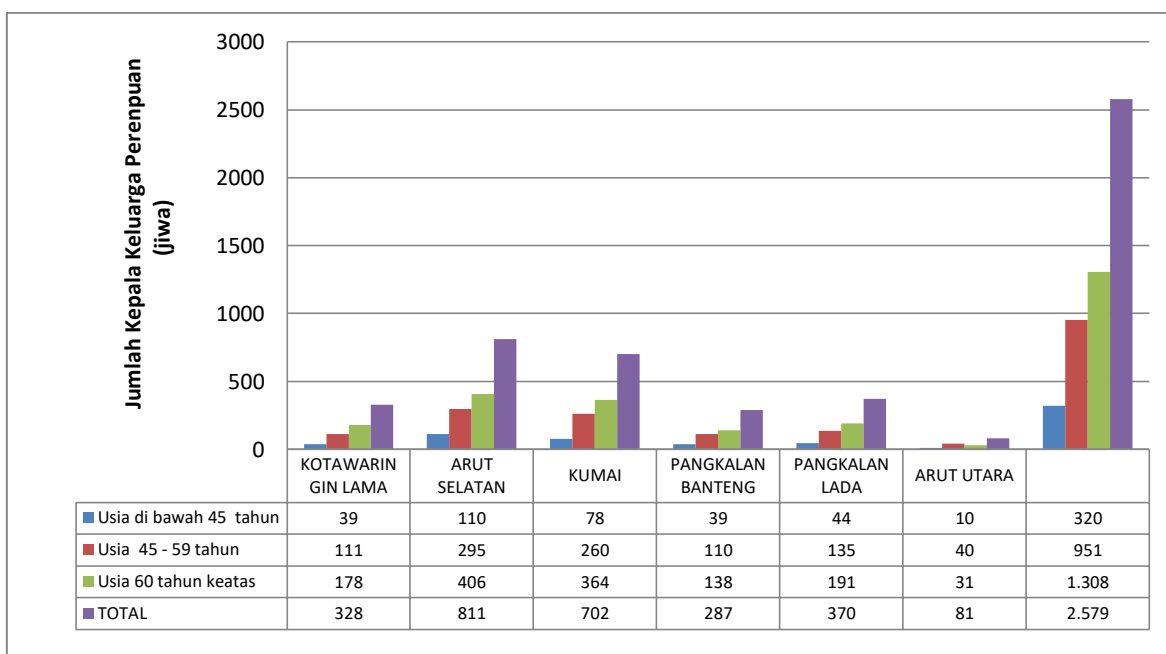
Gambar 4.11.
Grafik Persandingan Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan
Tertinggi Tahun 2015 dan 2017 di Kabupaten Kotawaringin Barat
Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka, Tahun 2017 dan 2018

Pada tahun 2017, terjadi perubahan data yang signifikan pada pengangguran terbuka di tingkat diploma dan Perguruan Tinggi, di mana sebelumnya lulusan diploma semua terserap dalam lapangan pekerjaan, pada tahun ini lulusan Perguruan Tinggi yang terserap secara keseluruhan, dan di tingkat diploma menyisakan jumlah pengangguran terbuka sebesar 365 jiwa. Khusus jumlah pengangguran dengan status kesejahteraan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 4.12.
Jumlah Individu Yang Bekerja dan Tidak Bekerja Menurut Kelompok Usia dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah di Kabupaten Kotawaringin Barat

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka, Tahun 2017



Gambar 4.13.
Jumlah Rumah Tangga dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan Menurut Kelompok Umur Kepala Rumah Tangga dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah di Kabupaten Kotawaringin Barat

Sumber: Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial (Bdt- Ppls) 2015

Dari Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial (BDT- PPLS) 2015, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga dengan Kepala Rumah Tangga dengan status kesejahteraan 40% terendah di Kab/Kota Kotawaringin Barat didominasi oleh kepala rumah tangga yang berpendidikan SD/MI. Jumlah kepala rumah tangga sesuai dengan pendidikan tinggi yang ditamatkan ini perkecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.3.
Jumlah Individu Menurut Pendidikan Tertinggi Kepala Rumah Tangga Dengan Kepala Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015, Per Kecamatan

Kecamatan	SD/SDL B	Paket A	Madrasah Ibtidaiyah	SMP /SMPLB	Paket B	Madrasah Tsanawiyah	SMA/SMK/ SMALB	Paket C	Mad. Aliyah	Perguruan Tinggi	NULL	Jumlah
Kotawaringin Lama	6095	48	52	865	16	57	532	11	19	23	2246	
Arut Selatan	4859	41	51	720	17	42	445	9	15	18	1742	
Kumai	3950	28	49	643	16	45	336	10	19	17	1560	
Pangkalan Banteng	2267	8	10	359	1	9	211	1	3	5	680	
Pangkalan Lada	1464	2	7	213	1	7	127	0	2	3	404	
Arut Utara	350	0	1	27	0	0	12	0	0	0	35	
Jumlah Perjenjang	18985	127	170	2827	51	160	1663	31	58	66	6667	30805
Persentase	61,63	0,41	0,55	9,18	0,17	0,52	5,40	0,10	0,19	0,21	21,64	100,00

Sumber: Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial (BDT- PPLS) 2015

Tabel IV.4.
Jumlah Individu Menurut Kelompok Usia Kepala Rumah Tangga Dengan Kepala Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015, Per Kecamatan

Nama Kecamatan	Kelompok Usia Kepala Rumah Tangga		
	0-15	15-64	65 Keatas
Kotawaringin Lama	13	7732	2484
Arut Selatan	1	19715	1315
Kumai	12	5303	1533
Pangkalan Banteng	8	2777	867
Pangkalan Lada	5	1730	554
Arut Utara	1	336	71
Jumlah	40	37593	6824
Persentase	0,09	84,56	15,35

Sumber: Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial (BDT- PPLS) 2015

Tabel IV.5.
Jumlah Individu Menurut Kelompok Usia Kepala Rumah Tangga Perempuan Dengan Kepala Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015, Per Kecamatan

Nama Kecamatan	Jumlah rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan			
	Usia di bawah 45 tahun	Usia 45 - 59 tahun	Usia 60 tahun keatas	TOTAL
Kotawaringin Lama	39	111	178	328
Arut Selatan	110	295	406	811
Kumai	78	260	364	702
Pangkalan Banteng	39	110	138	287
Pangkalan Lada	44	135	191	370
Arut Utara	10	40	31	81
Jumlah	320	951	1.308	2.579
Persentase	12,41	36,87	50,72	100

Sumber: Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial (BDT- PPLS) 2015

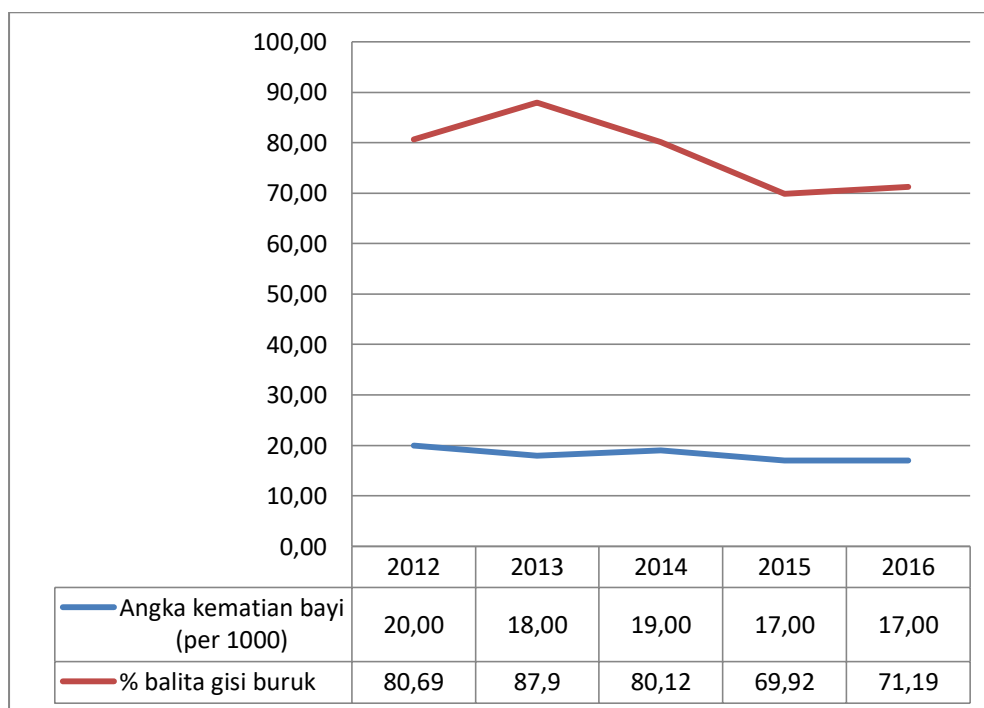
Prioritas untuk penanganan masalah ini dalam pengentasan kemiskinan bisa dilakukan dengan pengembangan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat di kabupaten ini baik berdasarkan karakteri masyarakat yang masih banyak bergerak di sektor agraris dan sesuai dengan tingkat pendidikan dan keterampilan, terutama yang berkaitan dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan yang jumlahnya cukup besar (2.579 jiwa), yang sangat rawan dengan kerentanan tidak hanya secara ekonomi tetapi juga rentan dibidang lainnya akibat isu gender. Sementara dari jenjang pendidikan dari 66% kepala keluarga miskin juga memiliki pendidikan yang rendah yaitu lulusan SD/MI, dan jika dipilah khusus kepala rumah tangga perempuan jumlah kepala rumah tangga perempuan yang usianya diatas 65 adalah 50,72%. Kondisi ini sangat menggambarkan bahwa selain mereka rentan karena umur dari sisi pendidikan dan skill mereka sangat rendah dan kemungkinan besar tidak bisa diserap di lapangan kerja formal dan industri

manufaktur. Dalam sektor pertanian peningkatan pendapatan dapat dilakukan dengan peningkatan harga jual petani ini bisa dilakukan dengan penambahan nilai hasil panen melalui pengolahan sederhana pengembangan IKM/UKM berbasis produk lokal yang lebih bisa menyerap tenaga perempuan. Pengembangan sektor ini akan lebih menyerap tenaga kerja lokal, banding dengan pengembangan industri manufaktur.

4.1.2.2. Kesehatan

1) Angka Kematian Bayi (AKB) DAN Balita Gizi Buruk

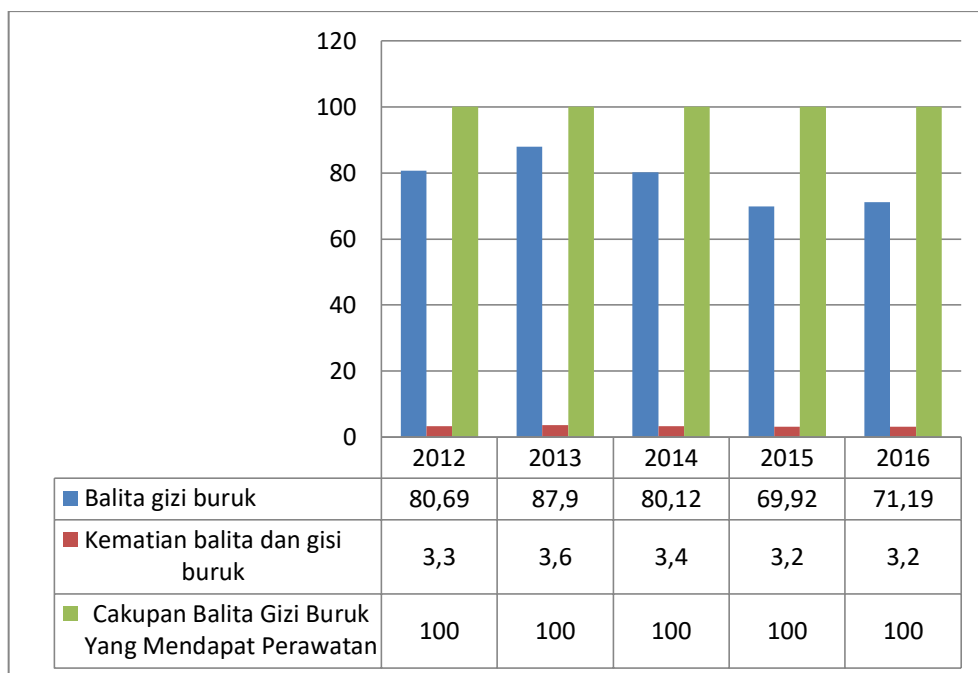
Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi usia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Kegunaan: AKB digunakan untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat. Besarnya AKB ini di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2011 sebanyak 49 bayi (40%) mengalami penurunan sebesar 40% dibanding tahun 2010, dengan kematian bayi sebesar 81 bayi, begitu juga dengan Angka Kematian Balita (AKABA) juga mengalami penurunan dari 84 balita yang meninggal pada 2010 menjadi 54 balita (35,7%) pada tahun 2011.



Gambar 4.14.
Tingkat Kematian Bayi dan Balita Gizi Buruk

Sumber: Renstra Dinas Kesehatan Kobar, 2012-2016 dan RPJM Kobar 2017-2022

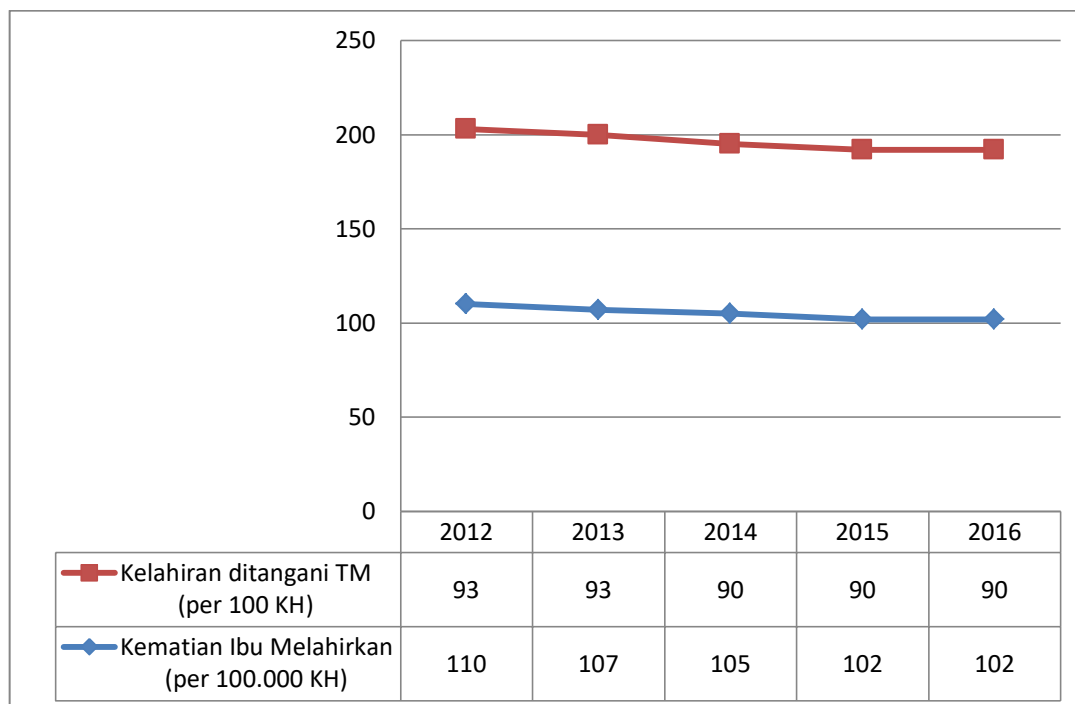
2) Angka Kematian Balita (AKBA)



Gambar 4.15.
Angka Kematian Balita (AKABA)

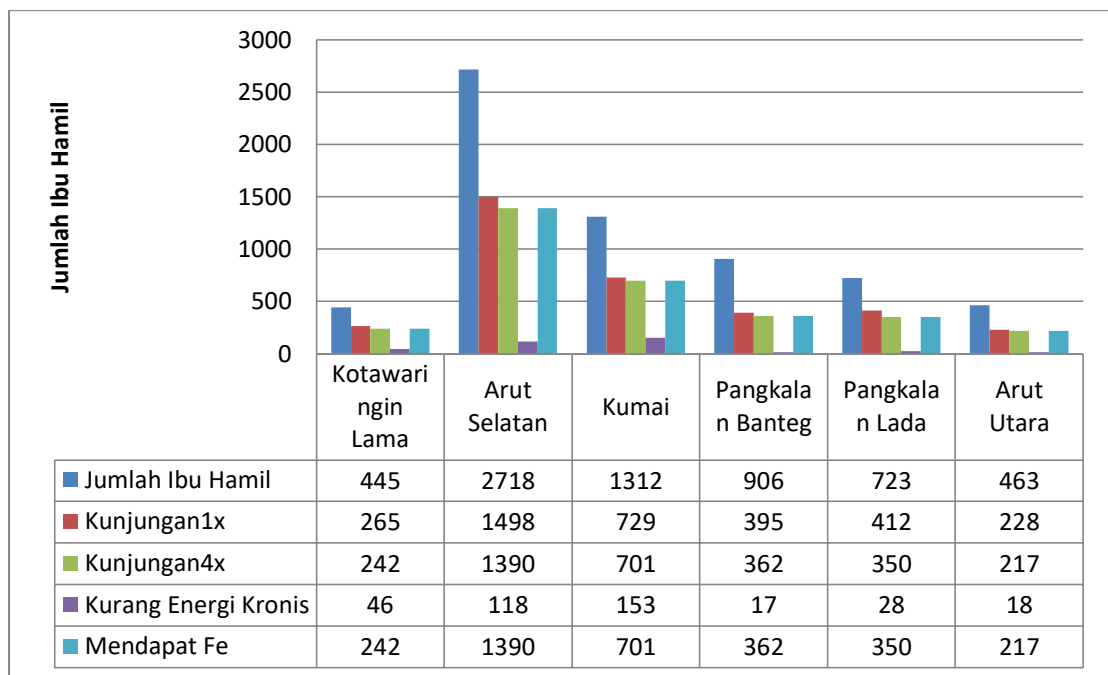
Sumber: Renstra Dinas Kesehatan Kobar, 2012-2016 dan RPJM Kobar 2017-2022

3) Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)



Gambar 4.16.
Angka Kematian Ibu Melahirkan

Sumber: Renstra Dinas Kesehatan Kobar, 2012-2016, RPJM Kobar 2017-2022, dan Kobar Dalam Angka, 2017



Gambar 4.17.
Jumlah Kunjungan Wanita Hamil, Nifas/Menyusui, Bayi dan Anak menurut
Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2016

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka, Tahun 2017

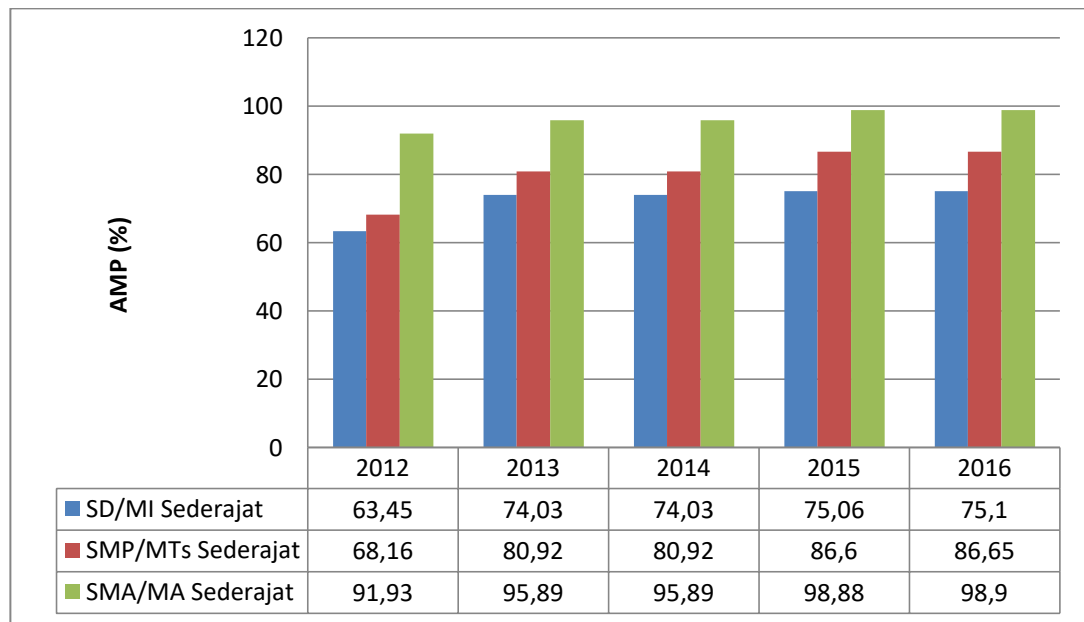
Angka kematian bayi di Kabupaten Kotawaringin Barat pada lima tahun terakhir sudah mengalami penurunan, akan tetapi masih menyisakan sekitar 17 bayi yang meninggal dari 1000 bayi kelahiran hidup. Angka ini juga diperparah karena angka balita yang bergizi buruk juga masih tinggi. Prioritas penanganan dalam bidang kesehatan ini diantaranya perlu penyadaran jumlah ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan janin semasa kehamilan dan kontrol balita semasa pertumbuhan, untuk menekan besarnya jumlah balita yang kurang asupan gizi. Jumlah ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan 1-4 kali masih besar demikian dengan ibu hamil yang kekurangan energi atau zat besi. Jumlah ibu hamil perkecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, baik yang melakukan pemeriksaan satu kali (k1), yang melakukan pemeriksaan 4 kali (k4), yang kekurangan energi kronis maupun yang mendapatkan tambahan Fe, secara rinci dapat dilihat pada gambar 4.17.

Prioritas penanganan untuk pengatasi kematian ibu hamil dan kematian bayi untuk Kabupaten Kotawaringin Barat adalah:

- 1) Prioritas I: penurunan angka jumlah ibu hamil yang kekurangan energi kronis dan yang melakukan pemeriksaan hanya 1x, serta pemberian asupan FE;
- 2) Prioritas II: peningkatan ibu hamil yang melakukan pemeriksaan K4.

4.1.2.3. Pendidikan

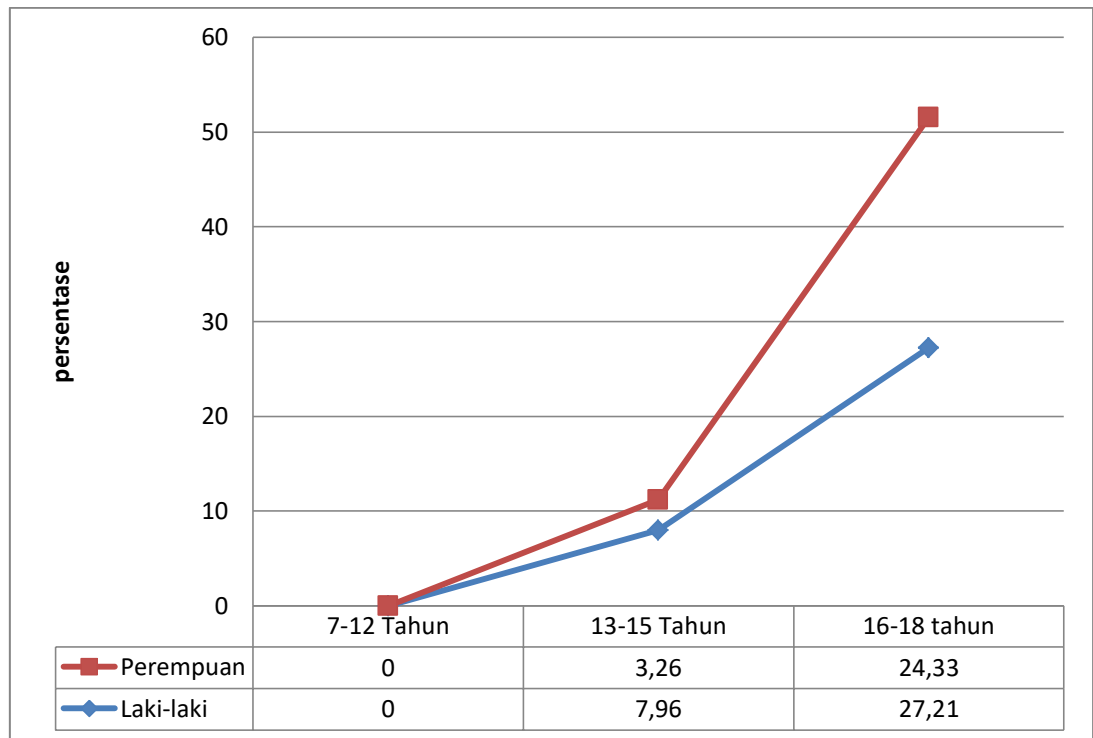
1) Penduduk Usia Sekolah (7-18 Tahun) Tidak Bersekolah



Gambar 4.18.
Angka Partisipasi Kasar Per Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2016

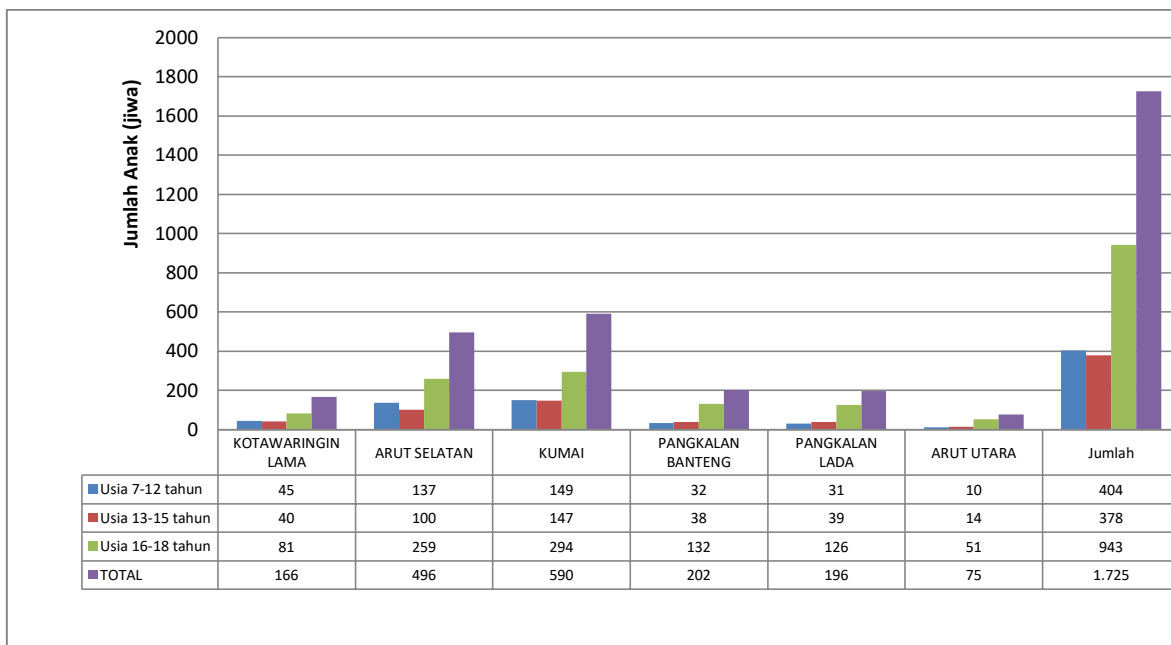
*Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka, Tahun 2017 dan
RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2017-2022*

Angka partisipasi kasar penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan tingkat pendidikan dapat dikatakan sudah cukup tinggi selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2016 prosentase APK untuk SD/MI 98,9%, SPM/MTS 86,65% dan %, 75,1% untuk Pendidikan SMA/MA sederajat. Akan tetapi kenaikan APM tersebut belum mencapai 100% sehingga diindikasikan adanya penduduk usia sekolah yang belum/tidak bersekolah sesuai dengan tingkatan umur. Hal ini bisa dilihat juga dari prosentase penduduk tak bersekolah di usia 7-18 tahun, dan juga penduduk yang bekerja di usia 15-18 tahun.



Gambar 4.19.
Penduduk Usia Sekolah (7-18 Tahun) Tidak Bersekolah
Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka, Tahun 2017

Sementara jumlah anak yang tidak bersekolah menurut kelompok usia dengan status kesejahteraan 40% terendah di Kabupaten Kotawaringin Barat dari data Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin 2015 Jumlah anak yang tidak bersekolah menurut kelompok usia dengan status kesejahteraan 40% terendah di Kabupaten Kotawaringin Barat dari usia 7-18 tahun yang merupakan kelompok sasaran usia pendidikan dasar (wajib belajar 9 tahun) yang tidak sekolah masih cukup tinggi yaitu 1725 jiwa. Jumlah anak yang tidak bersekolah menurut kelompok usia dengan status kesejahteraan 40% terendah di Kab Kotawaringin Barat berikut ini.



Gambar 4.20.
Jumlah Anak yang Tidak Bersekolah Menurut Kelompok Usia dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah Di Kab Kotawaringin Barat

Sumber: Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial (Bdt- Ppls) 2015

Program prioritas berkaitan dengan peningkatan angka partisipasi murni dan pengentasan kemiskinan ini lebih diprioritaskan pada upaya peningkatan wajib belajar 9 tahun, sehingga angka partisipasi murni baik untuk seekolah SD/MI, SMP/Mts maupun SMA/MA akan bisa mencapai prosentase lebih tinggi bahkan 100%.

Berkaitan dengan upaya pengentasan wajib belajar 9 tahun tersebut Kecamatan Kumai memiliki jumlah individu usia sekolah yang tidak sekolah yang relatif lebih besar dari kecamatan lainnya disusul dengan Arut Selatan.

Tabel IV.6.
Prioritas Penanganan Kemiskinan Berdasar Kondisi Kepala Keluarga dan Jumlah Jiwa yang tidak Sekolah Per Kecamatan

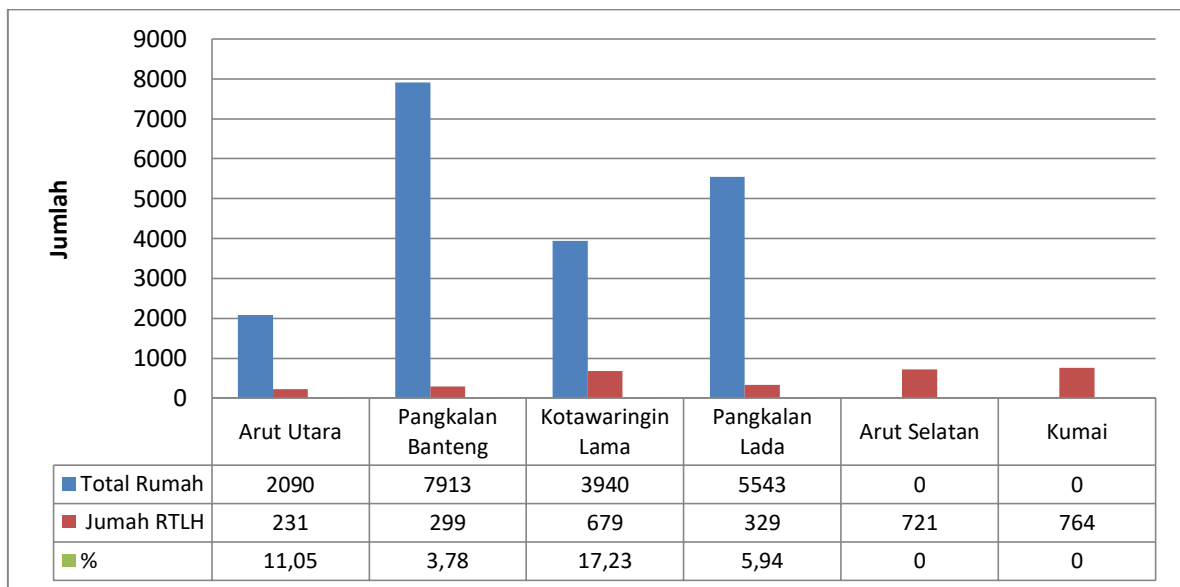
Nama Kecamatan	Pendidikan Kep. Kel (SD)	Kpl Kel Lanjut Usia	Kpl Kel. Perempuan	Jml. Individu Tidak Sekolah	Keterangan Prioritas
Urut Selatan	4.859	1.335	1.881	496	2
Urut Utara	350	95	78	75	5
Kotawaringin	6.095	2.488	2.626	166	1
Kumai	3.950	1.533	1.556	590	3
Pangalan Banteng	2.267	867	808	202	4
Pangkalan Lada	1.464	531	505	196	6

Sumber: Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial (BDT- PPLS) 2015

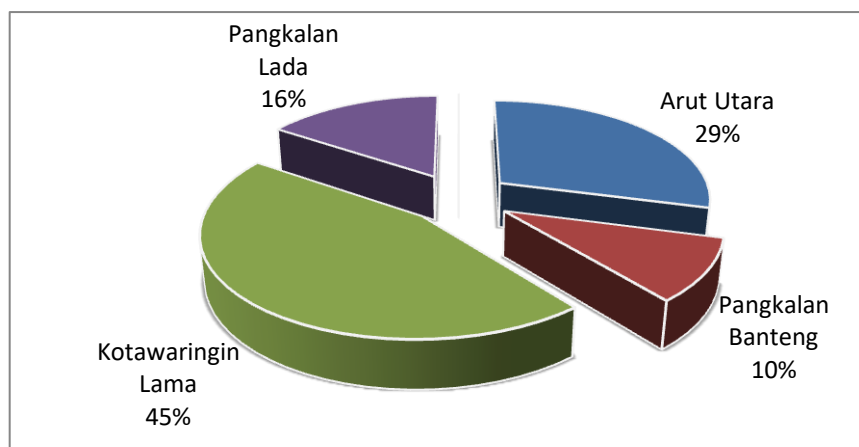
4.1.2.4. Infrastruktur Dasar

A. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 3.023 Unit yang tersebar di 5 Kecamatan. Kondisi rumah dilihat dari 3 komponen (atap, lantai dan dinding/aladin). Jumlah rumah tidak layak huni paling besar ada di Kecamatan Kotawaringin Lama dengan jumlah 679 unit (17,23% dari total jumlah rumah dikecamatan tersebut), sementara di dua kecamatan belum ada data pendukung jumlah total rumah, walaupun jumlah RTLHnya cukup tinggi. Intervensi terkait dengan prioritas penanganan akan dilakukan dengan pertimbangan parameter status kepemilikan lahan dan keparahan kondisi rumah.



Gambar 4.21.
Grafik Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
di Kabupaten Kotawaringin Barat Per Kecamatan Tahun 2016
Sumber: Dokumen Penyusunan Data Perumahan dan Permukiman, Tahun 2017



Gambar 4.22.
Grafik Prosentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
di Kabupaten Kotawaringin Barat Per Kecamatan Tahun 2016
Sumber: Dokumen Penyusunan Data Perumahan dan Permukiman, Tahun 2017

Dari Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial (BDT- PPLS) 2015 tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Jumlah Rumah Keluarga Miskin Dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015, memiliki karakteristik hunian sebagai berikut:

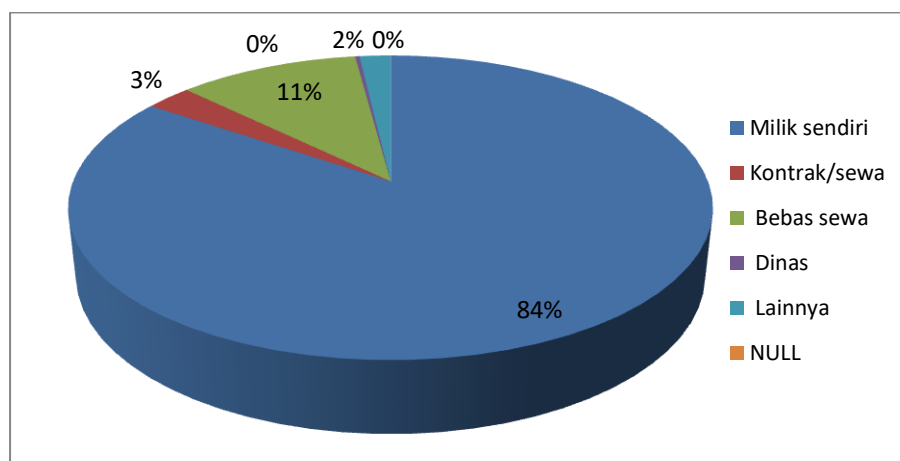
1) Karakteristik Kepemilikan Bangunan

Dari sisi kepemilikan bangunan, 84% masyarakat miskin, sudah menghuni bangunan miliknya sendiri, dan sisanya menggunakan bangunan milik dinas, menyewa, menempati bangunan milik orang lain.

Tabel IV.7.
Karakteristik Kepemilikan Bangunan Rumah Keluarga Miskin dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015

Nama Kecamatan	Milik sendiri	Kontrak/ sewa	Bebas sewa	Dinas	Lainnya	NULL	Jumlah
Urut Selatan	6545	305	938	20	152	0	7960
Urut Utara	325	8	88	0	5	0	426
Kotawaringin	8550	277	945	19	174	0	9965
Kumai	5588	168	780	18	120	0	6674
Pangalan Banteng	3024	57	353	18	103	0	3555
Pangkalan Lada	1982	34	197	4	14	0	2231
Jumlah	26014	849	3301	79	568	0	30811
Persentase	84,43	2,76	10,71	0,26	1,84	0,00	100,00

Sumber: Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial (BDT- PPLS) 2015



Gambar 4.23.

Karakteristik Kepemilikan Bangunan Rumah Keluarga Miskin Dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015

Sumber: Dokumen Penyusunan Data Perumahan dan Permukiman, Tahun 2017

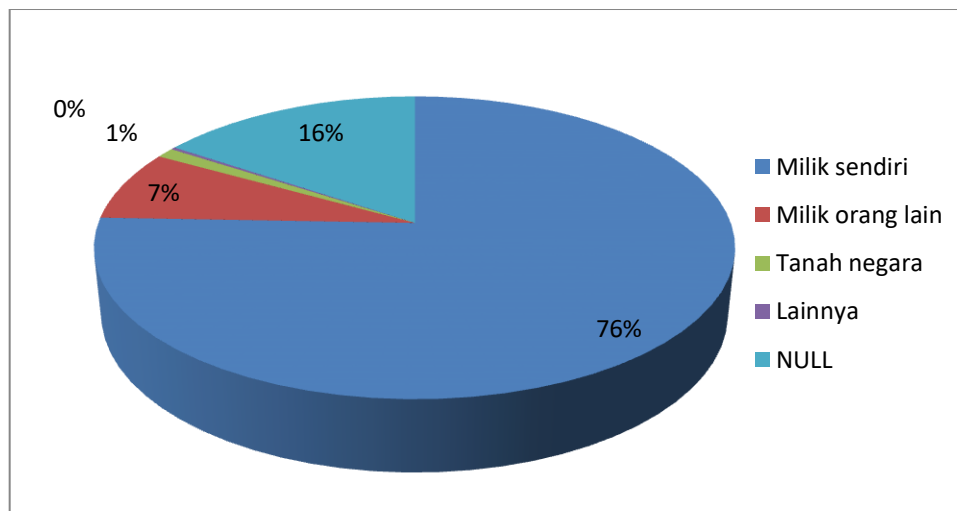
2) Karakteristik Berdasarkan Kepemilikan Lahan

Kepemilikan lahan, 84% masyarakat miskin, sudah menempati lahan miliknya sendiri, dan sisanya menggunakan milik orang lain atau lahan milik negara.

Tabel IV.8.
Karakteristik Kepemilikan Lahan Keluarga Miskin Dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015

Nama Kecamatan	Milik sendiri	Milik orang lain	Tanah negara	Lainnya	NULL	Jumlah
Urut Selatan	5921	536	65	23	1415	7960
Urut Utara	299	24	2	0	101	426
Kotawaringin	7899	541	81	29	1415	9965
Kumai	4990	524	57	17	1086	6674
Pangkalan Banteng	2566	387	61	10	531	3555
Pangkalan Lada	1610	307	65	0	249	2231
Jumlah	23285	2319	331	79	4797	30811
Persentase	75,57	7,53	1,07	0,26	15,57	100,00

Sumber: Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial (BDT- PPLS) 2015



Gambar 4.24.
Karakteristik Kepemilikan Lahan Keluarga Miskin Dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015

Sumber: Dokumen Penyusunan Data Perumahan dan Permukiman, Tahun 2017

3) Karakteristik Atap Bangunan

Tabel IV.9.
Karakteristik Jenis Atap Rumah Keluarga Miskin Dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015

Nama Kecamatan	Beton/genteng beton	Genteng keramin	Genteng metal	Genteng tanah liat	Asbes	Seng	Sirap	Bambu	Jerami/ijuk/daundaunan/rumbia	Lainnya	NULL	Jumlah
Urut Selatan	307	9	70	2182	1837	2641	603	1	273	37	0	7960
Urut Utara	0	0	4	1	81	212	127	0	0	1	0	426
Kotawaringin	406	12	84	2385	2399	3307	1012	1	285	74	0	9965
Kumai	320	2	52	2111	1629	1859	342	0	331	28	0	6674
Pangalan Banteng	102	1	28	1739	684	836	124	0	14	27	0	3555
Pangkalan Lada	79	0	12	1315	361	315	121	0	4	24	0	2231
Jumlah	1214	24	250	9733	6991	9170	2329	2	907	191	0	30811
Persentase	3,94	0,08	0,81	31,59	22,69	29,76	7,56	0,01	2,94	0,62	0,00	100,00

Sumber: Dokumen Penyusunan Data Perumahan dan Permukiman, Tahun 2017

4) Karakteristik Dinding Bangunan

Tabel IV.10.
Karakteristik Jenis Dinding Bangunan Keluarga Miskin Dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015

Nama Kecamatan	Tembok	Plesteran anyaman bambu/kawat	Kayu	Anyaman bambu	Batang kayu	Bambu	Lainnya	NULL	Jumlah
Urut Selatan	1761	69	6064	15	8	3	40	0	7960
Urut Utara	3	2	413	0	7	0	1	0	426
Kotawaringin	2056	93	7740	17	8	3	48	0	9965
Kumai	1615	62	4956	7	8	2	24	0	6674
Pangalan Banteng	1063	23	2446	3	9	2	9	0	3555
Pangkalan Lada	616	5	1586	0	8	4	12	0	2231
Jumlah	7114	254	23205	42	48	14	134	0	30811
Persentase	23,09	0,82	75,31	0,14	0,16	0,05	0,43	0,00	100,00

Sumber: Dokumen Penyusunan Data Perumahan dan Permukiman, Tahun 2017

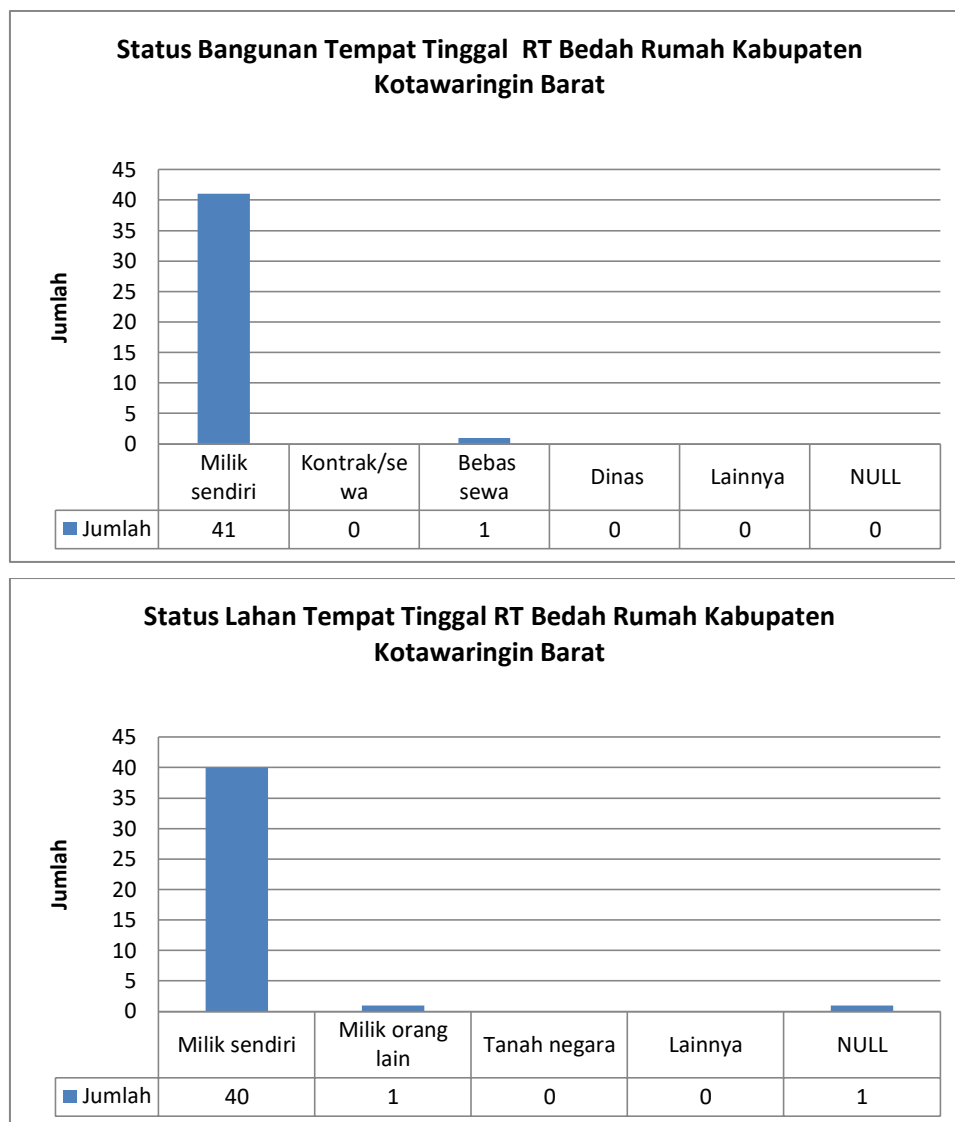
5) Karakteristik Jenis Lantai Bangunan

Tabel IV.11.
Karakteristik Jenis Lantai Bangunan Keluarga Miskin Dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015

Nama Kecamatan	Marmer /granit	Kera- mik	Parket/ vini/l permadani	Ubin/tegel/ teraso	Kayu/papan kualitas tinggi	Semen/bata merah	Bambu	Kayu/papan kualitas rendah	Tanah	Lain- nya	Jumlah
Urut Selatan	7	334	14	55	616	2564	3	3217	1139	11	7960
Urut Utara	1	4	0	0	86	10	1	323	1	0	426
Kotawaringin	8	416	31	58	864	3117	3	4208	1242	18	9965
Kumai	6	320	5	27	387	2361	3	2583	974	8	6674
Pangalan Banteng	3	184	2	18	215	1677	1	527	927	1	3555
Pangkalan Lada	2	94	0	16	124	1020	1	361	613	0	2231
Jumlah	27	1352	52	174	2292	10749	12	11219	4896	38	30811
Persentase	0,09	4,39	0,17	0,56	7,44	34,89	0,04	36,41	15,89	0,12	100,00

Sumber: Dokumen Penyusunan Data Perumahan dan Permukiman, Tahun 2017

Diantara sejumlah data di atas, 43 unit hunian masuk dalam dalam program bedah rumah berjumlah 43 unit. Karakteristik kepemilikan lahan dan bangunan rumah yang dibedah dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 4.25.
Karakteristik Kepemilikan Lahan dan Rumah yang Dibedah di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015

Sumber: Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial (Bdt- Ppls) 2015

Kondisi unit hunian prioritas secara rinci perkecamatan per desa di empat kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin barat secara rinci dapat dilihat pada lampiran tabel RTLH.

Prioritas penanganan RTLH ini akan terbagi menjadi 3:

- 1) Prioritas 1, yaitu rumah tangga dengan status penguasaan bangunan dan lahan tempat tinggal milik sendiri, serta kondisi rumah dilihat dari 3 komponen (atap, lantai dan dinding/aladin), tiga dari ketiga komponen tidak layak.

- 2) Prioritas 2, yaitu rumah tangga dengan status penguasaan bangunan dan lahan tempat tinggal milik sendiri, serta kondisi rumah dilihat dari 3 komponen (atap, lantai dan dinding/aladin), dua dari ketiga komponen tidak layak.
- 3) Prioritas 3, yaitu rumah tangga dengan status penguasaan bangunan dan lahan tempat tinggal milik sendiri, serta kondisi rumah dilihat dari 3 komponen (atap, lantai dan dinding/aladin), satu dari ketiga komponen tidak layak.

B. Rumah Tangga yang Belum Terayani Air Bersih

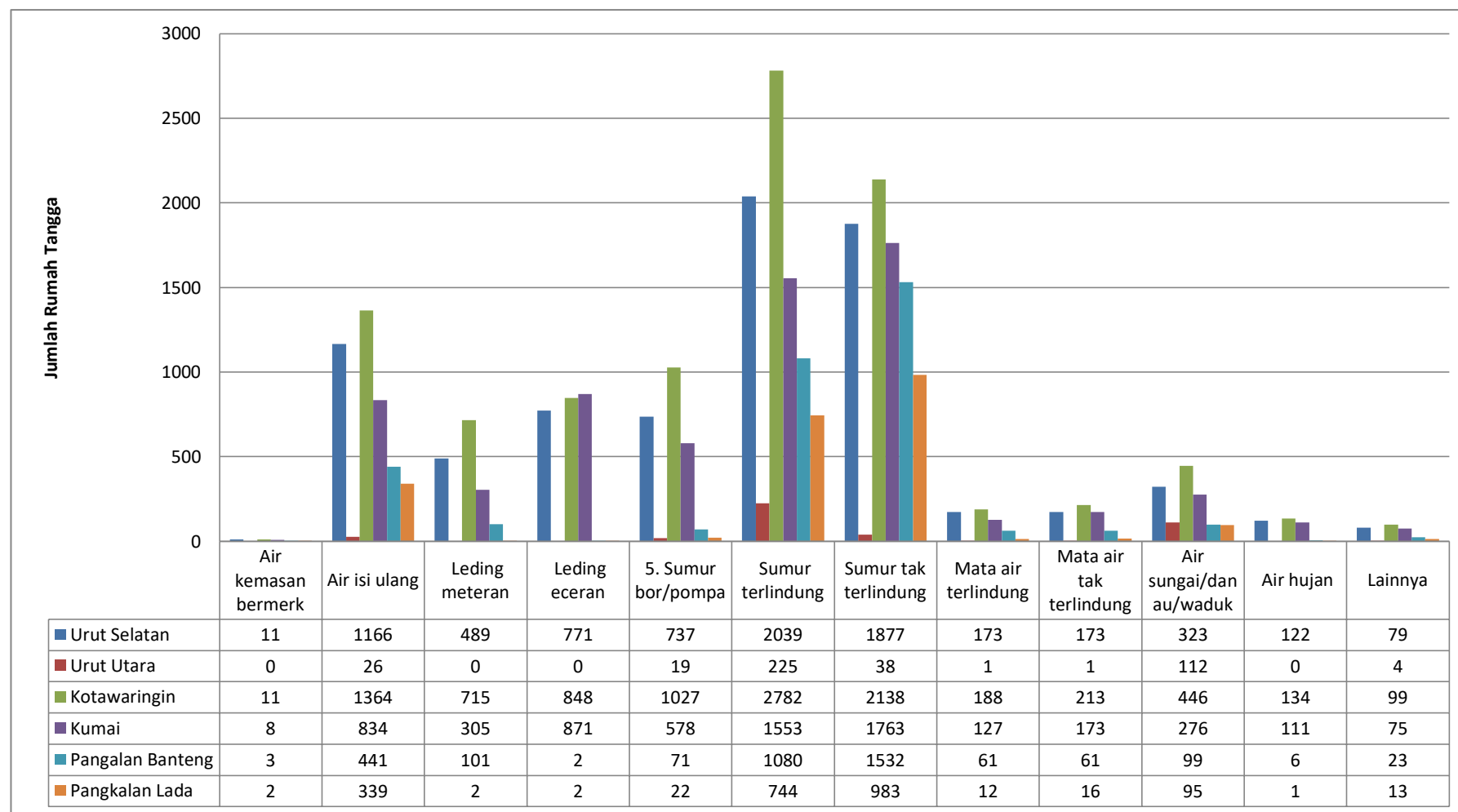
Infrastruktur air bersih merupakan salah satu komponen penting dalam penyehatan lingkungan dan peningkatan derajat kesejahteraan, karena merupakan salah satu keputusan primer untuk hidup. Tidak semua rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah terlayani oleh infrastruktur ini. Masih banyak masyarakat yang menggunakan sumber air bersih, yang mungkin dari sisi kualitas air tidak layak untuk digunakan sebagai sumber air bersih. Sumber air yang banyak dipakai oleh masyarakat ini adalah air sumur dan sumber lainnya berupa air hujan, air sungai atau dari mata air.

Jumlah rumah tangga yang belum terlayani infrastruktur air bersih baik yang masih menggunakan sumur maupun sumber lain (mata air/air hujan dan air sungai) masih cukup tinggi. Prioritas penangan dilakukan dengan pertimbangan parameter sumber air. Prioritas ini terutama ditekankan pada rumah tangga yang mendapatkan air di luar air kemasan bermerek, air ledeng (baik berlangganan maupun ecaran) air sumur bor dan air sumur terlindungi. Jumlah rumah tangga yang mendapat prioritas ini terdiri dari rumah tangga yang mengakses air sungai, waduk dan hujan dapat dilihat pada tabel IV.12.

Tabel IV.12.
Karakteristik Jumlah Keluarga Miskin Berdasarkan Cara Mendapatkan Air berdasarkan Sumbernya di Luar Air Kemasan, Ledeng dan Sumur Bor di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015

Nama Kecamatan	Sumur tak terlindungi	Mata air terlindungi	Mata air tak terlindungi	Air sungai/danau/waduk	Air hujan	Lain nya
Urut Selatan	1877	173	173	323	122	79
Urut Utara	38	1	1	112	0	4
Kotawaringin	2138	188	213	446	134	99
Kumai	1763	127	173	276	111	75
Pangalan Banteng	1532	61	61	99	6	23
Pangkalan Lada	983	12	16	95	1	13
Jumlah	8331	562	637	1351	374	293

Sumber: Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial (BDT- PPLS) 2015



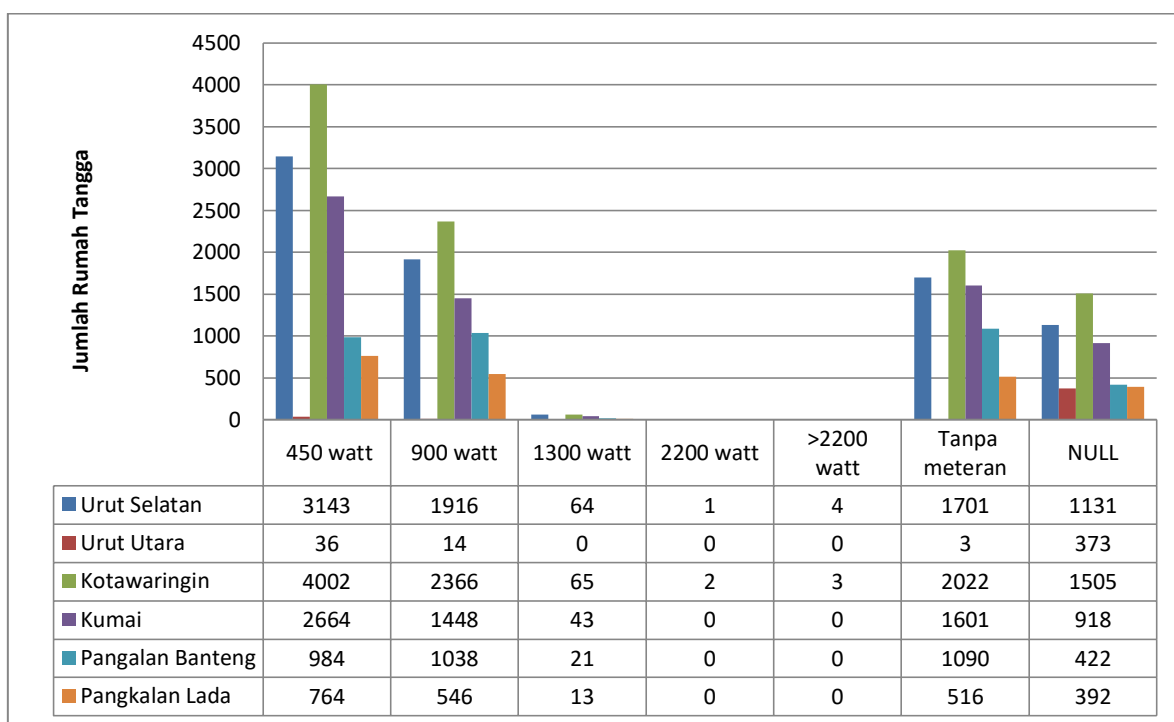
Gambar 4.26.
Grafik Jumlah keluarga Berdasarkan Sumber Air Bersih
di Kabupaten Kotawaringin Barat Per Kecamatan Tahun 2015
Sumber: Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial (BDT- PPLS) 2015

Prioritas Penangan terhadap infrastruktur air bersih untuk keluarga miskin:

- 1) Prioritas pertama adalah keluarga yang menggunakan sumber air dari sungai/mata air dan air hujan. Jumlah untuk masing-masing kecamatan (untuk 4 kecamatan) bisa dilihat pada data grafik di atas;
- 2) Prioritas kedua adalah keluarga yang menggunakan sumur.

C. Rumah Tangga Yang belum Terlayani Listrik (Tanpa Meteran dan Tidak Berlistrik)

Tidak semua keluarga di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah terlayani oleh jaringan penenrangan (listrik PLN). Masyarakat yang belum terlayani ini memperoleh penerangan dengan cara yang beragam, mulai menggunakan panel surya, menyalur tetangga atau sumber lainnya (tanpa meteran) dan bahkan ada yang masih tidak terlayani listrik dan menggunakan pelita. Jumlah keluarga yang menggunakan sumber penerangan per kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat bisa dilihat pada grafik di bawah ini.

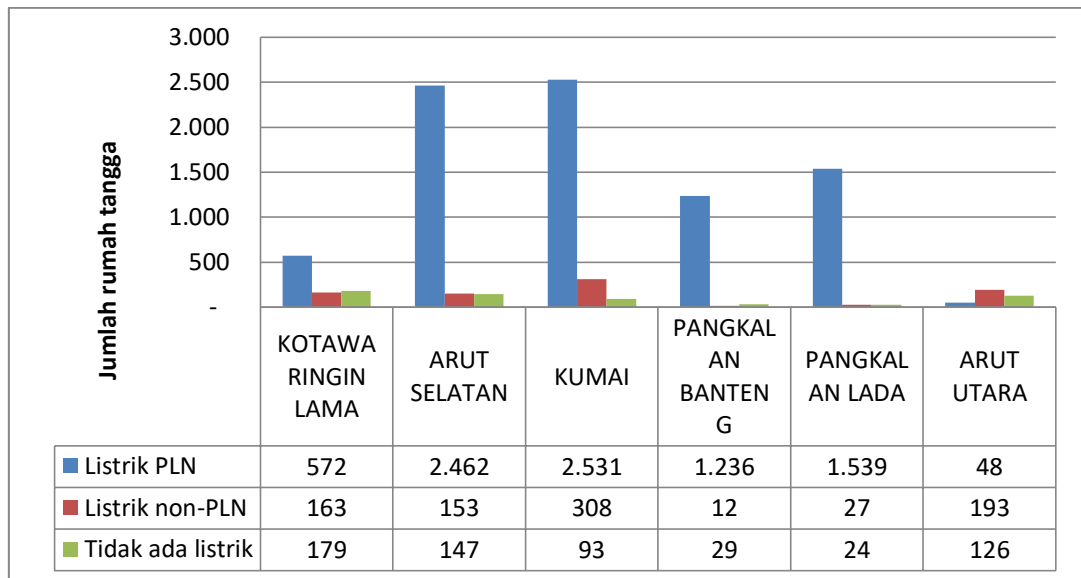


Gambar 4.27.

Grafik Jumlah Rumah Tangga Menurut Kapasitas Daya Sumber Penerangan Utama Dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah Di Kabupaten Kotawaringin Barat

Sumber: Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial (Bdt- Ppls) 2015

Dari data terpadu penanggulangan kemiskinan, jumlah keluarga miskin yang belum mengakses listrik adalah sebagai berikut:



Gambar 4.28.
Grafik Jumlah Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama Dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah Di Kabupaten Kotawaringin Barat

Sumber: Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin 2015

Prioritas penanganan untuk pelayanan infrastruktur kelistrikan ini adalah panyediaan listrik untuk masyarakat yang tidak ada listrik sesuai dengan **Jumlah Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama Dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah di Kab/Kota Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah** adalah sebagai berikut:

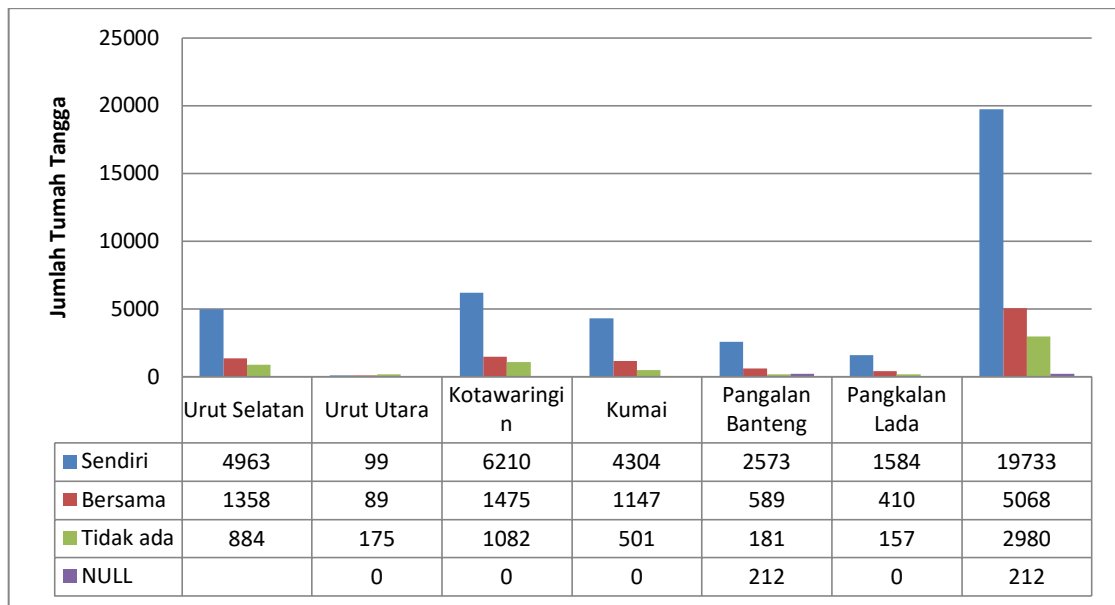
- Kecamatan Kotawaringin Lama 179 rumah tangga;
- Kecamatan Arut Selatan 147 rumah tangga;
- Kecamatan Kumai 29 rumah tangga
- Kecamatan Pangkalan Banteng 29 rumah tangga;
- Kecamatan Pangkalan Lada 24 rumah tangga;
- Kecamatan Arut utara 126 rumah tangga.

D. Rumah Tangga Tidak Memiliki Fasilitas Tempat Buang Air Besar/BAB (Jamban)

Di Kabupaten Kotawaringin Barat masih terdapat masyarakat yang tidak memiliki fasilitas penting dalam unit hunian, berupa jamban. Jumlah keluarga yang tidak memiliki fasilitas penyehatan lingkungan berupa jamban ini angkanya masih tinggi (lihat grafik **Jumlah Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar**). Dalam upaya penyelesaian ini maka prioritas penanganan diutamakan

- Prioritas Pertama pada keluarga yang tidak memiliki jamban sesuai dengan **Jumlah Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah** sebagai berikut:
 - Kecamatan Kotawaringin Lama 1.082 rumah tangga;

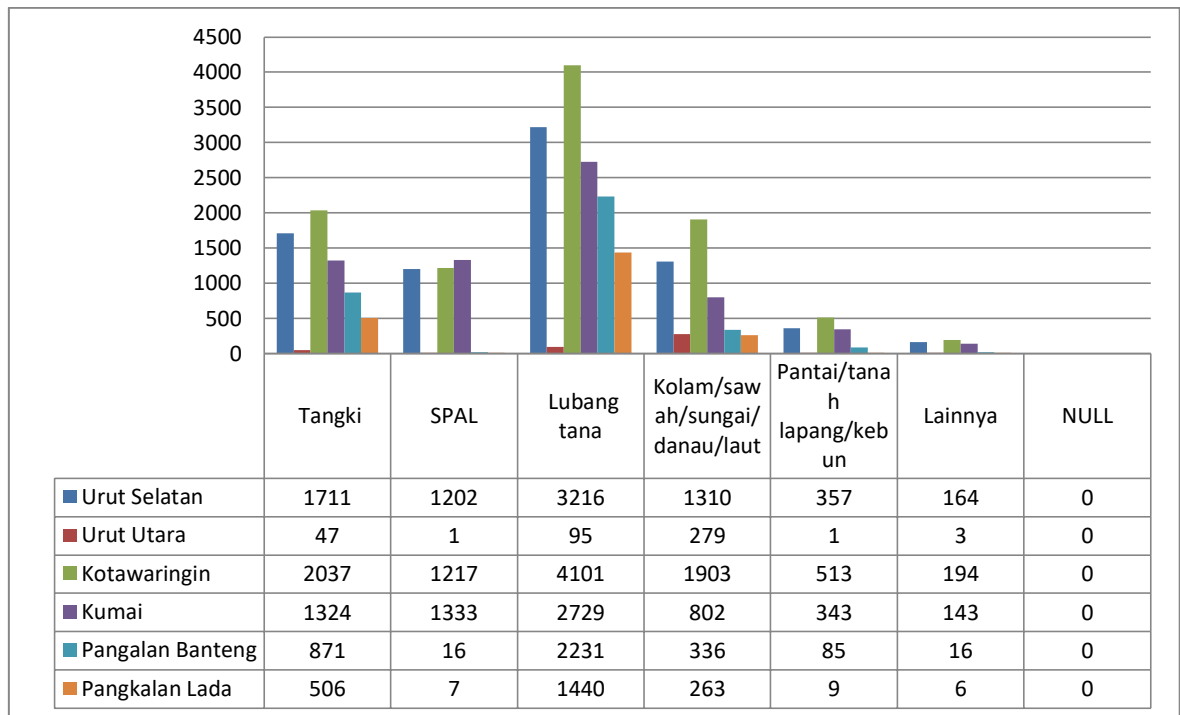
- b. Kecamatan Arut Selatan 884 rumah tangga;
- c. Kecamatan Kumai 501 rumah tangga
- d. Kecamatan Arut Utara 175 rumah tangga;
- e. Kecamatan Pangkalan Banteng 181 rumah tangga;
- f. Kecamatan Pangkalan Lada 157 rumah tangga.



Gambar 4.29.
Jumlah Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah di Kabupaten Kotawaringin Barat

Sumber: Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial (Bdt- Ppls) 2015

- 2) Prioritas **penanganan** kedua diarahkan pada keluarga yang tidak memiliki tempat buangan akhir tinja sesuai dengan **Jumlah Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja Dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah di Kabupaten Kotawaringin Barat** yang jumlahnya dapat dilihat pada grafik tabel di bawah ini.



Gambar 4.30.
Jumlah Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja Dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah di Kabupaten Kotawaringin Barat
Sumber: Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial (BDT- PPLS) 2015

Tabel IV.13.
Daerah Prioritas Penanganan Infrastruktur Dasar di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015

Nama Kecamatan	Status Lahan (Milik Sendiri)	Status Bangunan (milik Sendiri)	Kondisi Atap (Rumput/ bambu)	Kondisi Lantai (tanah)	Kondisi dinding (non tembok/ plester)	Pemenuhan air dr mata air, sungai, hujan dan lainnya	Tidak Ada Fasilitas BAB	Tidak ada Tempat Pembuangan Tinja	Keterangan prioritas
Urut Selatan	5921	6545	311	1139	6090	697	884	5047	2
Urut Utara	299	325	1	1	420	117	175	378	
Kotawaringin	7899	8550	360	1242	7768	892	1082	6711	1
Kumai	4990	5588	359	974	4973	635	501	4017	3
Pangalan Banteng	2566	3024	41	927	2460	189	181	2668	4
Pangkalan Lada	1610	1982	28	613	1598	125	157	1718	5

Sumber: Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial (BDT- PPLS) 2015

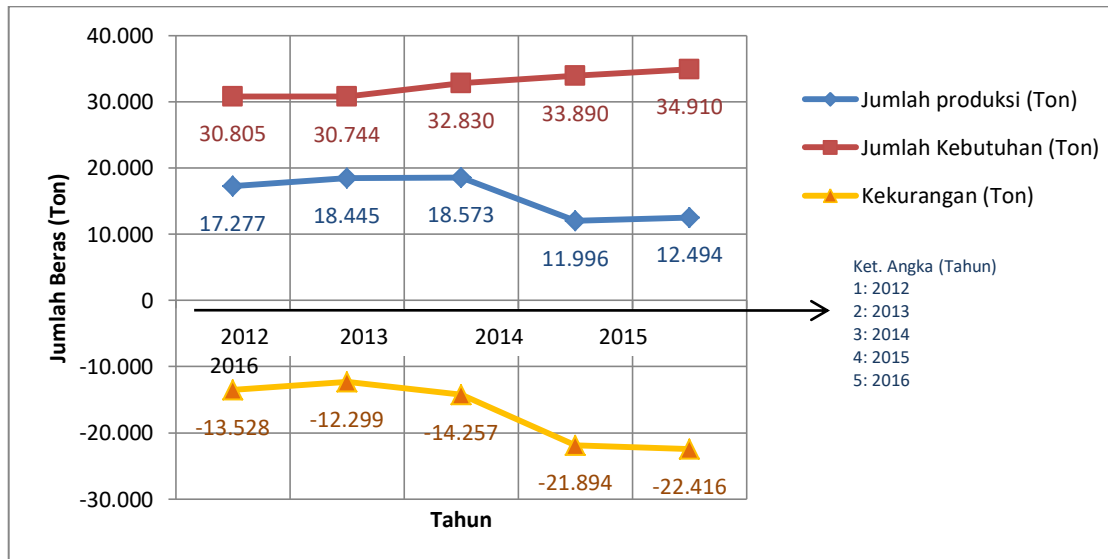
4.1.2.5. Ketahanan Pangan

Tingkat inflasi ini sangat mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap bahan pokok. Dari karakteristik kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah kita bisa melihat bahan pangan yang penting mempengaruhi kemiskinan adalah beras. Produksi beras untuk Kabupaten Kotawaringin Barat selama 5 tahun terakhir masih sangat dibawah angka kebutuhan sampai 43,91-64,21% dan dalam pelaksanaan program ketahanan pangan selama 5 tahun terakhir tidak ada standart capaian. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan bahan pangan pokok sangat tinggi terhadap wilayah di luar Kabupaten Kotawaringin Barat, sementara dalam realisasi selama 5 tahun terkait dengan upaya penanganan penyediaan dan pengendalian harga pangan pokok, belum menyertakan standart yang akan dicapai.

Tabel IV.14.
Komparasi Ketersediaan dan Kebutuhan Bahan Pangan Pokok (Beras)
di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah produksi (Ton)	17.277	18.445	18.573	11.996	12.494
Jumlah Kebutuhan (Ton)	30.805	30.744	32.830	33.890	34.910
Kekurangan	-13.528	-12.299	-14.257	-21.894	-22.416
% Kekurangan	-43,91	-40,00	-43,43	-64,60	-64,21

Sumber: RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2012-2022



Gambar 4.31.
Grafik Komparasi Ketersediaan dan Kebutuhan Bahan Pangan Pokok (Beras)
di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

Sumber: Tabel IV.14

BAB V

ANALISIS APBD UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

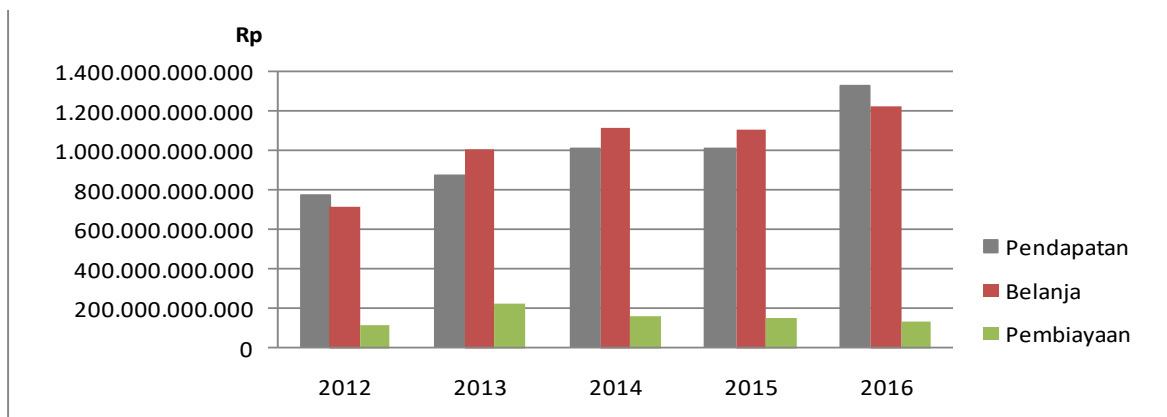


Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 telah menggaris bawahi empat strategi pokok penanggulangan kemiskinan, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan dan kemampuan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, serta memperkuat sinergi kebijakan. Berdasarkan strategi ini, untuk berpihak pada penanggulangan kemiskinan APBD perlu memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Anggaran pendapatan harus tidak menambah beban pengeluaran masyarakat miskin.
- Anggaran belanja harus mendukung pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin; peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; pengembangan dan keberlanjutan UMK; serta penguatan sinergi kebijakan penanggulangan kemiskinan.

5.1 GAMBARAN UMUM ANGGARAN DAERAH

APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 dengan komposisi pendapatan daerah sebesar Rp 1,329 triliun sedangkan belanja daerah sebanyak Rp 1,232 triliun. Berdasarkan data APBD Kabupaten Kotawaringin Barat TA 2012 hingga 2016 dapat diketahui bahwa pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami rata-rata pertumbuhan pertahunnya 12,1%. Sedangkan belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 12,2% pertahunnya.



Gambar 5.1. Rata-rata Pertumbuhan APBD Tahun 2012- 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat

Tabel V.1
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2012-2016 Kabupaten Kotawaringin Barat

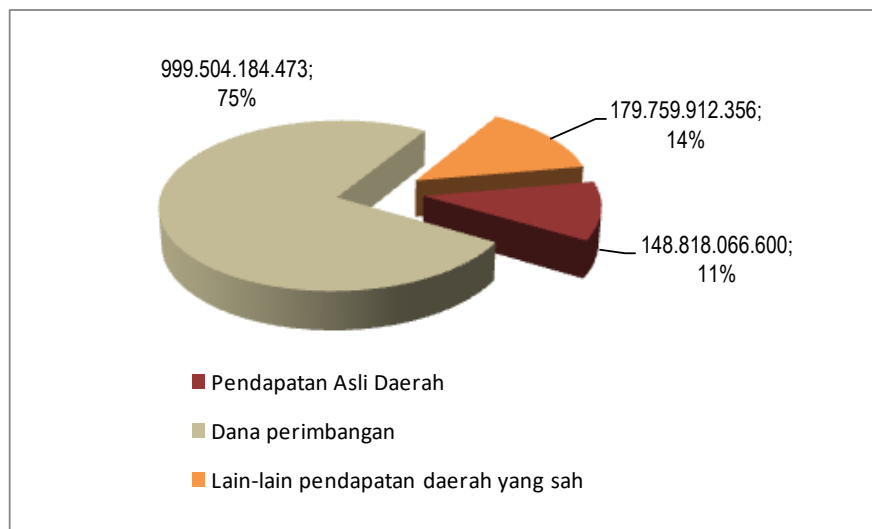
No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuh an (%)
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
I	Pendapatan	771.039.121.032	875.984.792.231	1.012.105.155.890	1.007.379.613.115	1.329.903.835.400	12,1
I.1	Pendapatan Asli Daerah	65.265.940.704	86.595.997.786	121.929.676.088	123.301.575.004	148.818.066.600	19,1
I.1.1	Pajak Daerah	18.163.795.420	18.164.283.078	24.317.570.204	26.679.640.330	38.351.000.000	17,5
I.1.2	Retribusi Daerah	33.645.759.867	16.256.170.502	12.880.041.243	13.680.698.799	14.014.206.000	-12,8
I.1.3	Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan	4.720.678.018	4.352.739.271	5.051.549.448	6.298.061.742	7.050.925.000	9,0
I.1.4	Lain-lain PAD yang sah	8.735.707.399	47.822.804.934	79.680.515.194	76.643.174.135	89.401.935.600	105,4
I.2	Dana perimbangan	583.842.053.425	654.073.605.571	743.476.846.280	710.945.739.168	999.504.184.473	12,4
I.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	68.961.212.425	70.498.011.571	95.042.382.280	61.705.486.168	68.077.342.000	2,5
I.2.2	Dana alokasi umum	486.941.691.000	566.405.844.000	597.665.464.000	614.824.773.000	662.249.343.000	6,5
I.2.3	Dana alokasi khusus	27.939.150.000	17.169.750.000	50.769.000.000	34.415.480.000	94.898.744.400	176,4
I.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	121.931.126.903	135.315.188.874	130.567.267.932	173.132.298.943	179.759.912.356	8,8
I.3.1	Hibah	17.257.682.055	18.061.618.076	3.500.000.000	25.784.718.247	4.900.000.000	95,9
I.3.2	Dana darurat	0	0	0	0	0	0,0
I.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah lainnya ***	54.918.945.848	6.645.438.798	67.737.996.932	46.020.008.696	78.525.571.400	12,3
I.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus ****	49.754.499.000	44.958.532.000	52.629.271.000	94.067.572.000	58.634.768.000	9,7
I.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	0	5.649.600.000	6.700.000.000	7.260.000.000	0	5,4
I.3.6	Sumbangan pihak ketiga	0	0	0	0	13.800.000.000	20,0
II	Belanja	719.465.512.100	1.007.578.083.000	1.113.961.783.800	1.111.699.635.508	1.231.699.546.500	12,2
II.1	Belanja tidak langsung	352.077.888.100	433.708.870.000	461.605.017.750	505.942.125.000	600.423.641.000	11,6
II.1.1	Belanja pegawai	313.492.771.100	359.206.191.000	360.879.241.000	402.296.892.100	450.474.587.000	14,8
II.1.2	Belanja bunga				0	1.050.000.000	
II.1.3	Belanja subsidi						
II.1.4	Belanja hibah	7.019.125.000	41.598.630.000	55.423.885.450	6.321.828.000	15.376.173.000	116,1
II.1.5	Belanja bantuan sosial	0	1.630.000.000	4.108.700.000	1.695.000.000	660.000.000	6,5
II.1.6	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/k	1.347.869.000	1.979.343.000	2.866.132.000	4.086.656.700	4.448.006.600	28,6
II.1.7	Belanja bantuan keuangan	27.718.123.000	27.944.706.000	34.924.068.300	9.291.748.200	127.914.399.400	44,9
II.1.8	Belanja tidak terduga	2.500.000.000	1.350.000.000	3.402.991.000	2.250.000.000	500.475.000	-1,1
II.2	Belanja langsung	367.387.624.000	573.869.213.000	652.356.766.050	605.757.510.508	631.275.905.500	13,4
II.2.1	Belanja pegawai	22.653.271.300	27.911.870.650	52.684.874.519	67.951.961.314	74.538.770.138	30,1
II.2.2	Belanja barang dan jasa	121.231.070.016	148.464.231.093	199.707.710.260	228.544.759.749	231.030.800.716	14,5
II.2.3	Belanja modal	223.503.282.684	397.493.111.257	399.964.181.271	309.260.789.445	325.706.334.646	12,2
III	Pembiayaan	119.347.894.085,04	222.788.332.591,70	166.601.025.388,19	153.062.132.605,69	139.922.595.702,26	8,9
III.1	Penerimaan	116.678.994.085,24	212.688.332.509,41	160.101.467.644,91	141.562.132.617,27	99.424.595.732,03	3,2
III.2	Pengeluaran	2.668.900.000,00	10.100.000.000,00	6.499.557.768,00	11.500.000.000,00	40.498.000.000,00	114,4

Sumber: Laporan RP JMD Kotawaringin Barat 2017 – 2022

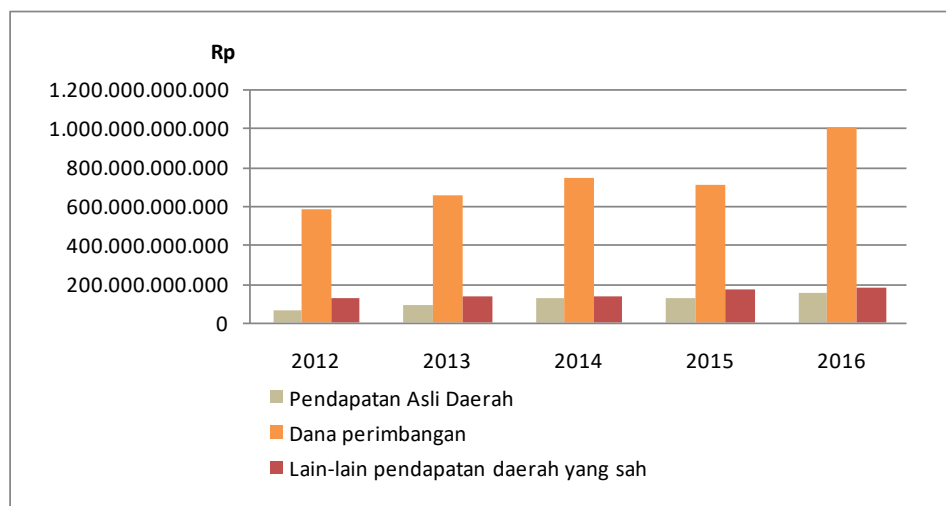
Anggaran pendapatan dan belanja yang meningkat menunjukkan bahwa secara fiskal daerah memiliki kemampuan lebih besar dalam mendanai pelayanan publik.

5.1.1 Pendapatan Daerah

Komposisi pendapatan daerah pada APBD Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian utama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lainnya. Gambar 5.2. menunjukkan besarnya pendapatan dan persentase dari ketiga sumber pendapatan daerah pada APBD Kabupaten Kotawaringin Barat TA 2016. Gambar 5.2 menunjukkan bahwa pada TA 2016 dana perimbangan mendominasi sumber pendapatan daerah yaitu sebesar 75% atau Rp. 999,5 miliar, sedangkan pendapatan lainnya sebesar 14% dan diikuti PAD hanya sebesar 11%. Perkembangan komposisi setiap jenis pendapatan daerah pada tahun 2012-2016 trend-nya terlihat pada Gambar 5.3.



Gambar 5.2. Komposisi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016 (%)



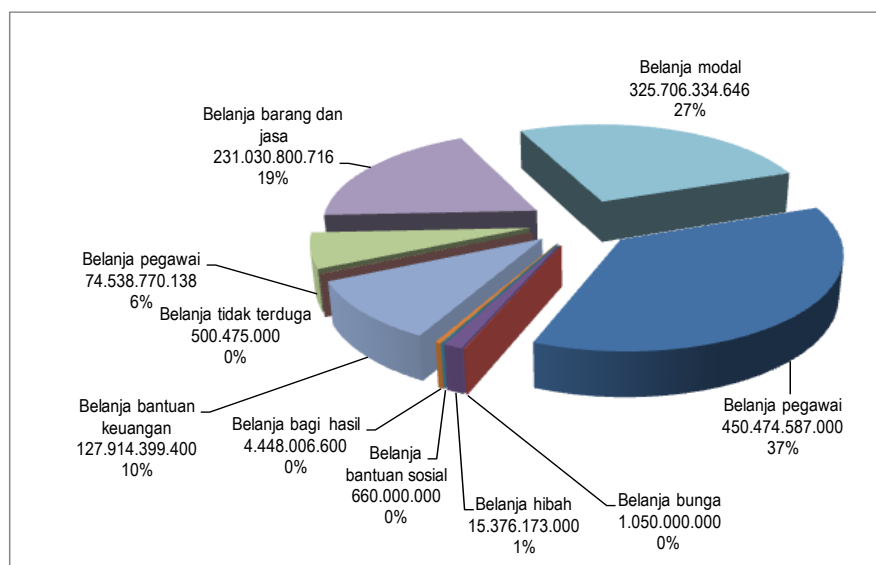
Gambar 5.3. Perkembangan Komposisi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2011-2015 (Rupiah)

Gambar 5.3. menunjukkan bahwa dana perimbangan setiap tahun mendominasi struktur pendapatan daerah, namun pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 dan tahun 2016 dana perimbangan menurun. PAD setiap tahunnya juga mengalami peningkatan, pada tahun 2012 sebanyak Rp 65,266 miliar meningkat menjadi sebanyak Rp 148,8 miliar pada tahun 2016. Pendapatan lainnya menunjukkan kondisi yang sama dengan PAD, yaitu mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga 2016 menjadi sebanyak Rp 179,76 miliar dari Rp 121,9 miliar.

5.1.2 Belanja Daerah

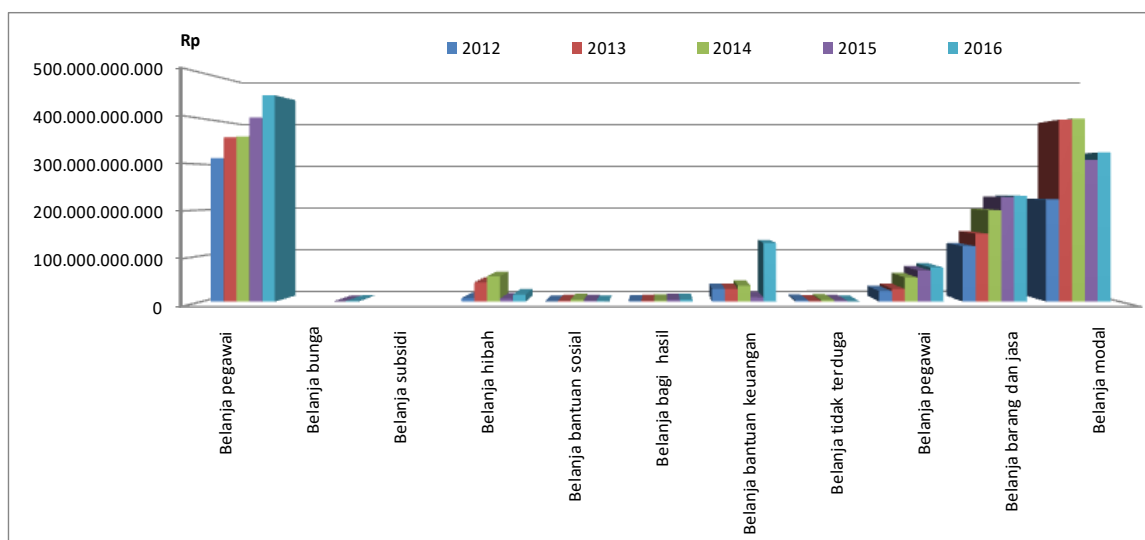
Belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat TA 2016 mencapai Rp1,232 triliun dengan komposisi 5 besar yaitu belanja pegawai (tidak langsung) mencapai 37%, diikuti belanja modal mencapai 27%, belanja barang dan jasa 19%, belanja bantuan keuangan 10%, dan belanja pegawai

langsung 6%. Sedangkan belanja untuk bantuan sosial sangat kecil dibandingkan belanja lainnya, kurang dari 1%, bahkan tahun 2016 menurun dibandingkan belanja di tahun 2015, secara rinci dapat dilihat pada Gambar 5.4.



Gambar 5.4. Komposisi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016 (%)

Pada tahun 2013 dan 2014 Belanja Modal menduduki proporsi terbesar, dan tahun 2015 dan 2016 belanja pegawai tak langsung. Bila dicermati pada tahun 2013 hingga tahun 2016 Belanja Modal cenderung menurun. Namun secara menyeluruh selama lima tahun belanja pegawai tak langsung, belanda modal dan belanja barang dan jasa mendominasi belanja di Kabupaten Kotawaringin Barat. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar 5.5 dan Tabel V.2.



Gambar 5.5. Perkembangan Komposisi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2012-2016 (Rupiah)

5.1.3 Pembiayaan Daerah

Total Pembiayaan Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai Rp 139,922 miliar dengan penerimaan pembiayaan mencapai Rp 99,424 miliar serta pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 40,498 miliar. Untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022, Prioritas Alokasi Belanja Langsung Kabupaten Kotawaringin Barat disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel V.2
Prioritas Alokasi Belanja Langsung Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2018-2022

PROGRAM	TAHUN					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PRIORITAS 1 :						
TOTAL (Rp)	Rp. 101,772,898,701	Rp. 110,545,317,726	Rp. 164,907,173,357	Rp. 166,314,040,409	Rp. 152,267,962,699	Rp. 152,500,411,481
% Terhadap BL	15%	15%	17.66%	17%	15%	14%
PRIORITAS 2 :						
TOTAL (Rp)	Rp. 556,383,113,461	Rp. 601,836,187,995	Rp. 717,123,351,572	Rp. 751,215,886,968	Rp. 792,788,423,191	Rp. 834,273,067,973
% Terhadap BL	81%	80%	76.78%	77%	78%	79%
PRIORITAS 3 :						
TOTAL (Rp)	Rp. 29,216,865,688	Rp. 39,579,136,600	Rp. 51,955,237,706	Rp. 57,522,721,505	Rp. 68,252,152,562	Rp. 73,911,852,465
% Terhadap BL	4%	5%	5.56%	6%	7%	7%
BELANJA LANGSUNG	Rp. 687,372,877,850	Rp. 751,960,642,321	Rp. 933,985,762,635	Rp. 975,052,648,882	Rp. 1,013,308,538,452	Rp. 1,060,685,331,918

Sumber: RPJMD Kotawaringin Barat 2017 - 2022 hal 387

Prioritas Intervensi dan Wilayah. Prioritas intervensi dan wilayah untuk penanggulangan kemiskinan ditentukan berdasarkan profil kemiskinan dan analisis determinan masalah. Alokasi belanja dalam APBD diharapkan mengacu kepada prioritas-prioritas tersebut, sehingga fokus dan lokus intervensi melalui program dan kegiatan yang dianggarkan sesuai dengan kebutuhan penyelesaian masalah.

Dalam RPJMD Kotawaringin Barat 2017-2022, Prioritas Alokasi Belanja Langsung Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018-2022, alokasi belanja dalam APBD yang diharapkan mengacu kepada prioritas-prioritas untuk penanggulangan kemiskinan, diperkirakan rata-rata mencapai 66,08%/ tahunnya. Berikut ini disampaikan rincian program, jumlah total dan nilai persentase biaya program yang mendukung penanggulangan kemiskinan terhadap belanja total di prioritas II.

Tabel V.3
Prioritas Alokasi Belanja Langsung Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018-2022 yang Diharapkan Mampu Mendukung
Penanggulangan Kemiskinan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	2018	2019	2020	2021	2022
Pendidikan					
Program pendidikan anak usia dini (PAUD)	2.001.528.500	2.201.681.350	2.421.849.485	2.664.034.434	2.930.437.877
Pogram pendidikan Nonformal	803.838.800	884.222.680	972.644.948	1.069.909.443	1.176.900.387
Program Pendidikan Sekolah Dasar	17.096.825.000	18.806.507.500	20.687.158.250	22.755.874.075	25.036.461.483
Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	11.310.110.000	12.441.121.000	13.685.233.100	15.053.756.410	16.559.132.051
Kesehatan					
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	607.344.400	1.595.000.000	1.740.000.000	1.885.000.000	2.035.000.000
Program Peningkatan Mutu dan Akses layanan	0	525.000.000	907.500.000	998.250.000	1.098.075.000
Program Sumber Daya Kesehatan					
Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas	2.367.000.000	5.380.000.000	5.918.000.000	6.509.800.000	7.160.780.000
Rumah Sakit yang dibangun dan Puskesmas serta jaringannya yang direhab	201.800.000	1.040.000.000	2.040.000.000	2.040.000.000	3.040.000.000
peningkatan jaminan kesehatan	7.297.059.600	7.297.059.600	7.297.059.600	10.780.000.000	12.280.000.000
Pelayanan kefarmasian, makanan, minuman dan alat kesehatan	58.618.600	75.000.000	82.500.000	90.750.000	106.330.262
sumber daya manusia kesehatan	8.494.917.200	9.920.000.000	13.400.000.000	13.400.000.000	13.400.000.000
peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan daerah	357.000.000	1.883.200.000	2.071.520.000	2.278.672.000	2.506.539.200
Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	277.849.400	400.000.000	600.000.000	912.500.000	912.500.000
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit					
Sarana Prasarana Rumah Sakit	37.149.014.000	33.377.400.000	34.750.562.000	38.482.131.960	42.965.597.529
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan					
<i>in service training</i> yang diadakan kegiatan	430.000.000	367.800.000	389.649.000	421.732.470	467.609.669
Program Pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan	0	539.000.000	565.950.000	565.950.000	726.679.800
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan					
Panjang jalan yang memenuhi Kondisi Jalan Baik dan sedang	7.272.044.400	6.200.000.000	6.200.000.000	6.200.000.000	6.200.000.000

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	2018	2019	2020	2021	2022
Program pembangunan infrastruktur Permukiman					
Panjang jalan yang memenuhi Kondisi Jalan Baik dan sedang	25.007.899.800	22.307.988.360	26.107.138.260	31.182.685.380	34.427.126.580
Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	906.800.000	1.593.427.740	1.864.795.590	2.227.334.670	2.459.080.470
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan					
Persentase anjang ruas jalan terhubung pusat produksi terhadap total panjang jalan kabupaten	49.084.605.600	177.804.664.100	209.262.389.500	251.250.960.450	278.092.878.100
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh					
Luas permukiman kumuh yang tertangani	10.556.525.016	7.485.996.120	8.752.379.420	10.444.228.460	11.525.708.860
Jumlah penduduk terlayani air minum (jiwa) dan Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/MCK komunal/ SPAL terpusat (kk)	12.259.683.000	5.311.425.800	6.215.985.300	7.424.448.900	8.196.934.900
Program Pembangunan & Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong					
Jumlah penduduk yang terlayani jaringan Drainase	6.733.487.584	16.415.419.980	19.219.554.430	22.965.791.590	25.360.498.190
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya					
Jumlah kawasan Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi Rawa yang ditangani	14.765.816.600	18.585.000.000	18.575.000.000	18.700.000.000	20.700.000.000
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya					
Jumlah Embung dan Bangunan Penampungan Air yang ditangani	4.832.051.800	7.875.000.000	10.750.000.000	13.600.000.000	16.600.000.000
Program pengendalian banjir					
Mengendalikan banjir pada daerah genangan air dan mengamankan pantai dari erosi dan abrasi	10.871.616.600	24.376.402.000	30.194.089.000	38.838.932.000	41.266.682.000
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman					
Persentase lingkungan kawasan permukiman yang tertangani	730.000.000	4.310.000.000	8.465.000.000	10.275.000.000	12.585.000.000
Sosial					
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial					
Jumlah PSKS yang diberikan Peningkatan Potensi dan sumber Daya Pembangunan Kesejahteraan Sosial (orang)	332.140.500	952.000.000	1.035.000.000	1.035.000.000	1.500.000.000
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					

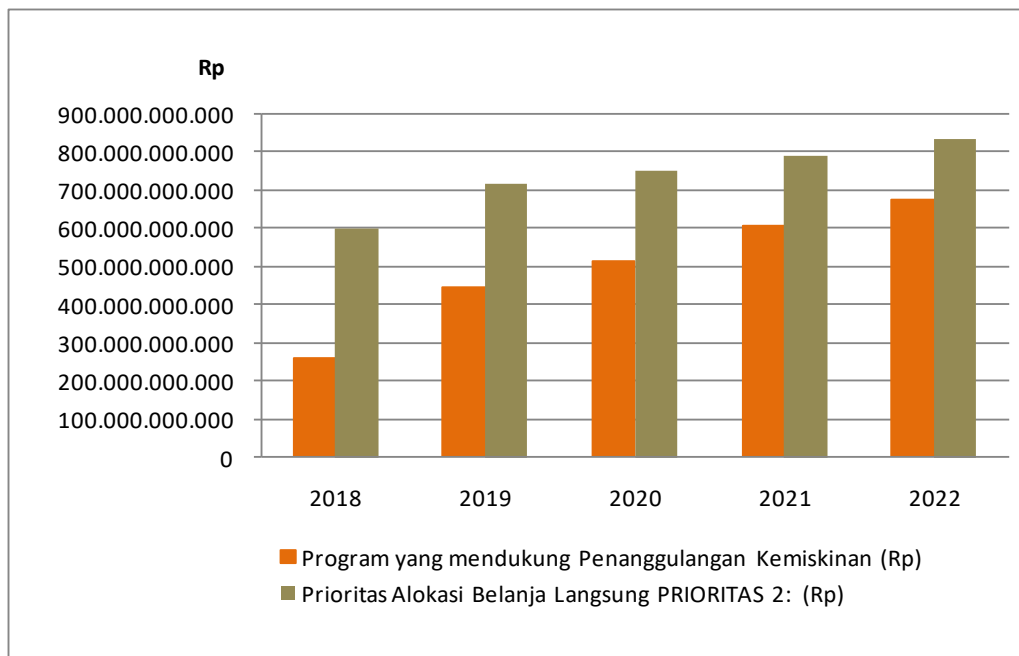
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	2018	2019	2020	2021	2022
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	265.650.000	440.647.190	538.150.000	598.150.000	720.000.000
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosialm (PMKS) Lainnya.					
Prosentase Fakir Miskin yang dapat meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (orang)	164.200.000	585.000.000	745.000.000	745.000.000	470.000.000
Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial					
Jumlah PMKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (orang)	120.200.000	427.500.000	513.000.000	553.000.000	660.000.000
Program Pembinaan Anak Terlantar					
Jumlah Anak Terlantar yang diberikan Pembinaan	105.400.000	210.000.000	230.000.000	1.230.000.000	230.000.000
Tenaga Kerja					
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja					
Prosentase peningkatan pelatihan dan sarana prasarana pendidikan keterampilan bagi pencari kerja serta terpeliharanya sarana dan prasarana LLK	1.538.281.500	1.473.689.600	1.726.094.200	2.029.629.000	2.212.450.000
Program Peningkatan Kesempatan Kerja					
Presentase peningkatan informasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	416.398.400	251.719.240	305.170.000	328.347.000	336.400.000
Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak					
Program Pembinaan Keluarga Berencana					
Kader dan Data Keluarga Sejahtera	38.990.000	120.000.000	132.000.000	145.000.000	133.000.000
Pangan					
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan					
Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	455.198.000	170.000.000	423.000.000	500.000.000	505.000.000
Program Pengembangan Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan					
Angka kecukupan energi (AKE)	317.616.300	409.000.000	505.000.000	635.000.000	682.500.000
Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan					

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	2018	2019	2020	2021	2022
Stabilitas Harga,Pasokan dan Akses Pangan	123.050.000	185.000.000	370.000.000	475.000.000	570.000.000
Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan					
Persentase Penurunan Kerawanan Pangan	211.751.200	300.000.000	325.000.000	438.500.000	585.000.000
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, UMKM dan Usaha Ekonomi Masyarakat, Masyarakat Miskin, dan Desa Tertinggal					
Prosentase lembaga ekonomi Desa, UMKM, usaha ekonomi masyarakat dan masyarakat miskin dan desa tertinggal yang dibina	400.901.800	678.800.000	899.000.000	1.335.000.000	1.565.000.000
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah					
Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi					
Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT (kenaikan 10 % Tiap tahun)	321.812.500	284.000.000	281.000.000	277.000.000	285.000.000
Program Pengembangan Usaha Koperasi					
Jumlah usaha koperasi yang berkembang Koperasi	177.000.000	214.000.000	226.000.000	230.000.000	234.000.000
Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro					
Jumlah Usaha Mikro yang berkembang UKM	121.943.000	223.000.000	231.000.000	238.000.000	247.000.000
Program Penumbuhan Wirausaha Baru					
Jumlah Wirausaha Baru	121.360.000	50.000.000	55.000.000	70.000.000	75.000.000
Kelautan dan Perikanan					
Program Pengembangan Usaha Hasil Perikanan					
Peningkatan konsumsi ikan perkapita pertahun	1.978.823.700	3.910.000.000	5.220.000.000	2.550.000.000	6.440.000.000
Pariwisata					
Program Pengembangan Ekonomi kreatif	759.000.000	1.786.906.850	1.775.000.000	3.200.000.000	3.430.589.693
Pertanian					
Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan					
Meningkatnya produktivitas tanaman pangan	1.523.246.605	3.660.854.669,65	3.827.415.806,77	6.469.770.094,86	6.875.869.148,20
Program Peningkatan Produksi Hortikultura					
Meningkatnya produktivitas hortikultura	1.231.628.000	3.958.935.000	5.603.880.000	6.125.400.000	6.344.501.000

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	2018	2019	2020	2021	2022
Program Peningkatan Produksi Perkebunan					
Meningkatnya produktivitas perkebunan	944.785.700	10.117.065.280	13.004.538.220	18.835.429.218	21.275.117.491
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan					
Prosesntase Peningkatan Prasarana, Sarana dan SDM Petani	1.914.500.000	5.841.750.000	8.027.000.000	11.295.740.000	12.688.011.600
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan					
Tenaga Penyuluh yang terfasilitasi	773.321.000	773.321.000	773.321.000	773.321.000	773.321.000
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak					
Persentase meningkatnya pelayanan keswan dan pencegahan penyakit menular pada hewan/ternak	920.807	1.546.000.000	1.602.100.000	1.703.810.000	1.821.691.000
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan					
Persentase peningakatan populasi dan produksi ternak uminsia dan non ruminansia	930.826.600	3.250.000.000	3.890.000.000	4.750.000.000	5.060.000.000
Program Peningkatan Agribisnis Peternakan					
Prosentase peningkatan usaha bidang peternakan	466.820.800	1.040.000.000	1.210.000.000	1.310.000.000	1.721.000.000
Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan					
Presentase peningkatan prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan	934.417.400	1.912.000.000	2.504.000.000	2.665.000.000	2.790.000.000
Perdagangan					
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri					
Persentase pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan Eceran	227.570.000	250.000.000	275.000.000	302.000.000	333.000.000
Program Stabilisasi Harga Komoditas Perdagangan					
Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar waktu (YoY) kurang dari 9%	44.155.000	78.000.000	85.000.000	94.000.000	25.000.000
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan					
Persentase peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga	72.525.000	69.273.000	78.700.000	88.800.000	111.000.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor					

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah realisasi ekspor	139.510.000	153.461.000	168.807.100	185.687.810	204.256.591
Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar	7.948.915.000	10.985.000.000	2.247.000.000	2.251.000.000	2.755.000.000
Perindustrian					
Program Pengembangan Sentra dan Klaster Industri					
Jumlah IKMI potensial	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000
Program Pengembangan Industri Kecil Menengah					
Jumlah Industri kecil Menengah yang berkembang	181.587.500	256.500.000	284.150.000	313.565.000	354.921.500
Program perlindungan HKI dan standardisasi Industri					
Jumlah IKM yang difasilitasi dalam standarisasi industri	101.603.000	123.020.000	145.000.000	161.000.000	164.000.000
JUMLAH	256.913.491.266	445.718.765.117	512.430.290.270	606.988.897.428	674.027.587.447
TOTAL PRIORITAS 2: (Rp)	601.836.187.995	717.123.351.572	751.215.886.968	792.788.423.191	834.273.067.973
% Program yang mendukung Penanggulangan Kemiskinan	42,69	62,15	68,21	76,56	80,79

Sumber: Diolah dari Laporan RP JMD Kotawaringin Barat 2017 – 2022



Gambar 5.6. Grafik Program yang Mendukung Penanggulangan Kemiskinan dalam Alokasi Belanja Langsung Prioritas II

Program-program dalam alokasi belanja langsung yang diharapkan mengacu kepada prioritas-prioritas untuk penanggulangan kemiskinan, di dalam RPJMD Kotawaringin Barat 2017-2022, selalu mengalami kenaikan 9,53% tiap tahunnya seperti tampak pada grafik diatas. Program-program tersebut yang diharapkan dapat mendukung penanggulangan kemiskinan hingga tahun 2022 yang akan datang.

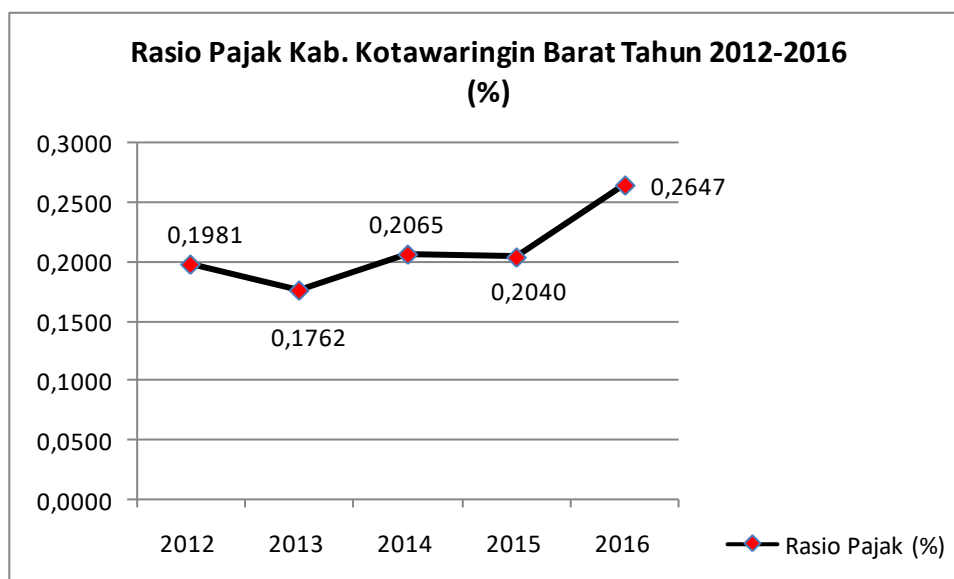
5.2 ANALISIS PENDAPATAN DAERAH

5.2.1 Rasio Pajak (*Tax Ratio*)

Rasio pajak (tax ratio) di tingkat daerah merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak daerah dengan PDRB. Rasio pajak dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, mengukur kinerja perpajakan, dan melihat potensi pajak yang dimiliki. PDRB sangat erat kaitannya dengan potensi pajak daerah karena dapat menggambarkan kegiatan ekonomi masyarakat. Jika pertumbuhan ekonomi daerah baik tentunya akan menjadi potensi penerimaan pajak di wilayah tersebut. PDRB yang akan digunakan dalam analisis ini adalah PDRB atas dasar harga berlaku yang merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan patokan harga pada setiap tahun.

Nilai PDRB ini pada umumnya digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi yang terjadi di suatu wilayah. Perhitungan rasio pajak di berbagai wilayah di Indonesia akan memberikan

gambaran hubungan antara penerimaan pajak daerah di wilayah tersebut dengan PDRB-nya, menilai kondisi suatu daerah, dan membandingkannya dengan daerah lain.



Gambar 5.7. Grafik Perkembangan Rasio Pajak Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2015 (%)

Gambar di atas menunjukkan perkembangan rasio pajak Kabupaten Kotawaringin Barat yang fluktuatif dari tahun 2012 hingga tahun 2016, namun meningkat dengan baik tahun 2014 hingga tahun 2016. Pada tahun 2012 hanya sebesar 0,20% meningkat di tahun 2016 menjadi 0,26%. Rata-rata pajak yang bisa dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2012 hingga 2016 hanya 0,21% dari PDRB. Komposisi Rasio Pajak Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

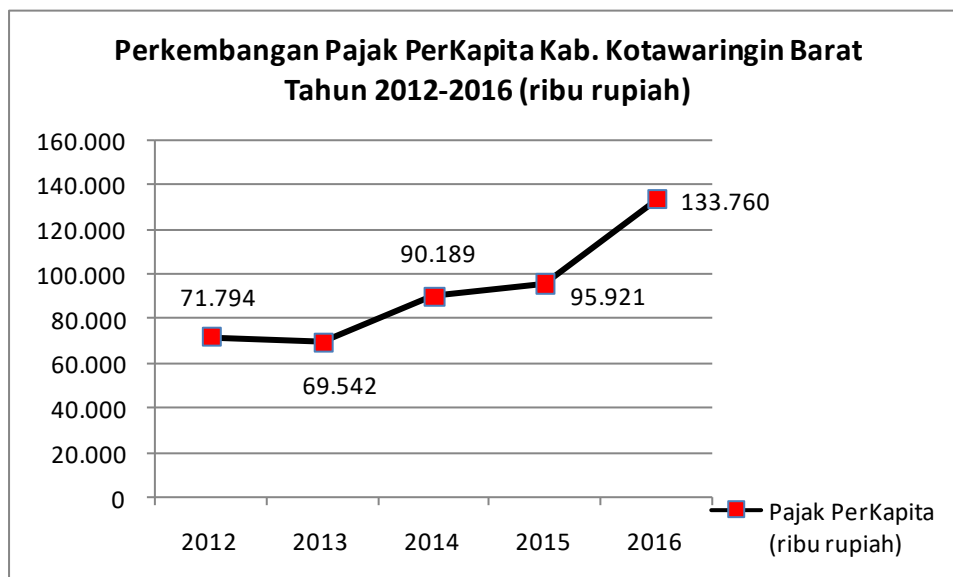
Tabel V.4
Komposisi Rasio Pajak Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

No	Jenis	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pajak Daerah (Rp.)	18.163.795.420	18.164.283.078	24.317.570.204	26.679.640.330	38.351.000.000
2	PDRB ADHB (juta rupiah)	9.168.960,20	10.306.881,50	11.775.583,20	13.075.238,50	14.485.921,00
3	Rasio Pajak (%)	0,20	0,18	0,21	0,20	0,26

Sumber: Diolah dari data BPS Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017

5.2.2 Pajak Per Kapita (*Tax Per Kapita*)

Pajak per kapita (*tax per capita*) memang belum banyak digunakan dalam menghitung tingkat keberhasilan pajak sebagai sumber Pendapatan Daerah. Namun, pajak per kapita dapat digunakan sebagai alternatif alat hitung efektifitas pemungutan pajak daerah. Pajak per kapita merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak yang dihasilkan suatu daerah dengan jumlah penduduknya. Pajak per kapita menunjukkan kontribusi setiap penduduk pada pajak daerah.



**Gambar 5.8. Perkembangan Pajak Per Kapita Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2012-2016 (Rupiah)**

Gambar di atas menunjukkan pajak per kapita Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan di akhir tahun 2016, terkecuali tahun 2013 (turun menjadi Rp 69.542) dari tahun 2012 sebesar Rp 71.794. Rata-rata rasio pajak per kapita Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2012 hingga 2016 mencapai Rp. 92.241, berarti secara rata-rata setiap penduduk yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan kontribusi melebihi Rp. 92.241 untuk pendapatan daerah melalui pajak daerah. Komposisi pajak per kapita Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel V.5
Komposisi Pajak Per Kapita Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2011-2015**

No	Jenis	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pajak Daerah (Rp.)	18.163.795.420	18.164.283.078	24.317.570.204	26.679.640.330	38.351.000.000
2	PDRB ADHB (juta rupiah)	9.168.960,20	10.306.881,50	11.775.583,20	13.075.238,50	14.485.921,00
3	Jumlah Penduduk (jiwa)	253.000	261.200	269.629	278.141	286.714
4	Pajak PerKapita (ribu rupiah)	71.794	69.542	90.189	95.921	133.760

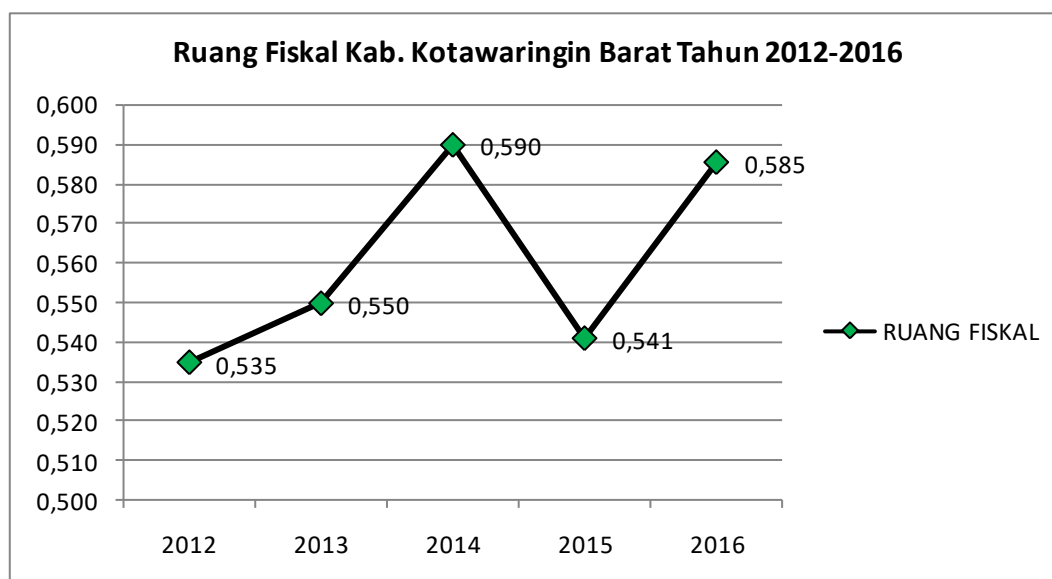
Sumber: Diolah dari data BPS Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017

5.2.3 Ruang Fiskal (*Fiscal Space*)

Ruang fiskal (*fiscal space*) merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah maka akan semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah seperti pembangunan infrastruktur daerah.

Ruang Fiskal Daerah. Indikator ini menunjukkan seberapa besar keleluasaan (diskresi) yang dimiliki Pemda dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja. Perhitungan Ruang Fiskal menggunakan rumus yang dikeluarkan oleh Kemenkeu, yaitu keseluruhan Pendapatan Daerah dikurangi dengan Pendapatan Hibah; pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (earmarked) yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian serta Dana Darurat; dan belanja yang sifatnya mengikat, yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Bunga dan selanjutnya dibagi dengan keseluruhan Pendapatan Daerah.

Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai ruang fiskal daerah yang cukup baik, yaitu lebih dari 50%. Perkembangan ruang fiskal Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2012-2016, menunjukkan penurunan terbesar di tahun 2015, yaitu mencapai 4,9% (54,1%). Hal ini dikarenakan dana hibah meningkat dari Rp 3.500.000.000 (2014) menjadi Rp 25.784.718.247(2015). Berikut ini disampaikan grafik perkembangan ruang fiskal dari tahun 2012-2016.



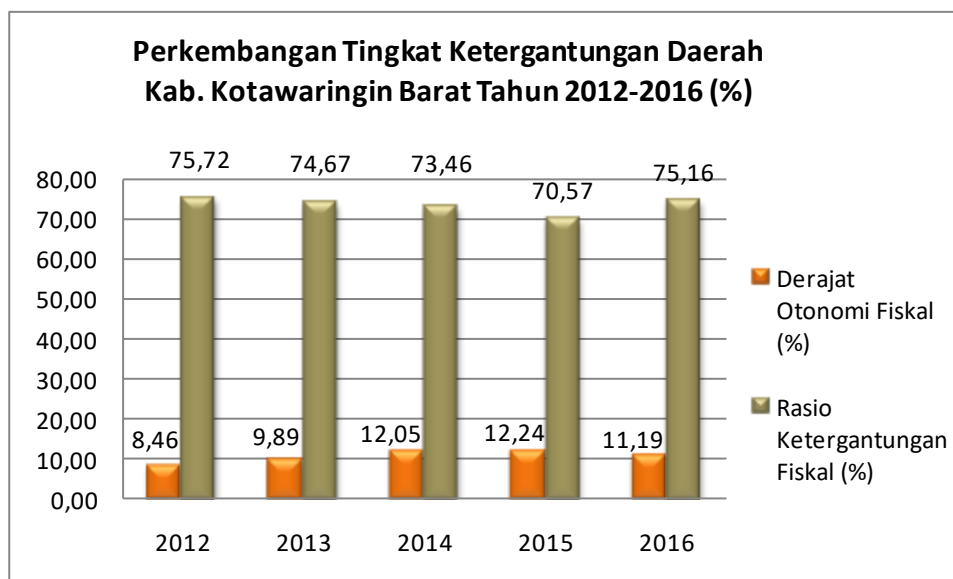
Gambar 5.9. Perkembangan Ruang Fiskal Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

5.2.4 Tingkat Ketergantungan Daerah

Rasio Ketergantungan Daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik itu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain. Rasio ini ditunjukkan oleh perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan (Derajat Otonomi Fiskal) dan rasio dana transfer terhadap total pendapatan (Rasio Ketergantungan Fiskal).

Derajat Otonomi Fiskal memiliki makna yang berkebalikan dengan Rasio Ketergantungan Fiskal. Semakin besar angka Derajat Otonomi Fiskal maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka Rasio Ketergantungan Fiskal, maka semakin besar tingkat

ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki Derajat Otonomi Fiskal yang tinggi sekaligus Rasio Ketergantungan Fiskal yang rendah.



Gambar 5.10. Perkembangan Tingkat Ketergantungan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 (%)

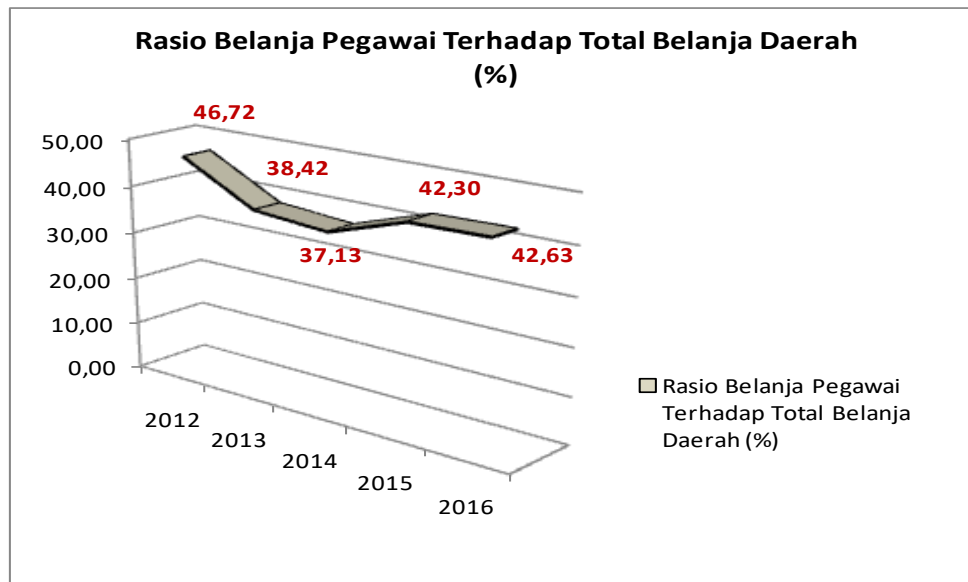
Gambar di atas memberikan gambaran Tingkat Ketergantungan Kab. Kotawaringin Barat dari tahun 2012 hingga 2016, rata-rata rasio Derajat Otonomi Fiskal sebesar 10,77% dan rata-rata Rasio Ketergantungan Fiskal sebesar 73,92%. Hal ini menunjukkan bahwa, Kab. Kotawaringin Barat memiliki ketergantungan daerah yang tinggi baik dari sisi PAD yang dihasilkan maupun dari sisi dana transfer yang diterima dari pusat. Tingginya tingkat ketergantungan Kab. Kotawaringin Barat tersebut disebabkan oleh rendahnya PAD, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah dan tingginya dana transfer yang diterima.

5.3 ANALISIS BELANJA DAERAH

5.3.1 Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah

Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah menggambarkan bahwa semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil angka rasio Belanja Pegawai maka semakin kecil proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai APBD.

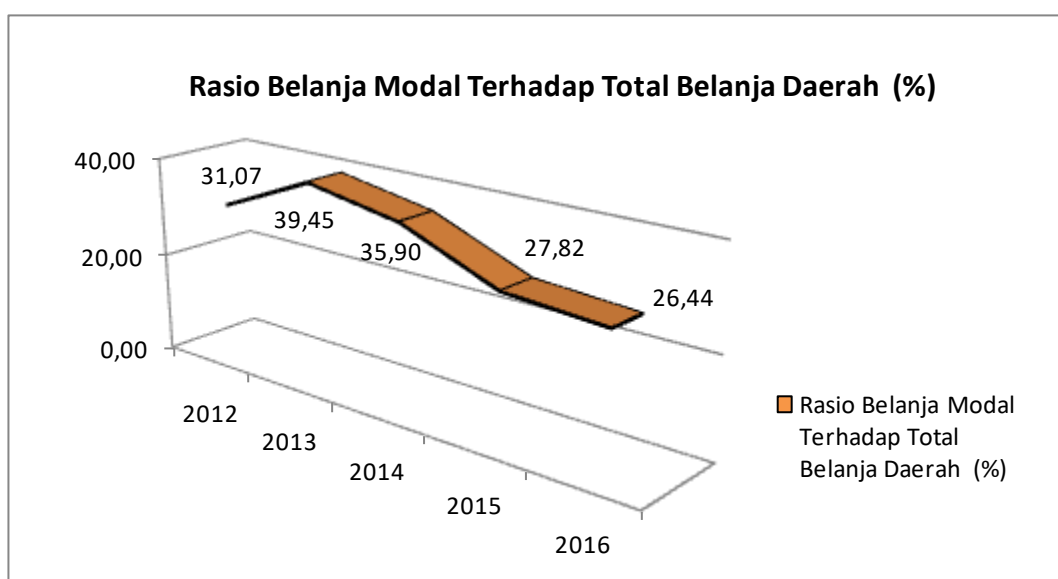
Gambar 5.11 menunjukkan rata-rata rasio Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah Kab. Kotawaringin Barat dari tahun 2012 hingga 2016 adalah 41,44%. Kinerja penurunan/kenaikan belanja pegawai terhadap total belanja daerah Kota Kab. Kotawaringin Barat rata-rata hanya 3,8% per tahun.



Gambar 5.11. Perkembangan Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 (%)

5.3.2 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah

Rasio Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah mencerminkan porsi Belanja Daerah yang dibelanjakan untuk membiayai Belanja Modal. Belanja Modal ditambah belanja barang dan jasa merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, di samping pengaruh dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri.



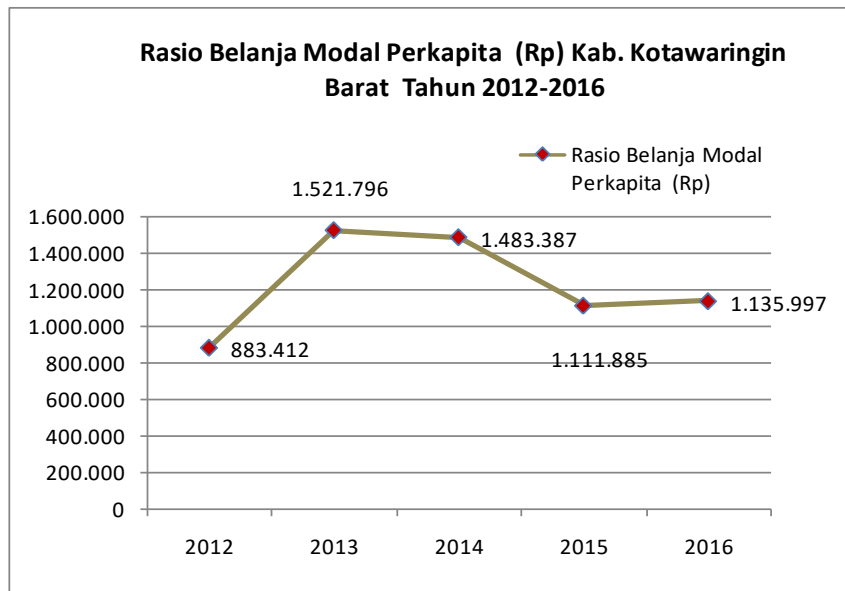
Gambar 5.12. Perkembangan Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 (%)

Realisasi Belanja Modal akan memiliki *multiplier effect* dalam menggerakkan roda perekonomian daerah, oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, diharapkan akan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Gambar di atas menunjukkan rasio Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah Kab. Kotawaringin Barat dari tahun 2012 hingga 2016, perkembangan porsi belanja modal cukup fluktuatif setiap tahunnya. Namun kondisi tahun 2014 hingga 2016 terus mengalami penurunan. Hal ini merupakan indikasi negatif bahwa porsi Belanja Modal Kab. Kotawaringin Barat belum sepenuhnya mampu mendukung pertumbuhan ekonominya, dengan asumsi semakin rendah angka rasio Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

5.3.3 Rasio Belanja Modal Per Kapita

Rasio Belanja Modal per kapita menunjukkan seberapa besar belanja yang dialokasikan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur daerah per penduduk. Rasio Belanja Modal per kapita memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi karena Belanja Modal merupakan salah satu jenis belanja pemerintah yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Rasio ini bermanfaat untuk menunjukkan perhatian pemerintah dalam meningkatkan perekonomian penduduknya dari pembangunan infrastruktur yang dikeluarkan.

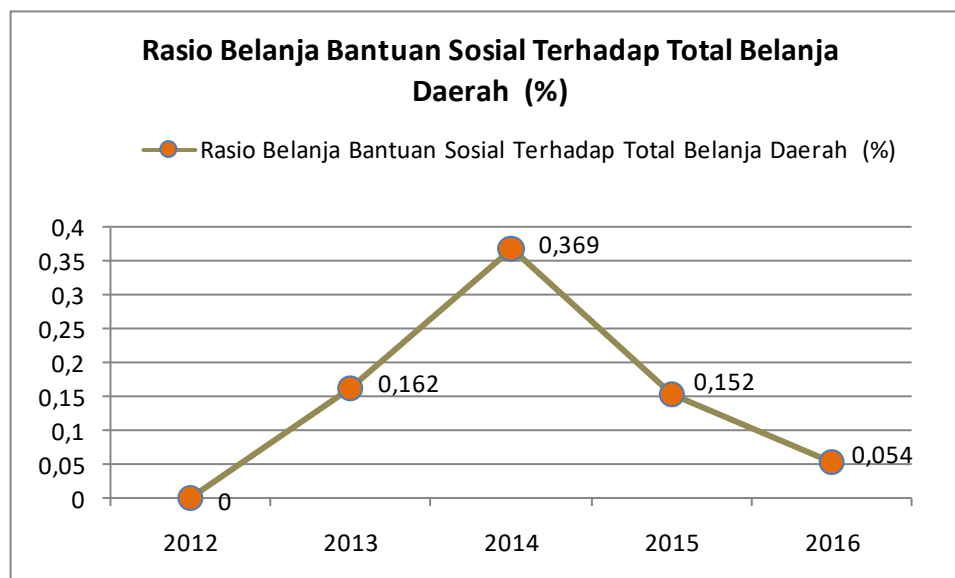


Gambar 5.13. Perkembangan Rasio Belanja Modal Per Kapita Daerah Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 (Ribu Rupiah)

Gambar di atas menunjukkan rasio belanja modal per kapita Kab. Kotawaringin Barat dari tahun 2012 hingga 2016, rata-rata rasio Belanja Modal per kapita adalah Rp. 1,227 juta. Rasio Belanja Modal per kapita Kab. Kotawaringin Barat mengalami kenaikan tahun 2013 dan menurun di tahun 2014 dan 2015, kemudian beranjak naik kembali tahun 2016 walaupun tidak banyak. Hal ini menandakan bahwa anggaran Belanja Modal untuk merangsang pertumbuhan perekonomian masyarakat di Kab. Kotawaringin Barat mulai meningkat kembali.

5.3.4 Rasio Belanja Bantuan Sosial Terhadap Total Belanja Daerah

Belanja Bantuan Sosial merupakan salah satu pos dalam belanja tidak langsung. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat atau organisasi profesi yang bertujuan untuk kepentingan umum. Rasio Belanja Bantuan Sosial terhadap total Belanja Daerah mencerminkan porsi Belanja Daerah yang dibelanjakan untuk Belanja Bantuan Sosial. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Bantuan Sosial dan begitu sebaliknya semakin kecil angka rasio Belanja Bantuan Sosial maka semakin kecil pula proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Bantuan Sosial.



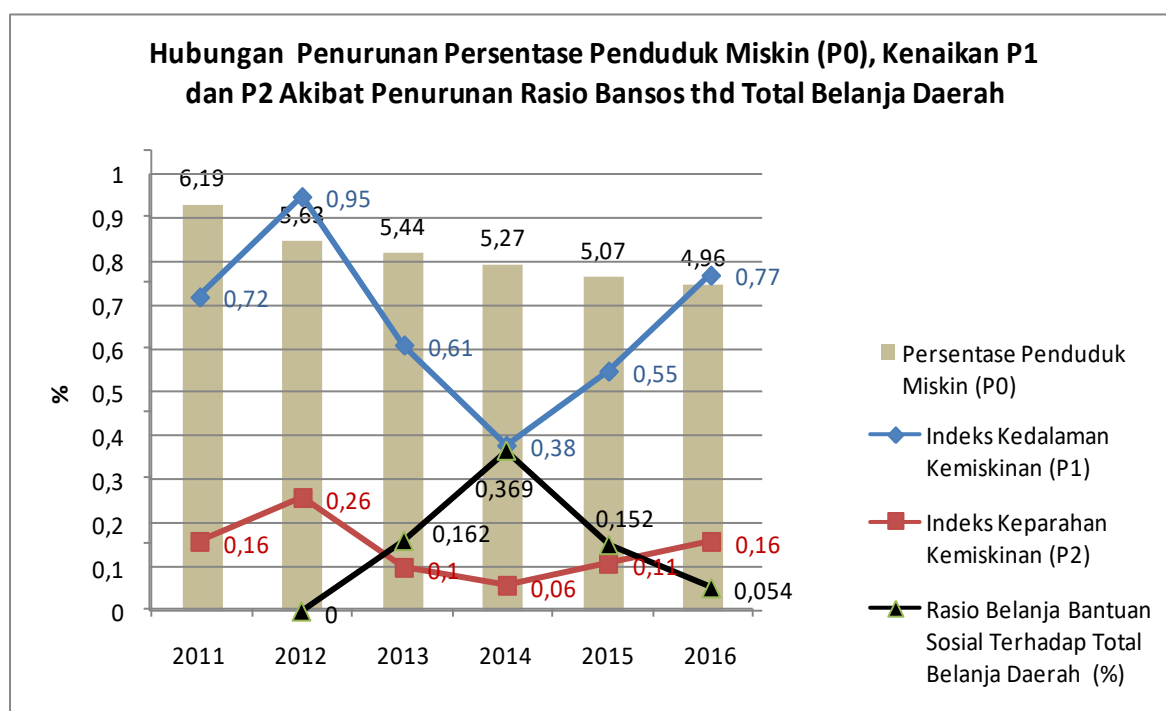
Gambar 5.14. Perkembangan Rasio Belanja Bantuan Sosial Terhadap Total Belanja Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 (%)

Gambar di atas menunjukkan Perkembangan Rasio Belanja Bantuan Sosial Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 (%). Proporsi APBD untuk Belanja Bantuan Sosial menunjukkan kenaikan untuk tahun 2012-2014, dan menurun tajam tahun 2015 dan 2016, dari sebesar 0,369% turun pada tahun 2016 menjadi sebesar 0,054%. Kondisi semakin

kecil angka rasio Belanja Bantuan Sosial maka mengindikasikan semakin kecil pula proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Bantuan Sosial adalah Pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.



Gambar 5.15. Hubungan Penurunan Persentase Penduduk Miskin (P0), Kenaikan P1 dan P2 Akibat Penurunan Rasio Bansos Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 (%)

Gambar di atas menunjukkan bahwa mulai tahun 2014-2016 terjadi penurunan Rasio Bansos terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang diikuti kenaikan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), walaupun persentase penduduk miskin menurun dari tahun 2011-2016. Artinya bahwa pengurangan dana belanja bansos berdampak secara signifikan terhadap kenaikan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB VI

TINJAUAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN



6.1 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NASIONAL

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan a). Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, b). Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antarwaktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; c).menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; d). Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan. Segenap tahapan perencanaan pembangunan ini merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPNas) 2005-2025, disebutkan bahwa visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 adalah Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Dalam upaya mewujudkan misi tersebut akan ditempuh melalui 8 (delapan) misipembangunan nasional, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Dari 8 uraian misi di atas, tersirat sebuah misi yang mendorong pada tingkat pemerataan dan berkeadilan dalam pembangunan, yaitu misi ke 5. Misi kelima ini diarahkan pada upaya meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

Lahirnya misi ke 5 ini salah satunya adalah bahwa dalam 20 tahun mendatang, Indonesia menghadapi tekanan jumlah penduduk yang makin besar. Jumlah penduduk yang pada tahun 2005 sebesar 219,9 juta orang diperkirakan meningkat mencapai sekitar 274 juta orang pada tahun 2025. Sejalan dengan itu berbagai masalah kependudukan diperkirakan akan menjadi tantangan bagi pemerintah yang salah satunya adalah tingkat kemiskinan.

Dalam rangka mencapai terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan terhadap masyarakat miskin, maka tujuan pembangunan diarahkan sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan kesejahteraan sosial juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana.
- 2) Pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung disempurnakan melalui penguatan lembaga jaminan sosial yang didukung oleh peraturan-peraturan perundangan, pendanaan, serta sistem nomor induk kependudukan (NIK). Pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat.
- 3) Sistem perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak rakyat akan pelayanan sosial dasar. Sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang sudah disempurnakan bersama sistem perlindungan sosial nasional (SPSN) yang didukung oleh peraturan perundang-undangan dan pendanaan serta sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat memberikan perlindungan penuh kepada masyarakat luas. secara bertahap sehingga Pengembangan SPSN dan SJSN dilaksanakan dengan memperhatikan budaya dan sistem yang sudah berakar di kalangan masyarakat luas.

- 4) Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada (1) penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, dan efisien; (2) penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan; dan (3) pembangunan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.
- 5) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi diarahkan pada (1) peningkatan kualitas pengelolaan aset (*asset management*) dalam penyediaan air minum dan sanitasi; (2) pemenuhan kebutuhan minimal air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat; (3) penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitasi yang kredibel dan profesional; dan (4) penyediaan sumber-sumber pembiayaan murah dalam pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin
- 6) Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi.

Sejalan dengan proses demokratisasi, pemenuhan hak dasar rakyat diarahkan pada peningkatan pemahaman tentang pentingnya mewujudkan hak-hak dasar rakyat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada peningkatan mutu penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.

RPJP Nasional memiliki tahapan perencanaan jangka menengah atau yang biasa disebut RPJM, terdiri dari RPJM ke-1 untuk periode 2005-2009, RPJM ke-2 untuk periode 2010-2014 dan RPJM ke-4 untuk periode 2020-2024. Saat ini RPJMN masuk pada periode 2015-2019. Pada periode tersebut, arah kebijakan pembangunan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat mendorong pada meningkatnya kualitas sumber daya manusia, yang ditandai oleh:

1. Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan efektif;
2. Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat;
3. Meningkatnya kesetaraan gender;
4. Meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak;
5. Tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang;
6. Mantapnya budaya dan karakter bangsa.

Penanggulangan kemiskinan secara nasional dirumuskan melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Inti dari instruksi ini adalah ditetapkan 3 program utama yaitu program pembangunan pro rakyat, keadilan untuk semua, dan pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDG's). Inpres tersebut kemudian diterjemahkan kembali dalam Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Melalui perpres tersebut diharapkan adanya efektifitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dapat mempercepat upaya penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

Pada pasal 1 Perpres No. 96 tahun 2015 yang merupakan perubahan atas Perpres No. 15 Tahun 2010 disebutkan bahwa Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan disebutkan pada pasal 2 yaitu: (1) arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); (2) arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui Peraturan Presiden No.15 Tahun 2010 diarahkan melalui 4 strategi mendasar, yaitu:

1. Penyempurnaan program perlindungan sosial;
2. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar;
3. Pemberdayaan masyarakat, dan
4. Pembangunan yang inklusif.

Upaya penanggulangan kemiskinan juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Fakir Miskin. Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin merupakan bagian dari amanat ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Pengertian fakir miskin yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 ini adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Dalam undang-undang ini, fakir miskin memiliki hak-hak hidup yang harus dipenuhi selayaknya sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Pada pasal 3 menyebutkan bahwa hak-hak fakir miskin yang harus dipenuhi yaitu:

1. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan.
2. memperoleh pelayanan kesehatan.
3. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya.

4. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya.
5. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya.
6. memperoleh derajat kehidupan yang layak.
7. memperoleh lingkungan hidup yang sehat.
8. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
9. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Dalam undang-undang tersebut, penanganan fakir miskin ditujukan kepada perseorangan, keluarga kelompok dan atau masyarakat. Penanganan fakir miskin dilakukan dalam bentuk pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, penyediaan pelayanan kesehatan, penyediaan pelayanan pendidikan, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, bantuan hukum; dan/atau pelayanan sosial. Sementara itu pendekatan penanganan fakir miskin dapat dilakukan melalui pemberdayaan kelembagaan masyarakat, peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha, jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin, kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan.

Tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pada tahun 2013 pemerintah menetapkan satu kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah. Melalui peraturan ini Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui pendekatan wilayah dimaksudkan untuk memberikan arah agar Penanganan Fakir Miskin dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan derajat kesejahteraan Fakir Miskin dan memberikan pedoman bagi pengambilan kebijakan yang berpihak kepada peningkatan kesejahteraan Fakir Miskin, berbasiskan wilayah dengan memperhatikan kearifan lokal.

Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui pendekatan wilayah bertujuan terpenuhinya kebutuhan dasar fakir miskin agar memperoleh kehidupan yang layak dan bermartabat, meningkatnya kapasitas dan berkembangnya kemampuan dasar serta kemampuan berusaha bagi fakir miskin dan terentaskannya fakir miskin dari kemiskinan. Penanganan Fakir Miskin melalui pendekatan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal, yang meliputi wilayah perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah tertinggal/ terpencil dan/atau perbatasan antar negara.

Pada Pasal 6 menyebutkan bahwa upaya penanganan fakir miskin di wilayah perdesaan dilakukan melalui:

1. Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan;
2. Bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan;
3. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;
4. Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan/atau
5. Pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya.

Upaya Penanganan Fakir Miskin di wilayah perkotaan berdasarkan pasal 12 dilakukan melalui:

1. Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal;
2. Bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;
3. Pengembangan lingkungan permukiman yang sehat; dan/atau
4. Peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.

Upaya Penanganan Fakir Miskin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan pasal 17 dilakukan melalui:

1. Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang perikanan dan sumber daya laut;
2. Bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;
3. Penguatan lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan;
4. Pemeliharaan daya dukung serta mutu lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan/atau
5. Peningkatan keamanan berusaha dan pengamanan sumber daya kelautan dan pesisir.

Upaya Penanganan Fakir Miskin di wilayah tertinggal/terpencil berdasarkan pasal 24 dilakukan melalui:

1. Pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal secara berkelanjutan;
2. Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
3. Bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
4. Peningkatan pembangunan terhadap sarana dan prasarana;
5. Penguatan kelembagaan dan pemerintahan; dan/atau
6. Pemeliharaan, perlindungan, dan pendayagunaan sumber daya lokal.

Upaya Penanganan Fakir Miskin di wilayah perbatasan antar negara berdasarkan pasal 32 dilakukan melalui:

1. Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
2. Bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
3. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;

4. Penguatan kelembagaan dan pemerintahan;
5. Pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya;
6. Menjamin keamanan wilayah perbatasan serta pengamanan sumber daya lokal; dan/atau
7. Peningkatan daya tahan budaya lokal dari pengaruh negatif budaya asing.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013, Pasal 42 menyebutkan bahwa upaya Penanganan Fakir Miskin dilaksanakan secara terencana, terarah, terukur, dan terpadu dengan berdasarkan pada Rencana Aksi Nasional Penanganan Fakir Miskin. Rencana aksi nasional Penanganan Fakir Miskin disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Sementara itu pada Pasal 43 menjelaskan bahwa Gubernur menyusun rencana aksi provinsi dengan berpedoman padarencana aksi nasional Penanganan Fakir Miskin. Sedangkan bupati/ walikota menyusun rencana aksi kabupaten/kota dengan berpedoman pada rencana aksi nasional dan rencana aksi provinsi Penanganan Fakir Miskin.

Perpres No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 disebutkan bahwa visi pembangunan nasional adalah: Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh dengan 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sementara itu strategi pembangunan nasional yang ditempuh dalam rangka menjalankan misi pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

1. Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
 - b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan

menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

- c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

2. Tiga Dimensi Pembangunan;

- a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.
- b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas:
- c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan

3. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas

4. Kepastian dan penegakan hukum:

- a. Keamanan dan ketertiban
- b. Politik dan demokrasi
- c. Tatakelola dan reformasi birokrasi.

5. *Quickwins* (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya).

Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Dalam lima tahun ke depan, terdapat 9 prioritas pembangunan yang masuk dalam agenda NAWACITA pembangunan nasional. Kesembilan cita-cita tersebut adalah:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan termasuk ke dalam agenda Nawacita, yang dapat dilihat pada agenda pembangunan ke 3 yaitu Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan. Agenda pembangunan ketiga ini memuat tiga hal pokok yaitu Peletakan Dasar-Dasar Dimulainya Desentralisasi Asimetris, Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan Timur Indonesia dan Penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, upaya penanggulangan kemiskinan secara jelas termasuk menjadi agenda utama pembangunan nasional.

Dalam agenda pembangunan nasional, masalah kemiskinan merupakan bagian dari dua konsekuensi penting dari adanya pertumbuhan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat serta perubahan struktur perekonomian Indonesia.

- ➔ **Pertama**, penduduk golongan menengah ke bawah akan semakin membutuhkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif.
- ➔ **Kedua**, adanya potensi meningkatnya kesenjangan antar kelompok berpendapatan terbawah dan menengah ke atas yang menjadikan masalah kemiskinan semakin kompleks.

Untuk itu pemerintah dalam lima tahun ke depan memiliki target dalam penanggulangan kemiskinan yaitu menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 7,0-8,0 persen pada tahun 2019. Sasaran utama dalam mencapai target tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya investasi padat pekerja sehingga memperluas kesempatan pekerjaan yang layak bagi masyarakat yang kurangmampu (*decent job*).
2. Meningkatnya akses usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan keterampilan, pendampingan, modal usaha, dan pengembangan teknologi.
3. Terbentuknya kemitraan pemerintah, pemerintah daerah dan swasta/BUMN/BUMD dalam pengembangan kapasitas dan keterampilan masyarakat dalam rangka peningkatan penghidupan masyarakat.
4. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi yang berkualitas.
5. Meningkatnya penjangkauan pelayanan dasar mencakup identitas hukum, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat kurang mampu termasuk penyandang disabilitas dan lansia.
6. Meningkatnya perlindungan sosial, produktivitas dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu.

Arah kebijakan yang diambil dalam rangka menjawab tantangan kemiskinan dalam lima tahun yang akan datang adalah dengan mengurangi ketimpangan yang dilakukan dengan pembangunan yang inklusif dan kebijakan afirmatif yang lebih nyata, yaitu:

1. Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif.
2. Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu.
3. Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan.

Adapun strategi yang akan ditempuh dalam upaya penanggulangan kemiskinan mencakup hal-hal berikut.

1. Mengarahkan kebijakan fiskal yang mendukung penghidupan masyarakat kurang mampu terutama pengeluaran publik yang bersifat bantuan sosial yang bersasaran;
2. Sinkronisasi kerangka regulasi dan kebijakan pemerintah terutama kerangka regulasi dan kebijakan sektor pertanian, perdagangan luar negeri, aturan logistik komoditas pangan, dan aturan monopoli;
3. Meningkatkan perlindungan, produktivitas dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu, melalui (i) penataan asisten sosial terpadu berbasis keluarga dan siklus hidup melalui Program Keluarga Produktif dan Sejahtera yang mencakup antara lain bantuan tunai bersyarat dan/atau sementara, pangan bernutrisi, peningkatan kapasitas pengasuhan dan usaha keluarga, pengembangan penyaluran bantuan melalui keuangan digital, serta pemberdayaan dan rehabilitasi sosial; (ii) peningkatan inklusivitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia pada setiap aspek penghidupan, dan (iii) penguatan kelembagaan dan koordinasi melalui peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial, standarisasi lembaga kesejahteraan sosial, serta pengembangan sistem rujukan dan layanan terpadu;
4. Memperluas dan meningkatkan pelayanan dasar untuk masyarakat kurang mampu melalui: (i) meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan; (ii) meningkatkan penjangkauan pelayanan dasar bagi penduduk kurang mampu dan rentan; (iii) penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang menyangkut kriteria, standarisasi, dan sistem pengelolaan data terpadu;
5. Meningkatkan penghidupan masyarakat kurang mampu melalui: (i) pemberdayaan ekonomi berbasis pengembangan ekonomi lokal, (ii) perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan mikro, (iii) peningkatan pelatihan dan pendampingan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan keterampilan, (iv) peningkatan kapasitas pemanfaatan sumber daya lokal sebagai sumber penghidupan yang berkelanjutan, (v) peningkatan akses pasar yang didukung penyediaan kepastian lokasi usaha, dan (vi) penguasaan aset-aset produksi (seperti lahan pertanian), secara memadai bagi masyarakat kurang mampu sebagai modal dasar bagi pengembangan penghidupan;
6. Kebijakan tenaga kerja yang kondusif dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat kurang mampu dengan meningkatkan iklim investasi yang bersifat padat pekerja;

7. Meningkatkan akses masyarakat kurang mampu terhadap informasi lapangan pekerjaan, peningkatan pelatihan, dan penyaluran tenaga kerja;
8. Menciptakan kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah, pusat pelatihan kerja, dan pihak swasta/ BUMN;
9. Meningkatkan kesempatan masyarakat kurang mampu terhadap pendidikan formal dan non-formal sehingga dapat meningkatkan akses terhadap pekerjaan yang layak (decent job);
10. Memperkuat konektivitas lokasi pedesaan dengan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi di pedesaan yang dapat menghubungkan lokasi-lokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada pusat ekonomi terdekat;
11. Advokasi kepada penduduk kurang mampu tentang peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan anak yang akhirnya dapat mengontrol pertumbuhan penduduk terutama penduduk kurang mampu dan rentan.

Selanjutnya berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, dalam Buku III tentang Agenda Pembangunan Wilayah khususnya berkenaan dengan capaian kinerja penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran di wilayah Provinsi Jawa-Bali, dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi di Wilayah Jawa-Bali telah cukup berhasil dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dari tahun 2009 hingga 2014 (Maret) dan sudah berada di bawah angka kemiskinan nasional sebesar 14,15 % (2009) dan 11,25 % (Maret 2014), kecuali di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur yang masih berada di atas angka kemiskinan nasional. Demikian halnya dengan pencapaian tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pemerintah Provinsi di Wilayah Jawa-Bali juga telah berhasil menurunkan TPT dan sudah berada di bawah TPT nasional sebesar 7,87 % (2009) dan 5,70 % (Feb, 2014), kecuali di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten yang masih berada di atas TPT Nasional.

Adapun sasaran target penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran Wilayah Jawa-Bali sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel VI.1
Sasaran Utama Pengembangan Wilayah Kalimantan Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran

SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI PER PROVINSI TAHUN 2015-2019					
Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kalimantan Barat	5,8 - 5,9	5,9 - 6,1	6,1 - 6,4	6,9 - 7,5	7,5 - 8,3
Kalimantan Tengah	6,0 - 6,1	6,9 - 7,2	7,3 - 7,7	7,8 - 8,5	8,3 - 9,2
Kalimantan Selatan	5,0 - 5,1	6,0 - 6,3	6,6 - 7,0	7,3 - 7,9	8,2 - 9,2
Kalimantan Timur	4,5 - 4,6	5,5 - 5,7	5,5 - 5,8	6,1 - 6,6	6,7 - 7,4
Kalimantan Utara	4,9 - 5,0	4,9 - 5,1	5,8 - 6,1	6,1 - 6,7	6,6 - 7,3

SASARAN TINGKAT KEMISKINAN PER PROVINSI TAHUN 2015-2019					
Wilayah	Tingkat Kemiskinan (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kalimantan Barat	7,9 - 7,8	7,6 - 7,3	6,8 - 6,4	6,0 - 5,5	4,7 - 4,3
Kalimantan Tengah	5,7 - 5,6	5,4 - 5,2	4,8 - 4,5	4,2 - 3,9	3,3 - 3,0
Kalimantan Selatan	4,1 - 4,0	3,9 - 3,8	3,5 - 3,3	3,1 - 2,9	2,5 - 2,2
Kalimantan Timur	5,0 - 4,9	4,8 - 4,6	4,2 - 4,0	3,7 - 3,4	2,9 - 2,6
Kalimantan Utara	7,2 - 7,0	6,6 - 6,4	6,0 - 5,7	5,4 - 5,0	4,8 - 4,4

SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN PER PROVINSI TAHUN 2015-2019					
Wilayah	Tingkat Pengangguran (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kalimantan Barat	2,6 - 2,5	2,5 - 2,4	2,4 - 2,3	2,3 - 2,2	2,3 - 2,1
Kalimantan Tengah	2,7 - 2,6	2,6 - 2,5	2,5 - 2,3	2,4 - 2,2	2,3 - 2,1
Kalimantan Selatan	4,0 - 3,9	3,9 - 3,8	3,8 - 3,6	3,7 - 3,4	3,6 - 3,3
Kalimantan Timur	8,5 - 8,3	8,2 - 7,9	7,9 - 7,4	7,5 - 6,9	7,2 - 6,5
Kalimantan Utara	8,0 - 7,8	7,8 - 7,5	7,4 - 7,0	6,9 - 6,4	6,6 - 6,0

6.2 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM RPJPD DAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

6.2.1 Visi, Misi dan Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 adalah:

Kalimantan Tengah Yang Maju, Mandiri dan Adil

disebutkan bahwa Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2005-2025 adalah **mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang maju, mandiri dan adil dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia**. Untuk tercapainya masyarakat Kalimantan Tengah yang maju mandiri dan adil dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut, pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

1. Tercukupinya sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah;
2. Terwujudnya pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan;
3. Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah;
4. Terwujudnya peningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah;
5. Terbangun dan berkembangnya budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat;
6. Terwujudnya masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan;
7. Terwujudnya pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah;
8. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Terwujudnya kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan;
10. Terwujudnya peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah;
11. Terwujudnya fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan; dan
12. Terwujudnya optimalisasi produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

6.2.2 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan RPJMD ketiga (2016-2021)

Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam RPJMD ketiga (2016-2021), secara jelas tertuang dalam **misi ke-4, yaitu Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan**. Stabilitas inflasi merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Inflasi yang tinggi menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat juga turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin bertambah miskin. Selain itu, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan masyarakat dalam melakukan investasi, dan berproduksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter Bank Indonesia ditujukan untuk mengelola tekanan harga yang berasal dari sisi permintaan agregat (*demand management*) relatif terhadap kondisi sisi penawaran. Kebijakan moneter tidak ditujukan untuk merespon kenaikan inflasi yang disebabkan oleh faktor yang bersifat kejutan yang bersifat sementara (*temporer*) yang akan hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu.

Untuk mendorong perekonomian rakyat, paket-paket deregulasi dapat secara langsung membantu atau mendorong tumbuhnya perekonomian rakyat, sekaligus untuk mengatasi kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan golongan ekonomi lemah. Untuk itu, selain perlu peranan pemerintah, pengembangan keswadayaan masyarakat juga penting. Pengembangan keswadayaan masyarakat selain memerlukan kebijakan publik yang menyentuh kepentingan masyarakat, inisiatif dari bawah, yang berasal dari masyarakat, juga diperlukan. Program perkreditan, seperti Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Umum Pedesaan (Kupedes), dan program perkreditan lainnya merupakan bagian dari usaha menggerakkan ekonomi rakyat. Namun hal tersebut masih perlu dikembangkan dan masih memerlukan kajian, terutama yang menyangkut efektivitasnya.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi serta inflasi yang rendah dan stabil, maka masyarakat akan meningkatkan pendapatannya secara riil, sehingga jumlah masyarakat miskin secara otomatis menjadi berkurang. Pembangunan daerah akan lebih efektif apabila bertumpu pada kompetensi dasar dan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki Kalimantan Tengah. Seluruh aspek kegiatan ekonomi harus dilakukan secara seimbang untuk mencapai suatu keadaan ekonomi yang stabil. Untuk menghindari berhentinya kreatifitas masyarakat, kegiatan produksi harus ditingkatkan. Upaya peningkatan aktivitas perekonomian yang dilakukan berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung dunia usaha, serta meningkat dan berkembangnya koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Misi keempat: Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan

tujuan: Meningkatkan daya saing ekonomi daerah

sasaran: 1) Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat

2) Meningkatnya daya beli masyarakat

Tabel VI.2
Prioritas Alokasi Belanja Langsung Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018-2022

Misi keempat: Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Target tahunan					Target akhir (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Kontribusi PDRB Kalimantan Tengah dalam pembentukan PDRB Kalimantan (%)	10,85	13	14	14	15	15	15
	Laju pertumbuhan ekonomi(%)	7,01	6,5	6,5	7	7	7,5	7,5
	Tingkat kemiskinan (%)	5,91	5,3	5,02	4,8	4,5	4,3	4,3
Meningkatnya daya beli masyarakat	Laju inflasi (%)	4,74	4,4 – 4,5	4,3 – 4,4	4,2 – 4,3	4,1 – 4,2	3,4	3,4
	PDRB perkapita (Juta Rp.)	40,14	43,54	45,41	47,61	49,95	52,67	52,67
Meningkatnya sektor ekonomi hijau	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, terhadap PDRB (%)	23,5	24	24,35	24,65	25	25,5	25,5
Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	16,15	16,5	16,8	17,1	17,5	18	18
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,54	4,5	4	4	4	3,5	3,5

Berdasarkan kertas kerja yang telah dikembangkan, strategi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel VI.3
Strategi PJM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021

Misi keempat (4)	Tujuan	Sasaran	Strategi/prioritas (2016-2021)	Arah Kebijakan (2016-2021)
Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan	Meningkatkan daya saing ekonomi daerah	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	S(4) Stabilitas ekonomi daerah	1) Menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok strategis
		Meningkatnya daya beli masyarakat		2) Pengurangan beban dan pemberdayaan masyarakat miskin
				3) Peningkatan daya saing produk unggulan daerah
				4) Peningkatan nilai tambah produksi regional Kalimantan Tengah
	Meningkatnya perekonomian masyarakat secara konsisten	Meningkatnya sektor ekonomi hijau	S(5) Peningkatan pendapatan masyarakat	5) Pemberian kemudahan dalam berbagai investasi di Kalimantan Tengah
				1) Peningkatan produksi hasil pada setiap sub sektor pertanian
		Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat		2) Perluasan lapangan usaha dan kesempatan berkarya di instansi pemerintah dan swasta
				3) Pengembangan ekonomi kreatif pada komunitas tertentu
	4) Pengembangan usaha rumah tangga yang mendorong perekonomian			

Target penurunan angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan RPJMD 2016-2021 adalah 5,3% sampai dengan 4,3% pada tahun 2021 dengan kondisi angka kemiskinan pada awal tahun perencanaan sebesar 5,91%.

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, untuk arah kebijakan **Pengurangan beban dan pemberdayaan masyarakat miskin**, kemudian dijabarkan dalam tujuh (7) program prioritas dan kegiatan pokoknya, seperti disampaikan pada tabel berikut ini:

Tabel VI.4
Program Prioritas dan Kegiatan Pokok untuk Pengurangan Beban dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Arah kebijakan	Program prioritas	Kegiatan pokok
Pengurangan beban dan pemberdayaan masyarakat miskin	1) <i>Program Penanggulangan Kemiskinan</i>	1) Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan serta Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan
		2) Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
		3) Pemberian bantuan kepada koperasi, usaha kecil, mikro dan menengah
		4) Mempercepat izin usaha ekonomi menengah ke bawah
		5) Penguatan produk kerajinan lokal untuk industri kecil dan menengah
		6) Membuka lapangan kerja dan kesempatan kerja
		7) Pengadaan paket bibit pertanian, peternakan, perkebunan dan bibit tanaman hutan
		8) Pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil dan menengah dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif
		9) Bantuan bahan bangunan perumahan dan sarana lingkungan
	2) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Bantuan perumahan, rumah KAT dengan rehabilitasi rumah tidak layak huni
	3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bantuan sosial bagi masyarakat miskin, KIT, Kartu Indonesia Pintar
	4) Program pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Peningkatan kesempatan berusaha dan lapangan kerja fakir miskin Bantuan Kelompok usaha bersama
	5) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada PMKS
	6) Program peningkatan sarana dan prasarana panti sosial	Pengembangan Panti Binsa Laras dan Panti Lanjut Usia/Jompo dan Rehabilitasi Panti PSBRKW dan PSTW
	7) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pembangunan kawasan agropolitan, minapolitan Perdesaan.

6.2.3 Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis

Penetapan kawasan strategis provinsi (KSP) meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan yaitu: pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

kawasan strategis provinsi (KSP) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yang ditetapkan di Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas:

- 1) Kawasan Strategis Pusat Kegiatan Nasional, yaitu Kota Palangka Raya;
- 2) Kawasan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan dan Kota Palangka Raya;
- 3) Kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis yang terdapat di Kabupaten Katingan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, dan Kabupaten Lamandau;
- 4) Kawasan Pertanian Berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan DR. Pasang Surut, DR. Non Pasang Surut, DR. Lebak berlokasi di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Barito Selatan dan Kota Palangka Raya;
- 5) Kawasan pertanian lahan gambut di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya;
- 6) Kawasan pengembangan Peternakan berupa kawasan Peternakan ruminansia dan non ruminansia yang lokasi pengembangannya di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya dan Kota Palangka Raya;
- 7) Kawasan perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet, lada dan kakao) di 14 Kabupaten/Kota;
- 8) Kawasan terpadu Industri, pelabuhan, peti kemas dan pergudangan, serta simpul transportasi darat, laut dan udara berupa KSP Pangkalan Bun – Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat, KSP Sampit - Bagendang di Kabupaten Kotawaringin Timur, KSP Batanjung - Kapuas di Kabupaten Kapuas, Sigintung di Kabupaten Seruyan dan Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau;
- 9) Kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan di Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat, Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas, Lamunti Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas, Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara, Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan, Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Pulang Pisau; dan

10) Kawasan Strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur,

6.2.4 Pembangunan Kewilayahan

Pengembangan Potensi Prioritas di Kalimantan Tengah. Pengembangan potensi di Kalimantan Tengah dilakukan melalui pembagian wilayah atau zonasi. Pembagian zonasi kawasan ini disusun dalam rumusan Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Tengah, yang dibagi menjadi 3 Zona. Antara lain Zona 1 (Barat), Zona 2 (Tengah), dan Zona 3 (Timur). Kabupaten Kotawaringin Barat dalam hal ini masuk di zona 1 (Barat) dengan rincian potensi dan pengembangannya sebagai berikut:

Tabel VI.5
Pembagian 3 Zona di Provinsi Kalimantan Tengah

No	Zona	Kabupaten/Kota	Potensi	Pengembangan Potensi
1	Zona 1 (Barat)	• Sukamara • Lamandau • Kotawaringin Barat • Seruyan • Kotawaringin Timur	- Kelapa Sawit (CPO) - Pertambangan (baja, nikel, lumina, dll) - Perikanan tangkap - Pariwisata	➤ Industri berbasis sawit ➤ Industri berbasis metal ➤ Industri berbasis perikanan tangkap ➤ Taman Nasional Tanjung Puting
2	Zona 2 (Tengah)	• Katingan • Gunung Mas • Palangka Raya • Pulang Pisau • Kapuas	- Pertanian (tanaman pangan) - Perikanan darat - Pariwisata	➤ Pengembangan kawasan argo industri Batanjung di Kapuas) ➤ Budidaya perikanan sungai ➤ Taman Nasional Sebangau
3	Zona 3 (Timur)	• Murung Raya • Barito Utara • Barito Selatan • Barito Timur	- Batubara - Hasil hutan (kayu, rotan, dll) - Karet - HOB (<i>Heart Of Borneo</i>)	➤ Pembangkit tenaga listrik ➤ Industri berbasis hasil hutan ➤ Industri berbasis karet (<i>rubber industry</i>) ➤ Konservasi Hayati di pegunungan <i>Muller Schwaner</i>

Sumber: Perda No. 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalteng 2015-2035

6.3 TINJAUAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM RPJPD DAN RPJMD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

6.3.1 Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 - 2025

Visi pembangunan jangka panjang untuk kurun waktu 2006-2025 Kabupaten Kotawaringin Barat adalah:

Kotawaringin Barat Yang Aman, Maju dan Sejahtera, Mandiri, Demokratis dan Berkeadilan.

Misi Pembangunan Daerah 2006 - 2025

Dalam mewujudkan masyarakat Kotawaringin Barat yang Aman, Maju dan Sejahtera, Mandiri, Demokratis dan Berkeadilan dapat ditempuh melalui misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan masyarakat Kobar yang Aman;
- 2) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- 3) Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis;
- 4) Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.
- 5) Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agrobisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
- 6) Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi (sebagai urat, nadi ekonomi kerakyatan) dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait dengan sistem berjaringan antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan.
- 7) Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, bermoral, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
- 8) Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas hidup secara Berkelanjutan.
- 9) Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan masalah sosial kemasyarakatan dan peningkatan kecepatan penanggulangannya secara berkesinambungan.
- 10) Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.**
- 11) Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
- 12) Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

6.3.2 Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 - 2025

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam RPJPD secara tersirat tergambarkan melalui visi yang ke-10 yaitu:

Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Unit sosial terkecil dari masyarakat adalah keluarga. Kemampuan keluarga merupakan salah satu pilihan dalam strategi pembangunan manusia. Keluarga yang fungsional, mampu menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi psikologi dan sosial, akan menentukan kapasitas anggota keluarga tersebut. Peningkatan kemampuan belajar, etos kerja dan semangat juang, serta kondisi kesehatannya tetap dimulai dari keluarga. Selain itu, dalam upaya pencegahan (antisipasi) kemiskinan, maka peningkatan kualitas keluarga menjadi sangat vital dan strategis.

Peningkatan kualitas kependudukan akan meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kerja. Berdasarkan kondisi seperti itu, dalam misi ini juga perlu diupayakan pengurangan tingkat pengangguran dan peningkatan kualitas hubungan industrial. Hal ini sedemikian karena sangat terkait dengan upaya peningkatan pendapatan perkapita dan mengurangi kerentanan masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Pengurangan pada pengangguran harus disebut secara eksplisit agar koordinasi kegiatan antar satuan kerja menjadi semakin vital sehingga percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

Arah Pembangunan Daerah untuk Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 – Tahun 2025 khususnya Misi ke- 10:

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Keluarga Kecil Berkualitas Serta Pemuda dan Olahraga di Seluruh Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang diarahkan melalui:

- 1) Terwujudnya Kualitas Manajemen Pelayanan Kependudukan, Keluarga Kecil dan Berkualitas.
- 2) Terwujudnya Distribusi Alokasi Penduduk yang Seimbang antar Kecamatan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
- 3) Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Prestasi Kepemudaan dan Keolahragaan.
- 4) Terwujudnya Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan, Perluasan Lapangan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Peningkatan Kesempatan Kerja Produktif, dalam Rangka Mengurangi Penganggur dan Setengah Penganggur, baik di Perdesaan maupun Perkotaan.

- 5) Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- 6) Terciptanya Hubungan industrial yang Harmonis antara Pekerja dan Pengusaha serta Perlindungan Tenaga Kerja.

6.3.3 Visi Misi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2022

Tahapan perencanaan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini memasuki RPJMD tahap III periode 2017-2022, dicanangkan dengan Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

“Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata dan Ikhlas”

Untuk mencapai visi tersebut di atas, telah ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 melalui rumusan misi sebagai berikut:

- Misi 1** : Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
- Misi 2** : Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga.
- Misi 3** : Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup
- Misi 4** : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat
- Misi 5** : Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis
- Misi 6** : Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata

Upaya penurunan angka kemiskinan yang tercermin dalam misi ke-5. Misi ke-5: “Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tenteram dan Dinamis.” Misi kelima adalah terfokus terhadap mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram, dan dinamis. Indikator tujuan yang merupakan fokus capaian yakni Angka Kemiskinan dengan sasaran dari Misi V adalah:

- 1) Pemberdayaan PMKS;
- 2) Menekan pengangguran; dan
- 3) Meningkatkan ketertiban dan keamanan.

Sebagai upaya mencapai Misi Ke-5 maka dirumuskan Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-5 sebagai berikut:



Gambar 6.1. Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-5

6.3.4 Tujuan dan Sasaran Misi ke-5 RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2022

Tujuan dan Sasaran Misi ke-5. Sebagai upaya untuk mencapai Misi ke-5 yakni Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis., maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Mewujudkan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan dengan Sasaran Pembangunan:

- 1) Meningkatnya keberdayaan PMKS dalam mengakses sektor-sektor strategis.
- 2) Meningkatnya kesempatan dan daya saing masyarakat dalam mengakses sumber-sumber ekonomi
- 3) Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum.

Pemahaman terkait linieritas Misi, Tujuan, dan Sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui *Desain Logical Framework* Pencapaian Misi ke-5 Kabupaten Kotawaringin Barat yang disajikan sebagai berikut :



Gambar 6.2. Pohon Kinerja Pencapaian Misi ke-5

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam RPJMD menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi ke dalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati Terpilih. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran tersebut kedalam matriks berikut ini.

Tabel VI.6
Misi ke-5, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis.	Mewujudkan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan	Angka Kemiskinan	Meningkatnya keberdayaan PMKS dalam mengakses sektor-sektor strategis	Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya kesempatan dan daya saing masyarakat dalam mengakses sumber-sumber ekonomi	Persentase Penurunan jumlah Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk
		Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran perda terhadap tahun sebelumnya	Persentase penurunan pelanggaran perda terhadap tahun sebelumnya

6.3.5 Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah

Peruntukan dan fungsi strategi pembangunan terhadap sasaran pembangunan yang ingin dicapai, khususnya untuk misi ke-5.

Tabel VI.7
Linieritas Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Strategi (Misi ke-5)

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target 2017	Rp.	OPD
Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis.	Mewujudkan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan	Angka Kemiskinan	Meningkatnya keberdayaan PMKS dalam mengakses sektor-sektor strategis	Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang diberikan Peningkatan Potensi dan Sumber Daya Pembangunan Kesejahteraan Sosial (orang)	Orang	80	80	389.995.500	Dinas Sosial
					Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.	Persentase fakir miskin yang dapat meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	%			474.175.000	Dinas Sosial
					Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Orang			373.220.000	Dinas Sosial
					Program Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang diberikan Pembinaan	Orang			113.500.000	Dinas Sosial
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya kesempatan dan daya saing masyarakat dalam mengakses sumber-sumber ekonomi	Persentase Penurunan jumlah Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan pelatihan sarana dan prasarana pendidikan, keterampilan bagi pencari kerja serta terpeliharanya sarana dan prasarana LLK				1.912.284.300	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase peningkatan informasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja				272.708.542	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan perlindungan hukum jaminan sosial bagi tenaga kerja				267.078.250	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran perda terhadap tahun sebelumnya	Persentase penurunan pelanggaran perda terhadap tahun sebelumnya	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase anggota LINMAS yg mendapat pelatihan		N/A	90	1.952.412.500	Satpol PP dan DAMKAR
					Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Penurunan jumlah penyakit masyarakat		N/A	91	239.368.320	Satpol PP dan DAMKAR

Tabel VI.8

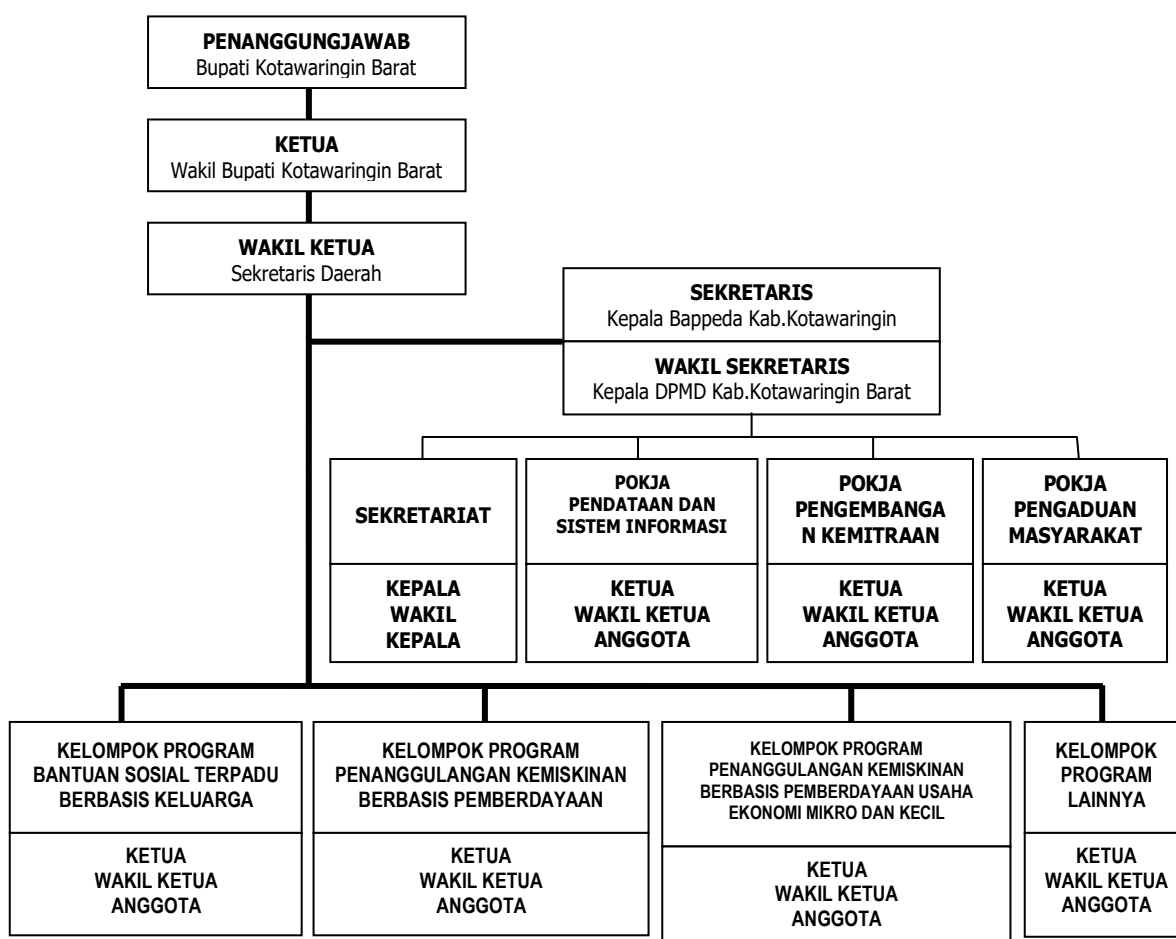
Justifikasi Empat Perspektif Balanced Score Card Strategi, Khusus Misi ke-5 Terhadap Program Pembangunan Daerah

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Satu an	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD 2022		OPD
Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis.	Mewujudkan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan	Angka Kemiskinan	Meningkatnya keberdayaan PMKS dalam mengakses sektor- sektor strategis	Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang diberikan Peningkatan Potensi dan Sumber Daya Pembangunan Kesejahteraan Sosial (orang)	Org	80	80	Rp332.140.500	80	Rp952.000.000	80	Rp1.105.000.000	80	Rp1.035.000.000	80	Rp1.500.000.000	80	Rp1.500.000.000	Dinas Sosial
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Prosentase PMKS yang mendapatkan bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%		100	Rp265.650.000	100	Rp440.647.190	100	Rp538.150.000	100	Rp598.150.000	100	Rp720.000.000	100	Rp720.000.000	Dinas Sosial
					Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.	Persentase fakir miskin yang dapat meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	%		20	Rp164.200.000	40	Rp585.000.000	60	Rp745.000.000	80	Rp745.000.000	100	Rp470.000.000	100	Rp470.000.000	Dinas Sosial
					Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial (orang)	Orang		302	Rp120.200.000	302	Rp427.500.000	302	Rp513.000.000	302	Rp553.000.000	302	Rp660.000.000	302	Rp660.000.000	Dinas Sosial
					Program Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang diberikan Pembinaan	Orang		40	Rp105.400.000	40	Rp210.000.000	40	Rp230.000.000	40	Rp1.230.000.000	40	Rp230.000.000	40	Rp230.000.000	Dinas Sosial
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya kesempatan dan daya saing masyarakat dalam mengakses sumber-sumber ekonomi	Meningkatnya kesempatan dan daya saing masyarakat dalam mengakses sumber-sumber ekonomi	Persentase Penurunan jumlah Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan pelatihan dan sarana prasarana pendidikan, keterampilan bagi pencari kerja serta terpeliharanya sarana dan prasarana LLK				Rp1.538.281.500		Rp1.473.689.600		Rp1.726.094.200		Rp2.029.629.000		Rp2.212.450.000		Rp2.212.450.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase peningkatan informasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja				Rp416.398.400		Rp251.719.240		Rp305.170.000		Rp328.347.000		Rp336.400.000		Rp336.400.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan perlindungan hukum jaminan sosial bagi tenaga kerja				Rp293.940.000		Rp184.678.500		Rp181.238.000		Rp256.596.630		Rp267.100.000		Rp267.100.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Satu an	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD 2022		OPD
		Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran perda terhadap tahun sebelumnya	Persentase penurunan pelanggaran perda terhadap tahun sebelumnya	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase anggota LINMAS yg mendapat pelatihan	%	90	90	Rp3.334.175.000	90	Rp3.388.244.200	90	Rp3.442.417.400	90	Rp3.501.979.140	90	Rp3.567.724.454	90	Rp3.567.724.454	Satpol PP dan DAMKAR
					Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Penurunan jumlah penyakit masyarakat	%	90	90	Rp892.658.397	90	Rp915.658.397	90	Rp922.658.397	90	Rp957.958.397	90	Rp962.888.397	90	Rp962.888.397	Satpol PP dan DAMKAR
					Program Penegakkan Perda dan Perkada	Prosentase penyelenggara an Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	%				90	Rp66.164.000	90	Rp73.141.140	90	Rp87.820.000	90	Rp97.820.000	90	Rp97.820.000	Satpol PP dan DAMKAR
					Program Pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah partisipasi instansi vertikal (keamanan daerah) yang terlibat dalam pencegahan tindak kriminal dan menjaga kantramtibmas	instansi	4	4	Rp608.350.000	4	Rp2.100.000.000	4	Rp2.300.000.000	4	Rp2.800.000.000	4	Rp3.100.000.000	4	Rp700.000.000	Bakesbangpol
					Program Pemeliharaan Kantram tibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah partisipasi instansi vertikal (keamanan daerah) yang terlibat dalam pencegahan tindak kriminal dan menjaga kantramtibmas			4	Rp535.560.000	4	Rp608.350.000	4	Rp2.100.000.000	4	Rp2.300.000.000	4	Rp2.800.000.000	4	Rp3.100.000.000	Bakesbangpol

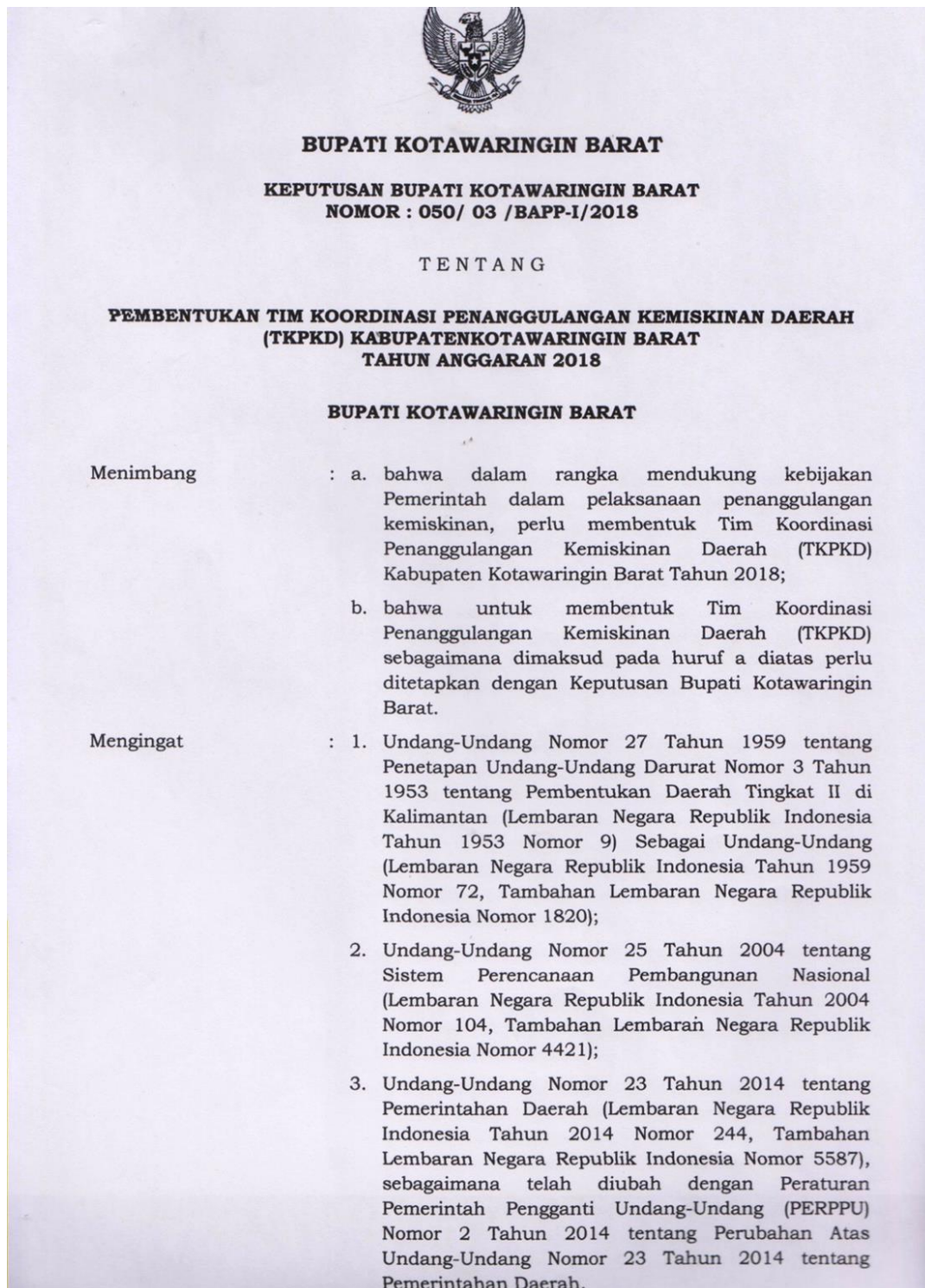
6.4 KELEMBAGAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD)

Dalam melaksanakan Program-program Penanggulangan Kemiskinan, pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah membentuk lembaga pengelola program, yaitu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Kotawaringin Barat. Lembaga ini berfungsi sebagai koordinasi dalam rangka menjamin keberlanjutan program dan menggalang partisipasi pemangku kepentingan pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Lembaga ini bersifat lintas Perangkat Daerah (PD) dan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dibentuk melalui Keputusan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 050/03/BAPP-I/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018. Pembentukan tersebut dengan mengacu pada Permendagri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun susunan organisasi TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 6.3. Susunan Organisasi TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat

Berikut ini disampaikan foto dari salinan dokumen SK Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 050/03/BAPP-I/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018.



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya di sebut TKPKD, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KETIGA** : TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas mengkoordinasikan kebijakan dalam program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. Pengoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Renstra SKPD;
 - c. Pengoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RPKD;

- d. Pengoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Renja SKPD; dan
 - e. Pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
- KEEMPAT** : TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b, menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. Pengendalian penanggulangan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati Kotawaringin Barat dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
- KELIMA** : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibentuk Sekretariat TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KEENAM** : Sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KETUJUH** : Sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KEDELAPAN** : Sekretariat TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM bertanggungjawab kepada Ketua TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat.

KESEMBILAN	: Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KENAM dibentuk Kelomok Kerja.
KESEPULUH	: Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEMBILAN terdiri atas : a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sisten Informasi; b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan; dan c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.
KESEBELAS	: Kelompok Kerja Pendataan dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEPULUH huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan.
KEDUABELAS	: Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESEBELAS, menyelenggarakan fungsi: a. Pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan; b. Pengembangan indikator kemiskinan daerah; c. Pengembangan sistem informasi kemiskinan; dan d. Penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
KETIGABELAS	: Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.
KEEMPATBELAS	: Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGABELAS, menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah; dan b. Perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah.
KELIMABELAS	: Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEPULUH huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan.
KEENAMBELAS	: Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMABELAS menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - b. Perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. Perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- KETUJUHBELAS** : TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibantu kelompok program penanggulangan kemiskinan.
- KEDELAPANBELAS** : Kelompok program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUHBELAS terdiri atas :
- a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
 - b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil; dan
 - d. Kelompok program lainnya, yang dibentuk sesuai kebutuhan daerah.
- KESEMBILANBELAS** : Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDELAPANBELAS huruf a, melaksanakan sebagian tugas TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.
- KEDUAPULUH** : Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDELAPANBELAS huruf b, melaksanakan sebagian tugas TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat.
- KEDUAPULUH SATU** : Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDELAPANBELAS huruf c, melaksanakan sebagian

- tugas TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.
- KEDUAPULUH DUA** : Kelompok Program Lainnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDELAPANBELAS huruf d, melaksanakan sebagian tugas TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di bidang lainnya.
- KEDUAPULUH TIGA** : Mekanisme pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Rapat Koordinasi TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipimpin oleh Ketua TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - c. Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, membahas :
 - 1) Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - 2) Penyusunan Program-program Penanggulangan Kemiskinan dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - 3) Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- KEDUAPULUH EMPAT** : Mekanisme pelaporan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Bupati melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten kepada Gubernur;
 - b. Laporan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- KEDUAPULUH LIMA** : Pembinaan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

- KEDUAPULUH ENAM : Bagan Struktur TKPKD Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUAPULUH TUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Barat.
- KEDUAPULUH DELAPAN : Apabila selama tahun anggaran berjalan, terjadi mutasi/pergantian Pejabat di Instansi/Dinas/Unit Kerja, maka Pejabat Pengganti yang baru berfungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUAPULUHSEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KETIGAPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 04 Januari 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



NURHIDAYAH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
4. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**NOMOR : 050 / 03 / BAPP-I/ 2018****TANGGAL : 04 JANUARI 2018****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH (TKPKD) KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2018****SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH (TKPKD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018**

No. Urut	Jabatan Pokok	Jabatan dalam Tim
1	2	3
1.	Bupati Kotawaringin Barat	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Kotawaringin Barat	Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Wakil Ketua
4.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat	Wakil Sekretaris

6.	SEKRETARIAT	
	a. Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat	Kepala
	b. Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat	Wakil Kepala
	c. Kasubbid Kesehatan dan Sosial BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
	d. Kasubag Keuangan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
	e. Kasubid Pendidikan, Pemuda Olahraga dan Kebudayaan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
	f. Pelaksana Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
	g. Pelaksana Bidang Sosial dan Pemerintahan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
	h. Pelaksana Bidang Ekonomi BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
	i. Pelaksana Sub Bagian Perencanaan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota

7.	KELOMPOK KERJA	
	A. KELOMPOK KERJA PENDATAAN DAN INFORMASI	
	a. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat	Kepala
	b. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat	Wakil Kepala
	c. Kepala Bidang Penelitian dan Dokumen Perencanaan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
	d. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota

	B. KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN KEMITRAAN	
a.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat	Kepala
b.	Kepala Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Wakil Kepala
c.	Kepala Bidang Ekonomi BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
d.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Desa Tertinggal Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota

	C. KELOMPOK KERJA PENGADUAN MASYARAKAT	
a.	Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat	Kepala
b.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat	Wakil Kepala
c.	Kepala Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
d.	Kasubid Pemerintahan dan Aparatur BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota

8.	KELOMPOK PROGRAM :	
	A. KELOMPOK PROGRAM BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA	
a.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Ketua
b.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat	Wakil Ketua
c.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
d.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
e.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, PA, Pemberdayaan Penduduk dan KB Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
f.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun	Anggota
g.	Kepala Perum BULOG Sub Divisi Regional Wilayah III Pangkalan Bun	Anggota

	B. KELOMPOK PROGRAM BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
a.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Ketua
b.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat	Wakil Ketua
c.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
d.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
e.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Anggota

	C. KELOMPOK PROGRAM BERBASIS PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MIKRO DAN KECIL	
	a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Kotawaringin Barat	Ketua
	b. Kepala Dinas Perindag, Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat	Wakil Ketua
	c. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
	d. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
	e. Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
	f. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi & Masyarakat Dinas PMD	Anggota
	g. Pimpinan PD. BPR Marunting Sejahtera Pangkalan Bun	Anggota

	D. KELOMPOK PROGRAM LAINNYA	
	a. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Ketua
	b. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat	Wakil Ketua
	c. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



NURHIDAYAH

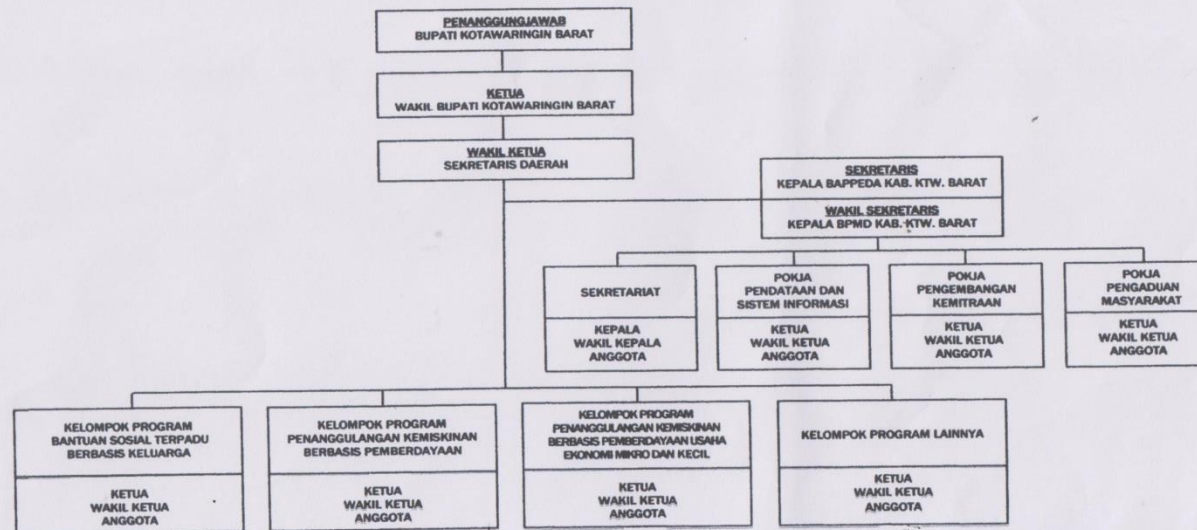
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 050 / 03 /BAPP-I/ 2018

TANGGAL : 4 JANUARI 2018

**TENTANG: PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
(TKPKD) KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT TAHUN ANGGARAN 2018**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN**



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NURHIDAYAH

BAB VII

ISU-ISU STRATEGIS DAN RENCANA AKSI



7.1. ISU-ISU STRATEGIS

7.1.1 Kemiskinan Konsumtif

Beberapa isu strategis berkaitan dengan kemiskinan konsumtif dari hasil kajian di bab sebelumnya adalah:

- 1) Jumlah individu berstatus kesejahteraan desil 1-desil 4 masih besar (33.332 jiwa), dengan sebaran paling besar di Kecamatan Kumai (11.137 jiwa);
- 2) Kecilnya pendapatan perkapita yang dipengaruhi oleh banyak hal, seperti karakteristik skill yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan;
- 3) Bahan pokok makanan utama yang menjadi penyumbang utama kemiskinan adalah beras dan rokok;
- 4) Inflasi dan pertumbuhan ekonomi memberi pengaruh pada tingkat daya beli masyarakat dan mempengaruhi angka kedalaman kemiskinan.

7.1.2 Kemiskinan Non Konsumtif:

Beberapa isu strategis berkaitan dengan kemiskinan konsumtif dari hasil kajian di bab sebelumnya adalah:

- 1) Tingkat pengangguran terbuka masih 2,7% dan 14% diantaranya disumbang oleh penduduk dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi, 30% penduduk lulusan SMP/MTs dan 23% penduduk lulusan SMA;
- 2) Jumlah rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan di atas umur 60 tahun jumlahnya cukup besar yaitu 1.308 (50,72%) kepala rumah tangga serta yang berada di bawah usia 15 tahun sebanyak 320 kepala keluarga. Sementara secara keseluruhan jumlah kepala keluarga (baik laki-laki maupun perempuan) yang berusia di atas 65 tahun jumlahnya masih besar yaitu 15,35%;
- 3) Jumlah kepala keluarga miskin memiliki karakteristik berpendidikan rendah yaitu didominasi tingkat pendidikan tertinggi lulusan SD sebanyak 66,63%, serta SMP sebesar 9,18%;

- 4) Angka partisipasi baik kasar dan murni masih untuk pendidikan dasar 9 tahun belum 100%, angka melek huruf 95,07, angka putus sekolah SD dan SMP 0,14% dan SMA 0,7%;
- 5) Angka Kematian Bayi di Kabupaten Kotawaringin Barat sejak Tahun 2012 - 2016 mengalami fluktuasi naik turun. Pada Tahun 2012 Angka Kematian Bayi 51 bayi (9,7/1000 KH), Tahun 2013 sebanyak 102 kematian bayi (18/1000 KH), Tahun 2014 80 kematian bayi (14/1000 KH), Tahun 2015 untuk Kematian Bayi adalah 50 (9,27/ 1000 KH),dan 2016 Angka Kematian bayi adalah 30 bayi atau setara dengan 7/1000 KH;
- 6) Tingkat kematian ibu melahirkan masih tinggi (200 per 100.000), angka kematian bayi (24 per KH), angka prevalensi kekurangan gizi 17%; angka kesakitan malaria 3, Penanganan penyakit kronis untuk malaria masih ditemukan 3 kasus, meningkat dari target 2016 1 kasus, TB Paru dengan DOT 85;
- 7) Pelayanan sarana dasar jumlah RTLH masih cukup besar, begitu juga dengan jumlah rumah tangga yang belum mendapatkan pelayanan air yang layak, memiliki jamban dan *septic tank*, serta pelayanan listrik;
- 8) Isu ketahanan pangan terkait dengan penganeekaragaman pangan dan pengendalian harga yang baru mencapai 60%.

7.2. TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI

Tujuan dari SPKD Kabupaten Kotawaringin Barat adalah menurunkan prosentase dan jumlah penduduk miskin Kabupaten Kotawaringin Barat melalui perluasan lapangan kerja, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, ketersediaan sarana dasar dan penguatan ketahanan pangan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka penanggulangan kemiskinan berdasarkan tujuan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya partisipasi kerja penduduk usia produktif;
- b. Meningkatkan pendapatan perkapita penduduk;
- c. Meningkatnya perluasan kesempatan kerja (baik untuk penduduk usia produktif maupun yang di atas 65 tahun dengan rerata lulusan SD, mengingat karakter kepala keluarga penduduk miskin masih disumbang oleh kelompok ini. Dan jumlahnya masih cukup besar);
- d. Meningkatnya akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan;
- e. Terwujudnya layanan pendidikan dasar minimal 9 tahun yang terjangkau;
- f. Menurunnya angka putus sekolah;
- g. Tercapainya angka kelulusan sekolah 100%;
- h. Terpenuhinya kebutuhan rumah layak dan sehat bagi masyarakat miskin;
- i. Terpenuhinya kebutuhan air minum layak;
- j. Terpenuhinya listrik bagi rumah tangga miskin;
- k. Terpenuhinya kebutuhan jamban keluarga yang layak.

Sementara kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan difokuskan pada:

Ketenagakerjaan

- 1) Penyiapan dan pemberdayaan tenaga kerja produktif yang diarahkan pada peningkatan keterampilan tenaga kerja, perluasan lapangan kerja formal dan pengembangan wirausaha produktif.
- 2) Pengembangan lapangan kerja yang mampu menyerap penduduk miskin yang kebanyakan berpendidikan rendah dan sebagian berusia lanjut;

Kesehatan

- 3) Perluasan jaminan pelayanan kesehatan terhadap seluruh penduduk yang belum tercakup ke dalam jamkesda dan pendampingan, perluasan layanan kesehatan pada ibu hamil, balita, penduduk penyakit tertentu dan penduduk dengan kecacatan.

Pendidikan

- 4) Peningkatan capaian wajib belajar 9 tahun

Pemenuhan prasarana dasar

- 5) Pemenuhan sarana dan prasarana dasar bagi penduduk miskin yang difokuskan pada fasilitasi pembangunan rumah layak huni, perluasan penyediaan air bersih, peningkatan lingkungan sehat perumahan dan fasilitasi rumah tangga berlistrik.

Ketahanan pangan

- 6) Peningkatan ketahanan pangan melalui penganekaragaman makanan pokok dan pengendalian harga bahan pangan pokok.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dan kebijakan tersebut, strategi yang diupayakan adalah melalui:

Ketenagakerjaan

- 1) Meningkatkan perluasan dan kesempatan kerja penduduk miskin melalui penyiapan dan pemberdayaan tenaga kerja produktif.

Kesehatan

- 2) Meningkatkan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui perluasan kepesertaan jaminan kesehatan dan pelayanan sosial.

Pendidikan

- 3) Peningkatan partisipasi kasar dan partisipasi murni penduduk usia sekolah;
- 4) Peningkatan angka melek huruf;
- 5) Penurunan angka putus sekolah;
- 6) Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pelayanan bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin, mengembangkan sekolah kejuruan bagi siswa miskin dan pemanfaatan pendidikan non formal.

Sarana dasar

- 7) Pemenuhan sarana dan prasarana dasar bagi penduduk miskin melalui perluasan jaringan air bersih, pengembangan perumahan terjangkau dan penciptaan lingkungan sehat.

Ketahanan Pangan:

- 8) Meningkatkan cakupan distribusi bahan pangan utama bagi masyarakat melalui pemenuhan stok pangan pusat-pusat penyedia pangan.
- 9) Meningkatkan ketersediaan pangan melalui kegiatan Penguatan cadangan pangan daerah 100 ton dan menjaga kestabilan harga pangan pokok.

Tabel VII.1.
Isu-Isu Strategis dan Rencana Aksi SPKD Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Dasar (2016)	Target						
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	
A.	Kemiskinan Konsumtif										
1.	Penurunan Angka Kemiskinan	Penurunan persentase penduduk miskin	(%)	4,96	4,52	4,30	4,00	3,75	3,50	3,25	
		Penurunan angka kedalaman kemiskinan		0,859	0,807	0,755	0,703	0,658	0,606	0,550	
		Penurunan angka keparahan kemiskinan		0,196	0,180	0,165	0,150	0,140	0,130	1,20	
B	Kemiskinan Non Konsumtif										
1.	Ketenagakerjaan										
	Menurunkan jumlah pengangguran terbuka	Penurunan Angka Pengangguran terbuka	(%)	3,16	3,04	2,83	2,82	2,71	2,61	2,5	
		Laju pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	(%)	5,81	6,20	8,95	11,15	13,95	16,75	20	
		Partisipasi angkatan kerja	(%)	74,20	76,60	78,80	80,00	82,20	84,00	85	
2.	Pendidikan										
	Peningkatan akses untuk jenjang pendidikan dasar 9 tahun	Meningkatkan APM SD/MI	(%)	98,80	99,98	98,87	98,92	98,97	99,02	99,07	
		Meningkatkan APM SMT/Mts Pada	(%)	86,65	87,69	87,04	87,38	87,72	88,06	88,40	
		Meningkatkan APM SMA/MA	(%)	75,10	100						
		Meningkatkan APK SD/MI	(%)	118,20	118,25	118,30	118,35	118,40	118,45	118,50	
		Meningkatkan APK SMT/Mts Pada	(%)	98,90	98,95	99,29	99,63	99,97	100,31	100,65	
		Meningkatkan APK SMA/MA	(%)	87,60							
		Peningkatan angka melek huruf	(%)	97,05	97,05	97,34	97,63	97,93	98,22	97,05	
		Penurunan angka putus sekolah SD/MI	(%)	0,14	0,13	0,12	0,11	0,1	0,09	0,08	
		Penurunan angka putus sekolah SMP/MTs	(%)	0,70	0,53	0,52	0,51	0,5	0,49	0,48	
		Penurunan angka putus sekolah SMA/MA	(%)	0,70	0,53	0,52	0,51	0,5	0,49	0,48	
			Penurunan penduduk usia sekolah (13-15 th) tidak sekolah	(%)	5,7	5,1	4,5	3,9	3,4	2,8	2,5
			Penurunan penduduk usia sekolah (16-18)	(%)	25,87	25,60	25,08	24,57	24,07	23,08	22,60
3.	Kesehatan:										
	Meningkatkan akses penduduk mikin	Penurunan Angka Kematian Bayi	(per 10000 KH)	24	24	24	24	22	20	18	
		Penurunan angka kematian balita	(per 1000 KH)	32	32	32	30	28	26	32	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Dasar (2016)	Target					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
	terhadap pelayanan kesehatan	Penurunan Angka Balita kurang Gizi	kasus	17	17	17	16	16	15	15
		Menurunkan Angka Kematian Ibu	(per 100.000 KH)	200	200	200	160	140	120	100
		Kelahiran yang ditangani tenaga medis	(per 100 KH)	90	92	94	96	98	99	100
		Kunjungan ibu hamil 1x (K1)	(%)	100	100	100	100	100	100	100
		Kunjungan ibu hamil 4x (K4)	(%)	90	90	92	93	94	95	96%
		Penurunan angka kurang energi kronis	(%)	10	8	7	6	5	4	3
		Menemukan kasus malaria	(per 1000 dpp)	3	1	<1	<1	<1	<1	<1
		Penyembuhan kasus Tuberculosis dalam Prog. DOT	(%)	85	85	100	100	100	100	100
4.	Infrastruktur dasar	Penurunan jumlah RTH	(%)	92	93	94	95	96	97	99
			Unit	323	300	304	307	310	313	320
	Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar permukiman	Penurunan jumlah RT yang tidak terlayani air bersih	(5)	77,90	77	79	82	99	100	100
			Satuan Sambungan atau rumah tangga	239	184	189	196	237	239	239
		Penurunan jumlah RT Yang tidak terlayani listrik	Satuan Sambungan atau Unit rumah	515	184	189	196	237	239	239
		Penurunan jumlah RT yang tidak memiliki jamban	Rumah tangga	626	482	495	513	620	626	626
5	Ketahanan Pangan									
		Penguatan cadangan pangan daerah 100 ton	%	60	70,77	71	73	75	77	80
		Pengendalian harga/stabilitas harga	%	60	65	70	75	77,5	80	82,8

Sumber: Hasil Kajian Tim Penyusun 2018

BAB 8

MONITORING DAN EVALUASI



8.1 MAKSUD DAN TUJUAN

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dimaksudkan untuk mengukur perkembangan pelaksanaan kebijakan dan program dalam capaian kinerja masing-masing indikator program. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui kesesuaian program/kegiatan yang dilakukan, apakah sudah sesuai atau menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan; untuk selanjutnya dapat dilakukan langkah-langkah guna meningkatkan tingkat efektifitas dan efisiensi program/kegiatan. Selain itu monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui mengidentifikasi masalah dan potensi masalah dalam pelaksanaan, memberikan penilaian keberhasilan darisisi keluaran, kegunaan dan dampaknya.

Kegiatan monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan. Monev penanggulangan kemiskinan pada lembaga pemerintah dilakukan secara internal oleh daerah dan dinas terkait. Kegiatan monitoring dan evaluasi juga dilakukan secara independen oleh lembaga-lembaga non-pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi profesi dan media massa. Sistem monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran, oleh sebab itu hasil monitoring dan evaluasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan menjadi masukan penting bagi penyusunan rencana dan anggaran.

Integrasi ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan kesinambungan kebijakan/program penanggulangan kemiskinan. Siklus monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan harus diselaraskan dengan siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan, sehingga sistem monev penanggulangan kemiskinan menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem monev RPJM, RKPD dan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Hasil sistem monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan harus tersedia sebelum proses perencanaan dan penganggaran dimulai, agar hasil-hasil monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan menjadi umpan balik dan pertimbangan penting dalam proses perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin secara berkelanjutan.

Komplementaritas monitoring dan evaluasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Monitoring	Evaluasi
Memantapkan apa tujuan program	Menganalisis mengapa tujuan program (tidak) tercapai
Menghubungkan kegiatan dan sumberdaya dengan tujuan program	Menelusuri secara spesifik pengaruh kegiatan terhadap hasil yang dicapai
Menerjemahkan tujuan program kedalam indikator kinerja dan menetapkan target	Menguji proses pelaksanaan program
Mengumpulkan data secara rutin dari indikator kinerja dan antara capaian/realisasi dengan target membandingkan	Mengkaji hasil yang tidak diharapkan (ketidaktercapaian target)
Melaporkan perkembangan program kepada pengambil keputusan, termasuk permasalahan yang ditemukan.	Menyediakan pembelajaran, sumber potensi keberhasilan program dan rekomendasi perbaikan.

Sumber: Petunjuk Teknis Penyusunan SPKD, TNP2K

8.2 PELAKSANA

Sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya dalam Keputusan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 050/03/BAPP-I/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat, termasuk menyiapkan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPK Provinsi Kalimantan Tengah.

Penanggungjawab pelaporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan yaitu TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dan dalam melaksanakan tugasnya telah dibentuk Sekretariat, Kelompok Kerja dan Kelompok Program. Sekretariat TKPK mempunyai tugas (1) memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat; (2) berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; dan (3) bertanggungjawab kepada Ketua TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dibantu oleh Kelompok Kerja, yang terdiri atas:

1. Kelompok Kerja Pendataan dan Informasi, yang mempunyai tugas dalam pengumpulan dan pengolahan data dan program penanggulangan kemiskinan. Kelompok kerja ini menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;

- b. Pengembangan indikator kemiskinan daerah;
 - c. Pengembangan sistem peringatan dini; dan
 - d. Penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
2. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan, yang mempunyai tugas dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan. Kelompok kerja ini menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah; dan
 - b. Perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah
 3. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat, mempunyai tugas dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan. Kelompok kerja ini menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - b. Perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. Perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pedampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dibantu oleh kelompok program penanggulangan kemiskinan, yang terdiri dari:

1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, melaksanakan sebagian tugas TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.
2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, melaksanakan sebagian tugas TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat.
3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil, melaksanakan sebagian tugas TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.
4. Kelompok program lainnya, melaksanakan sebagian tugas TKPKD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang lainnya.

Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan dilakukan untuk memberi gambaran kondisi kemiskinan secara nyata dan kinerja kebijakan secara objektif. Laporan yang dihasilkan oleh berbagai pihak perlu diolah dan dikonsolidasikan agar komprehensif dan lengkap.

Konsolidasi laporan hasil monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan juga dilakukan terhadap hasil laporan lembaga swadaya masyarakat, media massa, perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

8.3 TOLOK UKUR DAN RUANG LINGKUP

Tolok ukur pelaksanaan monitoring adalah rangkaian indikator kinerja program, meliputi target *output* dan *outcome* suatu program. Sedangkan tolok ukur evaluasi adalah indikator kinerja capaian program penanggulangan kemiskinan setiap tahun atau akhir dari suatu periode program. Selain itu, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi:

1. Obyek monitoring dan evaluasi adalah semua kebijakan dan program yang terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat, sejak proses perencanaan sampai dengan akhir pelaksanaan;
2. Sarana monitoring dan evaluasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan adalah seluruh sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pemangku kepentingan;
3. Metode monitoring dan evaluasi, ditentukan dan dilakukan oleh masing-masing pihak, sesuai dengan kapasitas dan mekanisme kerja dengan semangat memperbaiki kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Secara umum, kegiatan monitoring dan evaluasi ini akan menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan dan program yang direncanakan dalam SKPD dapat dilaksanakan/direalisasi dalam proses perencanaan dan penganggaran?
2. Apakah kebijakan dan program yang dilaksanakan sudah mencapai tujuan yang direncanakan?
3. Apakah indikator kinerja program penanggulangan kemiskinan yang meliputi keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berhasil dilaksanakan? Jika berhasil faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat keberhasilannya? dan apabila tidak berhasil, hal-hal apa saja yang menyebabkan ketidakberhasilan tersebut? mengapa?
4. Apakah kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan daerah perlu dilanjutkan tanpa perbaikan, dilanjutkan dengan perbaikan atau merumuskan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang berbeda?
5. Apakah hasil monitoring dan evaluasi dapat dijadikan bahan umpan balik bagi peningkatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode sekarang maupun yang akan datang?

Indikator kinerja upaya penanggulangan kemiskinan merupakan indikator proses dari 5 bidang pembangunan yaitu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur dasar serta ketahanan pangan.

1) Bidang Ketenagakerjaan

Indikator utama dan penanggungjawab dari kelompok bidangketenagakerjaan, yaitu:

NO.	INDIKATOR	TANGGUNGJAWAB
1	Angkatan Kerja (jiwa)	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
2	Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
3	Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
4	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
5	Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri, Pekerja Bebas dan Pekerja Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
6	Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

2) Bidang Kesehatan

Indikator utama dan penanggungjawab dari kelompok bidang, yaitu:

NO.	INDIKATOR	TANGGUNGJAWAB
1	Angka Kematian Bayi/AKB	Dinas Kesehatan
2	Angka Kematian Balita/AKBA	Dinas Kesehatan
3	Angka Kematian Ibu Melahirkan/AKI	Dinas Kesehatan
4	Prevalensi Balita Gizi Buruk	Dinas Kesehatan
5	Prevalensi Balita Gizi Kurang	Dinas Kesehatan
6	Proporsi Anak Berusia 1 Tahun Diimunisasi Campak Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Dinas Kesehatan
8	Cakupan Pelayanan Antenatal/K4	Dinas Kesehatan
9	Angka Kejadian Malaria per 1.000 penduduk	Dinas Kesehatan
10	Tingkat Prevalensi Tuberculosis (per100.000 penduduk)	Dinas Kesehatan
11	Proporsi Kasus Tuberculosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (success rate)	Dinas Kesehatan
12	Angka Kematian DBD Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
13	Angka Morbiditas Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
14	Angka pemakaian kontrasepsi/Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun (semua cara dan cara modern)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
15	15 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
16	16 Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat

3) Bidang Pendidikan

Indikator utama dan penanggungjawab dari kelompok bidang pendidikan, yaitu:

NO.	INDIKATOR	TANGGUNGJAWAB
1	Angka Partisipasi Murni (APM)	
	1) APM SD/MI Sederajat	Dinas Pendidikan
	2) APM SMP/MTs Sederajat	Dinas Pendidikan
	3) APM SMA/MA Sederajat	Dinas Pendidikan
2	Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	1) APK SD/MI Sederajat	Dinas Pendidikan
	2) APK SMP/MTs Sederajat	Dinas Pendidikan
	3) APK SMA/MA Sederajat	Dinas Pendidikan
3	Angka Putus Sekolah (APtS)	
	1) APtS SD/MI Sederajat	Dinas Pendidikan
	2) APtS SMP/MTs Sederajat Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	3) APtS SMA/MA Sederajat	Dinas Pendidikan
4	Angka Kelulusan (AK)	
	1) AK SD/MI Sederajat	Dinas Pendidikan
	2) AK SMP/MTs Sederajat	Dinas Pendidikan
	3) AK SMA/MA Sederajat	Dinas Pendidikan
5	Angka Melek Huruf	Dinas Pendidikan
6	Rata-Rata Lama Sekolah	Dinas Pendidikan
7	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan Terhadap Laki-Laki	
	1) SD/MI Sederajat Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	2) SMP/MTs Sederajat Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	3) SMA/MA Sederajat Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

4) Bidang Infrastruktur Dasar

Indikator utama dan penanggungjawab dari kelompok bidang infrastruktur, yaitu:

NO.	INDIKATOR	TANGGUNGJAWAB
1	Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Persentase rumah tangga pengguna air bersih Dinas Pekerjaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik Perusahaan Listrik Negara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5) Bidang Ketahanan Pangan

Indikator utama dan penanggungjawab dari kelompok bidang ketahanan pangan, yaitu:

NO.	INDIKATOR	TANGGUNGJAWAB
1	Produksi Beras	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan
2	Kebutuhan dan ketersediaan Bahan Pangan Pokok Strategis	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan
3	Harga Bahan Kebutuhan Pokok Utama	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan

8.4 MANFAAT

Hasil temuan dan kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan:

- 1) Memberikan umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- 2) Melakukan sinkronisasi berbagai kebijakan dan program.
- 3) Meningkatkan keterbukaan.
- 4) Pertanggungjawaban publik terhadap pelaksanaan kebijakan dan program serta meningkatkan studi kebijakan bagi para akademisi dan peneliti.

Tindak lanjut dan hasil monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan dirumuskan dalam pembahasan antar Perangkat Daerah/ instansi dan pertemuan/ dengar pendapat dengan DPRD untuk menanggapi laporan monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam bentuk reorientasi perencanaan dan penganggaran pembangunan. Selanjutnya akan dikeluarkan kebijakan dalam bentuk keputusan untuk meneruskan, menghentikan sementara ataupun membatalkan suatu kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Keputusan yang disusun dengan memperhatikan dampak bagi masyarakat miskin, administrasi penganggaran dan pertimbangan lain yang mendesak.